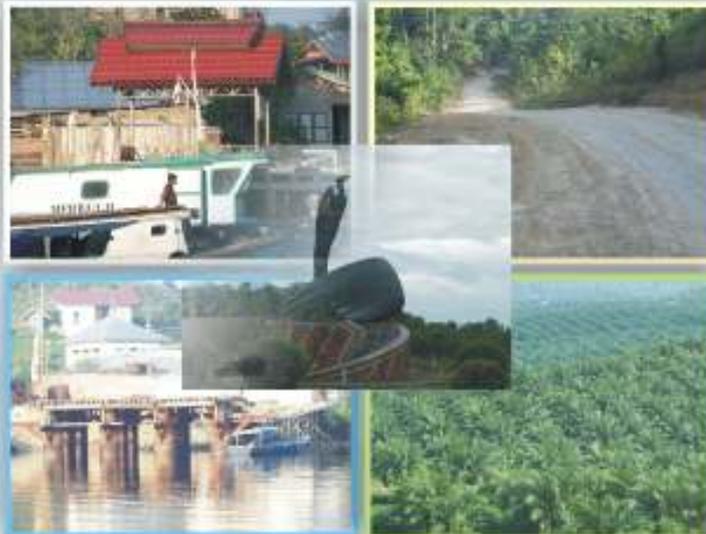




Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

**BUKU I : ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



Kerjasama :
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur**

**Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur**



**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

2009

SAMBUTAN BUPATI KUTAI TIMUR

Terbitnya Buku “**Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2009**” ini saya sambut gembira karena buku ini memuat series data yang panjang yaitu sejak berdirinya Kabupaten Kutai Timur.

Buku Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2009 pada dasarnya adalah gambaran atau potret kinerja pembangunan dalam bentuk data kuantitatif yang dapat menunjang kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka melihat kekuatan dan kelemahan daerah dari sisi suplai, demand, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan keamanan.

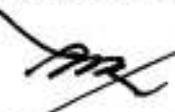
Oleh Karena itu saya minta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, agar muatan data series 2000-2008 yang telah disajikan tersebut harus terus diperbaharui agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam menyusun dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang akan datang.

Selanjutnya kepada Dinas/Instansi/Lembaga baik pemerintah maupun Swasta sebagai nara sumber data diharapkan dapat selalu memberikan informasi data yang terbaru, akurat, dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan untuk publikasi yang akan datang.

Semoga Buku Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2009 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak guna menunjang pembangunan Kabupaten Kutai Timur lebih cepat.

Sangatta, Desember 2009

BUPATI KUTAI TIMUR


H. ISRAN NOOR

KATA PENGANTAR

Buku Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2009 (SIMREDA) merupakan publikasi yang pertama kali diterbitkan, disusun berdasarkan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur.

Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2009 ini yaitu jenis data untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah seperti; SDM, SDA, prasarana dan sarana, potensi pertanian, aglomerasi kota-kota, sistem kota-kota, perkembangan dan penyebaran investasi, ekspor, impor, perdagangan antar daerah, kemampuan aparatur, kemampuan keuangan, kemampuan kelembagaan, dan keamanan. Data dimasukkan kedalam formulir-formulir yang tersedia, selanjutnya akan dimasukkan kedalam pangkalan data Simreda agar dapat diakses oleh para pelaku perencanaan pembangunan di daerah. Selain itu dilengkapi dengan perangkat analisis untuk perencanaan pembangunan daerah seperti; Analisis LQ, Shifshare, ICOR, Indeks Williamson, Analisis Ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Analisis Indikator Pembangunan Daerah (IPD), dan Analisis Sektor Pertanian.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Instansi Pemerintah maupun Swasta atas kerjasamanya dalam memberikan data dan informasi untuk menyusun buku ini.

Disadari bahwa penyusunan buku ini terdapat banyak kekurangan dan untuk penyempurnaan publikasi berikutnya, kritik dan saran sangat diharapkan.

Sangatta, Desember 2009
Kepala Bappeda Kutai Timur


H. RUPANSYAH, SE., MM.
NIP. 19590825 199003 1 005

KATA PENGANTAR

Publikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2009 (SIMREDA) ini merupakan serial publikasi yang mengacu pada Sistem Informasi Manajemen perencanaan pembangunan Nasional (SIMRENAS). Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan data akurat dan lengkap sejak berdirinya Kabupaten Kutai Timur sampai dengan saat ini yaitu 2000-2008 yang merupakan sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah.

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Dalam penyusunan Publikasi Simreda ini, data yang dihimpun selain bersumber dari data primer juga bersumber dari data sekunder, baik dari instansi pemerintah BUMD, maupun swasta. Meskipun telah diupayakan kelengkapan dan penyempurnaan data yang disajikan, namun masih terasa belum dapat memenuhi kebutuhan pemakai data. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat serta kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang

Kepada semua Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kabupaten Kutai Timur khususnya yang telah membantu penyediaan data hingga tersusunnya publikasi ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Sangatta, Desember 2009
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur



Drs. Johnny Anwar
NIP. 19540610 197703 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan kelengkapan database yang lebih lengkap lagi, agar setiap tahapan pembangunan didasarkan pada data yang semakin aktual. Dalam SIMREDA ini jenis-jenis data yang tercakup tidak hanya diambil dari salah satu aspek saja melainkan dari beberapa aspek, guna kelengkapan dan keluasan penggunaan dari data yang dihimpun.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan potensi sumber daya alam, dimana sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam yang merupakan salah satu penyangga perekonomian di Kabupaten Kutai Timur adalah sektor pertambangan khususnya pertambangan batubara.

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,60 km² terdiri dari 18 kecamatan dan 135 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 213.762 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 5,96 jiwa/km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,44 persen dan jumlah rumah tangga sebanyak 53.481 R.Tangga/KK. Persebaran penduduk tidak merata, dimana kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah kecamatan Sangatta Utara yang merupakan kecamatan ibu kota dengan persentase penduduk mencapai 26,12 persen dari total penduduk Kutai Timur atau sebanyak 26,12 persen serta kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduk yaitu Kecamatan Batu Ampar dengan penduduk 2.940 jiwa atau 1,38 persen.

Kabupaten Kutai Timur dapat melaksanakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dengan kewenangan berdasarkan PP No. 25 tahun 2000. Di Kabupaten Kutai Timur terdapat 17 dinas dan 10 badan/kantor dengan pegawai daerah yang berjumlah 4.797 orang dan lebih dari 40 persen berpendidikan Sarjana.

Dilihat dari Perekonomian Daerah, ekonomi ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi sektoral terbesar yaitu sebesar 86,17 persen. Selanjutnya sektor pertanian 4,39 persen, perdagangan 3,53 persen, konstruksi 1,98 persen dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 1,90 persen. Selebihnya, hanya memberi kontribusi di bawah 1 persen.

Berdasarkan hasil analisis LQ Kabupaten Kutai Timur dibandingkan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sektor pertambangan dan penggalian memiliki kemampuan yang relatif jauh lebih tinggi dibanding sektor yang sama di tingkat Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2000. Hal tersebut bisa dilihat melalui nilai LQ yang sebesar 2,57. Salah satu penyebabnya karena Kutai Timur merupakan wilayah pertambangan. Misalnya di wilayah Sangkima terdapat kandungan minyak dan gas bumi. Di Sengatta Utara terdapat pertambangan Batu Bara. Di wilayah Muara Ancalong, Muara Wahau dan Telen terdapat pertambangan dan penggalian emas. Dan masih banyak lagi wilayah lain yang mempunyai kandungan batu bara dan minyak dan gas bumi melimpah. Nilai LQ sebesar 2,57 artinya bahwa proporsi penciptaan nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur 2,57 kali lebih besar daripada proporsi penciptaan nilai tambah sektor yang sama di Propinsi Kalimantan Timur. Nilai tambah ini cenderung menurun hingga tahun 2008 nilai LQ menjadi sebesar 1,88.

Hasil analisis Shift-share menunjukkan bahwa selama tahun 2000-2008, nilai PDRB sektoral Kabupaten Kutai Timur telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar Rp.19 triliun atau sebesar 350 persen. Sedangkan perekonomian Kaltim tumbuh sebesar 240 triliun rupiah atau sebesar 320 persen. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan wilayah (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebesar 21 triliun rupiah atau 24,26 persen. Nilai positif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Kutai Timur cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif cepat.

Nilai Koefisien ICOR tahun 2008 sebesar 1,00 yang berarti bahwa untuk menghasilkan tambahan (increment) Rp 1 juta output diperlukan tambahan modal Rp 1 juta. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam hal ini proses produksi barang dan jasa sudah efisien. Kondisi ini disebabkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sangat dominan di daerah ini sehingga untuk investasi sektor pertambangan dan Penggalian menjadi sangat efisien bagi para pelaku usaha.

Selama periode 2002-2008 pencapaian angka IPM Kabupaten Kutai Timur relatif terus membaik. Pada tahun 2002 angka IPM mencapai 66,1 dan kemudian menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di tahun 2004 menjadi 69,1 atau naik sekitar 3 poin. Pada tahun 2005, capaian IPM Kabupaten Kutai Timur sekitar 69,2 atau naik 0,1 poin dibandingkan dengan tahun 2004, dan di tahun 2008 terlihat laju perkembangan IPM-nya relatif mengalami peningkatan hingga mencapai angka 70,84. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh diberlakukannya Otonomi Daerah (OTDA). Dalam Era Otonomi Daerah alokasi dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah sesuai UU No.25 Tahun 1999 sangat besar hampir empat kali lipat dan besaran fiskal yang diterima dari perimbangan tersebut sangat menunjang pembangunan di segala bidang. Namun apabila dilihat dari rangking atau posisi IPM dibanding dengan 440 Kabupaten/Kota se Indonesia, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 berada pada posisi 217, dimana tahun-tahun sebelumnya dari 2002 sampai 2007 posisi rangking berkisar pada urutan 171 hingga 204 atau semakin menaik, hal ini berarti laju peningkatan angka IPM Kabupaten/kota di luar Kabupaten Kutai Timur relatif lebih cepat. Sementara itu Kecamatan yang mempunyai angka IPM

tinggi atau di atas angka IPM Kabupaten yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Muara Wahau serta yang paling rendah adalah Kecamatan Sandaran dengan angka IPM sebesar 67,69.

Sementara itu dalam rangka mencari sumber-sumber pendapatan, dari hasil model regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut; bahwa indeks implisit/IHK berkorelasi tinggi terhadap pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika indeks implisit bertambah satu persen maka Keuntungan BUMD akan bertambah 0,7 milyar rupiah atau 700 juta rupiah dengan asumsi nilai PDRB tetap. PDRB berkorelasi tinggi terhadap pajak daerah dengan hasil jika PDRB bertambah satu juta rupiah maka pajak daerah meningkat sebesar 330,34 rupiah. PDRB berkorelasi tinggi terhadap retribusi daerah dengan hasil jika nilai PDRB bertambah satu juta rupiah maka nilai retribusi daerah akan meningkat sebesar 436 rupiah. Hasil Regresi menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang positif terhadap bagi hasil pajak sedangkan indeks implisit memiliki pengaruh yang negatif. Hal ini berarti bahwa jika indeks implisit meningkat satu persen sedangkan pendapatan perkapita tetap maka bagi hasil pajak akan menurun sebesar 1,63 milyar rupiah. Jumlah penduduk berkorelasi tinggi terhadap pendapatan bagi hasil bukan pajak SDA, dengan tingkat signifikansi 95 persen dapat dinyatakan bahwa jika jumlah penduduk bertambah satu jiwa saja maka bagi hasil bukan pajak akan meningkat sebesar 11,56 juta rupiah.

Indikator Pembangunan Daerah (IPD) Kabupaten Kutai Timur dapat diperlihatkan dari beberapa parameter sebagai berikut:

Indikator kapabilitas aparatur pemerintah daerah tercermin dari Dilihat dari kualitas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Timur setidaknya dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, dimana dari jumlah pegawai sebanyak 4.797 orang yang memiliki tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (S1, S2, dan S3) sebanyak 1.963 orang atau sebesar 40,92 persen dan merupakan kondisi cukup ideal yang dapat menunjang kinerja dalam melaksanakan

tugas sehari-harinya sesuai tugas dan fungsi. Selain itu pegawai yang telah mengikuti kursus penjenjangan sebanyak 362 orang atau sebesar 7,55 persen dari total jumlah pegawai atau sebesar 71,83 persen dari jumlah pejabat struktural yang ada yaitu sebanyak 504 orang. Rasio pelayanan pegawai terhadap penduduk semakin menurun, pada tahun 2001 setiap pegawai harus melayani penduduk laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan 30 orang dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 20 orang penduduk perempuan dan penduduk laki-laki sebanyak 24 orang. Hal ini menurun seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah pegawai negeri sipil setiap tahunnya yaitu dari semula sebanyak jumlah pegawai 188 orang tahun 2000 dan tahun 2001 menjadi 1.700 orang hingga 2008 menjadi 4.797 orang.

Indikator Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2001 awal diberlakukannya UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan peningkatan yang sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya ketika belum diberlakukannya otonomi (tahun 2000) yakni sebesar 86 milyar rupiah dan kemudian menjadi sebesar 543 milyar rupiah. Peningkatan pendapatan daerah ini merupakan pengaruh langsung dari bertambahnya beberapa komponen sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Peningkatan pendapatan daerah ini terus berlanjut hingga tahun 2008 menjadi 1.826 milyar rupiah atau secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 22,31 persen tiap tahun. Dari komponen utama sumber pendapatan daerah tersebut peranan dana perimbangan sangat dominan, yakni dengan kontribusi rata-rata sebesar 97,74 persen terhadap total pendapatan daerah. Sementara itu dalam kurun waktu yang sama, peranan pendapatan asli daerah hanya sebesar 2,26 persen. Sangat dominannya peranan dana perimbangan dalam struktur APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, merupakan cerminan begitu besarnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap bantuan pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan di daerah.

Indikator Sarana dan Prasarana Pemerintahan diperlihatkan dengan Realisasi belanja daerah pada tahun 2002 yang mengalami peningkatan dari tahun 2001, yaitu dari Rp. 276.700 juta pada tahun 2001 menjadi Rp. 828.499 juta tahun 2004 dan menjadi Rp. 1.628.351 ribu rupiah pada tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja aparatur daerah terutama bagian belanja pelayanan public yang perannya semakin meningkat dari sebesar 74,94 persen tahun 2004 menjadi 76,23 persen pada tahun 2008. Sementara itu peranan belanja aparatur daerah cenderung menurun dari 25,06 persen tahun 2004 menjadi 34,55 persen tahun 2006, dan tahun 2007 menjadi hanya 23,77 persen.

Sementara itu masyarakat yang mengakses teknologi komunikasi cukup tinggi. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari persentase rumah tangga menurut akses terhadap teknologi komunikasi dan infomasi Tahun 2006 dari hasil SUSENAS 2006 yang ditunjukkan oleh angka pengguna telepon sebesar 3,23 persen atau sebanyak 1.727 Rumah Tangga, pengguna handphon (HP) sebesar 41,98 persen atau sebanyak 22.451 Rumah Tangga, pengguna komputer sebesar 1,37 persen atau sebanyak 732 Rumah Tangga, pengguna internet di rumah tangga sebesar 0,20 persen atau sebanyak 106 Rumah Tangga. Kecamatan yang sudah tersambung telepon kabel yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Teluk Pandan. Sementara itu semua kecamatan di wilayah Kutai Timur sudah ada sinyal HP.

Indikator untuk melihat fasilitas publik dapat digambarkan salah satunya melalui pelayanan publik bidang kesehatan. Di sini terlihat jumlah rumah sakit pada tahun 2000 hanya ada 1 buah lalu meningkat menjadi 4 buah di tahun 2008. Jumlah puskesmas dari hanya 9 puskesmas di tahun 2000 bertambah menjadi 19 buah ditahun 2008, yang dapat diartikan bahwa seluruh kecamatan (jumlah kecamatan ada 18) saat ini telah memiliki puskesmas, dan puskesmas pembantu (pustu) tahun 2008 tercatat ada 92 unit. Secara keseluruhan sarana pelayanan kesehatan masyarakat berupa keberadaan puskesmas dan puskesmas

pembantu baru mencapai 82,11% dari jumlah desa yang ada di Kutai Timur. Pemenuhan kebutuhan obat-obatan dari toko obat yang dikelola oleh tenaga apoteker juga terus mengalami peningkatan dari tidak ada di tahun 2000 menjadi 14 buah di tahun 2008. Dilihat dari Tenaga medis pada tahun 2000 jumlah dokter umum yang hanya 16 orang telah meningkat menjadi 67 orang di tahun 2008, atau meningkat 76,12%. Kenaikan ini juga berlaku untuk tenaga mantri kesehatan dan tenaga medis lainnya, dari 201 orang di tahun 2000 menjadi 385 orang di tahun 2008 atau meningkat 47,92%.

Selama kurun waktu sembilan tahun 2000-2008 telah terjadi peningkatan jumlah sekolah, murid dan guru menurut jenjang pendidikan. Jumlah sekolah tingkat Taman Kanan-kanak (TK) terjadi pertumbuhan sebanyak 84 unit, dan untuk jumlah murid bertambah sebanyak 4,499 orang, serta untuk jumlah guru bertambah sebanyak 474 orang.

Sementara itu untuk jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA dalam kurun waktu yang sama telah terjadi peningkatan jumlah sekolah, murid dan guru. Jumlah Sekolah naik sebesar berturut-turut; 30,59 persen, 208,69 persen, dan 337,5 persen. Jumlah Guru meningkat 189,57 persen, 153,97 persen, dan 396,36 persen.

Selama kurun waktu delapan tahun (2001-2008) terjadi penurunan jumlah penduduk buta aksara sebesar -8,86 persen. Sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan 13,65 persen. Penduduk buta huruf di Kutai Timur masih terdapat sekitar 7.098 orang atau 4,79 persen dan bila dibandingkan dengan tahun 2000, yang berjumlah 7.788 orang atau sebesar 7,50 persen terlihat ada penurunan. Pada tahun 2008 rata-rata lama sekolah penduduk Kutai Timur sekitar 7,61 tahun, atau dapat dikatakan rata-rata penduduk Kutai Timur menduduki jenjang pendidikan kelas 1 sampai kelas 2 SLTP.

Angka partisipasi kasar untuk Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2007 sebesar 98,57 persen dan pada tingkat SLTP APK tercatat 30,28 persen, sedangkan SLTA sebesar 23,17 persen.

Penduduk menurut jenjang pendidikan SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi meningkat berturut-turut dari 15,11

persen menjadi 19,93 persen, dan 17,79 persen menjadi 19,53 persen, serta dari 2,29 persen menjadi 2,53 persen. Sementara itu penduduk se-tingkatan SD/Tidak/belum tamat SD turun dari 32,39 persen menjadi 24,56 persen. Dengan demikian penduduk Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2008 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah sebesar 58,01 persen.

Pelayanan publik lainnya adalah air dan listrik. Pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) dari tahun 2000 hingga 2008 tampak mengalami fluktuasi. Tahun 2000 yang merupakan masa transisi dimulainya otonomi daerah Kutai Timur baru rumahtangga yang mendapat saluran air bersih 5,95%, dan terus meningkat hingga tahun 2006 mencapai 12,36%. Namun pada tahun 2007-2008 mengalami penurunan sekitar 12,07% dan 11,81% pelanggan yang mendapat layanan air bersih. Pemenuhan kebutuhan akan listrik untuk Kutai Timur juga mengalami fluktuasi, tahun 2000 ada sekitar 27,73% rumahtangga yang mendapat aliran listrik PLN, dan turun di tahun 2002 menjadi 26,71%. Persentase pemenuhan listrik terus meningkat hingga tahun 2005 mencapai 32,43%, namun turun kembali hingga sekitar 29,94% rumahtangga pelanggan listrik.

Untuk menilai kondisi ekonomi wilayah, dapat diketahui dari melihat perekonomian Kabupaten Kutai Timur yang menunjukkan kecenderungan cukup baik, karena selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur selalu tumbuh positif. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor pertambangan dengan komoditi batubaranya yang dominan. Sektor-sektor lain pada umumnya juga mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kutai Timur dalam hal faktor produksi, harga, tenaga kerja serta anggaran pemerintah daerah. Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 adalah sebesar 24,3 triliun rupiah atau lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 18,1 triliun rupiah. Dari 9 lapangan usaha sektor ekonomi yang ada, pada tahun 2008, tercatat semua sektor menghasilkan pertumbuhan yang positif,

kecuali sub sektor pertambangan batubara (-1,64 %), sedangkan sektor yang tertinggi pertumbuhannya adalah sektor Konstruksi. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mencapai level tertinggi kedua sejak tahun 2000 yaitu mencapai lebih dari 86 %, sementara itu sumbangan sektor-sektor lainnya masih di bawah 4 % yaitu sektor perdagangan dengan *share* sebesar 3,5 %, bangunan 1,98 %, angkutan 1,90 %, keuangan 0,98 % serta jasa-jasa 0,65 %. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih dengan *share* masing-masing hanya sebesar 0,29 % dan 0,11 %. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 adalah sebesar 126,8 juta rupiah atau meningkat sebesar 28,72 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan regional per kapita Kabupaten Kutai Timur juga meningkat dari 73,16 juta rupiah pada tahun 2007 menjadi sebesar 98,43 juta rupiah pada tahun 2008

Indikator Akses keuangan di daerah ini, pada tahun 2008, bisa dilihat dari jumlah kantor bank umum yang mengalami peningkatan dari 2 menjadi 3 buah; dengan total aset mencapai Rp 694,8 miliar atau meningkat sebesar 93,36 %. Peningkatan jumlah aset ini ditunjang oleh peningkatan pada jumlah dana masyarakat yang dihimpun. Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan terbesar terjadi pada Giro, yaitu sebesar 1.621 % atau mencapai Rp 1,06 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditempatkan pada perbankan. Dari sisi penyaluran kredit pada 2008, porsi terbesar adalah kredit modal kerja yang mencapai 313,5 miliar. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan berdasarkan lokasi kantor bank pada periode berjalan telah mencapai 42,16%. Sedangkan LDR berdasarkan lokasi proyek mencapai 33,39 % atau sebesar Rp 2,08 triliun. Berdasarkan kredit UKM, jumlah yang telah disalurkan mencapai Rp 286,8 miliar atau 41,3 % dari keseluruhan kredit perbankan. Kredit UKM ini mengalami peningkatan sebesar 46,99 % dari tahun 2007.

Indikator kondisi fisik, lingkungan hidup, dan SDA dapat dilihat dari sumberdaya alam yang dimiliki terdiri

dari bahan tambang non-logam: batu bara, batu gamping, batu pasir dan lempung (bahan untuk pembuatan keramik dan campuran semen), maupun bahan tambang logam: pasir kuarsa, emas dan perak. Selain itu, terdapat juga gas dan minyak bumi. Potensi dan lokasi masing-masing sumber daya tambang tersebut tersebar di 32 desa dari 135 desa yang ada di Kutai Timur atau sebesar 23,70 persen atau tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kutai Timur yaitu berada di 13 Kecamatan dari 18 kecamatan yang ada atau sebesar 72,22 persen. Produksi batu bara yang menjadi andalan Kabupaten Kutai Timur yang telah dieksploitasi selama kurang lebih sembilan tahun (2000-2008) telah mencapai 214.277.907 M.Ton atau rata-rata produksi pertahun mencapai 23.808.656,33 M.Ton dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai 20,63 persen.

Selama kurun waktu yang sama 2000-2008 jumlah produksi minyak bumi yang dieksploitasi mencapai 11.222.730 Barrel dengan rata-rata produksi mencapai 1.246.970 Barrel per tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun menurun hingga -6,80 persen, dan produksi gas bumi yang dieksploitasi mencapai 46.734.750 Mscf dengan rata-rata produksi mencapai 5.192.750 Mscf per tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun menurun sebesar -6,80 persen

Luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah 2.297.664 ha atau 64,27 persen dari luas total wilayah kabupaten tersebut yang seluas 3.574.760 Ha. Menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu delapan tahun (2001-2008) telah terjadi penurunan yang signifikan, dimana hutan lindung turun luasnya hingga 30,24 persen, Hutan Suaka Alam dan Wisata 16,76 persen, Hutan Produksi Terbatas turun hingga -23,07 persen, Hutan produksi yang dapat dikonfersi turun sekitar 2,73 persen.

Di Kabupaten Kutai Timur pencemaran udara umumnya diakibatkan oleh beberapa hal seperti; kebakaran hutan yang mengakibatkan meningkatnya Carbon Dioksida, penebangan kayu yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku sehingga mengurangi jumlah luasan hijau dan mengakibatkan

berkurangnya supply Oksigen, dan bertambahnya kendaraan bermotor dan alat-alat berat lainnya serta eksploitasi tambang batu bara yang pada akhirnya menghasilkan partikel-partikel pencemaran udara seperti Nitrogen Oksida, Sox, dan CO.

Di Kabupaten Kutai Timur pencemaran Air umumnya diakibatkan oleh beberapa hal seperti; kebakaran hutan yang mengakibatkan matinya spesies tertentu dan tanaman hutan termasuk kayu, penabangan kayu yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku sehingga mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap air dan mengakibatkan berkurangnya daya simpan air oleh hutan, dan akibat limbah industri termasuk akibat penambangan liar.

Indikator untuk menilai kesejahteraan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari Jumlah penduduk miskin yang dihitung dengan menggunakan GK. Dari tahun 2000 hingga 2008 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan yang cukup berarti. Artinya dari segi pemenuhan kebutuhan dasar akan kecukupan pangan dan non makanan sudah mulai terlihat adanya pengentasan kemiskinan. Masyarakat mulai mampu untuk mencapai standar kecukupan hidupnya. Tahun 2000 persentase penduduk miskin sekitar 17,11% dan turun menjadi 13,20% ditahun 2008.

Di Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2005 TFR mencapai 2,279 per wanita. Angka TFR terus turun hingga pada tahun 2008 menjadi 2,20 per wanita. Ini berarti secara hipotesis setiap wanita akan melahirkan anak sebanyak 2-3 orang hingga berakhirnya masa reproduksi yang biasanya hingga usia wanita 49 tahun, atau untuk setiap 100 wanita dapat melahirkan sebanyak 20-30 anak hingga berakhir masa reproduksinya.

Besarnya Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Timur tahun 2005 adalah sebesar 20,67, dan pada tahun 2006 menjadi 19,75 per 1000 kelahiran hidup. Penurunan AKB ini memberikan dampak yang baik pada peningkatan AHH. Pada tahun 2005 AHH Kabupaten Kutai Timur sebesar 67,8 tahun, kemudian meningkat 67,9 tahun pada tahun 2006, dan ditahun 2008 meningkat menjadi 68,25 tahun. AHH

penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 ternyata masih rendah bila dibandingkan dengan AHH Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 (70,5 tahun).

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin berkurang pengeluaran yang dibelanjakan untuk makanan dan semakin meningkat pengeluaran untuk bukan makanan. Pada tahun 2007 persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 50,52 persen dan untuk pengeluaran non makanan sebesar 49,48 persen.

Analisis pertanian di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam periode 2000-2008. Untuk tanaman padi pada tahun 2000 produksinya mencapai 25.868,0 ton menjadi 43.376,0 ton pada tahun 2008 atau mengalami peningkatan produksi hingga 67,68 persen atau rata-rata pertahun tumbuh sebesar 8,46 persen. Sementara itu tanaman palawija pada tahun 2000 produksinya mencapai 12.051 ton menjadi hanya 12.818,00 Ha atau tumbuh sebesar 6,36 persen atau rata-rata pertahun tumbuh sebesar 0,80 persen. Kebutuhan beras untuk penduduk Kutai Timur baru mampu dipenuhi hanya sebesar 91,98 persen dari jumlah produksi padi sebesar 38.314 ton dan menjadi beras yang siap dikonsumsi sebesar 22.218 ton. Dengan jumlah konsumsi perkapita 113 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 213.762 jiwa, maka jumlah kebutuhan konsumsi besar per tahun sebanyak 24.155 ton atau masih kurang sebanyak 1.937 ton. Apabila dirinci per kecamatan, maka kecamatan yang telah surplus beras hanya kecamatan; Busang, Long Mesangat, Telen, Kongbeng, Muara Bengkal, Kaliorang, dan Sangkulirang. Sementara itu kemampuan daerah dalam menyediakan pangan untuk konsumsi jagung telah mampu surplus hingga 161,00 persen, Kedele baru mampu 31,36 persen, Ubi kayu surplus hingga 236,92 persen, Kacang Hijau baru mampu 45,48 persen, Kacang tanah 35,40 persen dan ubi jalar telah mampu 202,19 persen.

Dalam perekonomian Kutai Timur, sejak tahun 2000 nilai tambah yang diberikan oleh sub sektor perkebunan terus

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari sebesar Rp. 24.221,08 juta pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 305.346,78 juta pada tahun 2008. Kontribusi yang diberikan oleh subsektor perkebunan terhadap PDRB Kutai Timur pada tahun 2008 sebesar 1,23 persen dengan MIGAS dan tanpa MIGAS sebesar 8,57 persen. Meskipun kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah namun subsektor ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup tinggi selama sembilan tahun terakhir yaitu dari sebesar 0,44 persen tahun 2000 menjadi 1,23 persen tahun 2008 (dengan MIGAS) dan tanpa MIGAS dari 3,05 persen tahun 2000 menjadi 8,57 persen tahun 2008 (Tanpa MIGAS). Selain itu sektor ini merupakan sektor pendorong bagi sektor unggulan seperti sektor industri makanan dan minuman khususnya dengan adanya industri CPO (minyak sawit).

Perkembangan populasi ternak pada tahun 2000-2008 pada beberapa jenis ternak sudah menunjukkan perkembangan yang sangat tinggi seperti: sapi, kerbau, Kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging kecuali pada ternak domba yang mengalami penurunan populasi. Selama periode sembilan tahun (2000-2008) pertumbuhan ternak masing-masing seperti di atas yaitu: 86,15 persen, 726,14 persen, 153,68 persen, 13,68 persen, 179,91 persen, dan 24.430 persen. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan menurun yaitu domba sebesar -82,95 persen dan yang mengalami pertumbuhan lamban seperti babi sebesar 14,55 persen dan itik sebesar 13,86 persen.

Secara keseluruhan penyediaan produksi telur untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 baru mampu sebesar 21,95 persen dari total produksi telur sebesar 386,71 ton bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi total penduduk sebesar 1.761,40 ton tahun 2008. Sementara itu penyediaan produksi daging untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 baru mampu sebesar 46,99 persen dari total produksi telur sebesar 993,45 ton bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi total penduduk sebesar 2.114,11 ton.

Perkembangan produksi perikanan pada tahun 2000-2008 mencapai 87,46 persen untuk beberapa jenis perikanan sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik seperti: perikanan laut, kolam, keramba, dan budidaya pantai atau sawah yang selama periode 2000-2008 pertumbuhannya berturut-turut sebesar 49,11 persen, 312,85 persen, 335,29 persen, dan 100,00 persen, terkecuali perikanan perairan umum dan tambak yang justru menurun selama periode yang sama yaitu -57,76 persen dan 59,99 persen.

Dilihat dari kemampuan penyediaan produksi ikan untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kutai Timur ternyata baru mampu sebesar 42,39 persen dari total produksi sebesar 5.202,60 ton dibanding kebutuhan konsumsi penduduk yang mencapai 12.272,08 ton.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan tujuan	1
1.3. Hasil yang diharapkan	1
BAB II PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	2
2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan	2
BAB III DATA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN	4
3.1. Data perencanaan pembangunan daerah	4
3.2. Lembaga penyedia data pembangunan daerah	4
3.3. Penggunaan data dan informasi untuk kebijakan pembangunan	5
BAB IV JENIS-JENIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	7
4.1. Pengenalan Daerah dari Sisi Suplai.	7
4.2. Pengenalan daerah dari sisi demand	18
4.3. Pengenalan Daerah Dari Sisi Keberdayaan Pemerintah Daerah	20
4.4. Sistem Keuangan/Perbankan	23
4.5. Data Keamanan	24
BAB V TOOLS ANALISIS UNTUK PERENCANAAN	25
5.1. LQ (location quotient)	26
6.2. COR (capital-output ratio)	27
6.3. Shift Share	28
5.4. Ketenagakerjaan	35
5.5. Indikator Pembangunan Daerah	36
5.6. Perangkat Analisis Bidang Pertanian	39
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
6.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Kutai Timur	41
6.2. Analisis Location Quotient (LQ)	43
6.3. Analisis Shift Share	47

6.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	51
6.5 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional).....	53
6.6. Hubungan antar Variabel dalam Upaya mencari peningkatan sumber pendapatan daerah	57
6.6.1. Hubungan Antara Keuntungan BUMD dengan PDRB, Penduduk, dan Indeks Implisit	57
6.6.2. Hubungan Pajak Daerah dengan Jumlah Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit	59
6.6.3. Hubungan Retribusi Daerah dengan Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit.....	61
6.6.4. Hubungan antara Bagi Hasil Pajak dengan Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Implisit	63
6.6.5. Hubungan Antara Bagi Hasil Bukan Pajak dengan Jumlah Penduduk, Pendapatan perkapita, dan Indeks Implisit	65
6.7. Analisis Ketenagakerjaan	66
6.8. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	69
6.9. Indikator Pembangunan Daerah	86
6.9.1. Indikator untuk menilai Kapabilitas Aparat	88
6.9.2. Indikator untuk menilai Keuangan Daerah.....	91
6.9.3. Indikator untuk menilai Sarana dan Prasarana Pemerintahan.....	97
6.9.4. Indikator Untuk Menilai Fasilitas Publik	101
6.9.5. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah	121
6.9.6. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam	131
6.9.7. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kependudukan dan Ketenagakerjaan	148
6.9.8. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kesejahteraan Masyarakat	156
6.9.9. Indikator-indikator untuk menilai Sosial, Politik dan Budaya.....	170
6.10. Analisis Pertanian.....	176
BAB VII PENUTUP	200

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1.	Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur 2000-2008 (%)	42
Tabel 6.2.	Perbandingan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur dan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (%)	42
Tabel 6.3.	PDRB Sektoral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 – 2008	44
Tabel 6.4.	PDRB Sektoral Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 – 2008	44
Tabel 6.5.	Nilai Tambah Bruto Sektoral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 – 2008	45
Tabel 6.6.	Nilai Tambah Bruto Sektoral Prop Kalimantan Timur Tahun 2000 – 2008	45
Tabel 6.7.	Nilai LQ Sektoral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 dan 2008	46
Tabel 6.8.	PDRB Sektoral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 dan 2008	48
Tabel 6.9.	PDRB Sektoral Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 dan 2008	48
Tabel 6.10.	Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kutai Timur dan Kalimantan Timur 2008 (dalam persen)	49
Tabel 6.11.	Analisis Shift-share Klasik untuk Kabupaten Kutai Timur, 2000 dan 2008	50
Tabel 6.12.	Analisis ICOR Kabupaten Kutai Timur, 2000 – 2008	52
Tabel 6.13.	Penduduk menurut kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2008	53
Tabel 6.14.	PDRB Perkapita menurut kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2008	54
Tabel 6.15.	Proporsi PDRB Perkapita Kab/Kota Terhadap PDRB Perkapita Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 – 2008	56
Tabel 6.16.	Output Korelasi antara Keuntungan BUMD dengan PDRB, Penduduk, dan Indeks Implisit.	57
Tabel 6.17.	Output Regresi Linier antara Keuntungan BUMD, PDRB, Penduduk, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2002-2008.	58
Tabel 6.18.	Output Korelasi antara Pajak Daerah dengan Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit.	59
Tabel 6.19.	Output Regresi Linier antara Pajak Daerah, Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008.	60
Tabel 6.20.	Output Korelasi antara Retribusi Daerah dengan Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008	61
Tabel 6.21.	Output Regresi Linier antara Retribusi Daerah, Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008.	62
Tabel 6.22.	Output Korelasi antara Bagi hasil pajak dengan Penduduk, Pendapatan Per kapita, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008	63
Tabel 6.23.	Output Regresi Linier antara bagi hasil pajak, Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008.	63
Tabel 6.24.	Output Korelasi antara Bagi hasil pajak dengan Penduduk,	

	Pendapatan Per kapita, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008	64
Tabel 6.25.	Output Regresi Linier antara bagi hasil bukan pajak, Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008.	65
Tabel 6.26	Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kutai Timur 2006-2008	66
Tabel 6.27.	Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	67
Tabel 6.28	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	68
Tabel 6.29	Tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	68
Tabel 6.30.	Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur 2008	69
Tabel.6.31	Perkembangan Variabel Indeks Pembangunan Manusia/IPM Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	71
Tabel 6.32.	Komponen IPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan Tahun 2007	78
Tabel.6.33.	Indeks komponen IPM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007	81
Tabel.6.34.	Jumlah Pegawai di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	88
Tabel.6.35.	Kualitas Aparat (Manajemen dan Profesional) di Kabupaten Kutai Timur 2008	89
Tabel 6.36.	Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dari Pos PAD dan Dana Perimbangan Tahun 2000 - 2008 (Juta Rupiah)	92
Tabel 6.37.	Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008 (Juta Rupiah)	93
Tabel 6.38.	Struktur Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008 (juta rupiah)	95
Tabel.6.39.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Menurut Jenis Belanja Tahun 2000, 2004, dan 2008 (Juta rupiah)	97
Tabel 6.40.	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi Komunikasi dan Infomasi Tahun 2006	99
Tabel. 6.41.	Jumlah Desa di Setiap Kecamatan Berdasarkan Fasilitas Komunikasi Dan Informasi di Kabupaten Kutai Timur 2008	100
Tabel 6.42.	Indikator Layanan Kesehatan/Desa Tahun 2008	102
Tabel .6.43.	Sarana Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	102
Tabel.6.44.	Indikator Tenaga Kesehatan/desa Tahun 2008	103
Tabel .6.45.	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	104
Tabel.6.46.	Struktur Penduduk dan Dependency ratio	105
Tabel.6.47.	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menurut Tingkatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008	107
● Tabel.6.48.	Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 15 tahun ke atas	108
● Tabel.6.49.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2001-2008	108
● Tabel.6.50.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2002-2008	109
● Tabel.6.51.	Penduduk Berumur 10 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2007	110

Tabel 6.52.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat/ Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	110
Tabel 6.53.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat/ Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	111
Tabel 6.54	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	111
Tabel. 6.55.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan	112
Tabel 6.56.	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	112
Tabel 6.57.	Total Panjang Jalan dan Panjang jalan Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008 (Km)	117
Tabel 6.58.	Rasio Panjang Jalan yang kondisi baik dengan Total Panjang Jalan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	118
Tabel 6.59.	Banyaknya Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Polres Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	118
Tabel 6.60.	Kepadatan Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Timur 2007-2008	119
Tabel 6.61	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008	121
Tabel 6.62	PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008	125
Tabel 6.63.	Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum di Kutai Timur	127
Tabel 6.64.	Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Kutai Timur (jutaan rupiah)	128
Tabel 6.65.	Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Kutai Timur (juta rupiah)	128
Tabel 6.66.	Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kutai Timur (dalam Rp juta)	129
Tabel 6.67.	Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur (dalam juta rupiah)	130
Tabel.6.68.	Potensi Batu Bara di Kabupaten Kutai Timur	132
Tabel.6.69.	Potensi Bahan Galian Logam dan Non-Logam di Kabupaten Kutai Timur	132
Tabel.6.70.	Produksi Batu Bara di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	133
Tabel. 6.71.	Produksi Minyak Mentah dan Gas Alam di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	133
Tabel. 6.72	Luas Hutan di Kabupaten Kutai Timur	135
Tabel. 6.73	Realisasi Produksi Kayu Bundar Menurut Jenis Kayu Dari Kegiatan IUPHHK-PH dan IPK di Kabupaten Kutai Timur 2003-2007, dan 2008	136
Tabel.6.74	Produksi Kayu Olahan Menurut Jenisnya Produksi dalam (M3)	137
Tabel.6.75	Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	137
Tabel.6.76	Perambahan Hutan di TNK Sepanjang Jalan Bontang-Sangatta Tahun 2001	138
Tabel.6.77	Zona-Zona Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Kutai Timur	139
Tabel.6.78	Iklim, Atmosfir dan Udara Kabupaten Kuutai Timur	140
Tabel.6.79	Data Kualitas Udara di Kabupaten Kutai Timur	141

Tabel.6.80	Perkembangan Jumlah Kendaraan Eksploitas Batu Bara Penghasil Partikel Debu	141
Tabel.6.81	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Penghasil CO2	142
Tabel.6.82	Berkurangnya Jumlah Luasan Hutan dan Luasan Hijau yang berdampak pada kualitas Udara	142
Tabel.6.83	Data Kualitas Air di Kabupaten Kutai Timur	144
Tabel.6.84	Sarana Air Bersih di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	145
Tabel.6.85	Jumlah Perusahaan Air Minum, Kapasitas Produksi, sumber Air Baku dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur 2004-2008	145
Tabel.6.86	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang digunakan di Kabupaten Kutai Timur 2007	146
Tabel.6.87.	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan, dan persebaran serta kepadatan penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008	147
Tabel.6.88.	Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kutai Timur 2006-2008	148
Tabel 6.89.	Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur 2007-2008	148
Tabel 6.90.	Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	149
Tabel. 6.91.	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan pekerjaan Utama di Kabupaten Kutai Timur 2006-2008	150
Tabel . 6.92.	Tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	151
Tabel.6.93.	Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	152
Tabel 6.94.	Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur 2008	153
Tabel.6.95.	Penduduk bekerja menurut Sektor Formal dan Informal di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	154
Tabel 6.96.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Kecamatan dan Kelompok Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kutai Timur 2008	154
Tabel 6.97.	Produktivitas tenaga kerja menurut sektor Lapangan usaha di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	155
Tabel.6.98.	Jumlah penduduk miskin, persentase, dan garis kemiskinan di Kabupaten Klutai Timur 2008	161
Tabel.6.100.	Rumah Tangga Miskin Menurut Keberadaan Balita, Anak Sekolah dan Kondisi Tempat Tinggal di Kabupaten Kutai Timur 2005	163
Tabel 6.101.	Rumah Tangga Miskin Menurut Keberadaan Balita, Anak Sekolah dan Kondisi Tempat Tinggal di Kabupaten Kutai Timur 2008	164
● Tabel 101a.	Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	167
● Tabel.6.102.	Sarana Peribadatan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	169
● Tabel.6.103.	Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	169
● Tabel.6.104.	Organisasi Politik di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	170
● Tabel.6.105.	Potensi Wisata Alam di Kabupaten Kutai Timur 2008	171
● Tabel.6.106.	Sarana dan Prasarana Wisata di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	171

Tabel 6.105. Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004-2008	172
Tabel 6.106. Jumlah Tindak Kejahatan di Kabupaten Kutai Timur 2005-2008	173
Tabel. 6.107 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2005	174
Tabel. 6.108. Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	179
Tabel. 6.109. Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008	180
Tabel.6.110. Produktivitas hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008	180
Tabel.6.111. Nilai PDRB, Peranan dan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap Total PDRB Kabupaten Kutai Timur tahun 2000-2008	181
Tabel 6.112. Luas Lahan tanaman Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008	188
Tabel. 6.113 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Semusim Tahun 2008 di Kabupaten Kutai Timur	191
Tabel. 6.114 Produksi Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan menurut Jenisnya di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008	192
Tabel 6.115. Populasi Akhir Tahun Ternak besar dan kecil serta unggas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008	194
Tabel 6.116. Produksi Daging, dan produksi Telur Hasil Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008	195
Tabel.6.117. Kemampuan penyediaan telur untuk konsumsi penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008	195
Tabel.6.118. Kemampuan penyediaan Daging untuk konsumsi penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008	196
Tabel 6.119. Rumah Tangga Perikanan, Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2008	198
Tabel 6.120. Produksi Ikan, konsumsi total penduduk dan kemampuan penyediaan konsumsi ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008	199

DAFTAR GRAFIK

Grafik. 6.1	Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 (persen)	41
Grafik 6.2.	Grafik Perkembangan ICOR Kabupaten Kutai Timur, 2000 - 2008	52
Grafik 6.3	Grafik Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2008	55
Grafik .6.4.	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Kutai Timur 2002-2007	72
Grafik 6.5.	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007	79
Grafik 6.6	Persentase Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008	94
Grafik 6.7 .	Persentase Pelanggan Air bersih dan Listrik	114
Grafik 6.8	Struktur Perekonomian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 (%)	124
Grafik 6.9	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2008	175

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan telah diberlakukannya otonomi daerah kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir semakin dirasakan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat selalu membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil), sedangkan pemerintah daerah memerlukan data untuk membantu pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi demikian, secara praktis sebenarnya dapat dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang merupakan suatu unit fungsional pengelolaan basis data dan informasi daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dapat digunakan dalam rangka pengembangan peluang investasi dan potensi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kabupaten Kutai Timur adalah :

1. Memenuhi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka melihat kekuatan dan kelemahan daerah dari sisi suplai, demand, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan keamanan.
2. Menyusun format standar tentang data dan informasi yang mesti dikumpulkan oleh daerah dalam mendukung Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

1.3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersusunnya sistem informasi mengenai kondisi suplai, permintaan, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan data keamanan yang berguna untuk perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang akan digunakan oleh aparatur di daerah.

BAB II

PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Istilah perencanaan pembangunan (khususnya pembangunan ekonomi) sudah sangat umum didengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian dalam berbagai literatur tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian tersebut.

Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yakni:

- Merencanakan berarti memilih," Definisi ini dikenalkan oleh *Yulius Nyerere* (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan. Hal ini menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dengan proses pengambilan keputusan sangat erat sehingga banyak literatur perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif proses pengambilan keputusan, terutama sekali berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.
- Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya. Penggunaan istilah "sumberdaya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumberdaya disini mencakup sumberdaya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya), sumberdaya manusia, sumberdaya modal, dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumberdaya tersebut berpengaruh sangat penting dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan-tindakan yang ada.
- Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses

penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat diartikulasikan secara tepat. Seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.

- Perencanaan untuk masa depan. Salah satu elemen penting dalam perencanaan adalah elemen waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan.



BAB III

DATA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.1. Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Data untuk perencanaan daerah dapat dibedakan menjadi berbagai aspek menurut tinjauan yang diinginkan. Hal ini disebabkan tujuan dari perencanaan itu sendiri juga berbagai macam. Sebagaimana dijelaskan di depan inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang diinginkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah adanya tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumberdaya yang ada. Untuk menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut seringkali tidak mudah, mengingat bahwa tujuan dari pembangunan seringkali abstrak dan sangat ideal. Sedangkan apa yang dihadapi saat ini dengan melihat sumberdaya yang ada seringkali masih jauh dari apa yang diinginkan. Untuk itulah perencanaan juga menjadi ilmu tersendiri dalam khasanah ilmu pengetahuan. Seringkali dalam ilmu perencanaan, dibedakan menjadi perencanaan sektoral dan perencanaan nasional/regional.

Bagaimana data dapat membantu proses pembuatan perencanaan? Menurut beberapa ahli ekonomi bahwa penggunaan paling penting dari data atau indikator-indikator pembangunan adalah untuk menyediakan target-target untuk perencanaan. Beberapa contoh misalnya indikator pendapatan perkapita yang ingin dicapai oleh suatu daerah sering dijadikan target dari kemajuan pembangunan yang diinginkan. Selain itu target-target pengurangan angka kemiskinan juga menjadi proyek atau program yang relatif strategis bagi daerah.

3.2. Lembaga Penyedia Data Pembangunan Daerah

Berbicara mengenai lembaga penyedia data tidak terlepas dari sistem perstatistikan nasional Indonesia. Di Indonesia lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di samping berada di pusat BPS juga mempunyai kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan instansi vertikal yang disebut BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota.

Berkaitan dengan penyediaan data untuk perencanaan pembangunan di daerah maka mekanisme yang berjalan semala ini adalah berkoordinasinya BPS Provinsi

maupun BPS Kabupaten/kota dengan pemerintah daerah. Untuk itu upaya penyediaan data untuk perencanaan pembangunan haruslah melibatkan pihak-pihak tersebut.

Secara teknis data yang diolah dan kemudian didiseminasikan oleh BPS provinsi atau kabupaten/kota diperoleh dengan cara survei dan laporan/catatan rutin dari instansi pemerintah daerah.

3.3. Penggunaan Data dan Informasi Untuk Kebijakan Pembangunan

Selama ini, proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Sebelum era desentralisasi proses perencanaan pembangunan daerah lebih bersifat sentralistik. Dalam proses ini pemerintah daerah menerima agenda perencanaan pembangunan dari pusat untuk selanjutnya menjalankannya dalam kerangka memenuhi jadwal atau agenda perencanaan yang telah menjadi pola baku yang ditetapkan pemerintah pusat. Implikasi lebih jauh dari proses ini adalah ketergantungan yang semakin besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam era desentralisasi proses perencanaan pembangunan sudah mengalami pergeseran paradigma. Dalam hal ini sudah mulai dilakukan proses bottom up planing pada taraf yang lebih intensif dibandingkan masa sebelumnya. Kemudian pada tataran pelaksanaan pembangunan juga sudah lebih melihat kepentingan daerah dan lebih banyak melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diharapkan ke depan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kemudian juga akan menumbuhkan kemandirian dalam pendanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Namun demikian dengan semakin intens-nya peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus diterima antara lain:

- a. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan kelengkapan database yang lebih lengkap lagi, agar setiap tahapan pembangunan didasarkan pada data yang semakin aktual.
- b. Dibutuhkan sumberdaya manusia yang lebih baik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
- c. Dibutuhkan semakin besarnya partisipasi dari masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan.

- d. Dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Hal ini untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin pesat.



BAB IV JENIS-JENIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Jenis data untuk perencanaan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu data spasial (keruangan) dan non spasial. Kedua data tersebut juga masih bisa dikembangkan menjadi dua macam dalam hal manajemennya, yaitu data fisik yang bersifat statis dan data sosial-ekonomi yang dinamis sehingga penting untuk selalu di *update*.

Namun dari sisi substansi pembangunan ekonomi, data perencanaan pembangunan juga bisa dilihat dari perspektif suplai dan demand. Dengan melihat dari dua sisi ini diharapkan akan dapat memenuhi dua aspek penting pembangunan .

Dalam SIMREDA ini jenis-jenis data yang tercakup tidak hanya mengambil dari salah satu aspek saja melainkan dari beberapa aspek, guna kelengkapan dan keluasan kegunaan dari yang yang dihimpun.

4.1. Pengenalan Daerah dari Sisi Suplai.

Dilihat potensi dan prospek sumberdaya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana fisik, aglomerasi kegiatan ekonomi, serta sistem kota-kota yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan daerah.

A. Sumber daya manusia (SDM)

Data tentang SDM digunakan untuk melihat seberapa jauh ketersediaan dan kualitas SDM, mobilitas SDM untuk melihat pola penyebaran dan pola migrasi, dan produktivitas SDM daerah.

Data yang dibutuhkan adalah :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Kependudukan Kuantitas	jumlah penduduk per kecamatan	Perkembangan jumlah penduduk	Menggambarkan perkembangan	BPS setempat
			Laju pertumbuhan penduduk	Kependudukan suatu daerah agarantisipasi dan perencanaan lebih baik	BPS setempat
		kepadatan penduduk (jml pddk per luas wilayah)			
		Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur	Penduduk usia produktif (15-64 tahun)	Menunjukkan struktur penduduk	BPS setempat

Bab 4 Jenis-Jenis Data Perencanaan Pembangunan

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
		Angka kelahiran dan kematian		Untuk melihat dinamika kependudukan	BPS setempat
		Angka kematian bayi		Melihat tingkat kesehatan masyarakat	BPS setempat
		Jumlah penduduk setiap wilayah (perdesaan dan perkotaan)	Persebaran penduduk di setiap wilayah	Melihat peta persebaran penduduk dalam struktur ruang wilayah	BPS setempat
		daerah asal (tempat tinggal sebelum di wilayah yang sekarang)	Mobilitas penduduk antar wilayah (migran)		BPS setempat
	Kualitas	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan	Tingkat pendidikan	Menunjukkan kemampuan manusia sebagai pelaku pembangunan	BPS setempat
			Proporsi penduduk berpendidikan tinggi		BPS setempat
			Lama sekolah		
	2	Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama	Proporsi tenaga kerja terhadap penduduk	Menunjukkan potensi tenaga kerja yang ada di daerah tersebut
Jumlah angkatan kerja			Tingkat partisipasi angkatan kerja	Menyatakan potensi angkatan kerja yang siap masuk pasar kerja	
Tingkat pengangguran (presentase penduduk yang tidak bekerja terhadap total angkatan kerja)			Jumlah pengangguran	Menunjukkan beban, sekaligus target bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	
			Proporsi tenaga kerja sektor primer		
			Proporsi tenaga kerja sektor sekunder		
			Proporsi tenaga kerja sektor tersier		
	Jumlah permintaan tenaga kerja	Pertumbuhan kesempatan kerja dibagi pertumbuhan penduduk usia produktif	Menunjukkan upaya peningkatan kesempatan kerja daerah	Dinas kependudukan dan ketenagakerjaan setempat	



B. SUMBER DAYA ALAM (SDA)

Data tentang SDA digunakan untuk melihat potensi dan pola ketersediaan, penyebaran dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.

Data yang dibutuhkan adalah:

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Pertambangan dan Penggalian				
	Bahan galian gol. A, B, C, (Tabel 12)	Potensi emas, perak, timah, tembaga, batu bara, dll.	Perkembangan produksi bahan galian	Menunjukkan potensi, produksi, dan perkembangan produksinya	BPS atau Dinas Pertambangan dan Penggalian
		Produksi bahan tambang (Tabel 13)	Perkembangan produksi bahan tambang		
		Potensi bahan galian berdasarkan wilayah (Tabel 13)	Wilayah persebaran potensi bahan galian gol. C (Tabel 14)	Untuk kebijaksanaan pengembangan wilayah	
2	Migas	Potensi minyak bumi (tabel 15)		Menunjukkan potensi, produksi, dan persebaran migas di setiap wilayah	Departemen energi dan sumber daya mineral
		Potensi Gas alam (Tabel 15)			
		Wilayah persebaran minyak bumi (Tabel 16)			
		Wilayah persebaran Gas alam (Tabel 16)			
		Kontribusi PDRB sektor pertambangan (Tabel 17)	Kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB	Melihat peranan pertambangan dalam perekonomian daerah	BPS setempat
		Bagi hasil SDA (Tabel 18)	Nilai Bagi Hasil SDA	Bagi hasil SDA yang diterima selama ini	Bappeda/Dinas Pendapatan Daerah
3e	Kehutanan				
		Luas hutan	Luas hutan produksi	Melihat potensi hutan berdasarkan peruntukannya	BPS atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat
			Luas hutan tanaman industri		
			Pertumbuhan luas hutan	Menunjukkan perkembangan luas hutan untuk kebijakan pelestarian	

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
		Luas wilayah	Proporsi luas hutan	Luas hutan dibagi luas wilayah. Perkembangan data ini akan menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk pelestarian	BPS atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat
			Proporsi luas perkebunan		
			Pertumbuhan luas perkebunan		
		Produksi	Produksi Hutan	BPS atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat	
Kawasan lindung	Produksi perkebunan				
			luas kawasan lindung		
4	Potensi wisata alam	Jumlah objek wisata	jenis, luas, dan lokasi objek wisata		BPS atau Dinas Pariwisata
			Jumlah kunjungan wisatawan		

C. Prasarana Dan Sarana

Data prasarana dan sarana wilayah berguna untuk melihat seberapa jauh ketersediaan prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, kesehatan, pendidikan dan peribadatan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.

Data yang dibutuhkan :

NO	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan
1	Prasarana Transformasi darat			
		Panjang jalan	Pertumbuhan panjang jalan	Perkembangan pembangunan fisik jalan dan manajemen pengelolaan/pemeliharaan. Juga ntuk kebijakan penurunan biaya transportasi hasil pertanian
			Panjang jalan per klasifikasi (jalan propinsi,kabupaten, kec,jalan usaha tani,dll)	
		Luas wilayah	panjang jalan per luas wilayah	Menunjukkan kerapatan jalan (mencirikan wilayah perkotaan/pedesaan)
		Kondisi jalan	panjang jalan menurut kelas jalan	mantap, sedang, tidak mantap.
			panjang jalan menurut jenis permukaan jalan	Aspal, batu kerikil, tanah.
			panjang jalan menurut kualitas	baik, sedang, rusak
			panjang jalan menurut fungsi jalan	arteri, kolektor, lokal
			panjang jalan menurut kelas jalan	kelas I, II, III, IV, V

Bab 4 Jenis-Jenis Data Perencanaan Pembangunan

NO	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan
		Kepadatan jaringan jalan		Peningkatan manajemen lalu-lintas oleh daerah
		Lalu-lintas harian rata-rata	Perkembangan lalu-lintas	
		Waktu tempuh rata-rata jam/Km		
		Jumlah jembatan	jumlah jembatan yang seharusnya ada	Menunjukkan upaya meniadakan keterisolasian wilayah terpencil
			Jumlah jembatan yang terbangun	
		Jumlah sungai besar		
		Panjang jembatan		
		Kondisi jembatan		
		Panjang rel kereta api	Panjang jalan per luas wilayah	
2	Sarana Transformasi Darat	Jumlah Kendaraan menurut Golongan(I,II,III, IV) per ras		untuk melihat komposisi ideal menurut prasarana jalan yang ada
		Kapasitas angkut kereta api		
		Frekuensi armada angkutan	Breakdown per jenis armada	
		Biaya/tarif transportasi yang berlaku di daerah		
		Jumlah terminal	Terminal menurut jenis dan kelas pelayanannya	
3	Prasarana dan sarana Transformasi Sungai dan laut		Jumlah armada angkutan sungai	Melihat skala pelayaran armada angkutan sungai dibandingkan panjang sungai yang ada
		Panjang sungai	Jumlah penumpang angkutan sungai	
			jumlah barang yang dibongkar muat dari angkutan sungai	
		Jumlah pelabuhan laut	Jumlah armada yang melakukan bongkar muat	Menunjukkan kapasitas pelabuhan yang ada untuk perencanaan pengembangan pelabuhan
			Jumlah penumpang angkutan laut	
			jumlah barang yang dibongkar muat di pelabuhan laut	
			Kualitas pelayanan angkutan laut(kecepatan bongkar muat,dsb)	Untuk pembenahan manajemen pelabuhan. Bila terdapat beberapa pelabuhan akan diketahui prioritas penanganan

NO	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan
4	Prasarana dan sarana perhubungan udara	Keberadaan bandara	Las bandara yang dimiliki	
		Banyaknya penerbangan dari dan ke daerah bersangkutan	Jumlah penerbangan, jumlah penumpang dan kota tujuan.	Menunjukkan Mobilitas penumpang angkutan udara
5	Prasarana listrik	Kapasitas listrik terpasang	tingkat elektrifikasi suatu daerah	
			Jumlah RT pelanggan listrik	Ketersediaan energi listrik bagi pembangunan industri, ekonomi, masyarakat dan kegiatan lain
			Distribusi pemakaian daya menurut kelas pelanggan	
		Ketersediaan listrik selain PLN	kapasitas listrik non PLN	
6	Prasarana telekomunikasi	Sarana Telekomunikasi yang tersedia di daerah	Produksi pulsa	Menunjukkan tingkat kemajuan teknologi informasi yang ada di masyarakat. Salah satu indikator perkembangan ekonomi bisnis di suatu wilayah
			Jumlah pelanggan telepon tetap	
			Jumlah operator telepon seluler yang ada	
			Jumlah pelanggan/ pengguna telepon seluler	
7	Sarana Kesehatan	Jumlah Rumah sakit	Perkembangan jumlah kamar RS	Menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana kesehatan
		Jumlah Puskesmas/ Posyandu	Perkembangan jumlah Puskesmas	
			Puskesmas menurut jenis pelayanan	
		Jumlah balai/klinik pengobatan	Perkembangan jumlah balai/klinik pengobatan	
			Rasio sarana kesehatan (RS, Puskesmas, dll) per 1000 penduduk	Tingkat pelayanan sarana kesehatan
		Jumlah tenaga medis	Perkembangan jumlah dokter	Ketersediaan tenaga medis di suatu wilayah
			Perkembangan jumlah bidan	
			Perkembangan jumlah mantri kes/ paramedis lain	
			Perkembangan apotik/ toko obat	Ketersediaan sarana penunjang kesehatan masyarakat
8	Sarana Pendidikan	Jumlah sekolah	Jumlah sekolah menurut jenjang sekolah (SD, SLTP, SLTA, PT)	Ketersediaan Ruang bagi pendidikan masyarakat dan kapasitasnya

NO	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan
		Jumlah Kelas	Jumlah ruang kelas setiap jenjang sekolah	
		Jumlah tenaga pengajar/pendidik	Jumlah pendidik/pengajar menurut jenjang pendidikan	Kecukupan dari sisi kuantitas dan kualitas tenaga pengajar/pendidik
			Kualitas guru(tingkat pendidikan,dll)	
		Jumlah murid	Perkembangan jumlah murid	
			Raso guru : murid pada setiap jenjang pendidikan disetiap wilayah	Kecukupan atau kelayakan dan sarana yang ada terhadap jumlah pengguna
9	Sarana air bersih	Sumber air bersih tama masyarakat	Prosentase penduduk yang terlayani air bersih	Pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat,baik untuk air minum,masak,mandi,cuci dan sebagainya
			cakupan pelayanan PDAM (%)	
			Jmlah pelanggan	
		Air baku utama PDAM	Asal sumber air baku PDAM	Kinerja PDAM dalam melayani air bersih bagi masyarakat
			Kapasitas prodksi	
			Debit yang dihasilkan	

D. POTENSI PERTANIAN

Potensi pertanian berguna untuk melihat potensi dan prospek komoditi unggulan baik untuk domestik dan ekspor serta penyebarannya.

Data yang dibutuhkan

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data	
1	Pertanian			Pertanian dimaksud adalah dalam arti luas, meliputi sub-sektor; Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan,Hortikultura, Kehutanan, dan Kelautan Perikanan		
		umum			Data yang berlaku bagi semua subsektor pertanian	
		PDRB tahunan (Tabel 19)	PDRB setiap subsektor pertanian	Peranan pertanian secara lebih terperinci dalam perekonomian wilayah	BPS	
		Tenaga Kerja (tahunan) (Tabel 19)	Perkembangan jumlah tenaga kerja disetiap sub-sektor	Untuk pembuatan kebijakan ketenagakerjaan di suatu wilayah	BPS atau Dinas pertanian	
		Rumah Tangga Petani (Tahunan) (Tabel 19)	Perkembangan rumah tangga petani		BPS atau Dinas pertanian	

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
		Lahan (Tabel 20)	Lahan baku pertanian		BPS atau Dinas pertanian
			Jenis irigasi	Teknis, semiteknis, tadah hujan, dll.	BPS atau Dinas pertanian
			Bencana banjir	Luas area banjir yang terjadi di area pertanian (Umum)	BPS atau Dinas pertanian
			Konversi lahan pertanian kelahan nonpertanian	menunjukkan peralihan lahan yang terjadi di wilayah bersangkutan untuk masukan kebijakan tata ruang dan pengembangan wilayah	BPS atau Dinas pertanian
			Kepemilikan lahan (Tabel 21)	Bahan kebijakan pemberdayaan petani (pemilik dan Buruh tani)	BPS atau Dinas pertanian
			Jumlah RT pemilik lahan : a. 0,1-0,5 b. 0,6-0,9 c. 1-1,99 d. > 2 (Tabel 21)	Menunjukkan tingkat kepemilikan lahan oleh petani. Untuk pembuatan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan Buruh tani	Dinas Pertanian
		Input produksi pertanian (Tabel 19)	Kebutuhan pupuk per bulan atau per tahun. Lebih terperinci sesuai jenis pupuk kebutuhan akan pestisida	kebijakan penyediaan sarana produksi pertanian	BPS atau Dinas pertanian
		Jumlah penyuluh pertanian (Tabel 19)	Jumlah penyuluh pertanian untuk setiap subsektor	Kebijakan pemberdayaan petani	BPS atau Dinas pertanian
		Jumlah organisasi petani (Tabel 19)	Kelompok Tani P3A, dll	Kemampuan masyarakat petani mengorganisasikan diri. Upaya mengefektifkan pemberdayaan petani	BPS atau Dinas pertanian
		Pembiayaan kredit (Tabel 19)	Alokasi kredit perbankan Realisasi kredit perbankan	Menunjukkan peranan perbankan dalam membantu permodalan petani	BPS atau Dinas pertanian
		alokasi anggaran pembangunan (Tabel 19)	Alokasi APBD untuk sektor pertanian	Menunjukkan komitmen pemda dalam peningkatan sektor pertanian	BPS atau Dinas pertanian
		Kemiskinan	Pendapatan rumah tangga petani Pemenuhan pangan keluarga	Untuk kebijakan peningkatan pendapatan petani	BPS atau Dinas pertanian
		Luas Lahan non-sawah (tabel 22)			

Bab 4 Jenis-Jenis Data Perencanaan Pembangunan

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
		Kehutanan dan perkebunan (Tabel 23)			
2	Tanaman Pangan				
	Untuk setiap komoditas (misal: padi, jagung, kedelai, dll)	Produksi	Data produksi komoditas bulanan	Melihat produktivitas pertanian sebagai input kebijakan pengembangan produk unggulan di suatu wilayah	BPS atau Dinas pertanian
		Produktivitas	Data produktivitas per ha bulanan		
		Luas area tanam	perkembangan luas area tanam	masukan bagi kebijakan tata ruang	BPS atau Dinas pertanian
		Konsumsi per kapita	Konsumsi setiap komoditas per kapita	Menunjukkan kebutuhan potensial di wilayah yang bersangkutan	BPS atau Dinas pertanian
		Konsumsi Total	agregat dari konsumsi komoditas setiap wilayah		
		Jumlah Rumah Tangga petani	Jumlah rumah tangga para petani setiap komoditas	Mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap komoditas	BPS atau Dinas pertanian
		Intensitas Penanaman	Perkembangan IP per tahun	Menunjukkan pola tanam dari waktu ke waktu	BPS atau Dinas pertanian
		Pendapatan petani	Pendapatan petani setiap komoditas	Menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di setiap komoditas yang digelutinya	BPS atau Dinas pertanian
3	Perkebunan				
	Untuk setiap komoditas (misal: Kelapa sawit, tebu/gula, kakao, dll.) (Tabel 25)	Produksi	Data produksi komoditas bulanan	Mengetahui komoditas unggulan subsektor perkebunan untuk bahan kebijakan pengembangan	BPS atau Dinas pertanian
		Produktivitas	Data produktivitas per ha bulanan		
		Luas area tanam	perkembangan luas area tanam	Masukan bagi kebijakan tata ruang	BPS atau Dinas pertanian
		Konsumsi per kapita	Konsumsi setiap komoditas per kapita	manunjukkan kebutuhan potensial di wilayah yang bersangkutan	BPS atau Dinas pertanian
		Konsumsi Total	agregat dari konsumsi komoditas setiap wilayah		
		Jumlah Rumah Tangga petani	Jumlah rumah tangga para petani setiap	Mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap komoditas	BPS atau Dinas pertanian

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
			komoditas		
		Pendapatan petani	Pendapatan petani setiap komoditas	Menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di setiap komoditas yang digelutinya	BPS atau Dinas pertanian
4	Peternakan				
	Untuk setiap jenis hasil ternak (misal: telur, daging, susu, dll.) (Tabel 26)	Produksi	Data produksi setiap hasil ternak	Menunjukkan jenis ternak unggulan daerah	BPS atau Dinas pertanian
		Populasi	data populasi di wilayah bersangkutan	Perkembangan populasi ternak akan menjadi input pengembangan	BPS atau Dinas pertanian
		Konsumsi per kapita	Konsumsi setiap jenis hasil ternak per kapita	Menunjukkan kebutuhan potensial di wilayah yang bersangkutan	BPS atau Dinas pertanian
		Konsumsi total	Agregat dari konsumsi hasil ternak setiap wilayah		
		Pendapatan peternak	Pendapatan peternak setiap hasil ternak	Menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di setiap komoditas yang digelutinya	BPS atau Dinas pertanian
5	Hortikultura				
	Untuk setiap jenis komoditas buah dan sayuran (misal: buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dll.)	Produksi	Data produksi komoditas bulanan	Menunjukkan komoditas buah dan sayuran unggulan daerah	BPS atau Dinas pertanian
		Produktivitas	data produktivitas setiap komoditas di wilayah bersangkutan		
		Luas area tanam	perkembangan luas area tanam	Persebaran dan perkembangan luas area tanam menjadi input bagi kebijakan pemetaan komoditas di wilayah bersangkutan	BPS atau Dinas pertanian
		Konsumsi per kapita	Konsumsi setiap komoditas per kapita	Dapat menunjukkan tingkat konsumsi untuk setiap komoditas dan menunjukkan pasar potensial bagi pengembangan komoditas yang bersangkutan	BPS atau Dinas pertanian
		Konsumsi Total	agregat dari setiap komoditas di wilayah bersangkutan		

E. AGLOMERASI EKONOMI

Data aglomerasi ekonomi berguna untuk melihat konsentrasi kegiatan ekonomi daerah dari pola penyebaran industri dan perdagangan.

Data yang dibutuhkan :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Industri	Jumlah industri	Perkembangan jumlah per jenis industri	Menunjukkan peta industri berdasarkan jenisnya dan jumlah pelaku usaha industri	Dinas Perdagangan dan Industri
		Perkembangan jenis industri	Jumlah kelompok industri diperinci berdasarkan lokasi atau wilayah	Berkumpulnya industri-industri sejenis/tidak dalam suatu kawasan tertentu tanpa pengelolaan.	Dinas Perdagangan dan Industri
		Jumlah kawasan industri	Perkembangan kawasan industri	Berkumpulnya industri yang dikelola sebagai kawasan industri	Dinas Perdagangan dan Industri
		Luas kawasan Industri	Perkembangan luas kawasan industri	untuk input kebijakan panataan ruang dan tata kota.	Dinas Perdagangan dan Industri
		Persebaran kawasan industri			Dinas Perdagangan dan Industri
		Kontribusi	Kontribusi industri pada PDRB (diperinci berdasarkan klasifikasi industri)	Peranan sektor industri dalam perekonomian daerah	BPS setempat
2	Perdagangan	Jumlah kelompok Pertokoan & perdagangan	Diperinci berdasarkan skala usaha	Agglomerasi di bidang perdagangan yang direncanakan	Dinas Perdagangan dan Industri
		Persebaran pusat perdagangan	Diperinci berdasarkan daerah sampai terkecil (desa atau kecamatan)		Dinas Perdagangan dan Industri
		jumlah pasar	Jumlah pasar diperinci berdasarkan jenis pasar dan lokasi atau wilayah	Memperlihatkan persebaran lokasi pasar dalam konstelasi wilayah perencanaan	Dinas Perdagangan dan Industri
		Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi perdagangan pada PDRB (perinci berdasarkan berbagai klasifikasi perdagangan)	Peranan perdagangan dalam perekonomian	Dinas Perdagangan dan Industri

F. SISTEM KOTA-KOTA

Data sistem kota-kota berguna untuk melihat keterkaitan kota-desa, mana yang berperan sebagai *agent of development* dan *hinterland*.

Data yang dibutuhkan :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data	
1	Sistem kota-kota	Jumlah penduduk pedesaan per tahun	Pertumbuhan penduduk perdesaan	Melihat latar belakang penduduk di pedesaan	BPS setempat	
			Jumlah penduduk terlibat dalam pertanian		BPS setempat	
			Jumlah penduduk terlibat dalam nonpertanian		BPS setempat	
	Mobilitas penduduk	Jumlah penduduk perkotaan pertahun	jumlah penduduk musiman di perkotaan	pertumbuhan penduduk perkotaan	Melihat pengaruh pertumbuhan pedesaan terhadap perkotaan	BPS setempat
				Jumlah penduduk musiman setiap kota atau daerah perkotaan	Menunjukkan mobilitas penduduk ke wilayah perkotaan	BPS setempat dari sensus penduduk atau SUPAS
		angka migrasi	life time migrant (migran semasa hidup)	Migran permanen	Perkembangan angkanya munjukan pola migrasi antarwilayah di daerah bersangkutan.	BPS setempat dari sensus penduduk atau SUPAS
				Migran non permanen		
		Latar belakang Migran	Pekerjaan tetap migran untuk mengetahui presentase petani yang migran pada saat paceklik	Tingkat pendidikan penduduk migran	Mengetahui latar belakang dan alasan migrasi penduduk. Untuk input kebijakan perekonomian wilayah pedesaan dan perkotaan.	BPS setempat dari sensus penduduk atau SUPAS

4.2. Pengenalan daerah dari sisi demand

Potensi konsumsi dan daya beli masyarakat untuk melihat kemampuan daya beli dalam menyerap produksi daerah itu sendiri

A. Perkembangan dan penyebaran investasi

Perkembangan dan persebaran investasi berguna untuk melihat pola penyebaran investasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan daerah.

Data yang dibutuhkan :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Investasi	Pembentukan modal Tetap Domestik Bruto	ICOR = PMTDP / perubahan PDRB	Menunjukkan efisiensi dari investasi	BKPMD atau Badan yang mengurus investasi daerah
		Perkembangan PMA	Jumlah investasi asing yang masuk setiap tahun anggaran	Menunjukkan iklim investasi bagi investor asing.	BKPMD atau Badan yang mengurus investasi daerah
		Perkembangan PMDN	Perkembangan PMDN per tahun	Menunjukkan iklim investasi bagi investor dalam negeri.	
			Laju investasi		
		Data Perkembangan Proyek PMA Berdasarkan Sektor dan Bidang Usaha		Menunjukkan sektor prioritas yang cenderung menarik bagi investasi asing	

A. Perkembangan Ekspor

Data perkembangan ekspor berguna untuk melihat potensi permintaan pasar internasional, peluang diversifikasi produk ekspor dan diversifikasi negara tujuan, analisis perkembangan harga pasar internasional terhadap produk unggulan daerah.

Data yang dibutuhkan :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Perkembangan ekspor	Ekspor barang dan jasa (juta Rp)	Pertumbuhan Ekspor barang dan jasa (juta Rp)	Menunjukkan potensi permintaan pasar internasional terhadap komoditas daerah	BPS setempat atau Dinas perdagangan Bisa juga diperoleh dari Asosiasi eksportir komoditas tertentu yang telah ada.

B. Perkembangan impor

Data perkembangan impor berguna untuk melihat permintaan daerah, penajagan pasar domestik.

Data yang dibutuhkan :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Perkembangan impor	Impor barang dan jasa (juta Rp)	Pertumbuhan Impor barang dan jasa (juta Rp)	Menunjukkan potensi permintaan pasar dalam negeri	BPS setempat atau Dept. Perindustrian dan Dinas perdagangan
		Impor berdasarkan negara asal	Perkembangan impor berdasarkan negara asal	perkembangan impor berdasarkan jenis komoditas	
		Impor berdasarkan komoditas		Untuk input kebijakan substitusi impor bila memungkinkan	

C. Perdagangan Antar Daerah

Data perdagangan antar daerah berguna untuk melihat hubungan ekonomi antar daerah.

Data yang dibutuhkan :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Perdagangan antar daerah	Jenis komoditas yang diperdagangkan antara daerah		Atau data lain yang bisa menunjukkan hubungan ekonomi antar daerah	BPS setempat atau Dept. Perindustrian dan Dinas perdagangan
		Nilai barang yang diperdagangkan ke luar daerah		Biasanya data yang ada antar kota/pelabuhan besar, maka perlu justifikasi untuk dikelompokkan menjadi daerah administrasi	
		Modal angkutan utama untuk perdagangan antar daerah			

4.3. Pengenalan Daerah Dari Sisi Keberdayaan Pemerintah Daerah

A. Kemampuan aparat

Data tentang kemampuan aparat berguna untuk melihat kemampuan, efisiensi, dan produktivitas.

Data yang dibutuhkan:

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
	kemampuan aparat				
1		Jumlah Pegawai berdasarkan kelompok umur	Rasio aparat terhadap penduduk	Menunjukkan kecukupan aparat dalam melayani masyarakat	Badan Kepegawaian yang ada di daerah
		Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin			
		Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional di setiap sektor	Misal pertanian (penyuluh,mantri, dll)		
		Jumlah Anggota Legislatif		Menunjukkan keterwakilan masyarakat dalam politik	
2	Kualitas (Manajemen dan profesionalisme) aparat	Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan		Menunjukkan kualitas pegawai	Badan Kepegawaian yang ada di daerah
		Jumlah Anggota legislatif berdasarkan tingkat pendidikan		Menunjukkan kualitas wakil masyarakat (input)	

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
		Rasio Komputer terhadap jumlah pegawai		Ketersediaan sarana penunjang pelayanan masyarakat	Badan Kepegawaian yang ada di daerah
		Jumlah keluhan masyarakat dalam hal pelayanan publik	Banyaknya Komplain masyarakat terhadap layanan publik.	Menunjukkan kinerja aparat (perlu survey/pencatatan rutin terhadap laporan masyarakat	

B. Kemampuan keuangan

Kemampuan keuangan daerah berguna untuk melihat kemandirian daerah, ketergantungan anggaran daerah terhadap pemerintah pusat.

Data yang dibutuhkan :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Penerimaan asli daerah	PAD	PAD per PDRB PAD Per PDRB	Menunjukkan kapasitas keuangan daerah	Statistik Keuangan Daerah BPS atau Statistik PDRB
2	dana Perimbangan	DAU DAK Reboisasi dan Non Reboisasi Bagi hasil	Perkembangan DAU Perkembangan DAK Bagi hasil pajak, sumberdaya alam, PBB dan BPHTB	Menunjukkan tingkat ketergantungan anggaran daerah	Statistik Keuangan Daerah BPS atau Statistik APBD
3	Pinjaman Daerah	Belanja Wajib Daerah Angsuran Pokok Pinjaman Bunga Pinjaman Biaya-biaya lain (biaya komitmen, biaya Bank, dll)	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Menunjukkan Sumber pendanaan pembangunan yang lain	Statistik Keuangan Daerah BPS atau APBD

C. Kemampuan Kelembagaan

Kemampuan kelembagaan daerah berguna untuk melihat kelembagaan dengan pelayanan publik .

Data yang dibutuhkan :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Kemampuan Kelembagaan	Jumlah dinas/instansi daerah	Jumla dinas yang seharusnya ada	Kecakupan terhadap bidang yang ditangani	Analisis berdasarkan potensi dan permasalahan

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
			Jumlah dinas yang ada		yang dihadapi pemda Perda tentang Struktur Organisasi Pemerintah daerah
		Jumlah polisi yang bertugas		Rasio penduduk per polisi	Menunjukkan kelayakkan pelayanan dalam keamanan Kepolisian daerah setempat
2	Pelayanan Publik	Air bersih	Perkembangan penduduk yang terlayani air bersih (PDAM)	Menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	BPSempat atau PDAM setempat
		Telekomunikasi	jumlah penduduk dibagi satuan sambungan telepon	Menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi	BPS setempat atau PT Telkom setempat
		Kelistrikan	Rasio elektrifikasi (jumlah penduduk dibagi jumlah pelanggan listrik)	Menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	BPS setempat atau PLN setempat
		Pasar dan Pusat perdagangan	Jumlah pasar (tradisional) di bagi jumlah penduduk di kawasan perdesaan	Menunjukkan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar baik tradisional maupun modern	Dinas atau UPT yang mengurus Pasar tradisional di daerah
			Jumlah pusat perdagangan berdasarkan skala usaha dan skala pelayanan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat
		Angkutan Umum	Jumlah penduduk dibagi jumlah angkutan umum massal yang ada di perkotaan	Bila memungkinkan diperinci berdasarkan jenis alat transportasi yang ada	Dinas Perhubungan atau Dinas Lalu Lintas Jalan Raya setempat
		Sosial	jumlah kantong-kantong kemiskinan	Input bagi upaya jaring pengaman sosial masyarakat	Dinas Sosial setempat
		Pelayanan Standard perkotaan	Ketersediaan dinas pemadam kebakaran	Perlu dilihat juga kecukupan melayani persebaran kawasan permukiman dan kawasan komersial/industri	Dinas yang menangani Pemadam Kebakaran setempat
Kesehatan	Jumlah puskesmas	Menunjukkan kecukupan fasilitas kesehatan dalam melayani masyarakat	Dinas Kesehatan		
	Jumlah rumah sakit				

D. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan pemerintah daerah berguna untuk melihat dukungan terhadap kesempatan berusaha dan menggerakkan investasi daerah.

data yang dibutuhkan :

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Kebijakan Pemda	Peraturan Daerah (Perda)	Aturan perijinan dibidang usaha perdagangan	Menunjukkan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur sistem perdagangan, persaingan usaha dan tekanan terhadap petani	Perda-perda tentang atau yang terkait dengan perdagangan
			Aturan tentang penunjukkan badan tertentu dalam perdagangan komoditas pertanian		
			Aturan dibidang persaingan usaha		
			Aturan tentang keharusan menanam komoditas tertentu kepada petani		
		Perpajakan dan Retribusi	Aturan perpajakan daerah (pungutan/retribusi)	Mendeteksi adanya perda yang distorsif terhadap iklim usaha di daerah	Perda Pajak Daerah dan Retribusi
		Kepastian Hukum	Penegakan Hukum	Menunjukan Kepastian hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah	Analisis terhadap situasi kepastian hukum (bisa melalui survey atau FGD)
Konsistensi Peraturan					
Pungli di luar Birokrasi					

4.4. Sistem Keuangan/Perbankan

Sistem keuangan dalam hal ini berkaitan dengan aspek perbankan berguna untuk melihat kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan daerah sejauh mana mempengaruhi alokasi faktor produksi.

Data yang dibutuhkan:

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Perimbangan Masyarakat (lokal) Masyarakat (Asing)	Ratio / kredit DPK		Bank Indonesia
2	Kredit Perbankan	Plafon/rencana total (akumulasi)	Breakdown berdasarkan: -Sektor ekonomi - jenisPenggunaan: Investasi, Modal Kerja, Konsumsi. -UKM dan Non-UKM -Bentuk Bank	Mengetahui sektor prioritas yang menerima kredit perbankan	Bank Indonesia
		Realisasi total (akumulasi)			

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
		Kredit Baru (bulanan)			Bank Indonesia
3	Obligasi	Emisi Obligasi Korporasi			Bank Indonesia
		BPD			
		BUND lainnya			
		Emisi Obligasi PEMDA (municipal bonds)			
		Nilai kapitalisasi pasar obligasi - korporasi - Pemda			

4.5. Data Keamanan

Data tentang keamanan ini digunakan untuk melihat kepastian hukum dan gangguan keamanan yang terjadi di suatu daerah.

Data yang dibutuhkan:

No.	Variabel/Aspek	Data Dasar	Data Turunan	Keterangan	Sumber Data
1	Politik dan Keamanan	Tingkat kriminalitas	jumlah peristiwa kriminal diperinci menurut jenis kasus kriminal	Menunjukkan tingkat keamanan di suatu wilayah	Data Podes (BPS) atau Kepolisian setempat
		Perhatian terhadap hukum	Prosentase biaya penegakan hukum terhadap pengeluaran total daerah	Perhatian pemerintah terhadap penegakan hukum dan keamanan	APBD
		Konflik sosial	Jumlah peristiwa konflik sosial dalam setahun terakhir	Tingkat kerawanan sosial suatu wilayah	Dinas sosial atau yang sejenis

BAB V

TOOLS ANALISIS UNTUK PERENCANAAN

Pembahasan mengenai tool analisis untuk perencanaan pembangunan sangatlah luas cakupannya. Namun dengan menampilkannya sebagian dari tool-tool yang ada diharapkan akan memperkaya wawasan pengguna modul dan sekaligus dapat mempraktekkan secara langsung metode analisis yang berkaitan dengan data atau indikator yang ditampilkan.

Berbagai tool analisis yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan seringkali langsung berhubungan dengan indikator yang ada. Misalnya dengan menggunakan indikator investasi ingin dilakukan analisis mengenai efisiensi investasi di suatu wilayah. Dalam istilah umum seringkali tools analisis yang dimaksud dalam modul ini disebut sebagai indikator pembangunan. Misalnya ICOR (incremental Capital Output Ratio) walaupun dalam modul ini disebut sebagai tools analisis, dalam istilah umum juga dijadikan indikator pembangunan ekonomi. Jadi dalam penyebutan indikator dan tools analisis seringkali masih terjadi kerancuan.

Hal ini terjadi karena sebagai sebuah indikator memang seharusnya mengindikasikan perubahan dari suatu ukuran. Dan dalam prakteknya, indikator itu tidak selalu dapat diperoleh secara langsung dari data sekunder, melainkan harus dihitung terlebih dahulu dengan tools analisis tertentu.

Dalam modul ini tools analisis yang akan ditampilkan adalah tools yang sederhana dan umum digunakan dalam pembuatan perencanaan pembangunan, antara lain :

- LQ
- ICOR
- Shift Share
- Analisis Ketenagakerjaan
- dll

Selain itu juga akan diberikan indikator pembangunan lainnya, seperti

- IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
- IPD (Indikator Pembangunan Daerah)

5.1. LQ (LOCATION QUOTIENT)

LQ adalah suatu metode yang didasarkan pada teori basis ekonomi untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu region (kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan secara propinsi /nasional. Atau menghitung perbandingan antara share output sektor i di kabupaten terhadap share output sektor i di propinsi:

$$LQ_i = \frac{X_i^r / X^r}{X_i^n / X^n}$$

dengan X = output (PDRB); super skrip r = kabupaten dan n = propinsi.

$LQ > 1$ mengindikasikan adanya kegiatan ekspor bagi sektor tersebut atau sektor basis (B) dengan kata lain bahwa suatu daerah tersebut lebih berspesialisasi memproduksi sektor i dibanding wilayah di atasnya.

Sedangkan $LQ < 1$ disebut sektor non basis (NB) yang artinya bahwa suatu daerah tersebut tidak berspesialisasi memproduksi sektor i dibanding wilayah di atasnya.

Jika $LQ = 1$ mengindikasikan bahwa baik daerah tersebut maupun wilayah di atasnya sama-sama derajatnya memproduksi sektor i .

Dalam analisis LQ, ekonomi diasumsikan tertutup. Dengan demikian hasilnya hanya dapat digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi, tidak dapat digunakan untuk proyeksi kedepan.

Kunggulan Metode LQ

Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain

1. Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung
2. Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui trend.

Kelemahan Metode LQ

Beberapa kelemahan dari Metode LQ adalah :

1. Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah adalah identik dengan pola permintaan bangsa, bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional adalah sama dengan produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional.
2. Tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi.

6.2. COR (CAPITAL-OUTPUT RATIO)

Konsep capital-output ratio (COR) atau sering juga disebut *koefisien modal* menunjukkan hubungan antara besarnya investasi (modal) dengan nilai output. Konsep COR ini dikenal melalui teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar.

Konsep COR ini ada 2 macam yaitu *average capital-output ratio* (ACOR) dan *incremental capital-output ratio* (ICOR). ACOR menunjukkan, hubungan antara stok modal yang ada dengan aliran output lancar yang dihasilkan. Sedangkan ICOR menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan output/pendapatan (ΔY) yang disebabkan oleh kenaikan tertentu pada stok modal (ΔK). ICOR dapat digambarkan sebagai $\Delta K / \Delta Y$. atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ICOR} = \Delta K / \Delta Y$$

Dengan kata lain, ACOR menunjukkan hubungan antara segala sesuatu yang telah diinvestasikan pada masa lalu dengan keseluruhan pendapatan. Sedangkan ICOR menunjukkan segala sesuatu yang saat ini ditambahkan pada modal atau pendapatan. ACOR merupakan konsep statis, sementara ICOR merupakan konsep dinamis. Istilah COR sebagaimana sering digunakan dalam ilmu ekonomi biasanya berkaitan dengan ICOR. Nilai rasio ini biasanya bergerak antara 3 dan 4 dan menunjuk pada suatu periode waktu.

Konsep COR dapat diterapkan tidak hanya pada perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga di berbagai sektor perekonomian. Besarnya COR tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Pada sektor yang teknik produksinya bersifat padat modal, COR-nya akan tinggi. Sebaliknya sektor dengan teknik produksi padat karya COR-nya akan rendah. Sektor-sektor seperti transportasi, telekomunikasi, perhubungan, perumahan dan industri barang modal akan mempunyai COR sektoral yang relatif tinggi. Tingginya COR pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh besarnya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap output yang diinginkan. Dengan kata lain, sektorsektor tersebut merupakan sektor yang menggunakan teknik produksi yang bersifat lebih padat modal ketimbang sektorsektor lain. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sektor-sektor tersebut memiliki COR yang tinggi.

Sementara COR di sektor pertanian, industri barang konsumsi manufaktur (misalnya tekstil atau rokok), dan industri jasa pada umumnya relatif rendah. Rendahnya nilai COR tersebut merupakan konsekuensi dari teknik produksi yang relatif padat karya. sehingga kebutuhan modal yang diperlukan tidak seperti sektor-sektor yang

menggunakan teknik produksi yang cenderung lebih padat modal. Nilai COR keseluruhan dari suatu negara adalah rata-rata dari semua rasio sektoral tersebut.

6.3. SHIFT SHARE

Analisis shift-share dipergunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau propinsi.

Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa pergeseran struktur perekonomian daerah dalam hubungannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya maka perekonomian daerah tersebut akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

Data yang biasa dipergunakan untuk analisis shift-share adalah pendapatan per kapita (Y/P), PDRB (Y) atau Tenaga kerja (e) dengan tahun pengamatan pada rentang tertentu misalnya 1993-1997, 1997 - 2002.

Dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen :

1. Provincial share, dipakai untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kab/kota) dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi (Propinsi). Hasil perhitungan ini akan menggambarkan besarnya peranan wilayah propinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan propinsi maka peranannya terhadap propinsi tetap.
2. Proportional (Industry-Mix) Shift, adalah pertumbuhan Nilai Tambah Bruto suatu sektor i dibandingkan total sektor di tingkat propinsi..
3. Differential Shift (Sd), adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah (kabupaten) dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat propinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat.

Menurut Glasson (1977), mengkaji lebih jauh bahwa kedua komponen shift (S_p dan S_d) ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. S_p merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional(propinsi), sedangkan S_d adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan (Paul Sitohang, 1977).

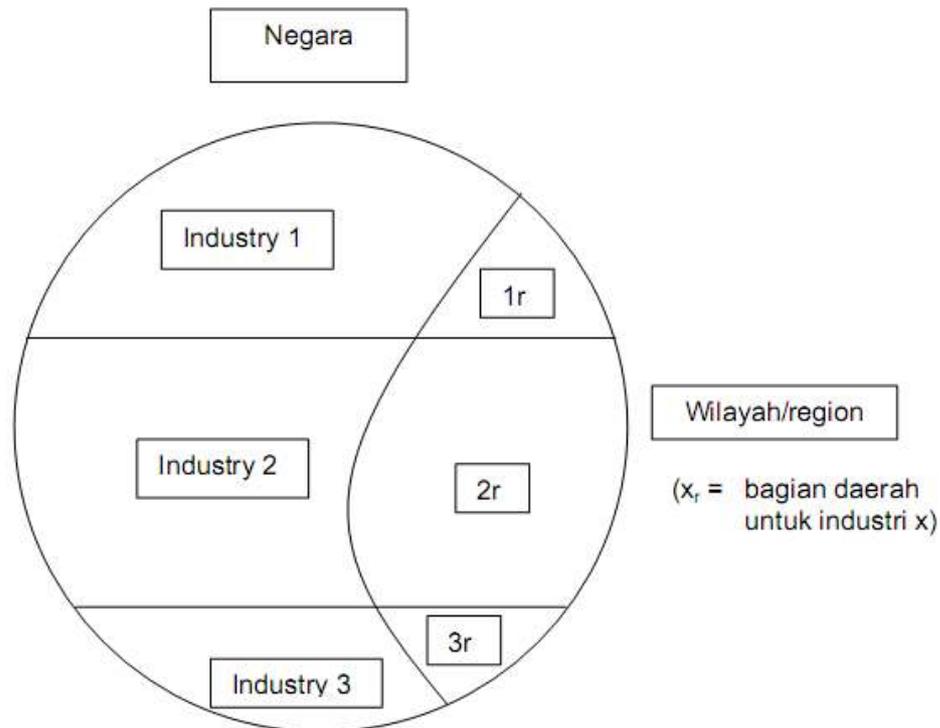
Apabila nilai S_d maupun S_p bernilai positif, menunjukkan bahwa sektor yang bersangkutan dalam perekonomian di daerah menempati posisi yang baik untuk daerah yang bersangkutan. Sebaliknya bilai nilainya negatif menunjukkan bahwa sektor tersebut dalam perekonomian masih memungkinkan untuk diperbaiki dengan membandingkannya terhadap struktur perekonomian propinsi (Harry W. Richardson, 1978, 202)

Untuk sektor-sektor yang memiliki differential shift yang positif maka sektor tersebut memiliki keunggulan dalam arti komparatif terhadap sektor yang sama di daerah lain. Dan untuk sektor-sektor yang memiliki proportional shift positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di daerah dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Apabila negatif maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif lamban.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional disebut pengaruh pangsa (share). Pertumbuhan atau perubahan perekonomian suatu daerah dianalisis dengan melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap variabel regional sektor/industri daerah yang diamati. Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan nasional yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah. Diharapkan bahwa apabila suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah.



Gambar 1
Diagram Konsep Mix dan Share



Sumber: Avrom (1991).

Mengenai pengaruh Bauran Industri (Industry Mix) dan pengaruh Regional Shares, kedua pengaruh tersebut dapat dijelaskan dengan Gambar 1. Untuk mempermudah pengertian, notasi-notasi yang ada diberikan contoh sebagai berikut.

1. Industri 1 → Sektor 1 di tingkat propinsi
2. Industri 2 → Sektor 2 di tingkat propinsi
3. Industri 3 → Sektor 3 di tingkat propinsi
4. 1r → Sektor 1 di Kabupaten r
5. 2r → Sektor 2 di Kabupaten r
6. 3r → Sektor 3 di Kabupaten r

Pengaruh Bauran Industri disebut *proportional shift* atau bauran komposisi. Analisis *proportional shift* dilakukan dengan membandingkan suatu sektor sebagai bagian dari perekonomian daerah dengan sektor tersebut sebagai bagian dari perekonomian nasional.

Komponen ini menunjukkan apakah aktivitas ekonomi pada sektor tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan aktivitas ekonomi secara nasional.

Pengaruh bauran industri akan positif apabila pertumbuhan variabel regional suatu sektor lebih besar daripada pertumbuhan variabel regional total sektor di tingkat nasional. Sebaliknya bauran industri akan negatif apabila pertumbuhan variabel regional suatu sektor lebih kecil dibandingkan pertumbuhan variabel tersebut di tingkat nasional. Nilai positif atau negatif tersebut akan menunjukkan tingkat spesialisasi suatu sektor, yaitu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat terhadap perekonomian nasional. Jadi, suatu daerah yang memiliki lebih banyak sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat secara nasional akan memiliki pengaruh bauran industri yang positif. Demikian juga sebaliknya, suatu daerah yang memiliki lebih banyak sektor-sektor yang tumbuh lebih lambat secara nasional akan memiliki pengaruh bauran industri yang negatif.

Secara matematis, Bauran Industri dapat diekspresikan sebagai berikut.

$$\frac{1_r}{1_r + 2_r + 3_r}, \frac{2_r}{1_r + 2_r + 3_r}, \frac{3_r}{1_r + 2_r + 3_r}$$

relatif terhadap

$$\frac{1}{1+2+3}, \frac{2}{1+2+3}, \frac{3}{1+2+3}$$

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka Bauran Industri Sektor 1 dianalisis dengan membandingkan Sektor 1 di Kabupaten r sebagai bagian dari perekonomian daerah dengan Sektor 1 sebagai bagian dari perekonomian propinsi. Apabila Sektor 1 adalah Sektor Pertanian, maka pengaruh Bauran Sektor Pertanian Kabupaten r adalah perbandingan antara nilai variabel regional Sektor Pertanian di Kabupaten r dibandingkan nilai variabel regional Sektor Pertanian secara propinsi.

Sementara itu, pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan differential shift atau regional share. Differential Shift menjelaskan tingkat kompetisi suatu aktivitas/sektor tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor tersebut

secara nasional. Komponen ini mengukur perubahan dalam suatu industri di suatu daerah karena adanya perbedaan antara pertumbuhan industri di daerah tersebut dengan pertumbuhan industri tersebut secara nasional. Differential Shift yang bernilai positif menunjukkan bahwa aktivitas sektor tersebut kompetitif.

Secara matematis, Regional Shares (differential shift) dapat diekspresikan sebagai berikut.

$$\frac{1_r}{1'} \frac{2_r}{2'} \frac{3_r}{3'}$$

Pada permulaan periode, yang relatif terhadap

$$\frac{1_r}{1'} \frac{2_r}{2'} \frac{3_r}{3'}$$

Pada akhir periode

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka Regional Shares Sektor 1 dianalisis dengan membandingkan variabel regional Sektor 1 di Kabupaten r dengan sektor yang sama di tingkat propinsi.

Dengan demikian, analisis Shift-share akan dapat memberikan dua indikator positif sebagai berikut.

1. suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang berkembang secara nasional (industry-mix effect)
2. sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor tersebut (competitive advantage effect)

Model Analisis Shift-share

Dalam uraian berikut akan dijelaskan model analisis Shift-share klasik beserta modifikasinya.

Analisis Shift-share Klasik

Secara ringkas, dengan analisis Shift-share dapat dijelaskan bahwa perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif (Bendavid-Val, 1983; Hoover, 1984).

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

D_{ij} : perubahan suatu variabel regional sektor i di wilayah j dalam kurun waktu tertentu

N_{ij} : komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j

M_{ij} : bauran industri sektor i di wilayah j

C_{ij} : keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j

Bila analisis itu diterapkan pada variabel regional, misalnya kesempatan kerja, maka tiap komponen dapat didefinisikan sebagai berikut.

Perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah tertentu juga merupakan perubahan antara kesempatan kerja pada tahun akhir analisis dengan kesempatan kerja pada tahun dasar.

$$D_{ij} = E^*_{ij} - E_{ij}$$

Keterangan:

E^*_{ij} : kesempatan kerja sektor i di wilayah j pada tahun akhir analisis

E_{ij} : kesempatan kerja sektor i di wilayah j pada tahun dasar.

Komponen pertumbuhan nasional suatu sektor di suatu wilayah menunjukkan bahwa kesempatan kerja tumbuh sesuai dengan laju pertumbuhan nasional.

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n$$

Keterangan:

r_n : laju pertumbuhan propinsi

Komponen bauran industri suatu sektor di suatu wilayah menunjukkan bahwa kesempatan kerja tumbuh sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan sektor tersebut di tingkat propinsi dengan laju pertumbuhan propinsi. Sementara itu, komponen keunggulan kompetitif suatu sektor di suatu wilayah merupakan kesempatan kerja yang tumbuh sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan sektor tersebut di wilayah tersebut dengan laju pertumbuhan sektor tersebut secara propinsi.

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan:

r_n : laju pertumbuhan propinsi

r_{in} : laju pertumbuhan sektor i wilayah j

Masing-masing laju pertumbuhan didefinisikan sebagai berikut.

1. mengukur laju pertumbuhan sektor i di wilayah j

$$r_{ij} = (E^*_{ij} - E_{ij}) / E_{ij}$$

2. mengukur laju pertumbuhan sektor i perekonomian nasional

$$r_{in} = (E^*_{in} - E_{in}) / E_{in}$$

3. mengukur laju pertumbuhan propinsi

$$r_n = (E^*_n - E_n) / E_n$$

Keterangan:

E_{in}^* : kesempatan kerja sektor i di tingkat propinsi pada tahun terakhir analisis

E_{in} : kesempatan kerja sektor i di tingkat propinsi pada suatu tahun dasar tertentu

E_n^* : kesempatan kerja propinsi pada tahun terakhir analisis

E_n : kesempatan kerja propinsi pada suatu tahun dasar tertentu

Untuk suatu wilayah, pertumbuhan propinsi, bauran industri, dan keunggulan kompetitif dapat ditentukan bagi suatu sektor (i) atau dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah.

Persamaan Shift-share untuk sektor i di wilayah j adalah :

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot r_n + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Persamaan ini membebankan tiap sektor wilayah dengan laju pertumbuhan yang setara dengan laju yang dicapai oleh perekonomian nasional selama kurun waktu analisis. Persamaan diatas menunjukkan bahwa semua wilayah dan sektor-sektor sebaiknya memiliki tingkat pertumbuhan yang paling kecil sama dengan laju pertumbuhan propinsi (r_n).

Perbedaan antara pertumbuhan suatu variabel wilayah dengan pertumbuhan propinsi merupakan net gain atau net loss (atau shift) wilayah bersangkutan (Supomo, 1993).

Bila tiap komponen (pengaruh) Shift-share dijumlahkan untuk semua sektor, maka tanda hasil penjumlahan itu akan menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah kesempatan kerja tingkat propinsi. Pengaruh bauran industri total akan positif/negatif/nol di semua wilayah bila kesempatan kerja suatu sektor tumbuh di atas/di bawah/sama dengan kesempatan kerja tingkat propinsi. Demikian pula, pengaruh keunggulan kompetitif total akan positif/negatif/nol di wilayah-wilayah, dimana kesempatan kerja berkembang lebih cepat/lebih lambat atau sama dengan pertumbuhan kesempatan kerja sektor yang bersangkutan di tingkat propinsi.

Keunggulan Analisis Shift-Share

Ada beberapa keunggulan dari analisis shift share, antara lain :

1. Analisis shift share adalah sederhana, tetapi secara mudah memberikan gambaran kepada kita akan perubahan struktur ekonomi yang terjadi.

2. Bagi seorang pemula dalam mempelajari struktur perekonomian akan terbantu dengan cepat.
3. Gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur yang diberikan cukup akurat.

Kelemahan analisis Shift-Share

Ada beberapa kelemahan analisis shift-share yaitu:

- Hanya bisa digunakan untuk analisis ex-post.
- Masalah Benchmark berkenaan dengan homothetic change, apakah t, t+1 tidak dapat dijelaskan dengan baik.
- Ada data di tengah tahun pengamatan periode waktu yang tidak terungkap.
- Analisis ini sangat berbahaya untuk alat peramalan, mengingat bahwa regional shift tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
- Tidak bisa dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor.
- Tidak ada keterkaitan antar daerah.

5.4. Ketenagakerjaan

A. Jumlah Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*) penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 10 tahun atau lebih atau akhir-akhir ini menjadi penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah: sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).



Klasifikasi Penduduk Menurut Ketenagakerjaan (ILO) Angkatan kerja dibedakan dua, yaitu:

- penduduk yang bekerja (sering disebut pekerja), dan
- penduduk yang tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan.

Dengan demikian angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan besarnya angkatan kerja adalah TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dengan tenaga kerja.

B. Produktivitas Pekerja

Produktivitas pekerja dapat diukur dengan menggunakan produktivitas rata-rata pekerja, yang menyatakan rasio nilai tambah dengan jumlah pekerja. Produktivitas pekerja juga dapat diukur dengan ukuran yang lebih baik, yaitu produktivitas marjinal pekerja yang menyatakan besarnya balas jasa terhadap kenaikan produktivitas pekerja. Apabila pekerja dibayar sesuai dengan produktivitas marjinalnya, maka upah merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan produktivitas pekerja.

Secara praktis untuk mengukur produktivitas pekerja dapat menggunakan data nilai tambah suatu daerah yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

5.5. INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

a. Pengertian umum

Indikator Pembangunan Daerah adalah suatu konsep ukuran pembangunan. Dengan demikian, IPD haruslah dapat diukur berdasarkan indikator-indikator yang tersedia. Ketiga konsep pembangunan yang dijadikan kriteria di atas adalah sesuatu konsep pembangunan yang sifatnya abstrak. Untuk itu kita perlu mengurangi 'kadar' keabstrakannya tersebut agar dapat sampai kepada sesuatu yang sifatnya riil dan terukur. Masing-masing kriteria diatas dapat dipecah-pecah lagi menurut beberapa aspek/unsur. Misalkan untuk kriteria Keberdayaan pemerintahan, aspek-aspek yang tercakup didalamnya seperti kemampuan dan kualitas aparat pemerintahan itu sendiri, atau sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat untuk melayani masyarakat, atau kita juga dapat melihat dari aspek besarnya

kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam usahanya melakukan pembangunan dan melayani masyarakat.

Begitu pula dengan kedua kriteria pembangunan yang lain. Setiap kriteria pembangunan, pada dasarnya dapat kita lihat dari berbagai aspek. Aspek-aspek yang menjelaskan kriteria-kriteria tersebut disebut subkriteria.

Untuk kriteria **Keberdayaan Pemerintah** memiliki subkriteria :

- Kapabilitas Aparat
- Keuangan Daerah
- Sarana dan Prasarana Pemerintah

Untuk kriteria **Perkembangan Wilayah** memiliki sub kriteria:

- Fasilitas Publik
- Ekonomi Wilayah
- Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam.

Sedangkan kriteria yang terakhir, yaitu Keberdayaan Masyarakat memiliki sub kriteria:

- Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Kesejahteraan masyarakat
- Sosial, Politik dan Budaya

b. Definisi dari Kriteria dan Sub Kriteria

Definisi untuk **Keberdayaan Pemerintah** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya dan atau hasil pemberdayaan pemerintah (*reinventing government*) di suatu daerah. Sedangkan **Perkembangan Wilayah** definisinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi ekonomi wilayah, penyediaan fasilitas publik dan potensi fisik dan lingkungan suatu daerah. Sedangkan untuk kriteria yang terakhir yaitu **Keberdayaan Masyarakat** definisinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya dan hasil pemberdayaan masyarakat di suatu daerah.

Kriteria yang pertama yaitu **Keberdayaan Pemerintah** memiliki subkriteria **Kapabilitas Aparat**, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan dan kemampuan aparat pemerintah di suatu daerah. Sedangkan sub kriteria yang kedua yakni **Keuangan Daerah** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan di suatu daerah. Sub kriteria terakhir adalah **Sarana dan Prasarana Pemerintah** yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas

bagi kelancaran pemerintahan daerah.

Kriteria yang kedua yaitu **Perkembangan Wilayah** memiliki subkriteria **Fasilitas Publik**, yaitu sarana dan prasarana publik yang tersedia di suatu daerah. Sub kriteria yang kedua adalah **Ekonomi Wilayah** yang memiliki definisi potensi dan hasil dari kegiatan ekonomi dan industri di suatu daerah.

Sedangkan yang terakhir adalah **Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**, memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, kondisi geografis dan masalah lingkungan hidup.

Kriteria yang terakhir yakni **Keberdayaan Masyarakat** memiliki subkriteria **Kependudukan dan Ketenagakerjaan** yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi penduduk dan tenaga kerja di suatu daerah. Subkriteria yang kedua adalah **Kesejahteraan Masyarakat** yang memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan mutu hidup masyarakat di suatu daerah. Sedangkan **Sosial, Politik dan Budaya** adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bidang sosial politik dan budaya di suatu daerah.

Berikut ini adalah indikator-indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang di atas.

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai **Kapabilitas Aparat** adalah:

1. Indikator Pendidikan PNS
2. Indikator Jumlah PNS
3. Indikator Kreativitas PNS

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai **Keuangan Daerah** adalah:

1. Indikator *Tax Effort*
2. Indikator Investasi Pemerintah
3. Indikator Transfer Pusat

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai **Sarana dan Prasarana Pemerintahan** adalah:

1. Indikator Belanja Non Pegawai
2. Indikator Rentang Kendali Desa
3. Indikator Sarana Komunikasi

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai **Fasilitas Publik**:

1. Indikator Pelayanan Kesehatan
2. Indikator Pelayanan Pendidikan
3. Indikator Pelayanan Jalan

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai **Ekonomi Wilayah**:

1. Indikator PDRB per kapita
2. Indikator ICOR
3. Indikator Akses Keuangan

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai **Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam**:

1. Indikator Kawasan Lindung
2. Indikator Pencemaran Air
3. Indikator Pencemaran Udara

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai **Kependudukan dan Ketenagakerjaan** adalah :

1. Indikator TPAK
2. Indikator Kompetitif Tenaga Kerja
3. Indikator Kualitas Tenaga Kerja

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai **Kesejahteraan Masyarakat**:

1. Indikator Penduduk Miskin
2. Indikator Angka Kematian Bayi
3. Indikator Konsumsi Non Makanan

Indikator-indikator untuk menilai **Sosial, Politik dan Budaya**:

1. Indikator Aktivitas Sosial
2. Indikator Pengaman Sosial
3. Indikator Partisipasi Pemuda

5.6. PERANGKAT ANALISIS BIDANG PERTANIAN

Model yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan sektor pertanian di daerah adalah pendekatan/taksiran pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) sektor pertanian. Taksiran pertumbuhan sektor pertanian tahun ke-t dihitung dengan pendekatan produksi dari kondisi PDRB tahun sebelumnya (t-1) atas dasar harga yang berlaku (*current price*). Dalam pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun. Perhitungan nilai tambah produksi tahun ke-t dilakukan taksiran laju pertumbuhan produksi dan harga atau nilai produksi tahun ke-t dari masing-masing komoditi (sub sektor). Nilai nominal tahun ke-t dari masing-masing komoditi diperoleh dari nilai penjumlahan nilai nominal tahun ke t-1 dan nilai tambah pada tahun ke-t. dengan cara serupa

akan diperoleh nilai nominal menurut sub sektor dan sektor pertanian. Laju pertumbuhan tahun ke-t dihitung dalam nilai konstan dengan menggunakan dasar nilai PDRB tahun ke t-1 pada harga konstan. PDB nasional sektor pertanian merupakan penjumlahan (agregasi) dari PDRB sektor pertanian secara keseluruhan.

Perhitungan Nilai Investasi di sektor Pertanian

Perhitungan teknis:

1. taksiran pertumbuhan sektor pertanian di daerah tahun ke-t dihitung dengan pendekatan produksi dari kondisi PDRB tahun sebelumnya (t-1) atas dasar harga yang berlaku
2. perhitungan nilai tambah produksi tahun ke-t dilakukan dari taksiran laju pertumbuhan produksi dan harga atau nilai produksi tahun ke-t dari masing-masing komoditi.
3. nilai nominal tahun ke-t dari masing-masing komoditi diperoleh dari penjumlahan nilai nominal tahun ke-t dan nilai tambah pada tahun ke-t
4. dengan cara serupa akan diperoleh nilai nominal menurut sub sektor dan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan, dll) pada tahun ke-t
5. laju pertumbuhan tahun ke-t dihitung dalam nilai konstan dengan menggunakan dasar nilai PDRB tahun ke-(t-1) pada harga konstan.
6. Bila dikaitkan dengan besarnya investasi yang dibutuhkan maka rumusnya :

$$\text{ICOR} = \text{dI/dY, atau } \text{dI} = \text{ICOR} * \text{dY}$$

Dengan demikian besaran ICOR sangat menentukan besarnya investasi di sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan bahwa ICOR sektor pertanian berada pada kisaran 0,8 - 1,4

Interpretasi Hasil Perhitungan

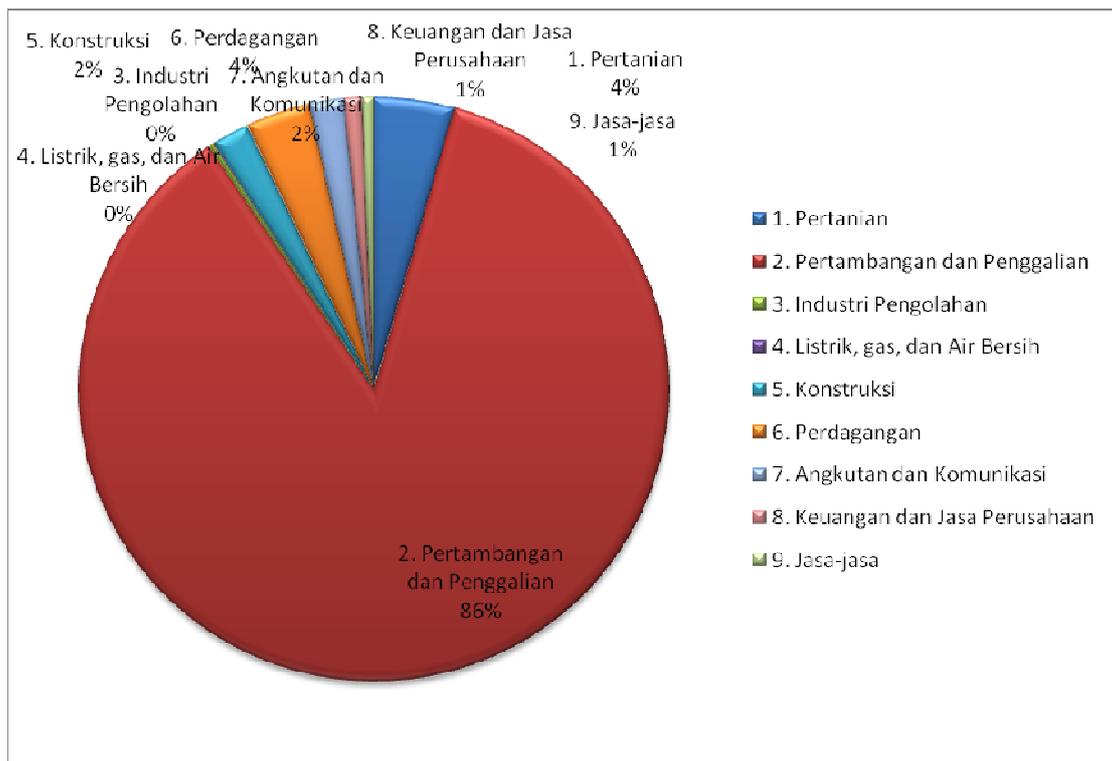
Dengan skenario beberapa nilai ICOR dan target pertumbuhan sektoral di daerah (PDRB) yang ingin dicapai, maka melalui rumus di atas dapat dihitung berapa besarnya nilai investasi yang dibutuhkan.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Kutai Timur

Perubahan struktur perekonomian Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Perubahan struktur perekonomian yang ditunjukkan dengan kontribusi sector ekonomi terhadap nilai PDRB digunakan sebagai salah satu ukuran dalam perekonomian regional Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, dengan mencermati struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat diketahui potensi ekonomi yang menjadi karakteristik wilayah tersebut.

Gambar 6.1. Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 (persen)



Secara umum di Kabupaten Kutai Timur, yang memberikan kontribusi sektoral terbesar hanyalah sector Pertambangan dan Penggalian hingga 86,17 persen. Selanjutnya sektor pertanian 4,39 persen, perdagangan 3,53 persen, konstruksi 1,98 persen dan sector angkutan dan komunikasi sebesar 1,90 persen. Selebihnya hanya memberi kontribusi dibawah 1 persen.

Tabel 6.1. Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur 2000-2008 (%)

Sektor Ekonomi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian	5.23	4.29	8.30	8.90	6.00	5.49	4.79	5,04	4.39
2. Pertambangan dan Penggalian	86.20	85.49	76.78	74.69	81.59	82.48	84.47	84,24	86.17
3. Industri Pengolahan	0.36	0.32	0.60	0.75	0.58	0.53	0.42	0.38	0.29
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	0.07	0.08	0.13	0.21	0.16	0.16	0.14	0.14	0.11
5. Konstruksi	0.65	2.42	5.10	4.94	3.36	2.90	2.60	2.60	1.98
6. Perdagangan	3.71	3.58	4.08	4.33	3.83	3.76	3.62	3.55	3.53
7. Angkutan dan Komunikasi	1.84	1.96	2.30	2.63	1.96	2.37	2.00	2.10	1.90
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	1.27	1.26	1.58	2.00	1.42	1.30	1.12	1.17	0.98
9. Jasa-jasa	0.65	0.60	1.13	1.56	1.10	1.03	0.84	0.68	0.65
TOTAL	100,00	100.00							

Sektor pertambangan dan penggalian sejak berdirinya Kabupaten Kutai Timur selalu memberikan kontribusi yang dominan, bahkan ada kecenderungan selalu meningkat. Sejak tahun 2000 hingga 2008, tidak ada perubahan pola kontribusi sektoral yang signifikan. Sektor pertanian yang pada tahun 2002-2003 memberikan kontribusi yang relative besar, tetapi tahun-tahun berikutnya justru selalu mengalami penurunan. Penurunan sektor pertanian diiringi dengan kenaikan sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 6.2. Perbandingan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur dan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (%)

Sektor Ekonomi	Kutai Timur	Kalimantan Timur
1. Pertanian	4.39	4,97
2. Pertambangan dan Penggalian	86.17	45,83
3. Industri Pengolahan	0.29	34,26
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	0.11	0,23
5. Konstruksi	1.98	2,13
6. Perdagangan	3.53	5,74
7. Angkutan dan Komunikasi	1.90	2,97
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	0.98	1,79
9. Jasa-jasa	0.65	2,09
TOTAL	100.00	100,00

Jika di Kutai Timur, sektor dominan adalah pertambangan dan penggalian maka di Propinsi Kalimantan Timur sektor yang dominan juga pertambangan dan penggalian dan sektor industry pengolahan. Sektor lainnya hanya berkontribusi 0 – 5 persen.

6.2. Analisis Location Quotient (LQ)

Penentuan komoditas unggulan nasional dan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi era globalisasi. Langkah menuju efisiensi dapat ditempuh dengan fokus pada pengembangan sektor ekonom yang mempunyai keunggulan komparatif terhadap daerah lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan adalah metode Location Quotient (LQ).

Metode Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. Secara matematik, Location Quotient atau lebih populer disebut dengan LQ diformulasikan sebagai perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Analisis LQ salah satunya dilakukan untuk menentukan sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. Walaupun pada perkembangannya analisis LQ juga digunakan dengan berbasis pada data tenaga kerja dan pendapatan.

Secara matematis, LQ diformulasikan sebagai berikut:

$$LQ = (ntb_i / pdrb) / (NTB_i / PDRB),$$

dimana:

ntb_i : Nilai tambah bruto sektor i di suatu daerah yang lebih kecil

$pdrb_i$: PDRB daerah yang lebih kecil

NTB_i : Nilai tambah bruto sektor i di suatu daerah yang lebih luas

$PDRB_i$: PDRB daerah yang lebih luas

Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi sektor basis antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit.

Sedangkan kelemahannya adalah analisis LQ tidak bisa menjawab apa yang menyebabkan sebuah sektor menjadi sektor unggulan. Selain itu, dalam analisis LQ juga diperlukan data pembandingan antara dua wilayah pada periode yang sama.

Tabel 6.3. PDRB Sektoral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008

Sektor Ekonomi	PDRB KUTAI TIMUR				
	2000	2001	2002	2003	2004
1. Pertanian	287.474,21	303.364,51	580.461,44	568.176,99	591.872,96
2. Pertambangan dan Penggalian	4.735.701,68	6.044.022,90	5.367.507,83	4.769.292,87	8.051.312,20
3. Industri Pengolahan	20.008,60	22.848,06	41.675,34	47.608,46	56.802,07
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	3.942,44	5.362,67	9.331,77	13.258,70	15.522,87
5. Konstruksi	35.941,79	170.986,42	356.282,45	315.747,76	331.535,15
6. Perdagangan	203.845,40	253.344,17	285.410,25	276.519,90	378.380,96
7. Angkutan dan Komunikasi	101.197,56	138.357,81	160.801,12	167.665,51	193.818,36
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	69.657,75	89.215,30	110.596,41	127.863,25	140.338,43
9. Jasa-jasa	35.813,97	42.219,13	79.110,08	99.374,38	108.736,05
TOTAL	5.493.583,40	7.069.720,96	6.991.176,69	6.385.507,82	9.868.319,05

Lanjutan.

Sektor Ekonomi	PDRB KUTAI TIMUR			
	2005	2006	2007r	2008*
1. Pertanian	675,792.51	778,640.98	926,800.21	1,066,664.71
2. Pertambangan dan Penggalian	10,157,143.08	13,738,501.55	15,494,749.78	21,355,307.66
3. Industri Pengolahan	64,749.58	68,126.17	69,330.65	71,141.18
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	19,240.68	23,418.23	25,697.02	27,590.11
5. Konstruksi	356,925.82	422,778.63	477,423.80	482,229.74
6. Perdagangan	463,196.48	589,485.67	652,461.65	872,083.70
7. Angkutan dan Komunikasi	291,685.90	325,105.26	385,803.52	461,435.07
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	159,495.95	181,991.80	215,321.71	237,952.62
9. Jasa-jasa	127,067.70	136,584.82	146,606.31	157,187.86
TOTAL	12,315,297.69	16,264,633.10	18,394,194.66	24,731,592.65

Tabel 6.4. PDRB Sektoral Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 - 2008

Sektor Ekonomi	PDRB KALTIM				
	2000	2001	2002	2003	2004
1. Pertanian	4.634.364	5.194.855	6.674.436	7.439.130	8.502.194
2. Pertambangan dan Penggalian	25.118.848	28.378.848	32.206.172	40.364.120	52.958.076
3. Industri Pengolahan	33.292.126	38.350.585	37.574.394	38.938.178	49.037.351
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	143.964	181.691	255.677	344.977	408.711
5. Konstruksi	1.395.631	1.733.227	2.787.809	3.128.026	3.539.046
6. Perdagangan	4.389.401	5.270.435	6.247.116	6.805.545	8.497.520
7. Angkutan dan Komunikasi	4.173.338	4.584.606	3.666.178	4.266.235	4.839.901
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	965.760	1.111.364	1.947.552	2.185.915	2.605.081
9. Jasa-jasa	900.027	1.219.148	2.410.594	2.981.468	3.316.193
TOTAL	75.013.459	86.024.759	93.769.927	106.453.595	133.704.074

Lanjutan.

Sektor Ekonomi	PDRB KALTIM			
	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian	9.535.872	10.792.274	13.519.394	15.663.601
2. Pertambangan dan Penggalian	76.699.235	83.608.302	95.606.495	144.474.651
3. Industri Pengolahan	65.988.813	71.805.685	74.879.047	107.982.253
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	536.350	584.252	650.628	715.026
5. Konstruksi	4.045.187	4.681.260	5.711.714	6.711.578
6. Perdagangan	10.463.894	12.746.465	14.698.058	18.081.799
7. Angkutan dan Komunikasi	6.023.522	6.910.832	7.885.269	9.360.582
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	3.028.656	3.491.324	4.540.329	5.632.969
9. Jasa-jasa	3.967.560	4.967.731	5.873.718	6.597.904
TOTAL	180.289.090	199.588.125	223.364.652	315.220.363

Tabel 6.5. Nilai Tambah Bruto Sektoral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008

Sektor Ekonomi	NTB KUTAI TIMUR									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1. Pertanian	5,23	4,29	8,30	8,90	6,00	5,49	4,79	5,04	4,31	
2. Pertambangan dan Penggalian	86,20	85,49	76,78	74,69	81,59	82,48	84,47	84,24	86,35	
3. Industri Pengolahan	0,36	0,32	0,60	0,75	0,58	0,53	0,42	0,38	0,29	
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	0,07	0,08	0,13	0,21	0,16	0,16	0,14	0,14	0,11	
5. Konstruksi	0,65	2,42	5,10	4,94	3,36	2,90	2,60	2,60	1,95	
6. Perdagangan	3,71	3,58	4,08	4,33	3,83	3,76	3,62	3,55	3,53	
7. Angkutan dan Komunikasi	1,84	1,96	2,30	2,63	1,96	2,37	2,00	2,10	1,87	
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	1,27	1,26	1,58	2,00	1,42	1,30	1,12	1,17	0,96	
9. Jasa-jasa	0,65	0,60	1,13	1,56	1,10	1,03	0,84	0,80	0,64	
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Tabel 6.6. Nilai Tambah Bruto Sektoral Prop Kalimantan Timur Tahun 2000 - 2008

Sektor Ekonomi	NTB KALTIM									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1. Pertanian	6,18	6,04	7,12	6,99	6,36	5,29	5,41	6,05	4,97	
2. Pertambangan dan Penggalian	33,49	32,99	34,35	37,92	39,61	42,54	41,89	42,80	45,83	
3. Industri Pengolahan	44,38	44,58	40,07	36,58	36,68	36,60	35,98	33,52	34,26	
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	0,19	0,21	0,27	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,23	
5. Konstruksi	1,86	2,01	2,97	2,94	2,65	2,24	2,35	2,56	2,13	
6. Perdagangan	5,85	6,13	6,66	6,39	6,36	5,80	6,39	6,58	5,74	
7. Angkutan dan Komunikasi	5,56	5,33	3,91	4,01	3,62	3,34	3,46	3,53	2,97	
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	1,29	1,29	2,08	2,05	1,95	1,68	1,75	2,03	1,79	
9. Jasa-jasa	1,20	1,42	2,57	2,80	2,48	2,20	2,49	2,63	2,09	
TOTAL	100,00									

Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung nilai LQ tahun 2000-2008 sebagai berikut :

Tabel 6.7. Nilai LQ Sektoral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 dan 2008

Sektor Ekonomi	LQ								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian	0,85	0,71	1,17	1,27	0,94	1,04	0,89	0,83	0,87
2. Pertambangan dan Penggalian	2,57	2,59	2,24	1,97	2,06	1,94	2,02	1,97	1,88
3. Industri Pengolahan	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	0,37	0,36	0,49	0,64	0,51	0,53	0,49	0,48	0,49
5. Konstruksi	0,35	1,20	1,71	1,68	1,27	1,29	1,11	1,02	0,92
6. Perdagangan	0,63	0,58	0,61	0,68	0,60	0,65	0,57	0,54	0,61
7. Angkutan dan Komunikasi	0,33	0,37	0,59	0,66	0,54	0,71	0,58	0,59	0,63
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	0,98	0,98	0,76	0,98	0,73	0,77	0,64	0,58	0,54
9. Jasa-jasa	0,54	0,42	0,44	0,56	0,44	0,47	0,34	0,30	0,30
TOTAL									

Berdasarkan hasil analisis LQ Kabupaten Kutai Timur dibandingkan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sektor pertambangan dan Penggalian di Kutai Timur memiliki kemampuan yang relatif jauh lebih tinggi dibanding sektor yang sama di tingkat Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2000. Hal tersebut bisa dilihat melalui nilai LQ yang sebesar 2,57. Salah satu penyebabnya karena Kutai Timur merupakan wilayah pertambangan. Misalnya di wilayah Sangkima terdapat kandungan minyak dan gas bumi. Di Sengatta Utara terdapat pertambangan Batu Bara. Di wilayah Muara Ancalong, Muara Wahau dan Telen terdapat pertambangan dan penggalian Emas. Dan masih banyak lagi wilayah lain yang kandungan batu bara dan minyak dan gas bumi melimpah.

Nilai LQ sebesar 2,57 artinya bahwa proporsi penciptaan nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur 2,57 kali lebih besar daripada proporsi penciptaan nilai tambah sektor yang sama di Propinsi Kalimantan Timur. Nilai tambah ini cenderung menurun hingga tahun 2008 nilai LQ menjadi sebesar 1,88. Selain sektor pertambangan dan Penggalian, proporsi penciptaan nilai tambah sektoral di Kabupaten Kutai Timur yang mengalami penurunan adalah sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-Jasa. Sektor yang lainnya mengalami kenaikan. Sektor pertanian yang sedang digalakkan, dibanding tahun 2000, hanya mengalami kenaikan nilai LQ sebesar 0,02. Hasil penghitungan LQ selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.7.

6.3. Analisis Shift Share

Konsep dasar Shift Share berkaitan dengan kebijakan anggaran, Pemerintah Daerah perlu untuk menentukan sektor-sektor prioritas agar kebijakan pengeluaran yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana.

Namun demikian, pemerintah daerah sering dihadapkan pada kendala keterbatasan data dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, analisis Shift-share dapat menjadi salah satu alternatif.

Analisis Shift-share dapat membantu para pengambil kebijakan (pemerintah daerah) untuk membuat keputusan dengan mudah. Hal ini dikarenakan analisis Shift-share memiliki metode yang sederhana dan mudah digunakan untuk menggambarkan perubahan ekonomi suatu daerah. Selain itu, data yang dibutuhkan untuk menganalisis juga relatif mudah didapatkan.

Analisis Shift-share merupakan suatu analisis dengan metode yang sederhana dan sering dilakukan oleh praktisi dan pembuat keputusan baik lokal maupun regional di seluruh dunia untuk menetapkan target industri/sektor dan menganalisis dampak ekonomi. Analisis Shift-share memungkinkan pelaku analisis untuk dapat mengidentifikasi keunggulan daerahnya dan menganalisis industri/sektor yang menjadi dasar perekonomian daerah.

Analisis Shift-share juga merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian regional maupun lokal.

Analisis Shift-share menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian wilayah yang lebih besar/propinsi. Bila suatu daerah memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian propinsi, maka akan dapat ditemukan adanya shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah. Selain itu, laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah akan dibandingkan dengan laju pertumbuhan perekonomian propinsi beserta sektor-sektornya. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari perbandingan tersebut. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut (Soepono, 1993:44)

Analisis Shift-share dikembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943). Analisis ini digunakan untuk menganalisis perubahan ekonomi (misalnya pertumbuhan atau

perlambatan pertumbuhan) suatu variabel regional sektor/industri dalam suatu daerah. Variabel atau data yang dapat digunakan dalam analisis adalah tenaga kerja atau kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan variabel lain dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 6.8 PDRB Sektoral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 dan 2008

Sektor Ekonomi	Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur			
	2000	2008 (Juta Rp)	Perubahan	
	(Juta Rp) Eij	Eij	Absolut (Juta Rp)	Persen
1. Pertanian	287.474,21	1.066.664,71	779.191	271,05
2. Pertambangan dan Penggalian	4.735.701,68	21.355.307,66	16.619.606	350,94
3. Industri Pengolahan	20.008,60	71.141,18	51.133	255,55
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	3.942,44	27.590,11	23.648	599,82
5. Konstruksi	35.941,79	482.229,74	446.288	1.241,70
6. Perdagangan	203.845,40	872.083,70	668.238	327,82
7. Angkutan dan Komunikasi	101.197,56	461.435,07	360.238	355,97
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	69.657,75	237.952,62	168.295	241,60
9. Jasa-jasa	35.813,97	157.187,86	121.374	338,90
TOTAL	5.493.583,40	24.731.592,65	19.238.009	350,19

Tabel 6.9 PDRB Sektoral Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 dan 2008

Sektor Ekonomi	Nilai PDRB Propinsi Kalimantan Timur			
	2000 (Juta Rp)	2008 (Juta Rp)	Perubahan	
	Eij	Eij	Absolut	Persen
1. Pertanian	4,634,364	15,663,601	11,029,237	237.99
2. Pertambangan dan Penggalian	25,118,848	144,474,651	119,355,803	475.16
3. Industri Pengolahan	33,292,126	107,982,253	74,690,127	224.35
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	143,964	715,026	571,062	396.67
5. Konstruksi	1,395,631	6,711,578	5,315,947	380.90
6. Perdagangan	4,389,401	18,081,799	13,692,398	311.94
7. Angkutan dan Komunikasi	4,173,338	9,360,582	5,187,244	124.29
8. Keuangan dan Jasa Pershan	965,760	5,632,969	4,667,209	483.27
9. Jasa-jasa	900,027	6,597,904	5,697,877	633.08
TOTAL	75,013,459	315,220,363	240,206,904	320.22

Analisis Shift-share untuk perekonomian Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan menggunakan variabel regional PDRB sektoral Kabupaten Kutai Timur dan PDRB sektoral Propinsi Kalimantan Timur tahun 2000 dan 2008. Nilai PDRB sektoral



Kabupaten Kutai Timur tahun 2000 dan 2008 disajikan dalam Tabel 6.8. Pada Tabel 6.8, nilai PDRB sektoral Kabupaten Kutai Timur dihitung perubahannya, yaitu selisih antara nilai PDRB tahun dasar dengan tahun analisis. Hal yang sama dilakukan juga pada nilai PDRB Propinsi Kalimantan Timur, disajikan pada Tabel 6.9. Berdasarkan data tersebut, nilai PDRB sektoral Kabupaten Kutai Timur telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar 19 triliun rupiah atau sebesar 350 persen. Sedangkan perekonomian propinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 240 triliun rupiah atau sebesar 320 persen.

Tabel 6.10 Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kutai Timur dan Kalimantan Timur 2008 (dalam persen)

Sektor Ekonomi	Laju Pertumbuhan		
	sektor i di Kutai Timur	sektor i di Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
	r_{ij}	r_{in}	r_n
1. Pertanian	2,71	2.38	3.63
2. Pertambangan dan Penggalian	3,51	4.75	3.63
3. Industri Pengolahan	2,56	2.24	3.63
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	6,00	3.97	3.63
5. Konstruksi	12,42	3.81	3.63
6. Perdagangan	3,28	3.12	3.63
7. Angkutan dan Komunikasi	3,56	1.24	3.63
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	2,42	4.83	3.63
9. Jasa-jasa	3,39	6.33	3.63
JUMLAH	39,83	32.68	32.67

Analisis Shift-share mensyaratkan untuk menghitung laju pertumbuhan variabel regional yang dianalisis (PDRB sektoral) baik dalam perekonomian daerah maupun dalam perekonomian wilayah. Selain itu, dihitung juga laju pertumbuhan untuk perekonomian tingkat wilayah. Tabel 6.10 menyajikan perhitungan tersebut.

Setelah rumus dasar yang diperlukan dalam analisis Shift-share dihitung, masing-masing komponen pembentuk rumus dapat dihitung.

Tabel 6.11. Analisis Shift-share Klasik untuk Kabupaten Kutai Timur, 2000 dan 2008

Sektor Ekonomi	Komponen			Pergeseran Struktur Ekonomi
	Pertumbuhan Kalimantan Timur Nij	Bauran Industri Mij	Keunggulan Kompetitif Cij	Pertumbuhan
				Dij
1. Pertanian	3.871.992,89	-1.333.457	352.628,19	2.891.163,76
2. Pertambangan dan Penggalian	77.519.766,79	23.953.035	(26.527.878,85)	74.944.923,31
3. Industri Pengolahan	258.242,49	-98.639	22.199,78	181.803,40
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	100.152,11	9.290	56.050,22	165.491,92
5. Konstruksi	1.750.493,95	86.315	4.151.020,31	5.987.829,42
6. Perdagangan	3.165.663,84	-445.266	138.434,08	2.858.831,96
7. Angkutan dan Komunikasi	1.675.009,29	-1.101.469	1.069.051,08	1.642.591,08
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	863.768,03	286.181	(575.049,39)	574.899,49
9. Jasa-jasa	570.591,94	424.531	(462.411,32)	532.711,18
JUMLAH	89.775.681,34	21.780.520	(21.775.955,90)	89.780.245,51
Prosentase Thd Pertumbuhan Dij	99,99	24,26	(24,25)	100,00

Hasil analisis Shift-share menunjukkan bahwa selama tahun 2000-2008, nilai PDRB sektoral Kabupaten Kutai Timur telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar 19 triliun rupiah atau sebesar 343 persen.

Sedangkan perekonomian Kaltim tumbuh sebesar 240 triliun rupiah atau sebesar 320 persen. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan wilayah (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Timur telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur sebesar 89 triliun rupiah atau 99,99 persen. Namun, sebenarnya nilai ini adalah nilai perkembangan PDRB Kabupaten Kutai Timur sebesar 89 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu bauran industri dan keunggulan kompetitif.

Komponen bauran industri menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebesar 21 triliun rupiah atau 24,26 persen. Nilai positif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Kutai Timur cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif cepat. Pada Tabel 6.11 dapat dilihat sektor-sektor yang mendapat pengaruh positif bauran industri, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Listrik, Gas, dan Air

Bersih, Sektor Konstruksi, Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-Jasa.

6.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan sebuah koefisien yang digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan investasi guna menghasilkan penambahan output sebanyak 1 unit. Selain itu juga dapat dilihat terjadinya ineficiency dalam investasi, yaitu bila koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil.

Dalam konsep ICOR, investasi yang dimaksud adalah total dari pembentukan modal tetap (fixed capital formation) dan stok barang yang terdiri dari gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, stok bahan baku dan barang modal lainnya. Sedangkan output adalah nilai tambah bruto (NTB) yang merupakan selisih antara nilai produksi dengan biaya-biaya untuk bahan baku dan penolong. Dalam penggunaan koefisien ICOR diasumsikan bahwa faktor faktor lain yang dapat meningkatkan tambahan output seperti penambahan tenaga kerja dan penggunaan teknologi pada mesin mesin produksi dianggap konstan.

Dalam menghitung ICOR, faktor penambahan tenaga kerja dan penerapan teknologi diasumsikan tetap. Dengan kata lain, diasumsikan penambahan output terjadi karena adanya tambahan investasi.

Secara matematis ICOR dinyatakan sebagai rasio antara penambahan modal (investasi) terhadap tambahan output. ICOR dapat dinotasikan sebagai berikut:

$ICOR = dK / dY$, dimana :

dK = Investasi atau penambahan kapasitas

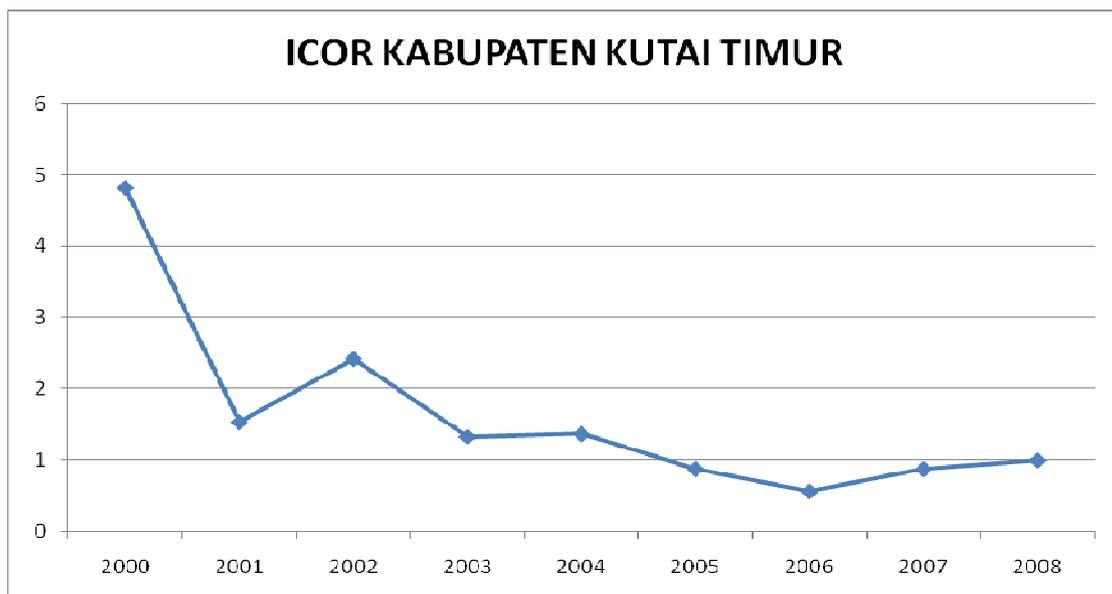
dY = Pertumbuhan output

Tabel 6.12. Analisis ICOR Kabupaten Kutai Timur, 2000 - 2008

TAHUN	PDRB KUTIM	PMTB	ICOR
2000	5.493.583,40	822.210	4,82
2001	7.069.720,96	1.249.930	1,53
2002	6.991.176,69	1.216.830	2,42
2003	6.385.507,82	1.080.600	1,33
2004	9.868.319,05	2.086.420	1,37
2005	12.315.297,69	2.527.280	0,88
2006	16.264.633,10	2.927.280	0,56
2007	18.394.194,66	3.257.465	0,88
2008	24.731.592,65	4.375.682	1,00

Nilai Koefisien ICOR Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 sebesar 1,00 yang berarti bahwa untuk menghasilkan tambahan (increment) Rp 1 juta output diperlukan tambahan modal Rp 1 juta. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi, dalam hal ini proses produksi barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur sudah efisien. Hal ini disebabkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sangat dominan di Kabupaten Kutai Timur. Sehingga untuk investasi sektor pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Kutai Timur, menjadi sangat efisien bagi para pelaku usaha di sektor ini.

Grafik 6.2. Grafik Perkembangan ICOR Kabupaten Kutai Timur, 2000 - 2008



6.5 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Perhitungan disparitas dilakukan dengan pendekatan wilayah dan rumah tangga. Dalam pendekatan wilayah sumber data yang digunakan adalah PDRB perkapita. Dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Williamson yaitu Indeks Disparitas Williamson dapat menggambarkan kesenjangan antar wilayah.

Perhitungan Indeks Disparitas Williamson ini merupakan koefisien variasi yang diberi penimbang proporsi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk Kalimantan Tengah.

Tabel 6.13 Penduduk menurut kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2008

Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Paser	169.932	172.845	171.773	177.258	179.150	180.986	182.745
2. Kutai Barat	142.136	143.664	147.468	153.688	155.787	157.847	159.852
3. Kutai Karta	445.362	480.499	485.375	498.590	508.664	518.722	528.702
4. Kutai Timur	161.946	165.461	168.529	175.106	203.156	208.662	213,762
5. Berau	130.988	133.386	140.731	150.852	156.991	163.309	169.793
6. Malinau	38.400	46.694	47.258	50.322	53.148	56.107	59.200
7. Bulungan	86.022	94.564	96.598	103.639	107.270	110.978	114.756
8. Nunukan	85.119	104.112	106.915	111.559	118.312	125.421	132.886
9. Penajam P .U	111.743	113.659	118.219	122.469	123.807	125.106	126.354
10. Balikpapan	421.330	428.819	431.113	477.530	487.353	497.168	506.915
11. Samarinda	544.044	561.471	567.997	583.786	590.519	597.075	603.389
12. Tarakan	119.220	148.319	152.299	158.250	166.588	175.291	184.353
13. Bontang	105.696	113.270	116.302	122.307	126.152	130.064	134.027
	2.558.572	2.704.851	2.750.369	2.887.100	2.955.500	3.024.800	3.094.700

Tabel 6.14 PDRB Perkapita menurut kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2008

Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pasir	15.282.048,11	18.588.064,45	20.637.300,39	22.573.023,50	24.264.783,70	33.985.562,42	40.424.509,56
Kutai Barat	15.073.042,72	17.198.811,11	19.411.621,50	20.935.635,83	23.094.417,38	25.201.042,78	31.128.087,23
Kutai Karta	60.260.974,22	69.820.673,92	87.374.240,54	118.750.414,17	130.466.549,63	139.331.491,63	188.308.763,73
Kutai Timur	3.169.801,61	38.592.223,09	58.555.613,84	70.330.529,44	80.059.821,53	88.153.064,07	115.696.862,18
Berau	21.267.520,69	22.962.492,32	24.057.101,85	24.245.207,22	25.299.048,99	26.605.318,75	28.013.663,70
Malinau	12.560.026,04	12.536.685,66	13.907.719,33	14.947.915,42	16.166.986,53	18.567.968,35	21.135.439,19
Bulungan	12.852.328,47	12.997.113,07	14.449.667,69	14.903.308,60	15.855.066,65	18.018.742,45	19.001.638,26
Nunukan	11.973.061,24	10.805.008,07	11.989.430,86	18.701.010,23	18.548.718,64	20.497.500,42	23.495.131,17
Penajam PU	13.555.166,77	14.904.090,31	15.493.347,09	15.772.375,05	16.554.072,06	17.645.980,21	19.297.339,22
Balikpapan	33.479.581,33	31.923.692,75	39.321.950,39	46.810.837,02	54.223.612,04	56.696.617,64	80.555.152,24
Samarinda	15.467.089,06	17.546.895,57	20.349.010,65	22.483.944,46	24.555.089,68	26.657.622,58	30.681.895,10
Tarakan	15.384.949,17	14.380.857,41	15.873.544,80	19.462.085,31	21.391.390,74	23.339.486,91	28.413.885,32
Bontang	247.516.074,40	258.022.283,04	310.085.252,19	393.938.940,53	403.205.252,39	413.969.814,86	568.617.636,74
PROPINSI	39.833.974,29	41.559.914,75	50.115.830,83	61.835.017,58	65.668.062,27	69.788.966,53	91.754.498,30

Rumus Indeks Williamson

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - Y)^2 \frac{n_i}{n}}}{Y}$$

Tingkat kabupaten/kota

- y_i = PDRB perkapita di kecamatan I
- Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota
- n_i = jumlah penduduk di kecamatan i
- n = jumlah penduduk di kab/kota

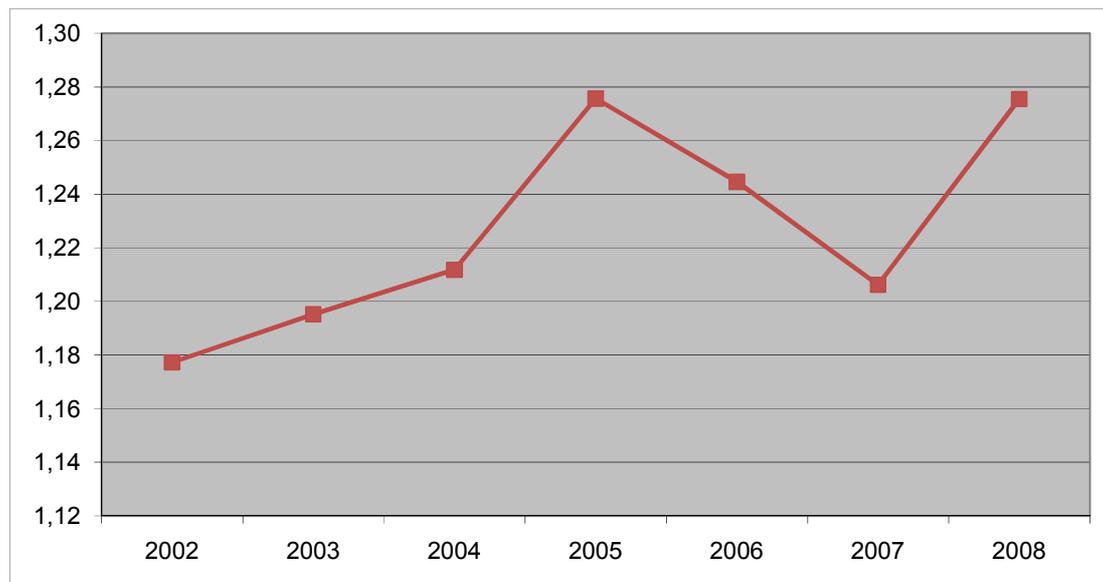
Tingkat Provinsi

- y_i = PDRB perkapita di kab/kota i
- Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi
- n_i = jumlah penduduk di kab/kota i
- n = jumlah penduduk di provinsi

Hasil pengolahan data :

Tahun	Indeks Williamson
2002	1,18
2003	1,20
2004	1,21
2005	1,28
2006	1,24
2007	1,21
2008	1,28

Grafik 6.3 Grafik Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2008



Data di atas menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2002 - 2008. Data di atas juga menunjukkan bahwa dari tahun 2002 hingga tahun 2008 distribusi pendapatan Propinsi Kaltim belum merata (Indeks Williamson menjauh dari nol). Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson yang menjauhi nol (0), dengan nilai rata-rata indeks sebesar 1,22. Ketimpangan terbesar adalah pada tahun 2005 dan 2008 yaitu 1,28. Sedangkan yang indeks williamsonnya paling kecil adalah di tahun 2002, yaitu sebesar 1,18. Ketimpangan antarkabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2002 - 2008 cenderung meningkat.

Tingginya nilai indeks ketimpangan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa rata - rata tingkat produk domestik regional bruto per kapita antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami ketimpangan yang cukup melebar. Dan perbedaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain cukup besar. Hal lain yang menjadi pemicu adalah kondisi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur cukup berbeda. Ada yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas yang cukup besar. Sedangkan yang lainnya hanya daerah pertanian yang tidak mempunyai sektor unggulan untuk dikembangkan. Akibatnya ketimpangan yang terjadi jauh lebih besar.

Tingginya tingkat ketimpangan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita antarkabupaten/kota, tidak berarti secara otomatis menerangkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur ada yang baik dan

ada yang sangat buruk dibandingkan daerah lain. Karena indeks williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB perkapita antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB perkapita yang didistribusikan tersebut dengan rata - rata PDRB daerah lainnya.

Tabel 6.15 Proporsi PDRB Perkapita Kab/Kota Terhadap PDRB Perkapita Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 - 2008

Kabupaten/ Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pasir	38,36	44,73	41,18	36,51	36,95	48,62	43,98
Kutai Barat	37,84	41,38	38,73	33,86	35,17	36,05	33,87
Kutai Karta	151,28	168,00	174,34	192,04	198,68	199,34	204,89
Kutai Timur	108,37	92,86	116,84	113,74	121,92	126,12	125,89
Berau	53,39	55,25	48,00	39,21	38,53	38,06	30,48
Malinau	31,53	30,17	27,75	24,17	24,62	26,56	23,00
Bulungan	32,26	31,27	28,83	24,10	24,14	25,78	20,68
Nunukan	30,06	26,00	23,92	30,24	28,25	29,32	25,56
Penajam P U	34,03	35,86	30,92	25,51	25,21	25,25	21,00
Balikpapan	84,05	76,81	78,46	75,70	82,57	81,11	87,65
Samarinda	38,83	42,22	40,60	36,36	37,39	38,14	33,38
Tarakan	38,62	34,60	31,67	31,47	32,58	33,39	30,92
Bontang	621,37	620,84	618,74	637,08	614,01	592,25	618,70
PROPINSI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

6.6. Hubungan antar Variabel dalam upaya mencari peningkatan sumber pendapatan daerah

6.6.1. Hubungan Antara Keuntungan BUMD dengan PDRB, Penduduk, dan Indeks Implisit

Hubungan antara Keuntungan BUMD dengan PDRB, Penduduk, dan Indeks Implisit dapat dilihat dari korelasinya. Dari output yang didapat korelasi antara keuntungan BUMD dengan PDRB, penduduk, dan Indeks Implisit hasilnya kurang kuat terutama untuk PDRB dan jumlah penduduk. Hasil output korelasi dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.16. Output Korelasi antara Keuntungan BUMD dengan PDRB, Penduduk, dan Indeks Implisit.

Correlations					
		Keuntungan BUMD	pdrb	penduduk	Indeks implisit
Pearson Correlation	keuntunganBUMD	1.000	.388	.200	.554
	pdrb	.388	1.000	.953	.972
	penduduk	.200	.953	1.000	.863
	indeksimplisit	.554	.972	.863	1.000
Sig. (1-tailed)	keuntunganBUMD	.	.195	.334	.098
	pdrb	.195	.	.000	.000
	penduduk	.334	.000	.	.006
	indeksimplisit	.098	.000	.006	.
N	keuntunganBUMD	7	7	7	7
	pdrb	7	7	7	7
	penduduk	7	7	7	7
	indeksimplisit	7	7	7	7

Dari output diatas korelasi antara Keuntungan BUMD dengan PDRB sebesar 0,388, sedangkan korelasi Keuntungan BUMD terhadap Penduduk 0,200, dan korelasi antara Keuntungan BUMD dengan Indeks implisit sebesar 0,554. Korelasi antara Keuntungan BUMD dan Indeks Implisit merupakan korelasi yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain dan hanya variabel inilah yang signifikan berkorelasi dengan keuntungan BUMD dengan tingkat keyakinan 90 persen.

Variabel-variabel tersebut kemudian dimasukkan dalam persamaan regresi, dengan menggunakan metode Backward ternyata variabel PDRB dan indeks implisit dan jumlah penduduk signifikan dalam model dengan tingkat keyakinan 90 persen. Hasil Output Regresi linier Retribusi Daerah ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 6.17. Output Regresi Linier antara Keuntungan BUMD, PDRB, Penduduk, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2002-2008.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1E+011	1E+011		-1.396	.257
	pdrb	-6278.546	3905.174	-6.967	-1.608	.206
	penduduk	530867.4	525910.1	2.027	1.009	.387
	indeksimplisit	1E+009	6E+008	5.579	2.151	.121
2	(Constant)	-4E+010	2E+010		-2.719	.053
	pdrb	-2472.252	1018.194	-2.744	-2.428	.072
	indeksimplisit	7E+008	2E+008	3.221	2.851	.046

a. Dependent Variable: keuntunganBUMD

Dari Output diatas diperoleh model regresi untuk Keuntungan BUMD adalah sebagai berikut :

$$\text{Keuntungan BUMD} = -40 \text{ milyar} - 2472,25 \text{ PDRB} + 0,7 \text{ milyar (indeks implisit)}$$

Untuk keuntungan BUMD digunakan tingkat kepercayaan 90 persen karena jika menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen maka tidak ada variabel yang signifikan mempengaruhi keuntungan BUMD. Dalam persamaan tersebut terlihat bahwa jika PDRB bertambah satu juta maka Keuntungan BUMD akan menurun sebesar 2472,25 rupiah dengan asumsi indeks implisit tetap. Sedangkan jika indeks implisit bertambah satu persen maka Keuntungan BUMD akan bertambah 0,7 milyar rupiah atau 700 juta rupiah dengan asumsi nilai PDRB tetap. Meskipun korelasi antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya kurang kuat namun hasil diatas mampu memberikan gambaran tentang hubungan antara keuntungan BUMD dengan PDRB dan Indeks Implisit.

6.6.2. Hubungan Pajak Daerah dengan Jumlah Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit

Hubungan antara pajak daerah dengan jumlah penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit dapat dilihat dari korelasinya. Dari output yang didapat korelasi antara Pajak daerah dengan jumlah penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit hasilnya cukup kuat. Hasil output korelasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.18. Output Korelasi antara Pajak Daerah dengan Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit.

		pajakdaerah	penduduk	pdrb	indeksimplisit
Pearson Correlation	pajakdaerah	1.000	.798	.913	.923
	penduduk	.798	1.000	.957	.792
	pdrb	.913	.957	1.000	.925
	indeksimplisit	.923	.792	.925	1.000
Sig. (1-tailed)	pajakdaerah	.	.005	.000	.000
	penduduk	.005	.	.000	.006
	pdrb	.000	.000	.	.000
	indeksimplisit	.000	.006	.000	.
N	pajakdaerah	9	9	9	9
	penduduk	9	9	9	9
	pdrb	9	9	9	9
	indeksimplisit	9	9	9	9

Dari output diatas korelasi antara pajak daerah dengan penduduk sebesar 0,798, sedangkan korelasi Pajak Daerah terhadap PDRB 0,913, dan korelasi antara Pajak Daerah dengan Indeks Implisit sebesar 0,923. Korelasi antara Pajak Daerah dan Indeks Implisit merupakan korelasi yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Dengan tingkat keyakinan 95 persen maka variabel-variabel tersebut secara signifikan berkorelasi dengan Pajak Daerah.

Variabel-variabel tersebut kemudian dimasukkan dalam persamaan regresi, dengan menggunakan metode Backward ternyata variabel indeks implisit tidak signifikan dalam model sehingga dikeluarkan dari model. Meskipun indeks implisit memiliki korelasi yang paling kuat dengan pajak daerah namun justru tidak signifikan di dalam model Hasil Output Regresi linier Pajak Daerah ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 6.19. Output Regresi Linier antara Pajak Daerah, Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8E+009	9E+009		.913	.403
	penduduk	-55568.9	45715.544	-1.134	-1.216	.278
	pdrb	405.119	278.792	2.185	1.453	.206
	indeksimplisit	-1E+007	4E+007	-.201	-.283	.789
2	(Constant)	6E+009	3E+009		1.899	.106
	penduduk	-44463.7	21539.245	-.907	-2.064	.085
	pdrb	330.358	81.483	1.782	4.054	.007

a. Dependent Variable: pajakdaerah

Dari Output diatas diperoleh model regresi untuk Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Daerah} = 5,548 \text{ miliar} - 44463,727 \text{ penduduk} + 330,358 \text{ PDRB}$$

Hubungan antara pajak daerah dengan penduduk negatif sedangkan dengan PDRB positif. Dari persamaan diatas dapat ditafsirkan bahwa jika jumlah penduduk bertambah satu orang maka pajak daerah akan menurun sebesar 44,46 juta rupiah. Sedangkan hubungan antara pajak daerah dengan PDRB dapat dijelaskan bahwa jika PDRB bertambah satu juta rupiah maka pajak daerah meningkat sebesar 330,34 rupiah. Nilai persamaan diatas menggunakan tingkat kepercayaan 90 persen karena jumlah penduduk masih dianggap layak masuk kedalam model.

6.6.3. Hubungan Retribusi Daerah dengan Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit

Hubungan antara Retribusi Daerah dengan Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit dapat dilihat dari korelasinya. Dari output yang didapat korelasi antara Retribusi Daerah dengan penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit cukup kuat dan signifikan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6.20. Output Korelasi antara Retribusi Daerah dengan Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

		retribusi daerah	penduduk	pdrb	Indeks implisit
Pearson Correlation	retribusidaerah	1.000	.869	.941	.910
	penduduk	.869	1.000	.957	.792
	pdrb	.941	.957	1.000	.925
	indeksimplisit	.910	.792	.925	1.000
Sig. (1-tailed)	retribusidaerah	.	.001	.000	.000
	penduduk	.001	.	.000	.006
	pdrb	.000	.000	.	.000
	indeksimplisit	.000	.006	.000	.
N	retribusidaerah	9	9	9	9
	penduduk	9	9	9	9
	pdrb	9	9	9	9
	indeksimplisit	9	9	9	9

Dari Output diatas korelasi antara retribusi daerah dengan penduduk sebesar 0,869, sedangkan output Retribusi daerah terhadap PDRB 0,941 korelasi antara Retribusi Daerah dengan PDRB paling tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Untuk korelasi antara Indeks implisit dengan retribusi daerah sebesar 0,910. Dengan tingkat keyakinan 95 persen maka variabel-variabel tersebut secara signifikan berkorelasi dengan Retribusi Daerah.

Variabel-variabel tersebut kemudian dimasukkan dalam persamaan regresi, dengan menggunakan metode Backward ternyata variabel indeks implisit dan jumlah penduduk dikeluarkan dari model karena tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil Output Regresi linier Retribusi Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.21. Output Regresi Linier antara Retribusi Daerah, Penduduk, PDRB, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.545E9	2.201E10		.070	.947
	penduduk	-35146.013	117882.534	-.287	-.298	.778
	pdrb	526.921	718.897	1.137	.733	.496
	indeksimplisit	1.087E7	9.388E7	.085	.116	.912
2	(Constant)	3.910E9	7.484E9		.522	.620
	penduduk	-46864.613	55176.100	-.383	-.849	.428
	pdrb	605.812	208.731	1.307	2.902	.027
3	(Constant)	-2.410E9	7.896E8		-3.052	.019
	pdrb	436.107	59.182	.941	7.369	.000

a. Dependent Variable: retribusidaerah

Dari Output diatas diperoleh model regresi untuk Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Daerah} = -2,410 \text{ miliar} + 436,107 \text{ PDRB}$$

Karena PDRB dalam juta rupiah maka dalam intepretasinya jika nilai PDRB bertambah satu juta rupiah maka nilai retribusi daerah akan meningkat sebesar 436 rupiah. Hal ini sejalan dengan data yang ada selama tahun 2002-2008 PDRB yang selalu meningkat diikuti dengan peningkatan Retribusi daerah.

6.6.4. Hubungan antara Bagi Hasil Pajak dengan Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Implisit

Hubungan antara Bagi Hasil Pajak dengan jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan indeks implisit pada dasarnya memiliki korelasi yang cukup kuat dan signifikan (tingkat signifikansi 95 persen). Namun setelah dimasukkan dalam regresi linier dengan menggunakan metode Backward jumlah penduduk tidak signifikan dalam model sehingga dikeluarkan dari model. Hasil Outputnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 6.22. Output Korelasi antara Bagi hasil pajak dengan Penduduk, Pendapatan Per kapita, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

Correlations					
		bagihasil pajak	penduduk	pendapata nperkapita	indeksimplisit
Pearson Correlation	bagihasilpajak	1.000	.978	.962	.818
	penduduk	.978	1.000	.948	.792
	pendapatanperkapita	.962	.948	1.000	.938
	indeksimplisit	.818	.792	.938	1.000
Sig. (1-tailed)	bagihasilpajak	.	.000	.000	.004
	penduduk	.000	.	.000	.006
	pendapatanperkapita	.000	.000	.	.000
	indeksimplisit	.004	.006	.000	.
N	bagihasilpajak	9	9	9	9
	penduduk	9	9	9	9
	pendapatanperkapita	9	9	9	9
	indeksimplisit	9	9	9	9

Tabel 6.23. Output Regresi Linier antara bagi hasil pajak, Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1E+011	2E+011		.704	.513
	penduduk	-151410	893181.1	-.067	-.170	.872
	pendapatanperkapita	3943.397	1588.867	1.723	2.482	.056
	indeksimplisit	-2E+009	9E+008	-.744	-2.061	.094
2	(Constant)	9E+010	3E+010		3.566	.012
	pendapatanperkapita	3682.283	356.765	1.609	10.321	.000
	indeksimplisit	-2E+009	4E+008	-.690	-4.428	.004

a. Dependent Variable: bagihasilpajak

Pada tabel 6.21 terlihat bahwa korelasi antara bagi hasil pajak dengan penduduk, Pendapatan perkapita, dan Indeks Implisit masing-masing 0,978, 0,962 dan 0,818. semua variabel tersebut berkorelasi secara signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tingkat kepercayaan 90 persen. Sedangkan pada tabel 8 terlihat bahwa jumlah penduduk dikeluarkan dari model karena tidak signifikan.. Sehingga model yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Pajak} = 8.929 \text{ juta} + 3682,283 \text{ Pendapatan perkapita} - 1.629 \text{ juta indeks implisit}$$

Hasil Regresi menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang positif terhadap bagi hasil pajak sedangkan indeks implisit memiliki pengaruh yang negatif. Hal ini berarti bahwa jika indeks implisit meningkat satu persen sedangkan pendapatan perkapita tetap maka bagi hasil pajak akan menurun sebesar 1,63 milyar rupiah. Sebaliknya apabila pendapatan perkapita naik seribu rupiah maka bagi hasil pajak akan meningkat sebesar 3,68 juta rupiah.

6.6.5. Hubungan Antara Bagi Hasil Bukan Pajak dengan Jumlah Penduduk, Pendapatan per kapita, dan Indeks Implisit

Hubungan antara Bagi Hasil bukan pajak dengan jumlah penduduk, Pendapatan perkapita, dan Indeks Implisit dapat dilihat dari korelasinya. Dari output yang didapat korelasi antara Bagi hasil bukan pajak dengan jumlah penduduk, Pendapatan perkapita, dan Indeks Implisit hasilnya cukup kuat dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil output korelasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.24. Output Korelasi antara Bagi hasil pajak dengan Penduduk, Pendapatan Per kapita, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

		bagihasil bkn pajak	penduduk	pendapata n perkapita	indeksimplisit
Pearson Correlation	bagihasilbkn pajak	1.000	.959	.960	.861
	penduduk	.959	1.000	.948	.792
	pendapatanperkapita	.960	.948	1.000	.938
	indeksimplisit	.861	.792	.938	1.000
Sig. (1-tailed)	bagihasilbkn pajak	.	.000	.000	.001
	penduduk	.000	.	.000	.006
	pendapatanperkapita	.000	.000	.	.000
	indeksimplisit	.001	.006	.000	.
N	bagihasilbkn pajak	9	9	9	9
	penduduk	9	9	9	9
	pendapatanperkapita	9	9	9	9
	indeksimplisit	9	9	9	9

Dari output diatas korelasi antara bagi hasil bukan pajak dengan penduduk sebesar 0,959, sedangkan korelasi Bagi hasil bukan pajak terhadap Pendapatan perkapita 0,960, dan korelasi antara bagi hasil bukan Pajak dengan Indeks Implisit sebesar 0,861. Dengan tingkat keyakinan 95 persen maka variabel-variabel tersebut secara signifikan berkorelasi dengan Bagi hasil bukan pajak.

Variabel-variabel tersebut kemudian dimasukkan dalam persamaan regresi, dengan menggunakan metode Backward ternyata variabel indeks implisit dan pendapatan perkapita dikeluarkan dari model karena tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil Output Regresi linier Retribusi Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.25. Output Regresi Linier antara bagi hasil bukan pajak, Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Indeks Implisit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2E+012	2E+012		-1.000	.363
	penduduk	9215562	8272540	.765	1.114	.316
	pendapatanperkapita	-466.236	14715.903	-.038	-.032	.976
	indeksimplisit	4E+009	8E+009	.291	.464	.662
2	(Constant)	-1E+012	2E+011		-7.185	.000
	penduduk	8961473	1852392	.744	4.838	.003
	indeksimplisit	3E+009	2E+009	.272	1.769	.127
3	(Constant)	-2E+012	2E+011		-6.777	.000
	penduduk	1E+007	1292792	.959	8.939	.000

a. Dependent Variable: bagihasilbkn pajak

Dari Output diatas diperoleh model regresi untuk bagi hasil bukan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Bukan Pajak} = -1,571 \text{ triliun} + 11,56 \text{ juta (penduduk)}$$

Dengan tingkat signifikansi 95 persen dapat dinyatakan bahwa jika jumlah penduduk bertambah satu jiwa saja maka bagi hasil bukan pajak akan meningkat sebesar 11,56 juta rupiah.

6.7. Analisis Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Angkatan

kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri dalam dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan itu sendiri. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan.

Tabel 6.26 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kutai Timur 2006-2008

Kelompok Umur	2006			2007			2008		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(2)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
15-24	15.704	12.396	28.100	14.715	15.631	30.346	15.291	16.226	31.517
25-34	15.056	17.774	22.831	21.938	19.148	41.086	24.516	18.890	43.356
35-44	17.583	13.720	31.303	14.076	11.793	25.869	16.650	13.468	30.068
45-54	7.761	6.262	14.023	7.156	6.594	13.750	8.796	7.736	16.532
55-59	2.646	1.711	4.357	3.353	1.788	5.141	2.280	2.500	4.780
60+	4.356	2.105	6.461	1.819	2.514	4.333	3.576	2.532	6.108
Jumlah	63.106	53.968	117.074	63.057	57.468	120.525	71.059	61.302	132.361

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur & Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk usia kerja dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada tahun 2006 tercatat sejumlah 117.074 jiwa meningkat 13,06% menjadi 132.361 jiwa. Jika dilihat dari jenis kelamin, tercatat peningkatan jumlah penduduk usia kerja laki-laki cenderung lebih besar jika dibandingkan penduduk usia kerja perempuan. Penduduk usia kerja laki-laki meningkat sebesar 13, 59% sedangkan yang perempuan 12,60% dari tahun 2006 ke tahun 2008.

Tabel 6.27. Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Uraian	2007	2008
Angkatan Kerja	73.623	82.972
Laki-laki	55.113	62.329
Perempuan	18.510	20.643
Bukan Angkatan kerja	46.902	44.389
Laki-laki	7.944	8.730
Perempuan	38.958	40.059
TOTAL	120.525	132.361

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Pertumbuhan penduduk yang bekerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja yang hampir sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada relatif lebih sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Artinya bahwa setiap tahun akan selalu terjadi penambahan pengangguran baik itu terbuka atau setengah terbuka.

Tabel dibawah menunjukkan bahwa jumlah total angkatan kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan mengalami peningkatan selama periode 2006-2008. Pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja yang terserap sebanyak 153.187 orang dari seluruh angkatan kerja. Lebih separuhnya yaitu 58,97% terserap di sektor pertanian sedangkan pada tahun 2008 menurun menjadi sebesar 52,56% dari jumlah angkatan kerja yang terserap sebanyak 169.351 orang.

Tabel 6.28 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Sektor/Lapangan Pekerjaan Utama (1)	2006		2007		2008	
	Jumlah (14)	% (15)	Jumlah (16)	% (17)	Jumlah (18)	% (19)
Pertanian	90.338	58,97	99.343	60,80	89.009	52,56
Pertambangan	9.697	6,33	10.354	6,34	20.038	11,83
Industri Pengolahan	12.104	7,90	2.400	1,47	788	0,47
Listrik, Gas dan Air Bersih	1.423	0,92	172	0,11	733	0,43
Bangunan	2.273	1,48	9.574	5,86	3.898	2,30
Perdagangan, Hotel dan Restoran	17.976	11,73	18.403	11,26	12.011	7,09
Pengangkutan dan Komunikasi	13.018	8,49	3.292	2,02	1.100	0,65
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.043	2,64	0,00	0,00	2.866	1,69
Jasa-jasa	21.314	13,91	17.076	10,45	26.537	15,67
Lainnya	0,00	0,00	2.775	1,70	12.371	7,31
Total	153.187	100,00	163.388	100,00	169.351	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Dari keseluruhan tenaga kerja yang terserap, menyisakan para pencari pekerjaan yang harus menjadi perhatian besar para pemegang kebijakan untuk mengatasinya. Pada tahun 2007, jumlah penduduk belum mempunyai pekerjaan sebesar 5.870 orang dan pada tahun 2008 sebanyak 4.220 orang. Sedangkan bagi mereka yang telah memiliki pekerjaan akan tetapi mempunyai pekerjaan yang tidak diharapkan/masih mau menerima pekerjaan dan bekerja di bawah jam kerja yang optimal (<35 jam seminggu) tercatat sejumlah 16.737 orang pada tahun 2006 dan 16.309 orang pada tahun 2008.

Tabel 6.29 Tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Variabel	2007	2008
1.	Angka pengangguran	5.870	4.220
2.	Angka setengah menganggur	16.737	16.309

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)



Menjadi kondisi yang umum bahwa jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal pembangunan apabila kualitas penduduk itu sendiri adalah baik. Untuk dapat mengetahui kualitas penduduk usia kerja dapat dilihat dari golongan umur dan tingkat pendidikan penduduk menurut usia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena tingginya tingkat pendidikan akan berkorelasi positif dengan tingkat keterampilan dan kemampuan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.30. Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur 2008

No.	Permintaan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan	2007			2008		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1.	SD	20	1	21	1	-	1
2.	SLTP	33	-	33	18	-	18
3.	SLTA	878	11	889	216	7	223
4.	Sarjana Muda	-	-	-	22	2	24
5.	Sarjana	22	11	33	11	1	12
6.	Lainnya	11	9	20	-	-	-
	Jumlah	964	32	996	268	10	278

Sumber : Disnakertran Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim Dalam Angka)

Dari tabel di atas terlihat bahwa permintaan tenaga kerja oleh pengguna/user pekerja terpusat pada tenaga kerja yang berpendidikan menengah. Walaupun data yang diperoleh tidak lengkap, terlihat pola yang sama terjadi pada tahun 2007 dan 2008.

6.8. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada Prinsipnya Strategi pembangunan endingnya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil pembangunan secara lebih berkeadilan, Disamping itu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas harus terus diupayakan. Namun demikian ternyata tidak mudah untuk diwujudkan pada daerah-daerah yang sedang berkembang. Seperti di Kabupaten Kutai Timur misalnya, memiliki cukup besar peluang untuk bertumbuh kembangnya industri dan perdagangan, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan per kapita yang lebih besar.

Skala prioritas pembangunan yang selama ini masih berpusat pada daerah-daerah perkotaan, mengakibatkan daerah-daerah yang relatif "tertinggal" seperti di

wilayah pedalaman menjadi kurang mendapat perhatian. Walaupun ada pemikiran yang berkembang, hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada daerah tertentu suatu saat diharapkan akan memberi efek tetesan ke bawah (Multiplier effect) pada daerah-daerah periferal tersebut, yang pada akhirnya diharapkan berdampak kuat pada upaya pemberantasan kemiskinan (Denis A. Rondinelli dan Shahir G.Cheema : 1983)

Sesuai dengan trend pembangunan saat itu, polarisasi aktivitas ekonomi pada daerah-daerah pusat pertumbuhan (*core areas*) semakin kuat. Sementara daerah-daerah periferal semakin tertinggal dan miskin (Hilhorst, 1971). Realitaas pembangunan menunjukkan disparitas antara si kaya dan si miskin makin lebar. Dan lebih menyedihkan, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan melesat pesat, tetap berjalan perlahan, sementara daerah-daerah miskin makin bertambah karena pemerataan pembangunan belum sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan tersebut di atas, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang handal menjadi solusi dan salah satu modal utama dalam proses pembangunan dewasa ini. Upaya peningkatan kualitas SDM, yang dalam skala lebih luas disebut sebagai pembangunan manusia mutlak terus dilakukan oleh pemerintah, seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk, serta kemampuan daya beli di masyarakat. Selama periode 2002-2008 pencapaian angka IPM Kabupaten Kutai Timur relatif terus membaik. Pada tahun 2002 angka IPM Kabupaten Kutai Timur mencapai 66,1 dan kemudian menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di tahun 2004 menjadi 69,1 atau naik sekitar 3 poin. Pada tahun 2005, capaian IPM Kabupaten Kutai Timur sekitar 69,2 atau 0,1 poin dibandingkan dengan tahun 2004, dan di tahun 2008 terlihat laju perkembangan IPM-nya relatif mengalami peningkatan yaitu mencapai angka 70,84, lihat tabel.1 berikut. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh diberlakukannya Otonomi Daerah (OTDA). Otonomi Daerah memberi dampak yang luar biasa pada daerah, terutama dalam hal alokasi dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah sesuai UU No.25 Tahun 1999. Kewenangan yang diberikan yang begitu besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan alokasi anggaran terutama alokasi dana perimbangan yang begitu besar rata-rata hampir 400 persen membuat pembangunan disegala bidang menjadi bergerak dengan cukup cepat. Pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan, jembatan, bandara, terminal, dermaga dan pelabuhan menjadikan terbukanya daerah-daerah terisolir

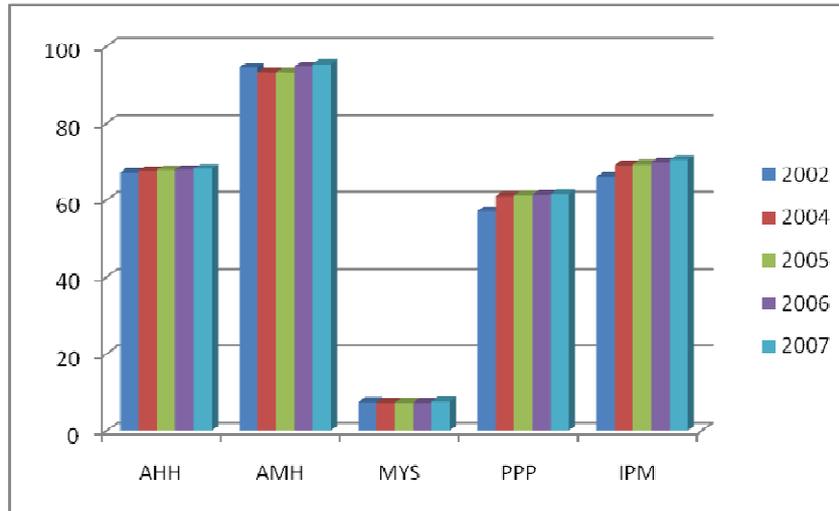
yang berdampak pada peningkatan kinerja proses perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pendidikan berupa gedung-gedung sekolah dan penunjangnya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti tingkat partisipasi sekolah, rata-rata usia sekolah dan tingkat pendidikan yang ditamatkan termasuk melek huruf. Pembangunan infrastruktur kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan balai pengobatan serta Apotik dan Toko Obat berdampak positif pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat berupa peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian bayi dan lainnya.

Tabel.6.31 Perkembangan Variabel Indeks Pembangunan Manusia/IPM Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peringkat IPM secara Nasional	Variabel Pendidikan		Variabel Kesehatan	Variabel Daya Beli	Reduksi Shortfall IPM
			Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2002	66,10	171	94,50	7,40	67,10	571,60	
2003	67,20	175	93,20	7,30	67,60	572,70	0,25
2004	69,10	177	93,20	7,30	67,80	610,20	5,79
2005	69,30	196	93,20	7,30	67,80	612,10	0,78
2006	69,80	208	94,80	7,30	67,90	613,70	1,63
2007	70,46	204	95,48	7,57	68,56	615,71	2,05
2008	70,84	217	95,48	7,61	68,25	619,00	1,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dan BPS Pusat

Grafik .6.4. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Kutai Timur 2002-2007



TAHUN	AHH	AMH	MYS	PPP	IPM
2002	67.10	94.50	7.40	571,60	66.10
2004	67.60	93.20	7.30	610,20	69.10
2005	67.80	93.20	7.30	612,10	69.30
2006	67.90	94.79	7.29	613,70	69.84
2007	68.08	95.48	7.57	615,70	70.46
2008	68,25	95,48	7,61	619,00	70,84

Jika dilihat berdasarkan komponennya, peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Kutai Timur dewasa ini merupakan kontribusi terbesar dari indeks pendidikan yang semakin baik. Pada tahun 2002 capaian indeks pendidikan berupa angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah masing-masing sebesar 94,5 persen dan 7,4 tahun meningkat menjadi 95,48 persen dan 7,61 tahun di tahun 2008. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka *drop out* yang cukup signifikan dari tahun ke tahun mampu menunjang pencapaian rata-rata sekolah yang cukup membanggakan. Upaya pembangunan di bidang pendidikan ternyata cukup nyata dan berdampak baik di masa mendatang. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan *drop out* murid sekolah tampaknya harus terus digalakkan dan menjadi prioritas utama, dengan tidak mengabaikan upaya lain, seperti melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.

Dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda dewasa ini, tampaknya perlu dipersiapkan sarana penunjang pendidikan yang memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun yang masih relatif besar. Jika

pendidikan mereka tidak ditangani secara baik dan lebih dini, dikhawatirkan pada rentang waktu 2-5 tahun ke depan akan berdampak cukup serius pada pencapaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sampai saat ini pencapaian indeks pendidikan (yang ditunjang oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) di Kabupaten Kutai Timur sudah relatif terus membaik.

Pencapaian angka melek huruf penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kutai Timur selama periode tahun 2002-2008 mengalami perkembangan yang relatif baik, pada tahun 2002 mencapai AMH penduduk Kabupaten Kutai Timur sebesar 94,5 persen meningkat menjadi sebesar 94,79 persen pada tahun 2006, dan di tahun 2008 mencapai sebesar 95,48 persen. Begitu juga dengan indikator pendidikan lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah terus menunjukkan peningkatan yang relatif baik pula, pada tahun 2008 telah mencapai sekitar 7,61 tahun relatif lebih baik dibandingkan kondisi tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,29 tahun pada tahun 2006 dan sebesar 7,4 tahun pada tahun 2002. pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum begitu besar kemungkinan disebabkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah.

Strategi pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui "KUTIM CEMERLANG" kiranya sangat signifikan berdampak pada pencapaian keberhasilan ini. KUTIM CEMERLANG (Cerdas, Merata dan Prestasi Gemilang) pada dasarnya merupakan strategi dalam pembangunan karakter dan kapasitas (*character and capacity building*) sumberdaya manusia sebagai pelaku, penerima manfaat sekalligus asset pembangunan, sehingga nantinya masyarakat Kutai Timur bukan hanya sebagai penonton namun lebih dari itu dapat menjadi pemain atau tuan rumah di daerah sendiri.

Kemampuan masyarakat Kutai Timur untuk secara mandiri dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pembangunan daerah untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya lokal (*resource based*) yang dimiliki sangat tergantung akan keberadaan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki.

Kebijakan KUTIM CEMERLANG diharapkan dapat menjawab kendala SDM tersebut dengan titik berat intervensi pada sektor pendidikan baik pendidikan formal, informal dan non formal, maupun berupa kegiatan fisik dan non fisik.

Lebih lanjut, maksud dan tujuan dari KUTIM CEMERLANG adalah sebagai berikut:

CERDAS : dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat Kutai Timur yang cerdas, terampil, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.

MERATA : melalui pendidikan yang berkeadilan, berpihak kepada rakyat kecil, merata bagi seluruh masyarakat dan mensejahterakan tenaga kependidikan.

PRESTASI GEMILANG: menghasilkan prestasi gemilang, mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan kebutuhan daerah, regional dan internasional.

Untuk mewujudkan KUTIM CEMERLANG tersebut maka pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20% dari APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2006 atau sekitar Rp. 202 Milyar lebih, meliputi pembangunan fisik dan non fisik.

Pengalokasian anggaran pendidikan 20% dari APBD:

- Memenuhi amanat UUD dan UU Sisdiknas
- Secara signifikan meningkatkan mutu sumberdaya manusia
- Diperlukan dukungan semua pihak, khususnya masyarakat pendidikan

Pengembangan Sistem Pendidikan

- Revitalisasi sistem informasi pendidikan
- PERDA tentang Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan
- RENSTRA Pendidikan 2006-2011
- Profil Pendidikan

Program Wajib Belajar 12 Tahun

- Komitmen untuk menerapkan program wajib belajar 12 tahun (Unesco)
- Anak dan remaja usia sekolah usia 0 s.d. 18 tahun, diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal secara cuma-cuma.
- Memerlukan strategi yang tepat dengan konsekuensi anggaran yang cukup signifikan.

Pembebasan Biaya Pendidikan

- Konsekuensi logis dari penerapan Wajib Belajar 12 Tahun
- Memebebaskan biaya pendidikan mulai dari TK hingga SMA/SMK/MA
- Menanggung biaya operasional sekolah
- Tidak membedakan Negeri atau Swasta (merata)
- Membantu masyarakat banyak, khususnya masyarakat miskin

- Tidak lagi diperkenankan pungutan/Iuran Wajib kepada murid/ siswa
- Revitalisasi Fungsi Komite Sekolah

Pembebasan Biaya SPP

- Diberikan biaya operasional sekolah berdasarkan jumlah siswa
- Biaya yang diberikan kepada sekolah per siswa per bulan untuk tahun 2006 masing-masing (di luar dana BOS dan BKM dari APBN) :
 - Rp 17.500,- untuk TK
 - Rp 20.000,- untuk SD/MI
 - Rp 28.000,- untuk SMP/MTs
 - Rp 70.000,- untuk SMA/MA/SMK
- Bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa kecil, maka disediakan biaya operasional tambahan, yang disesuaikan standar operasional minimal satuan pendidikan.
- Pemerintah masih menanggung biaya penerimaan siswa baru dan biaya ujian nasional.
- Jumlah anggaran yang diperlukan Rp 19,4 Milyar

Pengembangan sekolah unggulan

- Jenjang SD, SMP dan SMA
- Memiliki standar nasional / internasional
- Memiliki anggaran biaya operasional yang lebih tinggi
- Pembiayaan oleh pemerintah bersama stakeholders lainnya
- Dikelola secara profesional
- Siswa harus memiliki kemampuan di atas rata-rata normal
- Melalui seleksi ketat dan obyektif
- Dibangun sebuah asrama siswa

Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan

- Program pendidikan minimal sarjana bagi semua guru
- Program pendidikan magister dan doktor bagi yang berprestasi
- Program pelatihan/kursus/magang
- Program sertifikasi dan uji kompetensi guru

Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan

- Peningkatan insentif guru secara umum
- Insentif tenaga yang bertugas di daerah terpencil

- Rewards terhadap guru berprestasi
- Honorarium yang layak bagi tenaga guru honorer
- Program kegiatan yang dapat memberikan tambahan kesejahteraan
- Dana-dana yang dikomperisikan untuk guru

Pengembangan satuan pendidikan berbasis agrobisnis

- Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian
- Pengembangan politeknik pertanian
- Pengembangan SMK Kelautan
- Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan agribisnis
- Pengembangan BLK Mandiri

Kunci keberhasilan program-program dibidang pendidikan:

- Ketersediaan anggaran
- Komitmen dan kepedulian
- Keterpaduan persepsi, visi dan misi
- Komitmen pimpinan dan seluruh penyelenggara pendidikan
- Keseriusan dan kebersamaan kebersamaan penyelenggara pendidikan
- Penataan sistem pendidikan yang baik
- Monitoring, evaluasi dan pengawasan

Sebelum membaiknya perekonomian masyarakat ternyata cukup berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang relatif lambat dan kurang menunjang kontribusi positif bagi capaian angka IPM.

Pada tahun 2002, kemampuan daya beli penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar secara minimal agar dapat hidup secara layak mencapai sebesar Rp 571 ribu meningkat menjadi sebesar Rp 163 ribu pada tahun 2006. Dalam kurun waktu 2002-2006, peningkatan dari indeks daya beli penduduk Kabupaten Kutai Timur masih relatif kecil. Kondisi tersebut berlanjut di tahun 2008 dimana capaian kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Kutai Timur masih bertahan di kisaran Rp 619 ribu. Relatif lambatnya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Kutai Timur dewasa ini, kemungkinan lebih disebabkan oleh faktor eksternal Kabupaten Kutai Timur, seperti belum mantapnya kebijakan makro ekonomi nasional. Belum stabilnya nilai tukar rupiah saat itu dan adanya kenaikan

BBM di kuartal pertama tahun 2005, cukup menekan laju perkembangan daya beli masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan kebijakan makro ekonomi nasional ternyata berdampak secara serius terhadap ketatnya perkembangan daya beli masyarakat. Padahal dalam situasi perekonomian yang semakin membaik selama 3 (tiga) tahun terakhir, ekpektasi pencapaian komponen kemampuan daya beli masyarakat sebenarnya diharapkan lebih dari angka tersebut. Untuk itu, tampaknya pemerintah Kabupaten Kutai Timur mesti menyiapkan strategi dan kebijakan yang berpihak pada msyarakat, seperti menyiapkan program ketahanan pangan secara berkelanjutan, mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat miskin dan tunai dapat pula dioptimalkan karena terbukti efektif menghindari merosotnya kemampuan daya beli masyarakat secara luas, walaupun dalam beberapa sisi direview agar berhasil dan tepat guna dalam mendongkrak daya beli masyarakat.

Menjadi pemikiran bersama, pencapaian angka harapan hidup Kabupaten Kutai Timur dewasa ini masih belum begitu menggembirakan, walaupun teredapat peningkatan yang cukup signifikan, tetapi belum mampu mencerminkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Timur dapat dikatakan cukup baik. Tahun 2002, capiaan angka harapan hidup Kabupaten Kutai Timur baru mencapai sebesar 67,1 tahun meningkat sedikit menjadi 67,9 tahun pada tahun 2006 dan di tahun 2008 mencapai sebesar 68,25 tahun. Tampaknya diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektor, agar perbaikan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan masin mengkatnya angka harapan hidup dan terus menurunnya angka kematian bayi secara baik dapat terwujud di masa mendatang.

Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan balita secara bertahap harus terus menjadi prioritas, beitu pula penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu agar terus ditingkatkan, dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan.

6.8.1. Pencapaian Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan

Secara garis besar, ulasan di bawah melihat potret pencapaian IPM menurut kecamatan untuk tahun 2007 berdasarkan indikator-indikator penunjangnya.

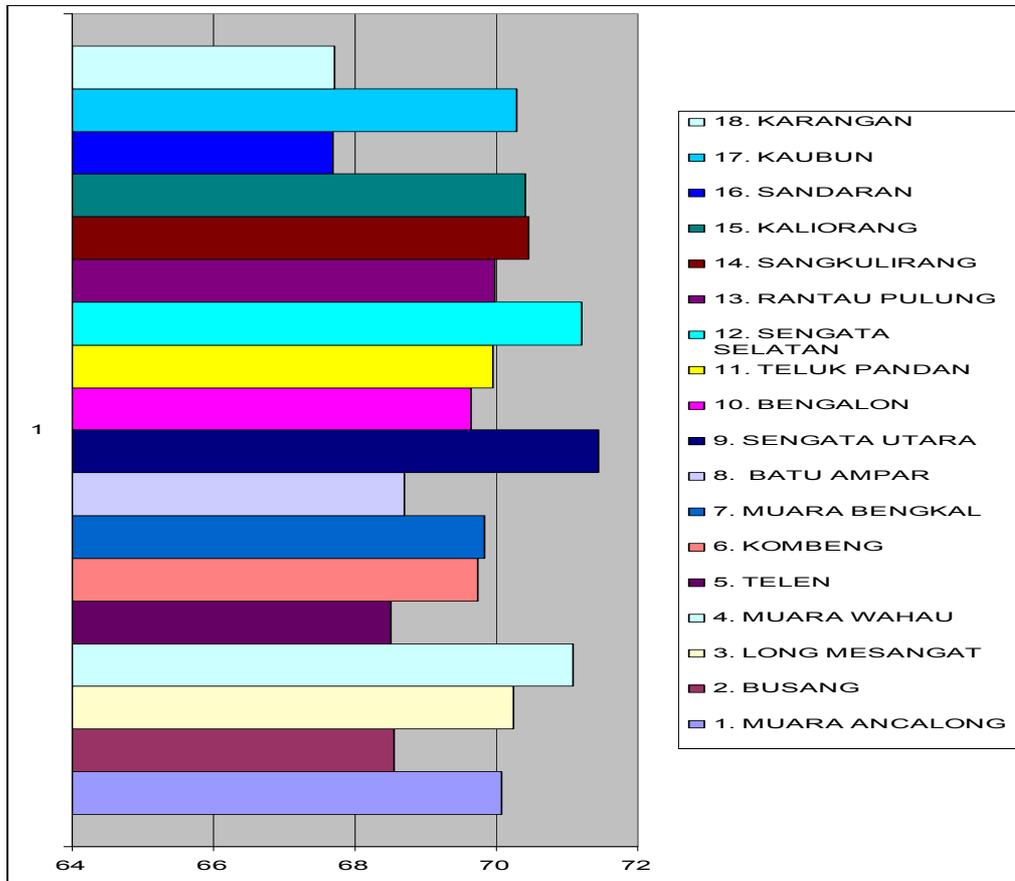
Tabel 6.32. Komponen IPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan Tahun 2007

Kecamatan	Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. MUARA ANCALONG	67,69	96,14	7,22	615,02
2. BUSANG	67,03	92,43	6,80	614,80
3. LONG MESANGAT	68,40	95,04	7,25	615,12
4. MUARA WAHAU	69,28	95,72	7,44	615,79
5. TELEN	67,13	91,35	6,89	615,67
6. KOMBENG	67,66	94,64	7,18	615,49
7. MUARA BENGKAL	67,76	95,31	7,05	615,35
8. BATU AMPAR	67,16	92,45	6,85	615,03
9. SENGATA UTARA	68,49	96,44	8,26	616,26
10. BENGALON	67,46	94,88	7,10	615,62
11. TELUK PANDAN	68,16	94,89	7,17	614,13
12. SENGATA SELATAN	68,31	96,34	8,10	616,13
13. RANTAU PULUNG	67,58	96,01	7,18	615,21
14. SANGKULIRANG	68,21	96,23	7,26	615,62
15. KALIORANG	68,64	95,02	7,23	615,77
16. SANDARAN	67,09	90,23	6,27	614,58
17. KAUBUN	68,54	95,00	7,21	615,00
18. KARANGAN	67,12	90,25	6,27	614,56
KUTAI TIMUR	68,08	95,48	7,57	615,71

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, nilai IPM Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2007 adalah 70,46. Sehingga masih memerlukan nilai 29,54 poin lagi untuk mencapai IPM ideal, yaitu nilai IPM 100. Nilai indeks pendukung IPM adalah sebagai berikut: Indeks harapan hidup 71,80; Indeks pengetahuan 80,48; dan indeks daya beli 59,09.

Angka IPM kecamatan di Kabupaten Kutai Timur cukup bervariasi, antara 67,69 sampai 71,45. Nilai tertinggi atau peringkat pertama diraih oleh Kecamatan Sengata Utara yang relatif memiliki fasilitas dan sarana/prasarana lebih lengkap dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Tempat kedua diduduki oleh Kecamatan Sengata Selatan dengan angka 71,20. Kemudian disusul oleh Kecamatan Muara Wahau dengan nilai 71,08. Sementara kecamatan dengan IPM terendah adalah Kecamatan Sandaran, yaitu sebesar 67,69. Grafik lengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.2.

Grafik 6.5. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007



Kondisi geografis kecamatan ternyata baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan manusianya. Kecamatan Sandaran merupakan kecamatan yang konon paling sulit dijangkau di Kabupaten Kutai Timur, kesulitan sarana transportasi inilah yang diperkirakan menjadi sebab tertinggalnya Sandaran dari kecamatan lain. Selain itu, secara umum kecamatan pemekaran cenderung memiliki angka IPM yang relatif lebih rendah, kecuali Kecamatan Kaliorang menduduki peringkat ke 5. Sebagai kecamatan yang terhitung baru, kondisi ini tentu saja dapat dimaklumi. Karena kecamatan-kecamatan tersebut masih dalam proses pembangunan. Namun ini tentu saja menjadi tantangan dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan pembangunan yang merata di wilayahnya.

6.8.2. Angka Harapan hidup

Angka harapan hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka ini sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*), namun karena data kematian menurut kelompok umur tidak tersedia maka cara ini tidak dapat dilakukan. Sehingga dalam publikasi ini, penghitungan angka harapan hidup dihitung dengan metode tidak langsung (*indirect method*).

Angka harapan hidup penduduk Kutai Timur 2008 adalah 68,25, yang artinya bahwa setiap bayi yang lahir memiliki harapan untuk dapat hidup selama 68 tahun. Kecamatan Muara Wahau adalah kecamatan dengan angka harapan hidup tertinggi di Kabupaten Kutai Timur yaitu 69,28 tahun. Sedangkan angka harapan hidup terendah dimiliki oleh Kecamatan Busang sebesar 67,03.

Tinggi rendahnya angka harapan hidup suatu daerah selain dipengaruhi oleh sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di daerah tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan, dan juga pengetahuan masyarakat setempat tentang hidup sehat. Banyaknya penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis merupakan salah satu faktor yang termasuk di dalamnya.



Tabel.6.33. Indeks komponen IPM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007

Kecamatan	Indeks Harapan Hidup	Indeks Pengetahuan	Indeks Daya Beli	IPM	Peringkat IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. MUARA ANCALONG	71,14	80,13	58,93	70,07	8
2. BUSANG	70,05	76,74	58,88	68,55	15
3. LONG MESANGAT	72,33	79,47	58,96	70,25	7
4. MUARA WAHAU	73,81	80,33	59,11	71,08	3
5. TELEN	70,21	76,20	59,08	68,50	16
6. KOMBENG	71,09	79,04	59,04	69,73	12
7. MUARA BENGKAL	71,27	79,21	59,01	69,83	11
8. BATU AMPAR	70,27	76,86	58,94	68,69	14
9. SENGATA UTARA	72,49	82,66	59,22	71,45	1
10. BENGALON	70,77	79,04	59,07	69,63	13
11. TELUK PANDAN	71,93	79,19	58,73	69,95	10
12. SANGATA SELATAN	72,19	82,23	59,19	71,20	2
13. RANTAU PULUNG	70,97	79,96	58,98	69,97	9
14. SANGKULIRANG	72,02	80,28	59,07	70,46	4
15. KALIORANG	72,73	79,41	59,11	70,42	5
16. SANDARAN	70,15	74,07	58,83	67,69	18
17. KAUBUN	72,57	79,36	58,93	70,29	6
18. KARANGAN	70,19	74,10	58,83	67,71	17
KUTAI TIMUR	71,80	80,48	59,09	70,46	-

6.8.3. Angka Melek Huruf

Indikator ini merupakan salah satu indikator bidang pendidikan yang membeikan gambaran kualitas sumber daya manusianya. Angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 95,48 persen menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis adalah 95,48 persen. Kecamatan Sengata Utara memiliki angka melek huruf tertinggi yaitu 96,44 persen. Sedangkan Kecamatan Sandaran merupakan kecamatan dengan angka melek huruf terendah, yaitu 90,23 persen. Di negara maju, indikator ini mungkin tidak memberikan pengaruh yang berarti. Namun dinegara berkembang termasuk Inndonesia, pengaruh indikator angka melek huruf sangat besar terhadap nilai IPM.

6.8.4. Rata-rata Lama Sekolah

Selain angka melek huruf, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang dijalani penduduk dalam kegiatan pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 adalah 7,61 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kutai Timur sudah menduduki kelas 2 SMP. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Sengata Utara, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Sandaran dan Karanganyar, yaitu 6,27 tahun.

6.8.5. Disparitas Daya Beli (Purchasing Power Parity)

Idikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan paritas daya belinya semakin meningkat pula. Namun hubungan ini tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum. Penduduk dengan pendapatan sama belum mempunyai paritas daya beli yang sama bila tempat tinggalnya berbeda.

Misalkan seseorang yang berpenghasilan 1 juta rupiah tinggal di Kecamatan Sengata Utara, dan seseorang yang lain tinggal di Kecamatan Sandaran, maka kemungkinan paritas daya belinya berbeda. Itulah sebabnya dalam penghitungan PPP dilakukan beberapa tahapan seperti dijelaskan pada Bab 2.

Besarnya pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 sebesar Rp 619.000,-. Kondisi perekonomian penduduk yang dideteksi melalui pengeluaran riil perkapita di 18 kecamatan di Kutai Timur berkisar antara Rp 614.130,- (Kecamatan Teluk Pandan) dan Rp 616.260,- (Kecamatan Sengata Utara).

6.8.6. Kesimpulan dan Rekomendasi

IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah.

Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

Dalam perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

Indikator IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat diharapkan tercermin dalam angka harapan hidup dan kemampuan daya beli, sedangkan untuk dampak non-fisiknya (intelektualitas) bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat.

Namun perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain seperti kesetaraan jender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga melihat indikator-indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) dan IMH (Indeks Mutu Hidup) sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya.

Berdasarkan bahasan sebelumnya, nampak bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan perubahan yang positif. Krisis memang belum sepenuhnya berakhir, tetapi tanda-tanda kebangkitan kembali ekonomi Kabupaten Kutai Timur sudah mulai terlihat. Hal ini bisa disimak dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang semakin membaik. Kondisi demikian bukan saja akan memberi peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi



juga terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Sinergi dari berbagai faktor tadi tercermin dengan semakin membaiknya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur seperti diperlihatkan oleh peningkatan IPM.

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian dan analisis pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut:

- *Pemerataan penyebaran fasilitas dan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan, seperti di wilayah yang menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas karena kurangnya sarana dan prasarana transportasi.*
- *Angka Drop Out (DO) pada tingkat pendidikan dasar pada umumnya masih cukup tinggi walaupun terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, terutama di wilayah pedesaan dimana pendidikan sering dipandang sebagai 'barang mewah' yang hanya menghabiskan uang tetapi tidak berdampak nyata pada kemampuan ekonomi keluarga dalam jangka pendek.*
- *Kaum perempuan masih belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Angka putus sekolah kaum perempuan cenderung lebih tinggi dari kaum laki-laki dan ini hampir secara merata terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.*
- *Disparitas pembangunan manusia antar kecamatan di Kabupaten Kutai Timur masih cukup tinggi, terutama antar daerah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan tersebut hanya dapat di persempit jika terjadi pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih adil. Otonomi Daerah yang digulirkan dewasa ini sebenarnya bisa menjadi solusi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seharusnya lebih terpacu untuk menggiatkan pembangunan di daerahnya karena sebagian besar kewenangan telah diserahkan ke daerah, sehingga distribusi hasil-hasil pembangunan yang terpusat pada daerah tertentu saja tidak terjadi.*

Dengan adanya gambaran perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur, setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan determinan setiap komponen IPM yang telah dicapai khususnya pada beberapa daerah yang harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan, hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi maka penyusun mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Agar dapat dibuat kebijakan yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor dominan yang menyebabkan akses terhadap pendidikan,

kesehatan dan aktivitas ekonomi kurang maksimal. Di bidang kesehatan misalnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mesti lebih intensif dalam hal perbaikan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian bayi. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh adanya faktor pelayanan kesehatan, lingkungan dan perilaku masyarakat. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, tempat praktek, serta tersedianya tenaga-tenaga dokter, bidan, dan tenaga paramedis lain hingga ke pelosok-pelosok daerah perlu ditingkatkan untuk menunjang kualitas kesehatan penduduk. Di bidang pendidikan, penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah harus tetap mendapat prioritas utama, disamping terus melakukan upaya lain, seperti: pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.

- 2) Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pembangunan manusia maka perlu mengoptimalkan peran komponen masyarakat, misalnya pemuka agama.
- 3) Kebijakan pembangunan manusia seyogyanya sinergis dengan upaya kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.
- 4) Dengan masih rendahnya pendidikan di masyarakat pedesaan (fakta, penduduk Kabupaten Kutai Timur lebih dominan tinggal di pedesaan), perlu langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Membuka lapangan usaha pertanian dan memberdayakan industri kecil merupakan hal yang dapat dilakukan. Kegiatan tersebut dikembangkan dengan lebih mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- 5) Peningkatan pembangunan di berbagai sektor usaha secara seimbang sesuai potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Untuk daerah-daerah pedesaan pembangunan yang optimal dapat dilakukan melalui peningkatan mutu dan sarana irigasi, penyediaan alat-alat pertanian yang mencukupi, sarana transportasi bagi kemudahan pemasaran produksi pertanian, serta pengadaan penyuluhan bagi petani yang berguna untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya merupakan cara-cara peningkatan pembangunan di bidang pertanian.

- 6) Mendorong laju investasi baik pemerintah maupun swasta kepada pembangunan yang mengarah ke daerah-daerah yang kurang berkembang, misalnya ke daerah-daerah pedesaan. Dan dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, upaya pengembangan usaha skala mikro tampaknya dapat menjadi alternatif pilihan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif tertinggal.
- 7) Kemampuan daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan itu sendiri adalah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mendatangkan penghasilan atau upah. Tingkat pendidikan seseorang berperan juga dalam menentukan lapangan pekerjaannya.
- 8) Kebijakan maupun intervensi yang akan dikembangkan hendaknya memprioritaskan pembangunan ekonomi maupun manusia pada wilayah-wilayah yang relatif tertinggal tanpa mengesampingkan wilayah yang dapat dikategorikan sudah "berhasil" dalam pembangunan manusianya.

6.9. Indikator Pembangunan Daerah

Dalam IPD, yang diukur adalah konsep atau kriteria pembangunan suatu daerah. Minimal ada 3 kriteria untuk mengukurnya. Kriteria 1, Keberdayaan pemerintahan, aspek-aspek yang tercakup didalamnya seperti kemampuan dan kualitas aparat pemerintahan itu sendiri, atau sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat untuk melayani masyarakat, atau kita juga dapat melihat dari aspek besarnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam usahanya melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Kriteria yang kedua yaitu Perkembangan Wilayah memiliki subkriteria Fasilitas Publik, yaitu sarana dan prasarana publik yang tersedia di suatu daerah. Sub kriteria yang kedua adalah Ekonomi Wilayah yang memiliki definisi potensi dan hasil dari kegiatan ekonomi dan industri di suatu daerah. Sedangkan yang terakhir adalah Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, kondisi geografis dan masalah lingkungan hidup.



Kriteria yang terakhir yakni Keberdayaan Masyarakat memiliki subkriteria Kependudukan dan Ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi penduduk dan tenaga kerja di suatu daerah.

Subkriteria yang kedua adalah Kesejahteraan Masyarakat yang memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan mutu hidup masyarakat di suatu daerah. Sedangkan Sosial, Politik dan Budaya adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bidang sosial politik dan budaya di suatu daerah.

6.9.1. Indikator untuk menilai Kapabilitas Aparat

- A. Indikator Kualitas PNS
- B. Indikator Jumlah PNS
- C. Indikator Kreativitas PNS

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memberdayakan masyarakat melalui pelayanan masyarakat secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan, diperlukan penataan kembali administrasi dan manajemen pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai dan paradigma baru. Sejalan dengan tuntutan tersebut dan atas dasar Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pengganti dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan ibu kota Sangatta terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 135 Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi dan tugasnya adalah sebagai pengelola pemerintahan di Kabupatennya. Untuk pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk menjalankan/mengatur rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya daerah demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Dari data aparatur Negara (pegawai negeri sipil/PNS) yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 terdapat sebanyak 4.797 orang meliputi tenaga pendidik/guru sebanyak 1.887 orang, tenaga penyuluh 88 orang, tenaga kesehatan

405 orang dan tenaga administrasi strategis sebanyak 2.417 orang. Apabila di rinci berdasarkan golongan PNS terdapat PNS Golongan I sebanyak 93 Orang, golongan II sebanyak 2.594 golongan III sebanyak 1.811 Dan golongan IV sebanyak 299 orang. Apabila di rinci berdasarkan Eselon terdapat PNS Eselon II sebanyak 29 Orang, Eselon III sebanyak 148 dan Eselon IV sebanyak 327 Orang. Apabila di rinci berdasarkan Pendidikan PNS terdapat PNS dengan pendidikan lulus Sekolah Dasar (SD) sebanyak 28 Orang, PNS dengan pendidikan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 79 orang dan PNS pendidikan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 2.030 orang, PNS dengan pendidikan lulus Diploma (Diploma) sebanyak 1.190 Orang, serta untuk PNS yang lulus Perguruan Tinggi (S1, S2, dan S3) sebanyak 1.965 Orang. Lihat Tabel.6.21.

Tabel.6.34. Jumlah Pegawai di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Jenis PNS	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Tenaga Pendidik/Guru	33	999	726	129	1.887
2	Tenaga Penyuluh	0	60	28	0	88
3	Tenaga Medis/Kesehatan	0	283	116	6	405
4	Tenaga Admin/Strategis	60	1.252	941	164	2.417
	Jumlah	93	2.594	1.811	299	4.797

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Timur

Dilihat dari kualitas Pegawai Negari Sipil Kabupaten Kutai Timur setidaknya dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, dimana pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (S1, S2, dan S3) sebanyak 1.963 orang atau sebesar 40,92 persen dan merupakan kondisi cukup ideal yang dapat menunjang kinerja dalam melaksanakan tugas sehari-harinya sesuai tugas dan fungsi. Selain itu pegawai yang telah mengikuti kursus penjenjangan sebanyak 362 orang atau sebesar 7,55 persen dari total jumlah pegawai atau sebesar 71,83 persen dari jumlah pejabat struktural yang ada yaitu sebanyak 504 orang. Lihat Tabel 6.22 berikut.



Tabel.6.35. Kualitas Aparat (Manajemen dan Profesional) di Kabupaten Kutai Timur 2008

No.	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
I.	TINGKATAN PENDIDIKAN	5.292	100,00
1.	Sekolah Dasar (SD)	28	0,53
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	79	1,49
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2.030	38,36
4.	Diploma Satu (D1)	66	1,25
5.	Diploma Dua (D2)	744	14,06
6.	Diploma Tiga (D3)	376	7,11
7.	Diploma Empat (D4)	4	0,08
8.	Sarjana Strata Satu (S1)	1.771	33,47
9.	Sarjana Strata Dua (S2)	191	3,61
10.	Sarjana Strata Tiga (S3)	3	0,06
II.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN	362	100,00
1.	Diklatpim Tingkat II	15	4,14
2.	Sepamen	6	1,67
3.	Sespanas	1	0,28
4.	Diklatpim Tingkat III	115	31,77
5.	Sepama	34	9,39
6.	Sepadya	-	-
7.	Spada	2	0,55
8.	Diklatpim Tingkat IV	155	42,82
9.	Adum	34	9,39
10.	Spala	-	-

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dari jumlah Pegawai sebanyak 4.797 orang tersebut harus melayani jumlah penduduk perempuan sebanyak 115.911 orang dan laki-laki sebanyak 97.851 orang yang berarti setiap pegawai melayani penduduk perempuan sebanyak 20 orang dan penduduk laki-laki sebanyak 24 orang. Kondisi rasio pelayanan pegawai terhadap penduduk semakin menurun dimana pada tahun 2001 setiap pegawai harus melayani penduduk laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan sebanyak 30 orang, hal ini seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah pegawai negeri sipil setiap tahunnya yaitu dari semula sebanyak jumlah pegawai 188 orang tahun 2000 dan tahun 2001 menjadi 1.700 orang hingga 2008 menjadi 4.797 orang.

Apabila dilihat dari jumlah pejabat struktural yang sebanyak 504 orang, ini berarti setiap pejabat eselon II rata-rata membawahi jumlah pejabat struktural eselon III sebanyak 5 orang, dan eselon III membawahi pejabat struktural Eselon IV sebanyak rata-rata 2 orang.

6.9.2. Indikator untuk menilai Keuangan Daerah

1. Indikator *Tax Effort*
2. Indikator Investasi Pemerintah
3. Indikator Transfer Pusat

A. Perkembangan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

Perlakuan system pemerintahan yang sentralistik yang berjalan cukup lama menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah dan mengakibatkan beberapa daerah mengalami ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan daerah lainnya. Kabupaten Kutai Timur berada di wilayah selatan Provinsi Kalimantan Timur dimana infrastruktur baik berupa jalan, jembatan, infrastruktur sarana pendidikan, sarana kesehatan, air dan listrik serta jaringan komunikasi sangat tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah selatan seperti Kota Samarinda maupun Balikpapan. Hal ini mengakibatkan permasalahan yang tak kunjung selesai di Kabupaten Kutai Timur dan berdampak sangat luas pada seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setelah adanya gerakan reformasi, kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan arah dan strategi pembangunan mengalami perubahan, dimana kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini mulai berkurang secara bertahap. Sebagai langkah awal, sejak tanggal 1 Januari 2001, pemerintah pusat telah memberlakukan UU No. 22 tahun 1999, yang mengatur tentang pelimpahan beberapa tugas dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU tersebut pada tanggal yang sama juga mulai diberlakukan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kondisi Kabupaten Kutai Timur yang cukup kaya akan sumber daya alam khususnya pertambangan non migas batu bara dan ternyata hanya sebagian kecil hasil eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam Kabupaten Kutai Timur yang dinikmati masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Namun sejak diberlakukannya UU No.22 dan UU No.25 tahun 1999, kemampuan pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyelenggarakan pembangunan mulai meningkat yang tercermin dari meningkatnya penerimaan APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dibandingkan sebelum diberlakukannya kedua UU tersebut.

Perlakuan sistem pemerintahan yang sentralistik yang berjalan cukup lama menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah dan mengakibatkan beberapa

daerah mengalami ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan daerah lainnya. Kabupaten Kutai Timur berada di wilayah selatan Provinsi Kalimantan Timur dimana infrastruktur baik berupa jalan, jembatan, infrastruktur sarana pendidikan, sarana kesehatan, air dan listrik serta jaringan komunikasi sangat tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah selatan seperti Kota Samarinda maupun Balikpapan. Hal ini mengakibatkan permasalahan yang tak kunjung selesai di Kabupaten Kutai Timur dan berdampak sangat luas pada seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setelah adanya gerakan reformasi, kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan arah dan strategi pembangunan mengalami perubahan, dimana kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini mulai berkurang secara bertahap. Sebagai langkah awal, sejak tanggal 1 Januari 2001, pemerintah pusat telah memberlakukan UU No. 22 tahun 1999, yang mengatur tentang pelimpahan beberapa tugas dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU tersebut pada tanggal yang sama juga mulai diberlakukan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kondisi Kabupaten Kutai Timur yang cukup kaya akan sumber daya alam khususnya batubara. Hanya sebagian kecil hasil eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam Kabupaten Kutai Timur yang dinikmati masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Namun sejak diberlakukannya UU No.22 dan UU No.25 tahun 1999, kemampuan pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyelenggarakan pembangunan mulai meningkat yang tercermin dari meningkatnya penerimaan APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dibandingkan sebelum diberlakukannya kedua UU tersebut.

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai perkembangan dan struktur pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta kontribusi setiap komponen sumber pendapatan terhadap total pendapatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2000 - 2008

B. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Walaupun dalam ulasan ini disajikan data pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2000) dan setelah otonomi daerah (tahun 2001 - 2008), namun dalam melakukan keterbandingan

antar tahun, seluruh sumber-sumber pendapatan daerah sebelum otonomi telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Tabel 6.36. Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dari Pos PAD dan Dana Perimbangan Tahun 2000 - 2008 (Juta Rupiah)

Sumber Pendapatan	2000	2001	2008
1. PAD	739	2.958	69.388
2. Perimbangan	85.815	543.182	1.757.021
3. Lain-lain Yang Sah	-	-	-
Jumlah	86.555	545.140	1.826.409

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pada tahun 2001 awal diberlakukannya UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan peningkatan yang sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang belum diberlakukannya otonomi (tahun 2000) yakni sebesar 86 milyar rupiah menjadi sebesar 543 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan otonomi daerah membawa kebaikan dengan adanya pelimpahan pendapatan sehingga menjadikan kesempatan emas untuk pembangunan. Peningkatan pendapatan daerah ini merupakan pengaruh langsung dari bertambahnya beberapa komponen sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Peningkatan pendapatan daerah ini terus berlanjut hingga di tahun 2008 menjadi 1.826 milyar rupiah atau secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 22,31 persen tiap tahunnya sejak tahun 2001.

Berdasarkan struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terbagi atas dua komponen utama yaitu pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya), dan dana perimbangan (bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus). Dari dua komponen utama sumber pendapatan daerah tersebut peranan dana perimbangan sangat dominan, yakni dengan kontribusi rata-rata sebesar 97,74 persen per tahun terhadap total pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur selama tahun 2001 – 2008. Sementara itu dalam kurun waktu yang sama, peranan pendapatan asli daerah hanya sebesar 2,26 persen per tahun terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur.

C. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pemberlakuan otonomi daerah juga ternyata berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. PAD pada tahun 2000 sebesar 740 juta rupiah juga meningkat drastis menjadi 2,95 milyar rupiah di tahun 2001. Kondisi ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2008 dimana nilai penerimaan pendapatan asli daerah mencapai 69 milyar rupiah atau secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 61,92 persen tiap tahunnya sejak tahun 2001.

Tabel 6.37. Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008 (Juta Rupiah)

Sumber PAD	2000	2001	2008
1. Retribusi	23	490	9.641
2. Pajak Daerah	709	645	4.426
3. Laba BUMD	-	-	13.798
4. Lainnya	8	1.822	41.524
Jumlah	740	2.957	69.388

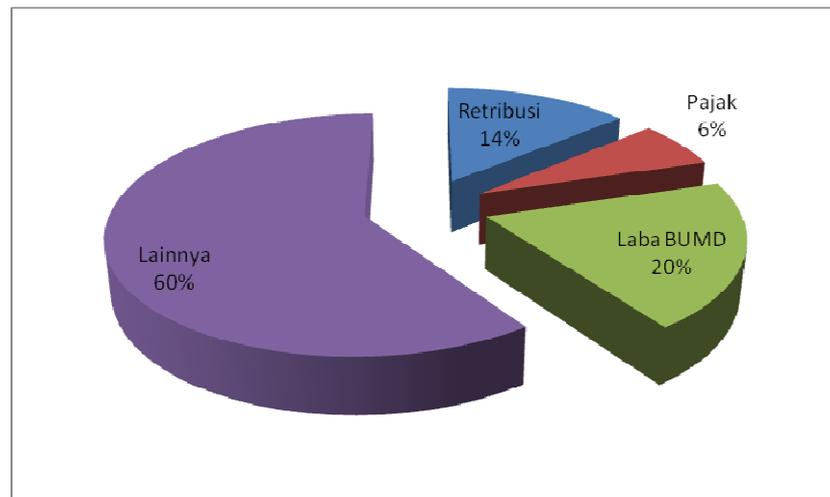
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Peningkatan PAD di tahun 2001 dan 2008 sangat dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah, dan penerimaan laba badan usaha milik daerah dalam hal ini laba yang diperoleh dari pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Bank Pembangunan Daerah, Perusda, dan PDAM), serta penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah lainnya.

Dalam komposisi PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2008 peranan pajak daerah mencapai 6 persen per tahun, sedangkan peranan retribusi daerah sebesar 14 persen per tahun, pendapatan lain-lain sebesar 60 persen per tahun dan laba usaha BUMD sebesar 20 persen per tahun. Komposisi ini di tahun 2008 ini merupakan hasil pergeseran jika dibandingkan dengan tahun 2001 yang

merupakan tahun dimulainya otonomi daerah, dimana peranan laba usaha BUMD dan diikuti peranan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun 2000.

Grafik 6.6 Persentase Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008



D. Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Sangat dominannya peranan dana perimbangan dalam struktur APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, merupakan cerminan begitu besarnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap bantuan pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan di daerah Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2000 dimana dana perimbangan hanya berupa bagi hasil pajak dari pajak bumi dan bangunan (IPEDA), bagi hasil sumber daya alam dari perusahaan sektor kehutanan dan landrent, serta subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan. Peranan dana perimbangan dalam struktur penerimaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat itu sudah mencapai 99,15 persen. Kemudian sejak diberlakukannya PP No. 104 tahun 2000 pada tahun 2001, dimana komponen pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan mengalami penambahan dua komponen, yaitu komponen bagi hasil pajak perorangan pasal 21, serta komponen bagi hasil bukan pajak yang merupakan bagi hasil potensi sumber daya alam dari sektor pertambangan bumi dan gas alam. Pada saat itu juga komponen dana perimbangan yang bersumber dari dana

alokasi khusus tidak dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi tetapi langsung dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota berupa dana reboisasi untuk menanggulangi kerusakan hutan yang terjadi di suatu kabupaten/kota.

Tabel 6.38. Struktur Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008 (juta rupiah)

Sumber Perimbangan	2000	2001	2008
Bagi Hasil Pajak	29.772	39.076	182.813
Bagi Hasil Bukan Pajak	54.889	369.680	1.016.130
DAU	-	103.059	292.217
DAK	-	26.432	47.379
Dana Dekonsentrasi	1.154	4.934	220.960
TOTAL	85.815	1.221.908	1.757.021

Sumber : Dinas Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur

Realisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Kutai Timur, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan dana alokasi umum di tahun 2001 mencapai 1.221 milyar rupiah kemudian meningkat terus hingga tahun 2008 menjadi 1.757 milyar rupiah.

Dengan adanya dana alokasi khusus dalam struktur penerimaan dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di tahun 2008 peranan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur tetap dominan yakni sebesar 96,21 persen. Besarnya penerimaan dana perimbangan di tahun tersebut sangat dipengaruhi oleh bagi hasil bukan pajak (bagi hasil dari sumber daya alam) yang mencapai 1.016 milyar rupiah atau 57,75 persen dari total penerimaan dana perimbangan Kabupaten Kutai Timur di tahun 2008.

Sementara itu dua komponen dana perimbangan lainnya selama tahun 2001 - 2008 memiliki kontribusi sebesar 17,41 persen per tahun untuk dana alokasi umum (subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan), serta sebesar 11,26 persen per tahun untuk komponen bagi hasil pajak (PBB, BPHTB, PPH Perorangan dan Pasal 21).

6.9.3. Indikator untuk menilai Sarana dan Prasarana Pemerintahan

1. Indikator Belanja Non Pegawai
2. Indikator Rentang Kendali Desa
3. Indikator Sarana Komunikasi

1. Indikator Belanja Non Pegawai

Dana yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Dimana setelah diterapkannya system anggaran berdasarkan kepada pendekatan kinerja sejak tahun 2002, belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik.

Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik masing-masing terdiri dari 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan. Pada bagian Belanja Pelayanan Publik, Selain terdiri dari 3 (tiga) kelompok belanja tersebut di atas juga termasuk didalamnya adalah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Pengeluaran Tidak Tersangka.

Kelompok Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Masing-masing terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Sedangkan kelompok Belanja Modal terdiri dari 19 jenis belanja modal, antara lain adalah belanja modal tanah; jalan dan jembatan; bangunan air (irigasi); instalasi; jaringan; bangunan gedung; monument; alat-alat besar; ala-alat angkutan; alat-alat ebngkel; alat-alat pertanian; alat-alat kantor dan rumah tangga; alat-alat studio dan alat-alat konsumsi; alat-alat kedokteran; alat-alat laboratorium;buku/perpustakaan; barang bercorak kesenian dan kebudayaan hewan, ternak serta tanaman; dan persenjataan/keamanan

Tabel.6.39. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Menurut Jenis Belanja Tahun 2000, 2004, dan 2008 (Juta rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran	2004	2006	2008	Konstri-busi (%)		
					2004	2006	2008
A.	Belanja Aparatur Daerah	207.645	418.900	387.000	25,06	34,55	23,77
1.	Belanja Pegawai	13.604	177.309				
2.	Belanja Barang Jasa	38.429	53.856				
3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.019	22.738				
4.	Biaya Pemeliharaan	843	137.838				
5.	Belanja Lain-lain	62.376					
6.	Belanja Modal	76.371	11.310				
B.	Belanja Pelayanan Publik	620.853	759.572	1.241.351	74,94	65,45	76,23
1.	Belanja Pegawai/Adm. umum	85.916	60.295				
2.	Belanja Barang Jasa	22.415	0				
3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.045	0				
4.	Biaya Pemeliharaan	6.308	214.222				
5.	Belanja Lain-lain	0	0				
6.	Belanja Modal	464.903	485.054				
7.	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	35.265	31.117				
8.	Pengeluaran Tidak Tersangka	0	3.000				
C.	Pembiayaan Daerah	828.499	1.212.589	1.628.351	100,0	100,0	100,0

Sumber : Bagian Keuangan Pemkab Kutai Timur

Realisasi belanja daerah pada tahun 2002 mengalami peningkatan dari tahun 2001, yaitu dari Rp. 276.700 juta pada tahun 2001 menjadi Rp. 828.499 juta tahun 2004 dan menjadi Rp. 1.628.351 ribu rupiah pada tahun 2008. peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja aparatur daerah terutama bagian belanja pelayanan public yang peranannya semakin meningkat dari sebesar 74,94 persen tahun 2004 menjadi 76,23 persen pada tahun 2008. Lihat Tabel.6.26 di atas. Sementara itu peranan belanja aparatur daerah cenderung menurun dari 25,06 persen tahun 2004 menjadi 34,55 persen tahun 2006, dan tahun 2007 menjadi hanya 23,77

Jadi dapat dilihat bahwa ternyata pemerintah daerah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (public).

3. Indikator Sarana Komunikasi

Kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pembangunan ekonomi mempunyai pengaruh cukup besar terhadap sosial budaya di daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku sosialnya, baik ekonomi maupun budaya setempat.

Era globalisasi yang terjadi di dunia saat ini dirasakan sangat luar biasa. Tantangan ini menyebabkan penyebaran informasi semakin cepat dan memberikan kehidupan yang semakin transparan. Keadaan ini dapat dirasakan dengan semakin gencarnya informasi ke segala pelosok dunia, baik melalui media cetak elektronik seperti radio dan televisi, maupun melalui media cetak seperti surat kabar atau majalah.

Segi positif informasi adalah membuka cakrawala pemikiran masyarakat sehingga menerima tantangan perubahan zaman dengan keterbukaan dan menjadikan masyarakat yang semakin dewasa. Segi negatifnya, informasi cenderung merusak budaya dan tradisi yang sudah dilestarikan masyarakat. Bahkan informasi yang tanpa batas diterima

masyarakat tanpa kedewasaan cenderung meracuni generasi muda. Dampaknya rasa peduli terhadap sesamanya semakin tipis, rawan akan kenakalan remaja, dan tindakan kriminalitas semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka meraih kemajuan, konsekuensinya kita harus menyiapkan segala sesuatu guna menghadapi tantangan

informasi. Di Kabupaten Kutai Timur masyarakat yang mengakses teknomogi komunikasi cukup tinggi, hal ini setidaknya dapat dilihat dari Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi Komunikasi dan Infomasi Tahun 2006 dari hasil SUSENAS 2006 diperoleh angka pengguna telepon. Sebesar 3,23 persen atau sebanyak 1.727 Rumah Tangga, pengguna handphon (HP) sebesar 41,98 persen atau sebanyak 22.451 Rumah Tangga, pengguna komputer Sebesar 1,37 persen atau sebanyak 732 Rumah Tangga, pengguna internet di rumah tangga sebesar 0,20 persen atau sebanyak 106 Rumah Tangga, lihat tabe. 6.27 berikut.

Tabel 6.40. Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi Komunikasi dan Informasi Tahun 2006

Akses Terhadap Teknologi dan Informasi	Rumah Tangga Pengguna Telepon		Rumah Tangga Tidak Pengguna Telepon	
	Jumlah R.Tangga	%	Jumlah R.Tangga	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Telepon	3.393	6,34	50.079	93,64
Handphon	22.451	41,98	31.030	58,02
Komputer	732	1,37	52.748	98,63
Internet di rumah tangga	106	0,20	53.374	99,80

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (SUSENAS'2006)

Akses rumah tangga terhadap media komunikasi dan informasi seperti telepon rumah relatif masih rendah yaitu hanya 6,34 persen atau 3.393 R. Tangga, sementara itu pengguna hand phone (HP) cukup tinggi hingga 41,98 persen atau sebesar 22.451 R. Tangga, sementara pengguna komputer dan internet masih rendah yaitu hanya 1,37 persen dan 0,20 persen. Keadaan ini merupakan hal yang wajar terjadi mengingat Kabupaten Kutai Timur sejak mengalami era otonomisasi daerah terjadi lonjakan fiskal ke daerah yang berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya peningkatan pendapatan yang tentunya terjadi rumah tangga yang pengeluarannya bertambah untuk yang bersifat skunder seperti handphon yang saat ini mencapai 41,98 persen.

Penggunaan HP ternyata lebih banyak disukai oleh masyarakat dari pada telepon rumah karena penggunaan lebih mudah dibawa kemana-mana, cepat, dan efisien. Dibandingkan dengan telepon yang terbatas pada jaringan telepon, sedangkan jangkauan HP lebih luas penerimaannya sampai di beberapa pelosok desa. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabe 6.28. berikut:



Tabel. 6.41. Jumlah Desa di Setiap Kecamatan Berdasarkan Fasilitas Komunikasi Dan Informasi di Kabupaten Kutai Timur 2008

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga Yang Berlangganan Telpon Kabel	Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos	Program TV Yang dapat Diterima Tanpa Parabola/Kabel			Sinyal HP Didesa
				TVRI	TV Swasta Nasional	TV Luar Negeri	
1	Muara Ancalong	-	-	-	-	-	3 desa ada 6 desa tdk ada
2	Busang	-	-	-	-	-	ada
3	Long Mesangat	-	-	-	-	-	Ada
4	Muara Wahau	-	-	-	-	-	Ada
5	Telen	-	-	-	-	-	6 desa ada
6	Kombeng	-	-	-	-	-	Ada
7	Muara Bengkal	-	-	-	-	-	Ada
8	Batu Ampar	-	1 ada	-	-	-	3 desa ada, ada
9	Sengatta Utara	493-828	2 desa ada	Bisa	-	-	Ada
10	Teluk Pandan	90	-	Bisa	-	-	Ada
11	Sengatta Selatan	142	-	-	-	-	Ada
12	Rantau Pulung	-	-	-	-	-	Ada
13	Bengalon	-	-	-	-	-	Ada
14	Kaliorang	-	-	2 desa bisa	2 desa bisa	1 desa	Ada
15	Kaubun	-	-	1 desa ada	2 desa bisa	1 desa bisa	1 desa ada, ada
16	Sangkulirang	-	1 desa ada	-	-	-	13 desa ada, ada
17	Karangan	-	-	-	-	-	2 desa ada, tdk ada
18	Sandaran	1	-	-	-	-	Ada

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur (Hasil PODES)

Kemudian akses rumah tangga terhadap komputer masih rendah hanya sekitar 2,18 persen dan internet masih di bawah 1 persen, hal ini diduga karena selain harga barangnya mahal, juga menyangkut teknologi tinggi yang memerlukan kecakapan untuk mengoperasikannya.

Jumlah pelanggan telepon PT.Telkom di Kabupaten Kutai Timur data tahun 2005 terdapat sebanyak 4.196 sambungan yang terdiri dari; pelanggan rumah tangga sebanyak 3.393 pelanggan, Usaha/bisnis sebanyak 698 pelanggan, social 22 pelanggan dan wartel 83 pelanggan.

6.9.4. Indikator Untuk Menilai Fasilitas Publik

1. Indikator Pelayanan Kesehatan
2. Indikator Pelayanan Pendidikan
3. Indikator Pelayanan Jalan

1. Pelayanan Kesehatan

Seperti yang dituangkan dalam visi pembangunan Kutai Timur, menyatakan bahwa pembangunan daerah bertumpu pada pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbahurui. Dalam penentuan keberhasilan peningkatan kesejahteraan digunakan berbagai indikator kesejahteraan yang bersifat input dan output. Indikator input berupa proses yang mempengaruhi tercapainya indikator output. Indikator input adalah variabel-variabel yang bersifat investasi berupa pemenuhan fasilitas sosial-ekonomi guna tercapainya suatu output kesejahteraan rakyat.

Implementasi dari indikator input dan output, bila terjadi kesenjangan antara variabel input dengan implementasi hasil (output) yang diharapkan, dapat diartikan bahwa arah kebijakan yang diambil dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah terjadi kekeliruan. Dan sebaliknya jika terjadi kesinergisan antara indikator input dan output maka program kesejahteraan diartikan berhasil mengena pada kebutuhan masyarakat.

Indikator lainnya tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah fasilitas kesehatan. Gambaran mengenai terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan masih terkendala oleh minimnya informasi yang ada. Untuk melihat terpenuhinya sarana tersebut masih dibutuhkan berbagai variabel mengingat jauhnya jarak antar kecamatan dan masih minimnya sarana transportasi yang ada, maka diperlukan pos-pos kesehatan atau puskesmas pembantu yang menyebar di kelompok-kelompok daerah tempat tinggal penduduk. Untuk rumah sakit diperlukan informasi mengenai jumlah tempat tidur pasien rawat inap, perawat dan tenaga medis lainnya seperti bidan, apoteker.

Dari data yang ada, terlihat jumlah rumah sakit pada tahun 2000 hanya ada 1 buah dan meningkat menjadi 4 buah di tahun 2008. Jumlah puskesmas dari hanya 9 puskesmas di tahun 2000 menjadi 19 buah ditahun 2008, yang dapat diartikan seluruh kecamatan (jumlah kecamatan ada 18) saat ini telah memiliki puskesmas, dan puskesmas pembantu (pustu) tahun 2008 tercatat ada 92 unit sementara jumlah Desa di Kutai Timur sebanyak 135 desa, jadi Secara keseluruhan sarana pelayanan kesehatan masyarakat berupa keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu baru mencapai 82,11% dari jumlah desa yang ada di Kutai Timur. Pemenuhan kebutuhan obat-obatan dari toko obat yang dikelola oleh tenaga apoteker juga terus mengalami peningkatan dari tidak ada di tahun 2000 menjadi 14 buah di tahun 2008.

Tabel 6.42. Indikator Layanan Kesehatan/Desa, Persentase Fasilitas kesehatan terhadap jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008

Indikator kesehatan/desa	Satuan	Ratio
Posyandu	persen	148,89
Puskesmas	persen	14,07
Puskesmas pembantu	persen	68,14
Jumlah	persen	82,22

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur (diolah)

Tabel .6.43. Sarana Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Puskesmas	Toko Obat	Jumlah Apotek	Jumlah Klinik/Balai Pengobatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2000	-	9	6	-	-
2001	-	9	15	2	2
2002	1	14	15	3	4
2003	1	14	27	4	4
2004	4	14	27	6	2
2005	4	14	42	7	3
2006	3	14	32	9	6
2007	3	19	39	13	9
2008	4	19	40	14	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

Tidak kalah pentingnya dalam peningkatan layanan kesehatan adalah keberadaan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang sangat diperlukan mengingat pentingnya kesehatan ibu dan anak. Idealnya setiap kelurahan mempunyai minimal 1 unit posyandu yang bertujuan peningkatan kesehatan ibu, ibu hamil/menyusui dan anak balita. Jumlah posyandu pada tahun 2000 ada 170 buah dan naik menjadi 201 buah ditahun 2008. Ratio jumlah posyandu adalah 14 posyandu pada 10 desa/kelurahan.

1.1. Tenaga Kesehatan

Pada tahun 2000 jumlah dokter umum hanya 16 orang dan meningkat menjadi 67 orang ditahun 2008, atau meningkat 76,12%. Kenaikan ini juga berlaku

untuk tenaga mantri kesehatan dan tenaga medis lainnya, dari 201 orang ditahun 2000 menjadi 385 orang ditahun 2008 atau meningkat 47,92%.

Sedapat mungkin tenaga kesehatan medis/paramedis berada disetiap kecamatan dan lebih ideal lagi bila berada disetiap desa/kelurahan. Tenaga kesehatan dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan. Ratio jumlah dokter pada tahun 2008, setiap kecamatan memiliki 2 dokter, atau 4 dokter untuk setiap 10 desa/kelurahan. Dan untuk tenaga mantri atau tenaga medis lainnya setiap desa memiliki 2 tenaga medis setingkat mantri.

Sedangkan tenaga paramedis penolong kelahiran cukup berfluktuasi tahun 2000 ada 29 bidan, dan naik ditahun 2005 mencapai 67 bidan. Tahun 2006 hingga 2008 mengalami penurunan menjadi 48 bidan. Bila setiap bidan diperlukan untuk berada di kecamatan dan desa/kelurahan, terlihat baru 2 bidan untuk setiap kecamatan atau 3 bidan untuk setiap 10 desa/kelurahan. Namun dalam kenyataan yang ada baru 4 kecamatan yang mempunyai bidan desa.

Tabel.6.44. Indikator Tenaga Kesehatan/desa, Persentase Jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008

Indikator kesehatan/desa	Satuan	Ratio
Dokter	Persen	49,6
Tenaga perawat	Persen	251,8
Mantri kesehatan	Persen	320,7
Bidan	Persen	35,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur (diolah)

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa rasio antara dokter dengan jumlah desa/kelurahan sebesar 49,6 persen yang berarti jumlah dokter baru mampu tersedia di desa/kelurahan sebesar 49,6 persen atau sebesar 50,4 persen belum ada dokter. Sementara itu bidan mencapai angka 35,6 persen yang berarti bidan baru memenuhi sebanyak 35,6 persen dari jumlah desa yang ada atau sebesar 64,4 persen belum terdapat bidan. Namun demikian rasio dokter terhadap jumlah penduduk meningkat cukup signifikan, dimana semula pada tahun 2000 satu dokter harus melayani sebanyak 9.156 orang penduduk pada tahun 2008 hanya 3.190 orang. Hal ini menggambarkan pertumbuhan jumlah dokter jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan jumlah penduduk, atau pertumbuhan dokter selama 2000-2008 sebesar 418,75 persen

sementara pertumbuhan penduduk pada periode yang sama hanya 145,90 persen. Begitu pula dengan beban pelayanan bagi perawat maupun mantri/tenaga medis lainnya.

Tabel .6.45. Jumlah Tenaga Kesehatan dan rasio dokter, perawat, mantri/tenaga kesehatan lainnya terhadap penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

Tahun	Dokter			Jumlah Dokter	Jumlah Perawat	Jumlah Tenaga Medis Lainnya	Rasio terhadap Penduduk		
	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis				Dokter	Perawat	Mantri/ Medis Lainnya
2000	12	4	-	16	44	230	9.156	3.329	637
2001	22	10	-	32	49	244	4.911	3.207	621
2002	22	8	4	34	121	243	4.763	1.334	604
2003	31	6	5	42	139	265	3.939	1.190	598
2004	33	9	5	47	138	337	3.585	1.209	566
2005	34	11	7	52	262	409	3.367	668	543
2006	44	12	9	55	322	442	3.693	654	532
2007	49	12	9	60	322	441	3.477	376	511
2008	46	12	9	67	340	433	3.190	628	494

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

1.2 Angka Beban Tanggungan (ABT)

Pengelompokan penduduk berdasarkan struktur penduduk usia muda, produktif dan tua, memberikan suatu gambaran sosial ekonomi bahwa menurut indikator demografi, Kutai Timur masih dapat berkembang dikarenakan kondisi struktur penduduknya sebagian besar merupakan penduduk yang masih mampu melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam suatu indikator untuk melihat seberapa besar penduduk usia produktif dapat membantu dalam pemenuhan ekonomi struktur umur muda dan tua yang disebut sebagai kelompok umur yang belum/tidak dapat berproduksi lagi secara ekonomi biasa disebut dengan angka beban ketergantungan (ABT) yang biasa disebut dengan dependency ratio .

Tabel.6.46. Struktur Penduduk dan Dependency ratio di Kabupaten Kutai Timur

Kel. Umur	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
non produktif	50457	55807	54505	61832	59471	60704	68083	66219	70609
produktif	96053	101356	107441	103629	109058	114402	135072	142443	143151
Jumlah	146510	157163	161946	165461	168529	175106	203155	208662	213760
Dependency Ratio	52,53	55,06	50,73	59,67	54,53	53,06	50,40	46,49	49,32

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

Dependency Ratio (DR) pada tahun 2000 tercatat 52,53% yang artinya setiap 2 orang usia produktif menanggung 1 orang lebih usia non produktif. Sejalan dengan pengontrolan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilihat hasilnya dari pertumbuhan jumlah penduduk, tahun 2008 turun menjadi menjadi 49,32% yang artinya setiap 2 orang menanggung kurang dari 1 orang.

2. Indikator Pelayanan Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembangunan suatu wilayah. Namun SDM yang dimaksud adalah sumber daya yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, skill, maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan Negara. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah harus mengedepankan peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan baik formal maupun non formal yang tepat sasaran.

Undang-undang Dasar 1945 mengamatkan pemerataan akses bagi setiap penduduk untuk memperoleh pendidikan sehingga tercapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam Sistem Pendidikan Nasional dapat dibedakan atas struktur pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan. Pada bahasan ini lebih ditekankan pada pendidikan umum, yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Pendidikan dasar juga dipersiapkan untuk dapat mengikuti pendidikan menengah. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, dibiadang pendidikan telah direncanakan program wajib belajar (wajib) pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994.

Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 beserta amandemennya menyatakan bahwa setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan. Di tingkat regional. Khususnya di Kabupaten Kutai Timur, sejak tahun 2001 melalui kebijakan pemerintah kabupaten telah memberlakukan pembebasan uang sekolah (SPP/BP3) mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Dalam kebijakan tersebut pemerintah daerah memberikan beasiswa bagi penduduk yang sedang mengikuti pendidikan di perguruan Tinggi baik beasiswa yang kuliah di dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Selain itu untuk menambah tingkat kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah Kabupaten juga member honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi untuk semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta termasuk Taman Kanak-kanak.

2.1. Sekolah, Guru, Murid, dan Sarana Pendidikan

Berdasarkan data empiris, yang paling menentukan keberhasilan suatu pembelajaran adalah sarana pendidikan berupa gedung sekolah dan prasarananya juga sosok guru (Jurnal Pendidikan, Mei 2006). Guru sebagai tokoh sentral serta tenaga profesional dibidang pendidikan mempunyai peran yang penting dalam membimbing peserta didiknya dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Selama kurun waktu sembilan tahun 2000-2008 telah terjadi peningkatan jumlah sekolah, murid dan guru menurut jenjang pendidikan, dimana jumlah sekolah tingkat Taman Kanan-kanak (TK) terjadi pertumbuhan sebanyak 84 unit, dan untuk jumlah Murid bertambah sebanyak 4,499 orang, serta untuk jumlah guru bertambah sebanyak 474 orang. Sementara itu untuk jenjang pendidikan SD dalam kurun waktu yang sama telah terjadi peningkatan jumlah sekolah sebanyak 41 unit atau meningkat sebesar 30,59 persen, dan untuk jumlah Murid bertambah sebanyak 8.499 orang atau 43,56 persen, serta untuk jumlah guru bertambah sebanyak 1.382 orang atau 189,57 persen..

Untuk jenjang pendidikan SLTP dalam kurun waktu yang sama telah terjadi peningkatan jumlah sekolah sebanyak 48 unit atau meningkat sebesar 208,69 persen, dan untuk jumlah Murid bertambah sebanyak 7.526 orang atau 192.63 persen, serta jumlah guru meningkat sebanyak 465 orang atau sebesar 153,97 persen.

Untuk jenjang pendidikan SLTA telah terjadi peningkatan jumlah sekolah sebanyak 27 unit atau meningkat sebesar 337,5 persen, dan untuk jumlah Murid bertambah sebanyak 3.128 orang atau 218,89 persen, serta jumlah guru meningkat sebanyak 436 orang atau sebesar 396,36 persen. Untuk jenjang pendidikan SMK tidak terjadi peningkatan jumlah sekolah, dan untuk jumlah Murid bertambah sebanyak 103 orang atau

Tabel.6.47. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menurut Tingkatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

Uraian	Satuan	2000	2008	Pertumbuhan
Jenjang Pendidikan TK :				
1. Sekolah	Unit	42*)	84	200,00
2. Murid	Orang	2.807*)	4,499	160,28
3. Guru	Orang	176*)	474	269,32
Jenjang Pendidikan SD :				
1. Sekolah	Unit	134	175	30,59
2. Murid	Orang	19,512	28,011	43,56
3. Guru	Orang	729	2,111	189,57
Jenjang Pendidikan SLTP :				
1. Sekolah	Unit	23	71	208,69
2. Murid	Orang	3,907	11,433	192,63
3. Guru	Orang	302	767	153,97
Jenjang Pendidikan SLTA :				
1. Sekolah	Unit	8	35	337,5
2. Murid	Orang	1,429	4,557	218,89
3. Guru	Orang	110	546	396,36
Jenjang Pendidikan SMK :				
1. Sekolah	Unit	3	3	0,00
2. Murid	Orang	209	312	49,28
3. Guru	Orang	44	323	634,09

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur

Catatan : *) Data Tahun 2003

1.2. Tingkat Melek Huruf

Salah satu dampak positif dari pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di daerah ini adalah semakin menurunnya penduduk yang tidak mampu membaca/menulis huruf latin. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (SD 6 tahun + SLTP 3 tahun) dan wajib belajar 12 tahun merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan dan peningkatan pendidikan di Indonesia umumnya dan Kutai Timur khususnya.

Dari hasil Susenas 2008 di Kabupaten Kutai Timur tercatat penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin, huruf lainnya, atau dapat membaca huruf latin dan lainnya berjumlah sekitar 141.469 orang atau 95,48 persen dari total penduduk berjum 10 tahun ke atas yang berjumlah 148.167 orang yang berarti jumlah buta huruf masih terdapat sekitar 7.098 orang atau 4,79 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2000, terlihat bahwa penduduk 10 tahun ke atas yang buta huruf lebih banyak yaitu 7.788 orang atau sebesar 7,50 persen. Hal ini berarti selama kurun waktu delapan tahun (2001-2008) terjadi penurunan jumlah buta aksara sebesar -8,86 persen sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan 13,65 persen. Lihat Tabel.5.1. berikut.

Tabel.6.48. Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 15 tahun ke atas

Kemampuan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
membaca/menulis								
Buta huruf	7.5	5.48	6.57	6.78	6.74	4.57	4.52	4.79
Mampu	92.5	94.52	93.43	93.22	93.26	95.43	95.48	95.21
Jumlah	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur (SUSENAS)

Tabel.6.49. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2001-2008

No	Kemampuan Baca - Tulis	2001		2008		Pertumbuhan
		Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Huruf Latin	95.886	92,38	141.070	95,21	46,94
2	Huruf Lainnya	116	0,11	399	0,27	243,96
3	Huruf Latin & Lainnya	96.003	92,50	141.469	95,48	47,35
4	Tidak Dapat	7.788	7,50	7.098	4,79	-8,86
Total		103.791	100,00	148.167	100,00	13,65

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur (SUSENAS)

Jika dilihat pertumbuhannya, maka dari tahun 2001-2008 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penduduk yang memiliki kemampuan baca-tulis huruf latin yakni sebesar 47,35 persen. Sedangkan yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya meningkat sebesar 243,96 persen dan yang tidak dapat membaca dan menulis menurun sebesar 8,86 persen.

1.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani. Adapun di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 rata-rata lama sekolah penduduk sekitar 7,61 tahun, atau dapat dikatakan rata-rata penduduk Kutai Timur menduduki jenjang pendidikan kelas 1 sampai kelas 2 SLTP.

Tabel.6.50. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2002-2008

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pertumbuhan(%)
2002	7,4	-
2003	7,3	-1,35
2004	7,3	0,00
2005	7,3	0,00
2006	7,3	0,00
2007	7,57	3,69
2008	7,61	0,53

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data percepatan variabel DAU)

1.4 Angka Partisipasi Kasar dan Murni

Semakin tinggi akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud.

Dari hasil Susenas 2007 sekitar 19,24 persen penduduk usia 10 tahun ke atas masih aktif sekolah, sedangkan yang tidak bersekolah lagi sekitar 75,46 persen, sehingga penduduk yang tidak/belum pernah sekolah berkisar antara 5,30 persen.

Tabel.6.51. Penduduk Berumur 10 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2007

No	Kemampuan Baca - Tulis	L	%	P	%	Total	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	3.666	4,65	4.042	6,06	7.708	5,30
2	Masih Sekolah	15.574	19,75	12.420	18,64	27.994	19,24
3	Tidak Sekolah Lagi	59.610	75,60	50.190	75,30	109.800	75,46
Total		78.850	100,00	66.652	100,00	145.502	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur (SUSENAS)

Salah satu indikator mengukur pemerataan akses pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar untuk Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2007 sebesar 98,57 persen.

Pada jenjang sekolah yang lebih tinggi (SLTP atau SLTA) angka partisipasi kasar penduduk masih rendah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk bekerja atau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga. Pada tingkat SLTP APK tercatat 30,28 persen sedangkan SLTA sebesar 23,17 persen.

Tabel 6.52. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat/ Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2007

APK	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	98,01	99,22	98,57
SLTP	33,11	26,95	30,28
SLTA	26,48	19,29	23,17

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur

Sedangkan untuk menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, maka digunakan Angka Partisipasi Murni (APM). APM SD pada tahun

2007 sebesar 94,33 persen, APM SLTP sebesar 24,66 persen, dan APM SLTA sebesar 17,66 persen.

Tabel 6.53. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat/ Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2007

APM	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	92,81	96,11	94,33
SLTP	27,15	21,74	24,66
SLTA	21,28	13,42	17,66

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur

Tabel 6.54 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2007

Kelompok Umur	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	98,01	99,22	98,57
13-15	96,43	97,20	96,74
16-18	64,49	58,15	61,91

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur

Adapun APS adalah partisipasi penduduk usia tersebut yang sekolah terhadap seluruh penduduk usia kelompok tersebut. APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 98,57 persen, APS kelompok 13-15 tahun sebesar 96,74 persen, dan APS kelompok 16-18 sebesar 61,91 persen.

1.5. Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Para analis mengandalkan pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat sebagai gambaran keterampilan yang mereka peroleh dan keterbukaan mereka terhadap ide-ide baru. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu negara mencerminkan taraf intelektualitas suatu bangsa.

Tabel 6.55. memperlihatkan bahwa pada kurun waktu sembilan tahun (2000-2008) tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk 10 tahun keatas mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan, hal ini disebabkan penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP keatas mengalami peningkatan yang tajam sementara sebaliknya SD dan Tidak tamat SD atau tidak sekolah persentasenya menurun yaitu dari 32,60 persen tahun 2000 menjadi 24,56 persen tahun 2008 dan yang tamat SD juga menurun dari 38,97 persen tahun 2001 menjadi 33,45 persen. Jenjang pendidikan SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi meningkat berturut-turut dari 15,11 persen menjadi 19,93 persen, dan 17,79 persen menjadi 19,53 persen, serta dari 2,29 persen menjadi 2,53 persen. Sementara itu Tingkatan SD/Tidak/belum tamat SD turun dari 32,39 persen menjadi 24,56 persen. Namun demikian penduduk sampai dengan tahun 2008 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah sebesar 58,01 persen.

Tabel. 6.55. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Belum/tdk sekolah/tdk tamat Sd	32.60	30.07	20.18	28.28	24.05	27.43	31.96	29.48	24,56
SD	32.21	38.97	32.88	42.15	37.31	31.27	39.07	34.79	33,45
SLTP	15.11	12.95	17.53	17.85	17.68	18.90	19.81	19.31	19,93
SMU	17.79	17.03	27.94	11.18	19.94	20.57	7.85	14.82	19,53
PT	2.29	0.98	1.46	0.54	1.02	1.84	1.31	1.60	2,53
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi (SUSENAS)

Tabel 6.56. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan yang Ditamatkan	2000				2008				Pertumbuhan
	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/Belum pernah Bersekolah/Tidak/Belum Tamat SD	20.841	20.631	41.472	32,60	20.905	20.694	41.599	24,56	-24,74
SD/Sederajat	20.250	20.728	40.978	32,21	27.989	28.651	56.640	33,45	3,85
SLTP/Sederajat	10.345	8.872	19.217	15,11	18.166	15.580	33.746	19,93	31,89
SLTA/Sederajat	15.490	7.148	22.638	17,79	22.640	10.448	33.088	19,53	9,78
DI/DII/DIII/DIV/S1/S2 /S3	2.034	883	2.917	2,29	2.982	1.294	4.276	2,53	10,48
Jumlah	68.960	58.262	127.222	100,0	91.795	77.555	169.350	100,0	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi (SUSENAS)

1.6. Rasio Murid - Guru

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar, juga dapat digunakan untuk melihat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung rendah. Rasio murid - guru SD pada tahun 2006 sekitar 15 murid per guru, rasio murid - guru SLTP sekitar 11 murid per guru, dan SLTA sekitar 11 murid per guru.

1.7. Indikator Pelayanan Jalan dan Pelayanan publik lainnya

Berdasarkan uraian konseptual yang telah dipaparkan diatas, gambaran kabupaten Kutai Timur dalam hal melihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat menggunakan kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang diimplikasikan berupa indikator input investasi pemenuhan kebutuhan akan layanan publik seperti pemenuhan air bersih, listrik, fasilitas keamanan kebakaran, pendidikan dan transportasi.

Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan publik seperti air bersih, listrik dan sarana kesehatan terlihat berfluktuasi. Fluktuasi ini lebih dikarenakan penambahan jumlah rumah tangga masih belum diimbangi dengan penambahan peningkatan sarana layanan publik.

1.8. Pelayanan Air dan Listrik

Air dan listrik merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan tersalurnya air secara merata, terpenuhinya standar air layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang 80% kebutuhan fisik manusia adalah pemenuhan kebutuhan akan air, menjadikan tubuh yang sehat dan siap melakukan kegiatan sosial ekonomi guna pemenuhan kebutuhan hidupnya.

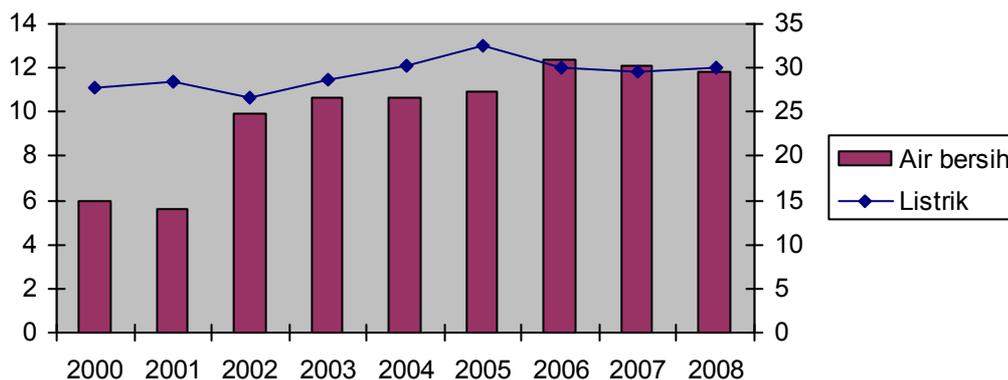
Air bersih yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) dari tahun 2000 hingga 2008 mengalami fluktuasi. Tahun 2000 yang merupakan masa transisi dimulainya otonomi daerah Kutai Timur baru 5,95% rumah tangga yang mendapat saluran air bersih, dan terus meningkat hingga tahun 2006 mencapai 12,36%. Namun pada tahun 2007-2008 turun menjadi sekitar 12,07% dan 11,81% pelanggan yang mendapat layanan air bersih.

Bila dilihat jumlah pelanggan air bersih dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan itu adalah peningkatan volume air bersih yang digunakan. Tahun 2000 jumlah pelanggan mencapai 2.246 pelanggan dengan debit air baku utama 940.068 m³ dan meningkat pada tahun 2008 jumlah pelanggan mencapai 6.329 dengan debit air baku mencapai 3.650.000 m³. Persentase air yang digunakan terhadap air baku yang tersedia pada tahun 2000 sebesar 53,27% dan ditahun 2008 turun menjadi 37,03%. Dengan kata lain peningkatan pelanggan belum maksimal bila melihat masih rendahnya pemanfaatan air bersih yang tersedia.

Rumahtangga pengguna air bersih untuk minum tidak hanya bersumber dari PDAM. Dari tabel yang ada sumber air minum rumahtangga banyak yang menggunakan air sungai. Pada tahun 2007 berturut-turut dari persentase terbanyak sumber air yang digunakan adalah 25,40% rumahtangga menggunakan air sumur tidak terlindung, 24,33% rumahtangga menggunakan air sungai, dan 16,01% menggunakan air ledeng (PDAM) untuk air minum.

Pemenuhan kebutuhan akan listrik untuk Kutai Timur juga mengalami fluktuasi, tahun 2000 ada sekitar 27,73% rumahtangga yang mendapat aliran listrik PLN, dan turun ditahun 2002 menjadi 26,71%. Persentase pemenuhan listrik terus meningkat hingga tahun 2005 mencapai 32,43%, namun turun kembali hingga sekitar 29,94% rumahtangga pelanggan listrik.

Grafik 6.7 . Persentase Pelanggan Air bersih dan Listrik



Jika dilihat berdasarkan jenis pelanggan, penggunaan listrik masih didominasi untuk pemenuhan kebutuhan rumahtangga. Tahun 2000 sekitar 93,59% pelanggan listrik adalah rumahtangga dari 10.460 jumlah pelanggan, dan ditahun 2008 turun menjadi 91,48% adalah rumahtangga dari 15.507 pelanggan dan selebihnya digunakan untuk usaha dan penerangan fasilitas umum.

Produksi listrik di Kutai Timur setiap tahun mengalami lonjakan pemakaian yang cukup tajam. Pada tahun 2000 produksinya mencapai 24.952 MWH dan meningkat tajam menjadi 72.808,06 MWH ditahun 2008 atau naik sekitar 65%. Dari produksi listrik yang ada terjual sebesar 24.717 MWH ditahun 2000 dan 66.625 MWH ditahun 2008. Atau jika dipersentasekan dari hasil yang diproduksi pada tahun 2000 terjual 99,06% dan turun ditahun 2008 menjadi 91,51%.

Masih rendahnya persentase kemampuan PLN dalam memenuhi fasilitas penerangan rumahtangga, maka untuk memenuhi kebutuhan listrik rumahtangga diperoleh dari berbagai sumber penerangan. Selama tahun 2000 hingga 2008 sekitar 22,52% menggunakan listrik non PLN dan selebihnya terutama untuk daerah pedesaan menggunakan non listrik seperti petromak, pelita dan sentir. Dari data yang ada ternyata pelanggan listrik PLN yang ada hanyalah pada kecamatan-kecamatan tertentu saja. Dari 18 kecamatan yang ada yang teraliri listrik PLN 61,11% (11 kecamatan).

1.9. Layanan Publik Keamanan dari Kebakaran

Pemantauan Pelayanan publik lainnya yang juga sangat perlu diperhatikan adalah mengenai ketersediaan fasilitas keamanan dari situasi kebakaran yang sering terjadi baik didaerah pemukiman maupun kebakaran hutan/ladang dikarenakan pengaruh musim panas dan kondisi struktur tanah yang berpotensi mudah menimbulkan panas karena mengandung tambang batubara/ minyak. Sarana alat pemadam kebakaran yang ada sepertinya baru berada di ibukota Kutai Timur. Kejadian kebakaran dipemukiman penduduk terlihat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 20002 kebakaran hanya tercatat 2 kali dan terus meningkat dan pada tahun 2008 tercatat hingga 10 kali kebakaran didaerah pemukiman penduduk. Belum lagi kebakaran didaerah pasar/pusat perbelanjaan, hutan dan lahan pertanian yang pada tahun 2006 tercatat sebanyak 26 kali terjadi kebakaran hutan/lahan.

1.10. Perumahan

Peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas masyarakat diwujudkan dengan pembangunan nasional di segala bidang secara berimbang. Dalam bidang perumahan, pembangunan tidak hanya menyangkut segi kuantitatif, melainkan juga kualitatif yang memungkinkan terselenggaranya perumahan sesuai dengan hakekat dan fungsinya. Kondisi perumahan dan lingkungan mencerminkan kondisi

penduduk yang tinggal di perumahan dan lingkungan tersebut. Gambaran kondisi perumahan dan lingkungan tidak hanya dilihat secara fisik saja tetapi juga harus dilihat dari akses penghuni rumah ke berbagai fasilitas perumahan, seperti air bersih, pembuangan sampah/kotoran, listrik, dsb.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi selain pangan dan sandang. Rumah dalam kehidupan berfungsi sebagai tempat tinggal yang diperlukan manusia untuk memasyarakatkan diri. Kondisi fisik sebuah bangunan mencakup lantai, atap dan dinding. Rumah merupakan pusat kegiatan budaya manusia dalam rangka mencapai tujuan dan kesempurnaan hidup.

Luas lantai yang dihuni rumahtangga menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk. Semakin luas lantai yang dihuni oleh suatu rumahtangga, maka semakin baik pula kondisi rumah tangga tersebut.

1.11. Pelayanan Jalan

Pembangunan transportasi di Kabupaten Kutai Timur memiliki arti terpenting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan karakteristinya, wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dikategorikan tiga kawasan yang berbeda, yakni kawasan pantai/pesisir, pedalaman, dan kawasan perkotaan. Meskipun hampir semua kawasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun karena terletak secara geografis dan topografinya relatif sulit dan berat, sehingga kawasan pedalaman mengalami ketertinggalan. Dengan kondisi minimnya aksesibilitas dan pola penyebaran penduduk yang masih timpang semakin menciptakan kesenjangan ekonomi dan disparitas regional antar kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian pembangunan transportasi sangat berperan dalam langkah awal dalam upaya pemerataan pembanguana di semua sektor. Disamping itu, selain berfungsi sebagai prasarana yang dapat membuka daerah-daerah yang masih tertinggal dan terisolasi juga dapat menumbuhkan minat investasi karena terbangunnya ruas jalan yang melalui lokasi deposit sumber-sumber daya galian/mineral dan hutan.

Prasarana Jalan

Sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Kutai Timur terutama untuk kawasan pedalaman masih sangat terbatas. Moda transportasi pada kawasan tersebut tertumpu pada moda angkutan sungai dan darat walaupun jaringan jalan yang

tersedia terbatas. Distribusi barang dan jasa menggunakan moda angkutan sungai masih dan darat ditemui kendala seperti pendistribusian memerlukan waktu yang lama dan tergantung musim. Sedangkan kendala angkutan darat membutuhkan biaya yang relatif mahal, kemampuan daya angkut yang terbatas, serta minimnya moda angkutan udara yang tersedia. Untuk pembukaan jaringan jalan merupakan alternatif terbaik dalam mempermudah aksesibilitas ke kawasan pedalaman dan daerah pesisir. Peningkatan dan pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa ke kota kecamatan dan dari kota kecamatan ke Ibukota kabupaten, hal ini diharapkan dapat membuka daerah terpencil dan terisolir dari keterbatasan dan ketertinggalan sehingga fungsi distribusi dapat lebih optimal.

Pembangunan infrastruktur prasarana jalan hingga menghasilkan jalan yang dapat dilalui tahun 2008 mencapai 1.379,30 km yang terdiri dari Jalan Negara (465,00 km), jalan Propinsi (287,00 km), jalan kabupaten 627,80 km. Jika dilihat rasio panjang jalan terhadap luas wilayah terlihat adanya perkembangan total panjang jalan secara bertahap, dimana pada tahun 2000 rasio tersebut mencatat angka 3,11 persen, kemudian tahun 2005 menjadi 3,86 persen dan tahun 2008 kondisinya masih tetap tercatat 3,86 persen dan hal ini menunjukkan masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh prasarana jalan darat, namun demikian laju pertumbuhan panjang jalan selama kurun waktu sembilan tahun 2000-2008 sebesar 23,94 persen atau dengan rata-rata pertahunnya sebesar 2,99 persen.

Tabel 6.57. Total Panjang Jalan dan Panjang jalan Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008 (Km)

No.	Jenis Data	2000	2005	2008	Pertumbuhan 2000-2008 (%)
1.	Total Panjang Jalan	1.112,84	1.379.30	1.379.30	23,94
2.	Panjang Jalan Negara	380,84	464,5	465,00	22,09
3.	Panjang Jalan Provinsi	241,00	287,00	287,00	19,08
4.	Panjang Jalan Kabupaten	491,00	627,80	627,80	27,86
5.	Panjang Jalan Per Luas Wilayah (%)	3,11	3,86	3,86	24,12

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

Kondisi permukaan jenis jalan di Kabupaten Kutai Timur, untuk jalan negara sebagian besar berpermukaan aspal, jalan provinsi sebagian besar aspal dan kerikil, dan jalan kabupaten sebagian besar kerikil dan tanah. Sementara itu kondisi jalan

negara sebagian besar pada kondisi baik, jalan provinsi dalam kondisi baik, dan jalan kabupaten sebagian besar kondisinya juga baik. Untuk rasio panjang jalan yang baik terhadap total panjang jalan berfluktuatif tetapi tiga tahun terakhir angkanya selalu meningkat yaitu dari 0,43 menjadi 0,57, dan tahun 2008 menjadi 0,62 hal ini sebagaimana pada tabel berikut 6.58 berikut.

Tabel 6.58. Rasio Panjang Jalan yang berkondisi baik dengan Total Panjang Jalan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Jenis Data	2000	2004	2006	2008
1.	Panjang Jalan dengan kondisai Baik	891,84	572,13	788,87	848,75
2.	Total Panjang Jalan	1.112,84	1.311,80	1.379.30	1.379.30
3.	Rasio Panjang Jalan berkondisi baik terhadap total panjang jalan	0,80	0,43	0,57	0,62

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

Perhubungan Darat

Arus lalu lintas pengguna jalan semakin meningkat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor terutama di era otonomisasi daerah dimana jumlah kendaraan bertambah begitu signifikan dengan rata-rata per tahunnya mencapai 179,03 persen. Namun demikian sarana dan prasarana pelayanan transportasi umum seperti jalan lebih lambat dan masih belum dapat menjangkau seluruh daerah Kutai Timur, hal ini menjadikan tingkat kepadatan kendaraan per km meningkat begitu pesat dari sebesar 4,21 unit kendaraan bewrmotor per km tahun 2000 menjadi 50,39 unit di tahun 2008. Lihat Tabel 6.58 berikut.

Tabel 6.59. Banyaknya Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Polres Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Uraian	Satuan	2000	2003	2006	2008
(1)	(2)	(2)	(5)	(8)	(10)
Jumlah Kendaraan	Unit	2.065	2.470	16.172	31.641
Pertumbuhan	Persen	-	1.86	88,22	39,87
Rasio Panjang Jalan Kabupaten terhadap Jumlah Kendaraan	Unit/Km	4,21	3,93	25,76	50,39

Sumber : Polda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim Dalam Angka)

Lalu lintas antar desa dari delapan belas kecamatan di Kutai Timur kesemuanya dapat dilewati melalui jalan darat dan terdapat dua belas kecamatan

yang melalui darat dan air atau sebesar 66,66 persen. Sebagian besar jalan darat masih berpermukaan tanah yaitu sebanyak sepuluh kecamatan atau 55,55 persen, dan yang permukaannya diperkeras sebanyak empat kecamatan atau 22,22 persen, serta hanya tiga kecamatan atau 16,66 persen yang permukaannya jalannya aspal yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Teluk Pandan, dan Sangatta Selatan. Sementara itu jenis angkutan umum utama ke ibu kota kecamatan sebagian besar menggunakan angkutan ojek motor yaitu sebanyak sebelas kecamatan atau 61,11 persen, dan hanya tiga kecamatan yang transportasi utamanya menggunakan kendaraan roda empat atau 16,66 persen yaitu Kecamatan Kombeng, Muara Bengkal, dan Sangatta Utara dan sisanya menggunakan transportasi umum perahu kapal motor yaitu Kecamatan Busang, Telen, Sangkuliurang dan Sandaran.

Sementara itu kepadatan jaringan jalan di dalam kota yang diambil sampel pada Jl. Yos Sudarso menunjukkan tingkat kepadatannya meningkat pada tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya yaitu dari sebesar 35 unit per jam menjadi 47 unit per jam atau mengalami pertumbuhan 34,29 persen Lihat tabel.6.59.

Tabel 6.60. Kepadatan Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Timur 2007-2008

No.	Kepadatan Jaringan	2007	2008	Pertumbuhan (%)
1.	Samarinda - Sangatta;dengan lokasi survey pada jalan Wolter	35 unit/jam	47 unit/jam	34,29
2.	Yos' Sudarso Sangatta (satu arah)			
	- Yos' Sudarso I	40 unit/jam	52 unit/jam	34,29
	- Yos' Sudarso II	52 unit/jam	65 unit/jam	25,00
	- Yos' Sudarso III	52 unit/jam	65 unit/jam	25,00
	- Yos' Sudarso IV	46 unit/jam	53 unit/jam	15,21

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kutai Timur

6.9.5 Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah:

1. Indikator PDRB per kapita
2. Indikator ICOR
3. Indikator Akses Keuangan

1. Indikator Pendapatan Perkapita

Perekonomian Kabupaten Kutai Timur menunjukkan kecenderungan yang cukup baik, karena selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur selalu tumbuh positif. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor pertambangan dengan komoditi batubaranya yang dominan. Sektor-sektor lain pada umumnya juga mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kutai Timur dalam hal faktor produksi, harga, tenaga kerja serta anggaran pemerintah daerah.

Seiring dengan era otonomi daerah dan makin mantapnya pembangunan di daerah, perekonomian tumbuh seirama dengan program-program pembangunan yang ada di daerah. Sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, bangunan dan keuangan, sudah menampakkan perkembangan yang menggembirakan dalam turut berpartisipasi membangun Kabupaten Kutai Timur.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 adalah sebesar 24,3 triliun rupiah atau lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 18,1 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batubara nilainya meningkat dari 3,01 triliun rupiah pada tahun 2007 menjadi 3,55 triliun rupiah pada tahun 2008.

1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selama tahun 2008, perekonomian Kabupaten Kutai Timur tumbuh sebesar -0,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah dari produk barang dan jasa yang ada di Kabupaten Kutai Timur sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2007, sehingga mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tanpa unsur migas dan batubara, pertumbuhannya tetap positif sebesar 5,34 %.

Angka pertumbuhan ini memberikan gambaran yang bersifat makro bahwa perekonomian Kabupaten Kutai Timur di tahun 2008, cenderung melemah dibandingkan pada tahun sebelumnya (2007). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh hasil komoditi dari kegiatan pertambangan khususnya batubara (sub sektor pertambangan non migas) yang kontribusinya mencapai 86,17 % dari keseluruhan nilai PDRB. Komoditi batubara menjadi andalan kabupaten ini karena produksi dari kegiatan di sub sektor tersebut sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga menempatkan Kabupaten Kutai Timur sebagai

salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengekspor komoditi pertambangan tanpa migas khususnya batubara.

Tabel 6.61 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008

Tahun	Perkembangan PDRB (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2000	5.493.583	3,21
2001	7.069.721	18,91
2002	6.991.177	18,30
2003	6.385.508	-3,02
2004	9.863.319	23,81
2005	12.315.298	20,86
2006	16.264.633	22,39
2007	18.099.220	8,13
2008	24.312.292	-0,84

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur

Dari 9 lapangan usaha sektor ekonomi yang ada, pada tahun 2008, tercatat semua sektor menghasilkan pertumbuhan yang positif, kecuali sub sektor pertambangan batubara (-1,64 %), sedangkan sektor yang tertinggi pertumbuhannya adalah sektor Konstruksi. Bila diurutkan pertumbuhan PDRB menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi ke yang terendah, maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Konstruksi sebesar 9,08 %, diikuti oleh sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 7,24 %. Sektor ekonomi ketiga tertinggi pertumbuhannya adalah sektor Pertanian yaitu sebesar 5,52 %, keempat sektor Keuangan sebesar 4,81 % dan kelima adalah sektor Jasa-jasa sebesar 4,39 %. Pertumbuhan ekonomi sektor berikutnya secara berurutan yaitu sektor Perdagangan, Listrik & Air Bersih dan terakhir adalah sektor Industri, yang masing-masing tumbuh sebesar 3,03 %, 2,56 % dan 1,80 %.

Sektor pertambangan khususnya sub sektor pertambangan batubara walaupun mempunyai kontribusi yang sangat dominan, tetapi pada tahun 2008 produksinya sedikit menurun dibanding produksi pada tahun 2007, sehingga secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2008, nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas atau batubara berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar 12,568 triliun, nilai ini menurun dibandingkan nilai tambah pada tahun sebelumnya yang sebesar 12,815 triliun rupiah. Walaupun jika ditinjau secara harga, besaran nilai

tambah komoditi ini nilainya masih tetap meningkat disebabkan pengaruh harga komoditi batubara di pasaran internasional yang cukup stabil dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan produksinya justru mengalami penurunan.

Sektor bangunan atau konstruksi mengalami peningkatan cukup baik sehingga mencapai pertumbuhan 9,08 %, pertumbuhan sektor ini ditunjang oleh banyaknya realisasi proyek-proyek infrastruktur yang ada di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2008, seperti pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, sekolah-sekolah, gedung pemerintah, dan bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal yang dikerjakan oleh pihak swasta lokal maupun luar Kabupaten Kutai Timur.

Sektor kedua tertinggi pertumbuhannya pada tahun 2008 adalah sektor angkutan, pertumbuhannya mencapai 7,24 %. Peningkatan di sektor ini umumnya disumbang oleh kegiatan dari angkutan sungai, angkutan jalan raya dan jasa penunjang angkutan.

Sektor pertanian juga cukup baik peningkatannya pada tahun 2008 yaitu sebesar 5,52 %, kenaikannya ditunjang oleh kenaikan produksi tanaman perkebunan yang mencapai hingga 13,80 %, umumnya sub sektor ini meningkat utamanya berasal dari peningkatan produksi komoditi kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar serta kakao dan kelapa. Selain itu dari beberapa komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan juga meningkat sebesar 6,30 %, kemudian peternakan dan perikanan juga mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan hingga mencapai pertumbuhan 6,57 % dan 5,79 %. Apabila sub sektor kehutanan dikeluarkan dari sektor pertanian maka pertumbuhan sektor pertanian tentunya akan lebih tinggi lagi, tetapi dengan semakin banyaknya areal hutan yang dirambah dan penebangan secara ilegal maka sub sektor ini semakin menurun produksinya, selama 5 tahun berturut-turut pertumbuhan sub sektor ini kian menurun.

Selanjutnya sektor keuangan, pertumbuhan sektor ini umumnya berasal dari peningkatan sub sektor bank, jasa perusahaan dan sewa bangunan, dimana terjadi kenaikan nilai tambah bank, output jasa perusahaan dan pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, baik merupakan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal hingga mencapai 4,81 %, walaupun tidak setinggi tahun lalu, pertumbuhan pada tahun 2008, masih cukup baik karena masih tingginya kecenderungan permintaan untuk sewa dan kontrak rumah terutama bagi warga luar

Kabupaten Kutai Timur yang bekerja di instansi pemerintah dan karyawan perusahaan tambang seperti di Kecamatan Sengata dan Bengalon.

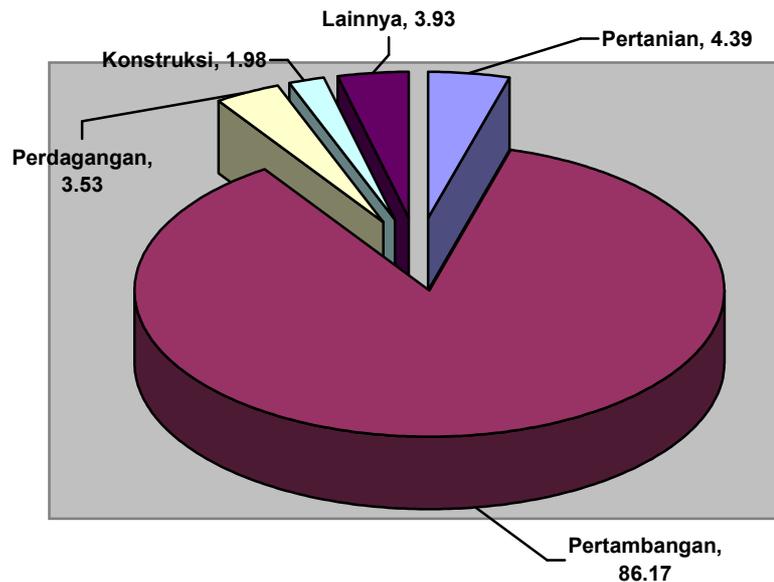
Sektor lain yang pertumbuhannya positif cukup tinggi adalah jasa-jasa, peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada jasa pemerintahan umum yang mengalami kenaikan sebesar 4,12 %, hal ini tentunya sejalan dengan peningkatan anggaran untuk belanja aparatur yang mengalami kenaikan. Untuk jasa-jasa swasta kenaikan cukup tinggi terjadi pada jasa sosial kemasyarakatan seperti jasa kesehatan dan pendidikan yang meningkat pada tahun 2008 menjadi 5,65 %. hal ini terutama akibat kenaikan jumlah siswa pada sekolah swasta dan jumlah dokter serta petugas kesehatan lainnya yang meningkat.

1.2. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan atau kontribusi suatu sektor terhadap sektor lainnya dapat dilihat dari distribusi persentase atau peranan suatu sektor terhadap total seluruh sektor dalam membentuk PDRB Kabupaten Kutai Timur. Selama lebih dari 9 tahun, sejak tahun 1999 hingga tahun 2008 atau sejak kabupaten ini berdiri, sumbangan sektor pertambangan sub sektor pertambangan tanpa migas dengan komoditi andalannya yaitu komoditi batubara selalu yang terbesar. Sumbangan sektor ini rata-rata berada pada level di atas 70 %. Pada tahun 2008, peranan sub sektor ini bahkan mencapai level tertinggi kedua sejak tahun 2000 yaitu mencapai lebih dari 86 %, berarti dengan kata lain sumbangan sektor lainnya selain pertambangan adalah hanya dibawah 14 %.



Grafik 6.8 Struktur Perekonomian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 (%)



Sektor yang kontribusinya terbesar kedua setelah pertambangan adalah sektor pertanian, seiring dengan terus meningkatnya peran sektor pertambangan dalam kurun 5 tahun terakhir, maka peran sektor ini justru terus menurun yaitu dari 8,9 % pada tahun 2003 menjadi 6 % pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 peranannya terus menurun yaitu hanya sebesar 4,39 %, diperkirakan untuk tahun-tahun selanjutnya andil dari sektor ini akan tetap stabil mengingat prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang mulai berorientasi kepada pembangunan pertanian dalam arti luas.

Adapun sumbangan sektor-sektor lainnya masih dibawah 4 % yaitu sektor perdagangan dengan *share* sebesar 3,5 %, bangunan 1,98 %, angkutan 1,90 %, keuangan 0,98 % serta jasa-jasa 0,65 %. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih dengan *share* masing-masing hanya sebesar 0,29 % dan 0,11 %.

1.3. Struktur Perekonomian Tanpa Migas dan Batubara

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) berupa batubara, migas dan bahan tambang lainnya, akan tetapi komoditi-komoditi tersebut adalah komoditi SDA yang tidak dapat terbaharui (*unrenewable*). Perubahan yang terjadi pada komoditi tambang tersebut khususnya batubara baik pada produksi maupun harga, pasti berpengaruh

terhadap besarnya sumbangan sektor-sektor lainnya seperti pertanian dan konstruksi/bangunan. Jika komoditi batubara dan migas ini dikeluarkan dari PDRB Kabupaten Kutai Timur maka peranan sektor-sektor lainnya akan lebih nyata terlihat pengaruh dan andilnya.

Berdasarkan PDRB tanpa migas dan batubara, sektor pertanian, bangunan dan perdagangan merupakan sektor yang paling dominan pengaruhnya terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 dengan sumbangan masing-masing sebesar 30,03 %, 24,19 % dan 13,58 %, disusul dengan sektor angkutan dan keuangan dengan kontribusi sebesar 12,99 % dan 6,70 %.

Selanjutnya adalah sektor pertambangan sub sektor penggalian, jasa-jasa dan industri merupakan sektor penyumbang PDRB lainnya dengan peranan masing-masing sebesar 5,30 %, 4,43 % dan 2 %. Dan terakhir sektor listrik dan air bersih adalah sektor terkecil kontribusinya dengan sumbangan hanya 0,78 %.

1.4. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 adalah sebesar 126,8 juta rupiah atau meningkat sebesar 28,72 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan regional per kapita Kabupaten Kutai Timur juga meningkat dari 73,16 juta rupiah pada tahun 2007 menjadi sebesar 98,43 juta rupiah pada tahun 2008, sehingga dapat dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kutai Timur mampu menciptakan nilai tambah 98 juta rupiah pada tahun 2008.

Tabel 6.62. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000 - 2008

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	Pendapatan Regional Per Kapita (Juta Rp)
2000	37.480.442	28.196.500
2001	46.424.277	34.887.591
2002	44.084.173	32.998.555
2003	38.665.132	28.942.212
2004	58.073.531	43.594.793
2005	69.636.967	52.788.525
2006	89.484.609	68.006.204
2007	98.509.017	73.161.391
2008	126.806.167	98.425.305

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur

Sejalan dengan distribusi persentase PDRB yang dipisahkan menurut PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara, maka akan terlihat besaran

PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita apabila unsur migas dan batubara dikeluarkan dari perhitungan.

PDRB per kapita di luar migas dan batubara pada tahun 2008 sebesar 9,8 juta rupiah, sedangkan pendapatan regional per kapita tanpa unsur batubara dan migas mencapai 7,8 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila unsur migas dan batubara dikeluarkan dari perhitungan PDRB Kabupaten Kutai Timur, maka pada tahun 2008 secara rata-rata setiap penduduk Kabupaten Kutai Timur hanya mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 7,8 juta rupiah.

Indikator Akses Keuangan

1. Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran di Kalimantan Timur

Pada tahun 2008, jumlah kantor bank umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan dari 2 menjadi 3 buah; dengan total aset mencapai Rp 694,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 93,36 %. Peningkatan jumlah aset ini tentunya ditunjang oleh peningkatan pada jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan di Kutai Timur. Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan terbesar terjadi pada Giro, yaitu sebesar 1.621 % atau mencapai Rp 1,06 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya dana Pemerintah Daerah (Pemda) di yang ditempatkan pada perbankan.

Dari sisi penyaluran kredit pada 2008, porsi terbesar adalah kredit modal kerja yang mencapai 313,5 miliar. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan berdasarkan lokasi kantor bank pada periode berjalan telah mencapai 42,16%. Sedangkan LDR berdasarkan lokasi proyek mencapai 33,39 % atau sebesar Rp 2,08 triliun. Berdasarkan kredit UKM, jumlah yang telah disalurkan mencapai Rp 286,8 miliar atau 41,3 % dari keseluruhan kredit perbankan. Kredit UKM ini mengalami peningkatan sebesar 46,99 % dari tahun 2007.

2. Analisis Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran

Industri perbankan di Kutai Timur pada triwulan 2008 menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada jumlah kantor bank umum yang beroperasi, jumlah aset, DPK dan penyaluran kredit. Jumlah dana pihak ketiga yang tersimpan pada industri perbankan Kutai Timur masih didominasi oleh giro, dan peningkatan yang terjadi pada DPK tersebut masih dipengaruhi oleh cukup tingginya suku bunga

SBI dan berbagai penawaran berhadiah dari perbankan untuk menarik minat nasabah. Berlimpahnya jumlah DPK ini masih belum dapat disalurkan dalam bentuk kredit secara optimal sebagai akibat dari belum optimalnya daya serap pelaku ekonomi dan kecenderungan perbankan untuk menempatkan dana mereka pada SBI yang lebih rendah risikonya.

2.1. Perkembangan Usaha Bank Umum

Jumlah kantor bank umum yang beroperasi di Kutai Timur mengalami peningkatan pada tahun 2008 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebanyak 1 kantor menjadi 3 kantor.

Tabel 6.63. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum di Kutai Timur

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008
Bank Asing dan Campuran	-	-	-	-	-
Bank Pembangunan Daerah	1	1	1	1	1
Bank Swasta Naional	-	-	1	1	2
Bank Syariah	-	-	-	-	-
Bank Pemerintah	-	-	-	-	-
Total	1	1	2	2	3

Sumber: Bank Indonesia Cabang Samarinda

2.2. Aset Bersih

Pertumbuhan aset bersih bank umum di Kutai Timur pada 2008 mengalami peningkatan sebesar 93,36 % dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode berjalan, jumlah aset tercatat sebesar Rp 694,8 miliar, meningkat dari Rp 359,3 miliar pada 2007.

2.3. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pada 2008, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank umum di Kutai Timur mencapai Rp 2,08 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,48 % dari Rp 1,935 triliun pada 2007. Berdasarkan jenis simpanannya, peningkatan tertinggi tercatat pada giro dibandingkan jenis simpanan lainnya, yaitu meningkat sebesar 1.621 % dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 61,6 miliar menjadi Rp 1,643 triliun. Deposito meningkat 317 % dari Rp 25,9 miliar menjadi Rp 108,2 miliar.

Sedangkan tabungan meningkat 190 % dari Rp 163,56 miliar menjadi Rp 474,9 miliar. Tingginya jumlah dana masyarakat yang ditempatkan di industri perbankan Kutai Timur ini masih dipengaruhi oleh tingginya suku bunga simpanan yang ditawarkan oleh bank dan relatif aman dibandingkan berinvestasi pada alternatif lainnya.

Tabel 6.64. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Kutai Timur (jutaan rupiah)

DPK	2004	2005	2006	2007	2008
Kab. Kutai Timur	48.129	54.790	79.402	251.127	1.643.932
Giro	4.986	6.451	6.420	61.636	1.060.819
Deposito/Simpanan Berjangka	6.047	8.136	21.006	25.929	108.199
Tabungan	37.096	40.203	51.976	163.562	474.914

Sumber: Bank Indonesia Cabang Samarinda, diolah kembali.

2.4. Penyaluran Kredit Bank Umum

Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan penyaluran tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang mencapai 303 % atau dari Rp 77,6 miliar menjadi Rp 313,5 miliar. Kredit investasi meningkat 30,13 % dari Rp 175,14 miliar menjadi Rp 227,92 miliar, dan kredit konsumsi meningkat dari Rp 106 miliar menjadi Rp 153 miliar atau naik 43,9 %.

Tabel 6.65. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Kutai Timur (juta rupiah)

Kelompok Bank	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Modal	8.776	61.655	70.114	141.211	175.142	227.922
Kerja	56.780	167.362	168.268	37.062	77.608	313.523
Investasi	284.958	188.230	188.230	155.710	106.563	153.310
Konsumsi	350.694	467.959	426.612	333.983	359.313	694.755
Total						

Sumber: Bank Indonesia Cabang Samarinda

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar terdapat di sektor pertanian yaitu mencapai Rp 171 miliar atau meningkat 89 % dari Rp 90,25 miliar pada 2007. Pangsa pasar kredit ini mencapai 24,7 % dari keseluruhan penyaluran

kredit. Kredit sektor ekonomi lainnya yang memiliki pangsa pasar cukup besar juga adalah kredit pada sektor pertambangan (20,7%) dan sektor jasa-jasa (19,5 %), dengan nominal masing-masing mencapai Rp 143 miliar dan Rp 135 miliar.

Tabel 6.66. Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kutai Timur (dalam Rp juta)

Sektor Ekonomi	2006	2007	2008
Pertanian	56.354	90.250	171.308
Pertambangan	41.366	64.160	143.872
Perindustrian	544	660	248
Perdagangan	46.567	60.612	88.570
Jasa-jasa	33.442	36.880	135.643
Listrik, Gas dan Air	-	-	-
Konstruksi	27.613	28.301	75.684
Angkutan	42	9	-
Jasa Dunia Usaha	5.758	8.085	59.511
Jasa Sosial	29	485	448
Lain-Lain	155.710	106.751	155.114
Total	333.983	359.313	694.755

Sumber: Bank Indonesia Cabang Samarinda

2.5. Perkembangan Kredit UMKM

Penyaluran kredit untuk UMKM pada 2008 mengalami peningkatan sebesar 46,99 % yaitu dari Rp 195 miliar pada 2007 menjadi Rp 286 miliar. Dari jumlah tersebut, kredit kepada usaha menengah (jumlah baki kredit dari diatas Rp 500 juta s/d Rp 5 miliar) mencapai Rp 64 miliar atau meningkat 42,35 % dari Rp 45 miliar. Kredit untuk usaha kecil (baki kredit diatas Rp 50 juta s/d Rp 500 juta) meningkat 12,27% dari Rp 2.406 miliar menjadi 2.701 miliar, dan kredit untuk usaha mikro (baki kredit s/d Rp 50 juta) juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 81,17 % dari Rp 55 miliar pada 2007 menjadi Rp 100 miliar. Pangsa kredit UMKM terbesar masih pada kredit usaha mikro yaitu sebesar 42,58 %, sedangkan untuk usaha kecil dan menengah masing-masing sebesar 35,02 % dan 22,39 %.

Tabel 6.67. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur (dalam juta rupiah)

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kredit Mikro	22.174	29.604	45.401	75.267	94.553	122.132
Kredit Kecil	16.755	22.369	26.511	29.311	55.435	100.434
Kredit Menengah	22.153	29.842	32.597	46.903	45.105	64.209
Non UKM	289.232	386.144	322.103	183.502	164.219	407.980
Total	350.694	467.959	426.612	333.983	359.313	694.755

Sumber: Bank Indonesia Cabang Samarinda

6.9.6. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam:

1. Indikator Kawasan Lindung
2. Indikator Pencemaran Air
3. Indikator Pencemaran Udara

A. Indikator Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Sebagai daerah pemekaran, Kabupten Kutai Timur dihadapkan pada tantangan internal yakni bagaimana mengembangkan wilayah pedalaman, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya ekspor non migas, memperkuat SDM, meningkatkan pelayanan prasarana dasar, meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi SDA, memperkuat manajemen dan kelembagaan daerah serta mengembangkan pola pemukiman.

Sementara itu berkaitan dengan arus globalisasi dan akan diberlakukannya pasar bebas, merupakan tantangan eksternal yang mau tidak mau harus dihadapi dimasa-masa yang akan datang. Oleh karenanya, daya saing wilayah merupakan kunci yang harus digali dan dikembangkan dalam rangka pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Timur.

1. Potensi Aktivitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya yang dinamis melalui berbagai usaha pengelolaan, perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan dna pengendalian keseimbangan unsur-unsurnya secara berkesinambungan. Dengan demikian untuk

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan generasi sekarang sampai generasi yang akan datang.

Potensi jumlah luasan dan sub sektor sumber daya alam yang dimanfaatkan antara lain:

1.1. Pertambangan Migas dan Non Migas

Dengan kondisi geologis seperti yang telah terkemuka, Kabupaten Kutai Timur amat kaya akan cadangan sumberdaya tambang. Sumberdaya tersebut, terdiri dari bahan tambang non-logam: batu bara, batu gamping, batu pasir dan lempung (bahan untuk pembuatan keramik dan campuran semen), maupun bahan tambang logam: pasir kuarsa, emas dan perak. Selain itu, SDA yang terdapat pada perut bumi Kabupaten Kutai Timur adalah gas dan minyak bumi. Potensi dan lokasi masing-masing sumber daya tambang tersebut tersebar di 32 desa dari 135 desa yang ada di Kutai Timur atau sebesar 23,70 persen atau tersebar hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kutai Timur yaitu berada di 13 Kecamatan dari 18 kecamatan yang ada atau sebesar 72,22 persen.

Dari data yang diperoleh Ditjen Geologi dan Sumberdaya Mineral terduga diperoleh angka potensi batu bara mencapai 3.825.610.000 M.Ton terutama tersebar di Santatta, Bengalon, Sangkulirang, Busang, dan Long Lees, sementara hasil tambang logam seperti besi, emas, perak, platina sumberdaya terduga mencapai antara 18.000.000 - 52.500.000 ton. Untuk Pertambangan Non Logam seperti batu gamping, lempung, gipsum, dan pasir kwarsa sumberdaya terduga mencapai antara 14.000.000 - 16.645.000.000 ton. Lihat Tabel 6.68 dan 6.69 berikut.

Tabel.6.68. Potensi Batu Bara di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Cadangan Terukur (M.Ton)	Sumber Daya Terduga (M.Ton)	Pengelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sangatta	570.000.000	2.454.000.000	KPC
2.	Bengalon	187.000.000	438.000.000	KPC
3.	Sangkulirang	-	205.000.000	MONENCO
4.	Busang	70.000.000	209.000.000	MONENCO
5.	Long Lees	-	519.000.000	
JUMLAH		827.000.000	3.825.610.000	

Sumber: Ditjen Geologi dan Sumberdaya Mineral 1999, dikutip dari Buku Profil Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Bapedalda Provinsi Kalimantan Timur, 2005

Tabel.6.69. Potensi Bahan Galian Logam dan Non-Logam di Kabupaten Kutai Timur

Bahan Galian	Lokasi	Jenis	Sumber daya Terduga (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
Logam	Sungai Kelinjau, Sungai Atan, Muara Ancalong	Emas Plaser	
	Muara Wahau	Emas Plaser	18.000.000
	Sangkulirang	Besi	52.500.000
Non Logam	Sangkulirang	Sungai Muara Marah, Sungai Telen	Emas, Platina dan Perak
		Batu Gamping	16.645.000.000
		Lempung	1.000.000.000
		Pasir Kuarsa	35.450.000
		Gypsum	14.000.000

Sumber: Ditjen Geologi dan Sumberdaya Mineral 1999, dikutip dari Buku Profil Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Bapedalda Provinsi Kalimantan Timur, 2005

Produksi batu bara yang menjadi andalan Kabupaten Kutai Timur yang telah dieksploitasi selama kurang lebih sembilan tahun (2000-2008) telah mencapai 214.277.907 M.Ton atau rata-rata produksi pertahun mencapai 23.808.656,33 M.Ton dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai 20,63 persen. Produksi batu bara ini setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan antara 13 sd. 42 persen lebih, terkecuali pada tahun 2003 dan 2007 produksi menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu -7,92 persen dan -11,72 persen. Sementara itu produksi minyak bumi dan gas bumi yang merupakan produksi yang cukup potensi di daerah ini produksinya cenderung menurun. Selama kurun waktu yang sama 2000-2008 jumlah produksi minyak bumi yang dieksploitasi mencapai 11.222.730

Barrel dengan rata-rata produksi mencapai 1.246.970 Barrel per tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun menurun hingga -6,80 persen, dan produksi gas bumi yang dieksploitasi mencapai 46.734.750 Mscf dengan rata-rata produksi mencapai 5.192.750 Mscf per tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun menurun sebesar -6,80 persen, lihat tabel 6.70 dan 6.71 berikut.

Tabel.6.70. Produksi Batu Bara di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Tahun	Produksi (M.Ton)	Peningkatan (M.Ton)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	13.102.329	-	-
2001	15.572.809	2.470.480	18,86
2002	17.671.759	2.098.950	13,48
2003	16.271.678	-1.400.081	-7,92
2004	19.694.354	3.422.676	21,03
2005	28.071.345	8.376.991	42,53
2006	35.300.852	7.229.507	25,75
2007	31.162.250	-4.138.602	-11,72
2008	37.430.531	6.268.281	20,11
Total	214.277.907	24.328.202	185,68
Rata-rata	23.808.656,33		20,63

Sumber : Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur (DDA) dan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel. 6.71. Produksi Minyak Mentah dan Gas Alam di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Tahun	Minyak Bumi			Gas Bumi		
	Produksi (000 Barrel)	Peningkatan (000 Barrel)	Pertumbuhan (%)	Produksi (000 Mscf)	Peningkatan (000 Mscf)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
2000	2.419,92	-	-	9.991,91	-	-
2001	1.530,53	-1.189,39	-36,75	2.516,87	-7.475,04	-74,81
2002	679,62	-850,91	-55,59	3.003,40	486,53	19,33
2003	838,86	159,24	23,43	3.223,76	220,36	7,34
2004	1.321,75	482,89	57,57	3.799,31	1.178,53	17,85
2005	1.368,01	46,26	3,49	4.255,23	455,92	12,00
2006	1.317,47	-50,54	-3,69	4.574,37	319,14	7,49
2007	808,99	-508,48	-38,59	6.584,96	3.110,58	43,95
2008	937,58	128,59	15,89	7.684,95	1.099,99	16,70
Total	11.222,73	-1.482,34	-61,26	46.734,75	-603,99	-23,09
Rata-rata	1.246,97		-6,80	5.192,75		-2,56

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur (DDA) dan Provinsi Kalimantan Timur

1.2. Kehutanan

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan di bumi ini, baik segi ekologi maupun ekonomi. Berbagai macam fungsi hutan antara lain; penyedia sumberdaya kayu dan produk hutan lainnya; rekreasi dan pengaturan bagi ekosistem tanah, udara dan air; tempat tumbuh berkembangnya keanekaragaman hayati; sebagai paru-paru dunia yang mengubah gas karbon monoksida menjadi oksigen segar yang siap dikonsumsi bagi hewan dan manusia. Dampak dari aktivitas atau tekanan manusia terhadap hutan telah mengganggu keseimbangan daya dukung sumberdaya hutan. Berbagai jenis hutan yang mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya (tegakan dan luasan) akibat eksploitasi yang berlebih (*overexploitation*) dan *Overharvesting*, dan konversi hutan menjadi hutan produksi atau lahan lainnya (perambahan, perkebunan, permukiman). Tetapi tekanan aktivitas manusia terhadap hutan juga datang dari berbagai segi seperti pembebasan lahan kehutanan untuk pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, jembatan), telekomunikasi, energi listrik, perluasan lahan pertanian (misalnya program satu juta Ha lahan gambut), pencemaran udara dan kebakaran hutan.

Pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai penghasil kayu, paru-paru dunia, konservasi kehidupan keanekaragaman hayati dan sebagai penyeimbang ekosistem lahan, tata guna air dan udara agar tetap berlangsung harus diusahakan.

Indikator yang disajikan untuk mengukurnya adalah:

- Produksi kayu per luas hutan produksi (m^3/Ha). Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan intensitas pemanenan hutan (kayu gergajian, kayu lapis dan kayu olahan) pada periode tertentu per satuan Ha per propinsi.
- Luas kebakaran hutan menurut fungsi hutan (hutan lindung, produksi, wisata alam, taman nasional, Tahura, hutan penelitian, hutan kota, hutan buru dan hutan masyarakat)
- Luas kebakaran hutan menurut jenis vegetasi hutan (hutan sekunder, hutan tanaman industri, tegakan campuran, reboisasi, HPH, hutan primer, eks HPH dan lainnya)

Luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah 2.297.664 ha atau 64,27 persen dari luas total wilayah kabupaten tersebut yang seluas 3.574.760 Ha. Menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu delapan tahun (2001-2008) telah terjadi penurunan yang signifikan, dimana hutan

lindung turun luasnya hingga 30,24 persen, Hutan Suaka Alam dan Wisata 16,76 persen, Hutan Produksi Terbatas turun hingga -23,07 persen, Hutan produksi yang dapat dikonfersi turun sekitar 2,73 persen. Lihat Tabel berikut.

Tabel. 6.72 Luas Hutan di Kabupaten Kutai Timur

No	Fungsi Hutan	Luas (ha)		Pertumbuhan (%)
		2001	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hutan Lindung	454.708	317,200	-30,24
2.	Hutan Suaka Alam dan Wisata	221.971	184,764	-16,76
3.	Hutan Produksi Terbatas	1.090.893	839,200	-23,07
4.	Hutan Produksi Tetap	969.952	956,500	0,00
5.	Hutan Tetap	2.060.845	2.297.664	11,49
6.	Hutan Produksi Yang Dapat dikonfersi	1.073.017	1.043.716	-2,73
7.	Luas Hutan	2.297.664	2.297.664	0,00
8.	Luas Wilayah	3.574.760	3.574.760	0,00

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur

Hasil hutan utama berupa kayu bulat di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari kurang lebih 12 jenis kayu dari 16 jenis kayu yang umumnya ada di hutan Kalimantan Timur seperti; meranti, kapur, bengkirai, keruing, nyatoh, anggi, mersawa, Jelutung, kayu indah, rengas, resak dan lainnya. Di daerah ini jenis kayu yang paling banyak dieksploitasi adalah jenis kayu meranti, kapur, kruing dan bengkirai. Selama kurun waktu enam tahun terakhir jumlah kayu bulat yang diproduksi dari hutan Kutai Timur melalui hasil kayu dari kegiatan IUPHHK-PH mencapai 1.395.293,23 m³ dengan rata-rata produksi per tahun mencapai 232.548,87 m³ dengan perkembangan produksi yang bervariasi setiap tahunnya dan pada tahun 2008 produksinya mencapai angka 248.461,80 M³ sementara itu hasil kayu dari kegiatan IPK mencapai 1.790.605,06 m³ dengan rata-rata produksi per tahun mencapai 358.121,01 m³ dengan perkembangan produksi yang bervariasi setiap tahunnya dan pada tahun 2007 rata-rata produksinya per tahun mencapai angka 358.121,01 M³ (Lihat Tabel 6.73). Apabila di cermati jumlah produksi kayu bulat dari kegiatan IPK setiap tahunnya cenderung menurun hingga hampir 100 persen dan untuk tahun 2008 turun hingga mencapai -96,10 persen.

Hasil hutan mempunyai nilai ekspor yang tinggi dan merupakan andalan Kabupaten Kutai Timur. Pada saat ini tercatat ada 15 HPH aktif di Kabupaten Kutai Timur untuk kegiatan Hak penguasaan Hutan (HPH) dengan total luas tahun 2008 mencapai 1.219.615 Ha dan kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan total luas tahun 2008 mencapai 145.030 Ha.

Tabel.6.73. Realisasi Produksi Kayu Bundar Menurut Jenis Kayu Dari Kegiatan IUPHHK-PH dan IPK di Kabupaten Kutai Timur 2003-2007, dan 2008
Volume Produksi (m³)

Jenis Kayu	Kayu Dari Kegiatan IUPHHK-PH			Kayu Dari Kegiatan IPK		
	2003	2008	Pertumbuhan (%)	2003	2007	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meranti	114.596,71	246.604,50	115,19	272.189,69	1.699,14	-99,38
Kapur	49.822,71	-		129.363,29	370,30	-99,71
Keruing	13.775,24	-		26.599,88	1.889,73	-92,89
Bengkirai	12.839,19	-		14.860,74	95,97	-99,35
Nyatoh	103,35	-		50,33	296,15	488,42
Aghatis	-	-		-	-	-
Bakau	-	-		-	-	-
Anggi	-	-		-	101,64	-
Mersawa	4.081,41	-		4.435,35	289,80	-93,47
Ulin	-	-		-	-	-
Perupuk	-	-		-	131,90	-
Lainnya	10.023,09	26.170,67	161,10	79.611,27	2.779,28	-96,51
Jelutung	3.184,78	-		3.217,96	-	-
Resak	30,70	-		289,57	37,61	-87,01
Kayu Indah	67,07	344,93	414,28	212,33	54,38	-74,39
Rengas	-	-	-	-	-	-
Durian	-	-	-	-	2,77	-
Pentong	-	-	-	-	433,68	-
Ipil	-	-	-	-	94,77	-
TAHUN 2008	208.524,25	248.461,80	-28,31	530.830,40	-	
2007		346.585,17	128,92		8.277,12	-96,10
2006		151.401,26	-53,52		212.187,10	-23,19
2005		325.764,20	184,36		276.267,73	-63,77
2004		114.556,55	-45,06		762.511,49	43,65
2003		208.524,25	-		530.830,40	-
TOTAL		1.395.293,23	-		1.790.605,06	-
Produksi Rata-rata per tahun		232.548,87	-		358.121,01	-

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur

Produksi kayu olahan dari Kabupaten Kutai Timur terdiri dari plywood, sawntimber, block board, dan moulding seperti tabel berikut.

Tabel.6.74. Produksi Kayu Olahan Menurut Jenisnya Produksi dalam (M3)

Jenis kayu Olahan	Tahun		Pertumbuhan (%)
	2000	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)
Plywood	5.690,26		
Sawn Timber	16.794,33	26.705,35	59,01
Block Board	254,67		
Moulding	2.437,54		

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur

1.2.1. Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang perlu dimantapkan pengembangannya di wilayah Kabupaten Kutai Timur meliputi kawasan hutan lindung diwilayah-wilayah; Kecamatan Busang, Karangan, Bengalon, Kongbeng, Sandaran, Teluk Pandan, dan Muara Wahau.

Tabel.6.75. Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Wilayah Atau Lokasi/Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Busang	103.314	38,19
2.	Karangan	39.916	14,76
3.	Bengalon	30.360	11,22
4.	Kongbeng	921	0,34
5.	Sandaran	4.654	1,72
6.	Teluk Pandan	9.475	3,50
7.	Muara Wahau	81.849	30,25
	Jumlah	270.489	100,00
	Persentase Hutan Lindung terhadap luas wilayah Kabupaten		7,57

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur

Khusus Taman Nasional Kutai (TNK) di dalam administrasi pemerintah, TNK dengan luas 198.629 ha terletak di Kabupaten Kutai Timur (lebih kurang 80%). Kabupaten Kartanegara (lebih kuranh 17,48%) dan Kota Bontang (lebih kurang 2,52%). Dalam pengelolaanya, TNK dibagi dalam 3 sub seksi pengelolaan, yaitu Sub

Seksi Wilayah Konversi Tanjung Limau (60.600 ha), Sub Seksi Wilayah Konversi Sangatta (61.641 ha) dan Sub Seksi wilayah Konversi Menamang (76.363 ha).

Data dari TNK menunjukkan bahwa luas areal perambahan hutan di kawasan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan lahan yang semakin meningkat bertambah luasnya areal perambahan juga didorong oleh indikasi adanya spekulasi-spekulasi tanah yang memanfaatkan situasi ketidakpastian hukum di TNK. Data perambahan hutan periode 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel.6.76. Perambahan Hutan di TNK Sepanjang Jalan Bontang-Sangatta Tahun 2001

Batas (1)	Lokasi (2)	Luas (ha) (3)
Di dalam Enclave ¹	Sangatta Selatan, Singa Geweh dan Sangkima	15.015
	Teluk Pandan dan Sidrap Kanibungan	86.97
	Jumlah Luas Enclave (bln thn....)	23.712
Di luar areal Enclave ²	Sepanjang Jalan Bontang-Sangatta di Kawasan TNK	256
Jumlah Luas Perambahan Hutan di TNK (bln thn ...)		23.968

Sumber: Laporan Tim Enclave Pemkab Kutai Timur 2001

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemkab. Kutai Timur untuk menangani permasalahan pengelolaan TNK adalah:

- Penyusunan DRAFT perda Enclave TNK;
- Pemagaran TNK sepanjang 13.500 m dari 97.889 m yang direncanakan; dan
- Reboisasi manual system jalur di Teluk Kaba TNK seluas 310 ha dan reboisasi hutan mangrove di Kecamatan Sangatta seluas 200 ha.

Perubahan luas hutan alam terjadi sebagai akibat dari berbagai kebutuhan, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat, atau karena terjadi bencana. Untuk menjaga kelestarian besaran hutan, pemerintah telah menetapkan luas hutan menurut berbagai fungsinya, sehingga hanya hutan yang dapat dikonversi saja yang dapat dimanfaatkan untuk fungsi hutan lain atau penggunaan lain.

1.3. Pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan

Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan pertanian dan perkebunan di Kutai Timur adalah 1,3 juta ha, namun yang telah diusahakan baru 129.667,99 ha

yang terdiri atas tanaman pangan seluas 17.447 Ha dan perkebunan 111.036,99 Ha dari 24.887 keluarga petani rata-rata mengerjakan lahan 1,8 ha per keluarga. Sementara itu kegiatan Perikanan mencapai luas 1.184 Ha.

Sampai dengan tahun 2006 terdapat 106 perusahaan yang mendapat izin melakukan kegiatan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur. Investor yang termasuk aktif mengelola 878.502 ha (Sesuai Izin yang diberikan) tetapi hanya 27 perusahaan yang telah merealisasikan kegiatannya seluas 63.212 Ha atau sebesar 7,19 persen). Mereka mengembangkan kelapa sawit, karet, kako, dan kenaf dan jarak pagar akan tetapi yang terbanyak perusahaan mengembangkan jenis tanaman kelapa sawit.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membagi seluruh lahan pertanian dan perkebunan ke dalam 7 (tujuh) zona peruntukan pengembangan agropolitan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel.6.77. Zona-Zona Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Kutai Timur

Zona (1)	Komoditas (2)	Luas (ha) (3)
I	Jati, Tanaman Keras	464.844,08
II	Padi, Palawija, Hortikultura, Kelapa	77.010,29
III	Padi, Palawija, Hortikultura, Kelapa	340.558,53
IV	Jati, Kelapa, Hortikultura	19.124,51
V	Jati, Kelapa Sawit, Hortikultura	144.249,02
VI	Kelapa, lada, Hortikultura	181.362,49
VII	Jati, Sawit, Kelapa, Hortikultura	227.468,73

C. Upaya Kongkrit Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kemampuan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menentukan keberhasilan upaya pelestarian fungsinya. Sistem pengelolaan ini terdiri dari organisasi dan tata cara, mulai dari pusat sampai dengan daerah, terlebih dari ditetapkannya otonomi daerah. Hal ini termasuk institusi dan organisasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pada saat ini kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh sistem pengelolaan yang kurang berfungsi dengan baik. Untuk itu diperlukan sistem kelembagaan yang lebih efisien dan efektif baik dalam lingkungan pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat.

B. Indikator Pencemaran Udara

Menurunnya kualitas udara bisa menghambat pembangunan berkelanjutan secara ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, karena menurunnya kualitas udara, biaya kesehatan akan meningkat dan produksi pertanian akan menurun. Secara umum menurunnya kualitas udara dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Bank Dunia (2003) memperkirakan nilai kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran udara di Indonesia sebesar US\$ 400 miliar setiap tahunnya. Berkaitan dengan perkiraan Bank Dunia tersebut, menurut hasil penelitian Asian Development Bank (ADB), kerugian tersebut belum termasuk kematian dini dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh PM₁₀ dan SO₂ (Lihat “Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004”, oleh KLH pada tahun 2005).

Indikator kualitas udara yang digunakan untuk mengukur kualitas udara seperti;

- Besarnya emisi Nitrogen Oksida (NO_x), SO_x dan CO dalam ton/th per provinsi yang berasal dari kendaraan bermotor yang dibedakan kendaraan bermotor roda 2 (sepeda motor) dan roda >2 (mobil penumpang, mobil bis dan mobil gerobak).

Kabupaten Kutai Timur pencemaran udara umumnya diakibatkan oleh beberapa hal seperti; kebakaran hutan yang mengakibatkan meningkatnya Carbon Dioksida, penabangan kayu yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku sehingga mengurangi jumlah luasan hijau dan mengakibatkan berkurangnya supplay Oksigen, dan bertambahnya kendaraan bermotor dan alat-alat lainnya serta eksploitasi tambang batu bara yang pada akhirnya menghasilkan partikel-partikel pencemaran udara seperti Nitrogen Oksida, Sox, dan CO.

Tabel.6.78. Iklim, Atmosfir dan Udara Kabupaten Kuutai Timur

No.	Variabel	Satuan	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Konsentrasi Ambien		
2.	Temperatur Udara Rata-rata	Derajad Celcius	27,5
3.	Curah Hujan Rata-rata	Mm/hh	1.349/124
4.	Debu	Ug/m3	782
5.	NO2	Ug/m3	64
6.	CO	Ug/m3	4.727
7.	SO2	Ug/m3	205

Sumber: Bapedalda Provinsi Kaltim (Profil Lingkungan Hidup Kaltim, 2005)

Dampak yang berpengaruh dari aktivitas kegiatan dalam pengelolaan pertambangan dan galian golongan C berpengaruh terhadap kualitas udara di daerah ini. Berdasarkan pemantauan kualitas udara yang dilakukan, bahwa tingkat partikulat terdapat pada udara sudah melebihi ambang batas yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel.6.79. Data Kualitas Udara di Kabupaten Kutai Timur

No.	Parameter	Satuan	Hasil Analisa	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SO ₂	Ug/m ³		
2.	CO	Ug/m ³		
3.	NO ₂	Ug/m ³		
4.	Debu (partikulat)	Ug/m ³		

Sumber: Bapedalda Provinsi Kaltim (Profil Lingkungan Hidup Kaltim, 2005)

Tabel.6.80. Perkembangan Jumlah Kendaraan Eksploitas Batu Bara Penghasil Partikel Debu

Tahun	Produksi (M.Ton)	Peningkatan (M.Ton)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	13.102.329	-	-
2001	15.572.809	2.470.480	18,86
2002	17.671.759	2.098.950	13,48
2003	16.271.678	-1.400.081	-7,92
2004	19.694.354	3.422.676	21,03
2005	28.071.345	8.376.991	42,53
2006	35.300.852	7.229.507	25,75
2007	31.162.250	-4.138.602	-11,72
2008	37.430.531	6.268.281	20,11
Total	214.277.907	24.328.202	185,68
Rata-rata	23.808.656,33		20,63

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur (DDA) dan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel.6.81. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Penghasil CO2

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2000	2.065	
2001	2.245	8,71
2002	2.327	8,01
2003	2.470	1,86
2004	2.534	2,59
2005	8.592	239,07
2006	16.172	88,22
2007	22.621	39,88
2008	31.641	39,87

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kutai Timur

Tabel.6.82. Berkurangnya Jumlah Luasan Hutan dan Luasan Hijau yang berdampak pada kualitas Udara

No	Fungsi Hutan	Luas (ha)		Pertumbuhan (%)
		2001	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hutan Lindung	454.708	317,200	-30,24
2.	Hutan Suaka Alam dan Wisata	221.971	184,764	-16,76
3.	Hutan Produksi Terbatas	1.090.893	839,200	-23,07
4.	Hutan Produksi Tetap	969.952	956,500	0,00
5.	Hutan Tetap	2.060.845	2.297.664	11,49
6.	Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi	1.073.017	1.043.716	-2,73
7.	Luas Hutan	2.297.664	2.297.664	0,00
8.	Luas Wilayah	3.574.760	3.574.760	0,00

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur

Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam

C. Indikator Pencemaran Air

Kualitas air, termasuk kuantitas merupakan aspek penting dipandang dari sudut ekonomi, lingkungan dan sosial. Peranan air begitu kompleks dalam kehidupan, ditinjau dari aspek fisik, kimiawi, mikrobiologi dan biologisnya. Juga kegunaan yang vital bagi kehidupan di daratan dan makhluk akuatik, baik perairan umum, pantai maupun lautan. Walaupun wilayah Indonesia memiliki 6 persen persediaan air dunia atau sekitar 21 persen persediaan air di Asia Pasifik, namun kelangkaan dan kesulitan dalam mendapatkan air bersih dan layak pakai mulai menjadi masalah yang menggejala di banyak tempat di negeri ini terutama di saat tibanya musim kemarau. Kecenderungan konsumsi air semakin meningkat secara

eksponensial sedangkan ketersediaan air bersih cenderung menurun akibat penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kerusakan sumberdayanya sebagai dampak aktivitas manusia (pembangunan) yang tidak terkendali.

Pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah yang tidak memenuhi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC), limbah rumah sakit, limbah peternakan dan pertanian, limbah domestik dan sebagainya telah menurunkan kualitas air sungai dan perairan umum seperti danau dan muara. (Lihat Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004, KLH 2005). Potensi sumberdaya air Indonesia yang besar baik air permukaan dan air tanah serta pasokan air dari curah hujan yang tinggi ternyata belum cukup untuk memenuhi besarnya kebutuhan air bersih karena pencemaran yang terjadi. Kualitas air hujan yang telah tercemar di beberapa titik pengamatan berdasarkan parameter yang dipantau seperti nilai pH yang rendah (hujan asam) menyebabkan potensi air pasokan ini semakin memprihatinkan. Semakin tinggi tekanan terhadap lingkungan (udara dan tanah) yang tidak bisa dikendalikan semakin berpotensi mengurangi (deplisi) dan merusak (degradasi) kualitas sumberdaya air.

Disinilah arti pentingnya pembangunan berkelanjutan terhadap sumberdaya air, air permukaan (sungai, danau, situ, bendungan), air tanah dan perbaikan kualitas air hujan dengan pengendalian kualitas udara, terutama di wilayah yang padat kendaraan bermotor (perkotaan), kawasan industri dan pengendalian kebakaran hutan/lahan dengan mengurangi titik-titik api atau hot spot pada beberapa provinsi. Indikator yang disajikan dalam dalam menilai kualitas air adalah:

- Pengukuran status kualitas air sungai pada beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) tertentu berdasarkan klasifikasi memenuhi, cemar ringan-sedang, cemar sedang, cemar berat, cemar ringan, cemar ringan-berat, cemar sedang-berat. Indikator ini menunjukkan derajat pencemaran yang terjadi pada air sungai yang dipantau berdasarkan parameter kualitas air sungai yang terukur.
- Derajat keasaman (pH) air hujan di beberapa kota yang dipantau, Indikator ini menunjukkan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran udara yang dengan daur hidrologi terbawa oleh air hujan.
- Pengukuran kualitas air laut/Pelabuhan Utama berdasarkan parameter utama yaitu pH, temperatur, Daya Hantar Listrik (DHL) dan salinitas.

Di Kabupaten Kutai Timur pencemaran Air umumnya diakibatkan oleh beberapa hal seperti; kebakaran hutan yang mengakibatkan matinya spesies tertentu dan

tanaman hutan termasuk kayu, penabangan kayu yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku sehingga mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap air dan mengakibatkan berkurangnya daya simpan air oleh hutan, dan akibat limbah industri termasuk akibat penambangan liar.

Beberapa hal yang menjadi menurunnya kualitas Air di daerah ini disinyalir akibat kurangnya keseimbangan lingkungan akibat eksploitasi hutan dan tambang yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan seperti diantaranya; Kebakaran hutan dan lahan yang menghancurkan spesies hutan dan tanaman hutan lainnya seperti yang terjadi kawasan hutan lindung dan areal lainnya, perambahan hutan sepanjang jalan Bontang-Sangatta seperti lokasi-lokasi; Pinang/Masabang, Sangkima, Kedodol/Teluk Toba, Tempatuk dan sekitarnya pada tahun 2000 hingga mencapai luasan 16.693 Hektar. Perambahan Hutan di TNK Sepanjang Jalan Bontang-Sangatta pada wilayah-wilayah Sangatta Selatan, Singa Geweh, dan Sangkima, Teluk Pandan dan Sidrap Kanibungan yang mencapai luasan 23.968 Hektar.

Tabel.6.83. Data Kualitas Air di Kabupaten Kutai Timur

No.	Parameter	Satuan	Hasil Analisa	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa		
2.	Kebutuhan Air Untuk Rumah Tangga	M3		
3.	Produksi Air PDAM	M3		
4.	Kemampuan PDAM Melayani Penduduk	Persen		
5.	Jumlah Pelanggan PDAM	R.Tangga		
6.	DHL	Us/cm	185,5	
7.	Kekeruhan	Skala NTU	10,00	
8.	Suhu	Derajad	27,5	
9.	COD	Ug/l	10	
10.	Zat Padat Terlarut	Mg/l	27,22	
11.	TOC	Mg/l	19,17	
12.	DO	Mg/l	6	
13.	pH	Mg/l	6,82	
14.	Sulfat (So4)	Mg/l	2.862	
15.	Raksa (Hg)	Mg/l	0,000	
16.	Besi (Fe)	Mg/l	16,4	
17.	Mangan (Mn)	Mg/l	0,058	
18.	Nitrat (N)	Mg/l	0,29	
19.	Timbal (Pb)	Mg/l	0,070	
20.	Potensi Air Tawar			

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur dan Bapedalda Provinsi

Tabel.6.84. Sarana Air Bersih di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Tahun	Air Baku Utama (m3)	Jumlah Pelanggan PDAM (Pelanggan)	Kapasitas Produksi (Liter/detik)	Jumlah Air Yang disalurkan (M3)	Cakupan Layanan PDAM Terhadap Rumah Tangga (%)
2000	840.068	2.246	100	500.750	5,95
2001	840.068	2.246	100	507.596	5,61
2002	1.559.325	4.169	100	942.194	9,92
2003	1.757.950	4.684	100	1.058.584	10,63
2004	1.757.950	4.684	100	1.059.989	10,62
2005	1.871.616	4.987	100	1.128.885	10,92
2006	2.356.128	6.278	100	1.421.123	12,39
2007	2.356.128	6.303	100	1.425.768	12,07
2008	3.650.000	6.329	100	1.351.526	11,81

Sumber Data : Kantor PDAM Kab. Kutai Timur (Survei Perusahaan Air Minum BPS Prov. Kalimantan Timur)

Tabel.6.85. Jumlah Perusahaan Air Minum, Kapasitas Produksi, sumber Air Baku dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur 2004-2008

Uraian	Satuan	2006	2007	2008
(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Jumlah Perusahaan	Buah	1	1	1
Jumlah Kantor Cabang	Unit	6	6	6
2. Status Perusahaan	Buah			
2.1. Pemerintah	Buah	1	1	1
2.2. Swasta	Buah	-	-	-
3. Kapasitas	Ltr/Detik			
3.1. Potensial	Ltr/detik	100	100	100
3.2. Efektifitas Produksi	Ltr/detik	99	99	99
4. Volume Air Baku				
4.1. Sungai	M3	2.356.128	2.356.128	3.650.000
4.2. Danau	M3	-	-	-
4.3. Mata Air	M3	-	-	-
4.4. Waduk	M3	-	-	-
4.5. Artesis	M3	-	-	-
4.6. Lainnya	M3	-	-	-
5. Jumlah Tenaga Kerja	Orang			
5.1. Pekerja Teknis	Orang	30	33	36
5.2. Pekerja Non Teknis	Orang	14	17	31
5.3. Pekerja Dipl/S1	Orang	2	2	6
5.4. Pekerja tidak tetap	Orang	3	3	3
6. Jumlah Pelanggan	KK	6.278	6.303	6.329
7. Volume Air Yang disalurkan	M3	1.421.123	1.425.768	1.351.526
8. Jumlah Desa yang dialiri	Desa/Kel	8	8	8

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi (Hasil Pendataan PODES)

Tabel.6.86 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang digunakan di Kabupaten Kutai Timur 2007

No.	Sumber Air Minum	Pedesaan	Perkotaan (%)	Perkotaan +Pedesaan (%)
	Air Dalam Kemasan/Isi			
1.	Ulang	11,85	17,50	12,23
2.	Ledeng Meteran	12,93	58,75	16,01
3.	Ledeng Eceran	-	2,50	0,17
4.	Sumur Bor/Pompa	1,29	1,25	1,29
5.	Sumur Terlindung	13,15	2,50	12,43
6.	Sumur Tidak terlindung	26,51	10,00	25,40
7.	Mata Air terlindung	1,08	-	1,01
8.	Mata Air Tak terlindung	1,94	-	1,81
9.	Air Sungai	26,08	-	24,33
10.	Air Hujan	5,17	7,50	5,33
	JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur (Hasil SUSENAS)

Bila sumber daya air yang ada ditangani dengan bijaksana dan berbagai aktivitas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, sebenarnya Kabupaten Kutai Timur tidak mungkin kekurangan air bersih.

Walaupun sesungguhnya air di daerah ini jumlahnya tetap, namun karena terjadinya perubahan lingkungan menyebabkan perputaran air semakin hari semakin berubah, sehingga terjadi ketidakmerataan penyebaran stok air. Ketidakseimbangan tata guna air ini sangat rawan, karena dapat menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam. Pada musim penghujan terjadi banjir, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Hal ini memang tidak terjadi dengan sendirinya. Penyimpangan pembangunan dari perencanaan tata ruang dan tata wilayah dan berkurangnya penahan air seperti hutan dan pepohonan, menyebabkan aliran air (tata air) dan tanah-tanah gundul di berbagai tempat. Tanah-tanah gundul seperti akibat penambangan yang tidak direklamasi tidak lagi mampu menyerap air hujan, akibatnya air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan langsung mengalir di atas permukaan tanah, meluapkan sumber-sumber air dan menggenangi permukiman dan perumahan dulu sebelum mengalir ke laut.

6.9.7. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah :

1. Indikator TPAK
2. Indikator Kompetitif Tenaga Kerja
3. Indikator Kualitas Tenaga Kerja

A. Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti, jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 146.510 jiwa meningkat menjadi 213,762 jiwa tahun 2008 yang berarti selama periode sembilan tahun penduduk Kutai Timur telah bertambah sebanyak 67.252 jiwa atau rata-rata pertahun bertambah sebanyak 8.406 jiwa. Pertumbuhan penduduk setiuap tahunnya tidak merata yang berkisar antara 1,85 sd. 16,02 persen.

Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk juga tidak merata dimana jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibu kota kabupaten dengan jumlah sebanyak 55,918 jiwa atau sebesar 26,12 persen dari total penduduk Kutai Timur, dan sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Batu Ampar dengan jumlah penduduk sebanyak 2,940 jiwa atau sebesar 1,38 persen dari total penduduk Kutai Timur.

Tabel.6.87. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan, dan persebaran serta kepadatan penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

No.	Uraian	Satuan	2000	2002	2005	2008
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	146.510	161.946	175.106	213,762
2.	Pertambahan jumlah Penduduk	Jiwa	-	15.436	28.596	38.656
2.	Pertumbuhan Penduduk	Persen	-	2,17	3,90	2,44
3.	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	4,10	4,53	4.90	5.98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur

Menurut UU No. 20 tahun 1999, penduduk usia kerja adalah penduduk usia 10 tahun keatas yang terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (10 tahun keatas) yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja, adalah penduduk

dalam usia kerja (10 tahun keatas) yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tetapi kegiatan golongan ini masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti tidak mampu bekerja,pensiun).

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Tabel.6.88. Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kutai Timur 2006-2008

Kelompok Umur	2006			2007			2008		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(2)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
15-24	15.704	12.396	28.100	14.715	15.631	30.346	15.291	16.226	31.517
25-34	15.056	17.774	22.831	21.938	19.148	41.086	24.516	18.890	43.356
35-44	17.583	13.720	31.303	14.076	11.793	25.869	16.650	13.468	30.068
45-54	7.761	6.262	14.023	7.156	6.594	13.750	8.796	7.736	16.532
55-59	2.646	1.711	4.357	3.353	1.788	5.141	2.280	2.500	4.780
60+	4.356	2.105	6.461	1.819	2.514	4.333	3.576	2.532	6.108
Jumlah	63.106	53.968	117.074	63.057	57.468	120.525	71.059	61.302	132.361

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur & Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk usia kerja dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada tahun 2006 tercatat sejumlah 117.074 jiwa meningkat 13,06% menjadi 132.361 jiwa. Jika dilihat dari jenis kelamin, tercatat peningkatan jumlah penduduk usia kerja laki-laki cenderung lebih besar jika dibandingkan penduduk usia kerja perempuan. Penduduk usia kerja laki-laki meningkat sebesar 13, 59% sedangkan yang perempuan 12,60% dari tahun 2006 ke tahun 2008.

Tabel 6.89. Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur 2007-2008

Uraian	2007	2008
Angkatan Kerja	73.623	82.972
● Laki-laki	55.113	62.329
● Perempuan	18.510	20.643
● Bukan Angkatan kerja	46.902	44.389
● Laki-laki	7.944	8.730
● Perempuan	38.958	40.059
● TOTAL	120.525	132.361

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Secara populer penduduk usia kerja disebut tenaga kerja merupakan salah satu indikator dasar dalam ketenagakerjaan mengacu kepada LFA (Labour Force Approach) yang digunakan ILO (International Labour Organization). Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) mencatat jumlah penduduk usia kerja (15 Th ke atas) pada tahun 2000 mencatat angka sebesar 98.046 jiwa dan yang kategori sebagai angkatan kerja di Kutai Timur pada tahun 2000 mencatat angka sebesar 70.343 jiwa yang berarti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai angka 71,75 persen. Sementara pada tahun 2008 jumlah penduduk usia kerja (15 Th ke atas) mencatat angka sebesar 132.361 jiwa dan yang kategori sebagai angkatan kerja di mencatat angka sebesar 82.972 jiwa yang berarti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai angka 62,69 persen.

Tabel 6.90. Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No		2000	2003	2006	2008
1.	Angkatan Kerja/ AK	70,343	66,652	94,917	82.972
2.	Tingkat Partisipasi				
	Angkatan Kerja/TPAK	71.75	62.05	58.12	62,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Setengah M<enganggur

Pertumbuhan penduduk yang bekerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja yang hampir sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada relatif lebih sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Artinya bahwa setiap tahun akan selalu terjadi penambahan pengangguran baik itu terbuka atau setengah terbuka.

Tabel dibawah menunjukkan bahwa jumlah total angkatan kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan mengalami peningkatan selama periode 2006-2008. Pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja yang terserap sebanyak 153.187 orang

dari seluruh angkatan kerja. Lebih separuhnya yaitu 58,97% terserap di sektor pertanian sedangkan pada tahun 2008 menurun menjadi sebesar 52,56% dari jumlah angkatan kerja yang terserap sebanyak 169.351 orang.

Tabel. 6.91. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan pekerjaan Utama di Kabupaten Kutai Timur 2006-2008

Sektor/Lapangan Pekerjaan Utama (1)	2006		2007		2008	
	Jumlah (14)	% (15)	Jumlah (16)	% (17)	Jumlah (18)	% (19)
Pertanian	90.338	58,97	99.343	60,80	89.009	52,56
Pertambangan	9.697	6,33	10.354	6,34	20.038	11,83
Industri Pengolahan	12.104	7,90	2.400	1,47	788	0,47
Listrik, Gas dan Air Bersih	1.423	0,92	172	0,11	733	0,43
Bangunan	2.273	1,48	9.574	5,86	3.898	2,30
Perdagangan, Hotel dan Restoran	17.976	11,73	18.403	11,26	12.011	7,09
Pengangkutan dan Komunikasi	13.018	8,49	3.292	2,02	1.100	0,65
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.043	2,64	0,00	0,00	2.866	1,69
Jasa-jasa	21.314	13,91	17.076	10,45	26.537	15,67
Lainnya	0,00	0,00	2.775	1,70	12.371	7,31
Total	153.187	100,00	163.388	100,00	169.351	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Dari keseluruhan tenaga kerja yang terserap, menyisakan para pencari pekerjaan yang harus menjadi perhatian besar para pemegang kebijakan untuk mengatasinya. Pada tahun 2007, jumlah penduduk belum mempunyai pekerjaan sebesar 5.870 orang dan pada tahun 2008 sebanyak 4.220 orang. Sedangkan bagi mereka yang telah memiliki pekerjaan akan tetapi mempunyai pekerjaan yang tidak diharapkan/masih mau menerima pekerjaan dan bekerja di bawah jam kerja yang optimal (<35 jam seminggu) atau disebut setengah menggagur tercatat sejumlah 16.737 orang pada tahun 2006 dan 16.309 orang pada tahun 2008. Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dihitung dengan membuat perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2006 adalah 84.424 orang, diantaranya yang mencari pekerjaan ada sekitar 6.608 orang, dan tahun 2007 menurun menjadi 5.870 orang, serta 2008 menurun lagi menjadi 4.220 orang, dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2006-2008 adalah 7,83 persen, 4,87 persen, dan 3,19 persen. Jadi dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja 8 orang, 5 orang, dan 3 orang diantaranya adalah pencari kerja (pengangguran).

Dari penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja sekitar 77.816 orang, ternyata masih terdapat setengah pengangguran yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu, tahun 2006 terdapat sekitar 57.608 orang, dengan demikian angka Tingkat Setengah Penganggur berkisar 68,24 persen. Semakin tinggi tingkat setengah penganggur memberi indikasi pemanfaatan sumber daya manusia semakin rendah, atau sebaliknya. Sementara itu penduduk yang bekerja 35 jam/minggu atau lebih berjumlah 20.208 orang, artinya mereka bekerja dengan produktivitas yang tinggi.

Tabel . 6.92. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Variabel	2007	2008
1.	Angka pengangguran	5.870 (4,87%)	4.220 (3,19%)
2.	Angka setengah menganggur	16.737	16.309

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

C. Kompetitif/kemampuan bersaing Tenaga Kerja

Menjadi kondisi yang umum bahwa jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal pembangunan apabila daya saing penduduk yang masuk pasar kerja/menjadi angkatan kerja itu sendiri adalah baik. Untuk dapat mengetahui daya saing penduduk usia kerja dapat dilihat dari keterampilan dan tingkat pendidikan penduduk menurut usia kerja. Semakin tinggi tingkat keterampilan dan pendidikan penduduk dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena tingginya tingkat pendidikan akan berkorelasi positif dengan tingkat keterampilan dan kemampuan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Kutai Timur jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sejak 2000 sampai 2008 selalu mengalami peningkatan yaitu dari 98.046 orang ,menjadi sebanyak 117.074 orang dan terakhir 120.525 orang. Dari angka tersebut didominasi penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas dan yang menarik selalu mengalami peningkatan dan sebaliknya penduduk usia kertja yang berpendidifikan SD ke b awah trendnya mengalami penuirunan dari 21,37 persen, 17,67 persen dan

11,93 persen. Yang berarti jumlah penduduk usia kerja yang berpendidikan menengah ke atas (SLTP-Perguruan Tinggi) persentasenya selalu meningkat, yang berarti kualitas calon pekerja di daerah ini mengalami peningkatan dan lebih siap Bersaing di pasar kerja. Apabila dilihat perkecamatan, maka penduduk usia kerja yang pendidikannya relatif tinggi atau menengah ke atas diantaranya adalah kecamatan Sangatta Utara, Kongbeng, Batu Ampar, Sandaran, Sangkulirang, dan Sangatta Selatan dimana PUK yang berpendidikan SLTA di atas 24 persen. Lihat tabel 6.93 berikut.

Tabel.6.93. Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)			Persentase (%)		
		2000	2006	2008	2000	2006	2008
1.	Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD/Tamat SD	20.954	20.683	14.385	21,37	17,67	11,93
2.	SLTP	54.491	73.809	70.164	55,58	63,04	58,21
3.	SLTA	21.440	20.303	33.290	21,86	17,34	27,62
4.	Perguruan Tinggi	1.161	2.278	2.686	1,18	1,95	2,23
TOTAL		98.046	117.074	120.525	100,0	100,0	100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Sementara itu dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur jumlah permintaan tenaga kerja pada tahun 2007 terlihat masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SLTP keatas hingga mencapai sebanyak 975 lowongan atau 97,89 persen dan siasanya yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) hanya sebanyak 20 orang atau 2,11 persen. Kondisi ini juga tidak berbeda dengan tahun 2008 dimana lowongan/jumlah permintaan didominasi SLTP ke atas.

Tabel 6.94. Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur 2008

No	Permintaan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan	2007			2008		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1.	SD	20	1	21	1	-	1
2.	SLTP	33	-	33	18	-	18
3.	SLTA	878	11	889	216	7	223
4.	Sarjana Muda	-	-	-	22	2	24
5.	Sarjana	22	11	33	11	1	12
6.	Lainnya	11	9	20	-	-	-
	Jumlah	964	32	996	268	10	278

Sumber : Disnakertran Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim Dalam Angka)

Dari tabel di atas terlihat bahwa permintaan tenaga kerja oleh pengguna/user pekerja terpusat pada tenaga kerja yang berpendidikan menengah. Walaupun data yang diperoleh tidak lengkap, terlihat pola yang sama terjadi pada tahun 2007 dan 2008.

D. Kualitas Tenaga Kerja

Beberapa indikator/parameter mengukur kualitas tenaga kerja diantaranya adalah tingkat output yang dihasilkan atau produktivitas tenaga kerja maupun sektor pekerjaan yang dijadikan sandaran. Di Kabupaten Kutai Timur sektor formal dan informal yang menyerap tenaga kerja relatif berimbang dengan perbandingan 49,16 persen sektor formal dan 50,84 persen informal. Dilihat dari perbandingan tersebut memang sektor formal lebih kecil, hal ini dapat dipahami karena sebagian besar atau 15 (lima belas) kecamatan penduduk Kutai Timur tinggal di kecamatan pedesaan yang sebagian besar hidupnya bergantung pada sektor pertanian yaitu di atas 50 persen, terkecuali tiga kecamatan lainnya seperti Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Bengalon dimana hanya antara 8,30 - 38,95 persen penduduknya hidup di sektor pertanian dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor manufacture dan service. Sementara itu sektor formal yang mencapai 50,84 persen dari penduduk yang bekerja sebagian besar bekerja pada sektor jasa,

pertambangan, sektor perdagangan, restoran dan hotel. Lihat Tabel.6.95 dan 6.96. berikut.

Tabel.6.95. Penduduk bekerja menurut Sektor Formal dan Informal di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Sektor	2000		2004		2006		2008	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Formal	18.354	31,70	32.491	50,88	47.187	59,50	38.715	49,16
2	Informal	39.546	68,30	31.364	49,12	32.123	40,50	40.037	50,84
TOTAL		57.901	100,00	63.855	100,00	79.310	100,00	78.752	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Tabel 6.96. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Kecamatan dan Kelompok Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kutai Timur 2008

Kecamatan (1)	Agriculture (2)	Manufacture (3)	Service (4)	Jumlah (5)
Muara Ancalong	86,26	3,27	10,47	100,00
Busang	85,32	8,66	6,01	100,00
Long Mesangat	86,03	2,15	11,82	100,00
Muara Wahau	75,01	7,74	17,26	100,00
Telen	81,93	1,40	16,67	100,00
Kombeng	50,54	13,97	35,49	100,00
Muara Bengkal	62,84	6,86	30,30	100,00
Batu Ampar	90,66	2,82	6,52	100,00
Sanggatta Utara	8,30	59,17	32,52	100,00
Bengalon	27,56	40,15	32,29	100,00
Teluk Pandan	83,58	9,12	7,30	100,00
Sanggatta Selatan	38,95	28,31	32,74	100,00
Rantau Pulung	93,96	2,40	3,64	100,00
Sangkulirang	51,40	5,61	42,99	100,00
Kaliorang	77,38	5,66	16,97	100,00
Sandaran	76,37	1,43	22,20	100,00
Kaubun	90,50	4,18	5,32	100,00
Karangan	68,53	9,25	22,22	100,00
Jumlah	57,10	19,72	23,18	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

Apabila dilihat dari sudut produktivitas tenaga kerja, maka tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian yang paling tinggi tingkat pruktivitasnya yaitu mencapai Rp. 1.045.457.405,- dan urutan ke dua adalah sector angkutan dan komunikasi sebesar Rp. 419.404.609,-, urutan ketiga yaitu sector konstruksi sebesar Rp. 123.712.093,- dan sector lainnya berkisar antara Rp. 11.983.785 - 90.280.685,- serta yang paling kecil produktivitasnya adalah sector tradisional yaitu pertanian yang mencapai angka Rp. 11.983.785,-. Lihat Tabel.6.97 berikut.

Tabel 6.97. Produktivitas tenaga kerja menurut sektor Lapangan usaha di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Sektor Ekonomi	2000	2003	2006	2008
1. Pertanian	6.423.861	6.588.018	15.468.254	11.983.785
2. Pertambangan dan Penggalian	-	604.933.139	1.416.778.545	1.045.457.405
3. Industri Pengolahan	9.293.358	5.640.145	5.628.401	90.280.685
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	-	-	1.885.070	37.639.986
5. Konstruksi	-	151.003.233	186.000.277	123.712.093
6. Perdagangan	47.377.773	32.493.443	32.792.928	71.535.752
7. Angkutan dan Komunikasi	84.613.345	83.332.758	14.123.958	419.404.609
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	-	-	45.014.049	83.026.036

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur

E. Status Pekerjaan

Dari hasil Susenas 2006 dapat diketahui bahwa sekitar 21.484 orang (27,61 persen) yang bekerja berstatus buruh/karyawan, sedangkan yang berstatus berusaha sekitar 33.516 orang (43,08 persen), sisanya adalah pekerja bebas sekitar 2.788 orang (3,58 persen), dan yang tidak dibayar sekitar 20.028 orang (25,74 persen). Bila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, maka terlihat bahwa pekerja laki-laki yang bekerja dengan status buruh relatif lebih besar jika dibandingkan dengan pekerja perempuan, yaitu 30,75 persen berbanding 16,84 persen.

6.9.8. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kesejahteraan Masyarakat:

1. Indikator Penduduk Miskin
2. Indikator Angka Kematian Bayi
3. Indikator Konsumsi Non Makanan

1. Indikator Penduduk Miskin

Konsep kemiskinan setiap individu/lembaga penyelenggara yang memperhatikan masalah kemiskinan mempunyai pengertian yang berbeda. Ada beberapa

pengertian kemiskinan yang masing-masing dapat digunakan untuk keterbandingan tingkat kemiskinan antar wilayah atau negara.

Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan bahwa kemiskinan seseorang timbul dikarenakan faktor pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penghitungan yang digunakan dengan cara melihat distribusi pendapatan/pengeluaran yang dihitung berdasarkan kriteria 20% atau 40% masyarakat yang berada dibawah rata-rata pendapatan/pengeluaran penduduk. Jenis kemiskinan ini tidak akan pernah tuntas, karena selalu ada golongan tersebut didalam struktur golongan pendapatan/pengeluaran penduduk. Dalam hal ini dikenal dengan pengelompokkan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan terhadap kebutuhan dasar manusia. Setiap daerah mempunyai garis kemiskinan yang berbeda disesuaikan dengan daya beli masyarakat terhadap "basic needs". Basic needs (atau kebutuhan) dasar dikelompokkan dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, dan fasilitas kehidupan seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihitung dengan standarisasi nilai uang suatu negara yang disepakati bersama, yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Garis kemiskinan dengan menggunakan nilai uang ini tidak berubah, walaupun nilai barang mengalami perubahan setiap saat. Garis kemiskinan absolut ini dapat digunakan untuk membandingkan kemiskinan antar daerah.

Garis kemiskinan absolut ini sangat penting diketahui jika pemerintah ingin mengetahui efek dari suatu kebijakan pembangunan ekonomi sosial yang diberikan dalam rangka upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Misalnya pengaruh pemberian kredit terhadap kemampuan pengentasan kemiskinan seseorang.

Bank Dunia memerlukan penghitungan garis kemiskinan absolut ini guna mengetahui dan menganalisis penetapan arah kebijakan atau arah penyaluran dana yang akan diberikan kepada suatu negara. Nilai absolut yang digunakan adalah dengan 2 nilai yaitu: US \$1 /kapita/hari dan US 2\$/kapita/hari. US\$ yang digunakan adalah nilai tukar terhadap kemampuan daya beli standar (*Purchasing*

Power Parity) dan bukan nilai tukar resmi yang digunakan didalam perdagangan komersial antar negara (*Exchange rate*). Negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari nilai PDB/kapita/tahun. Untuk Indonesia kemiskinan dihitung dengan pengeluaran minimum makanan yang didekati dengan kebutuhan 2100 kkalori ditambah dengan kebutuhan bukan makanan.

Kemiskinan Struktural dan Kultural

Kemiskinan ini dinilai dari kultur dan adat budaya setempat yang mengelompokkan manusia dalam berbagai tingkatan kehidupan. Kemiskinan struktural lebih bersifat menetes kebawah (*trickle down effect*) dikarenakan penataan arah pembangunan yang tidak merata sehingga suatu daerah, atau kelompok masyarakat akan tetap berada didalam kondisi miskin. Sebagai contoh adalah terisolirnya tempat tinggal penduduk dari berbagai akses guna pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi.

Sedangkan kemiskinan kultur lebih dipengaruhi oleh adat-istiadat atau budaya setempat. Dalam kemiskinan jenis ini, terkadang walaupun upaya kemiskinan telah dilakukan telah dilakukan, namun dikarenakan pola pandang adat, budaya tidak berubah maka kelompok masyarakat ini akan tetap berada didalam kondisi miskin. Sebagai contoh tradisi sosio kultur suku pedalaman. Untuk itu Sutandyo Wignyosoebroto dalam penulisan "kemiskinan, kebudayaan dan gerakan membudayakan keberdayaan" mengetengahkan pelunya meningkatkan dengan mencanangkan "Gerakan membudayakan keberdayaan" dengan menjadikan masyarakat kalangan tersebut akan arti melek huruf, melek sosial, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak dan lainnya yang dapat membuka wawasan masyarakat tersebut agar tidak "terjebak" dalam kemiskinan kultur .

2. Strategi penghitungan Kebutuhan dasar

ILO (International Labor Organisation) tahun 1976 telah mempopulerkan strategi kebutuhan dasar dalam suatu publikasi dengan judul "Kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan dasar: Suatu masalah bagi satu dunia". Kebutuhan dasar lebih menitikberatkan pada pemenuhan secara langsung bukan *trickle down effect* . Kesulitan umum dalam penilaian kebutuhan dasar yang subjektif karena dipengaruhi adapt, budaya, dan kelompok social. Sedangkan penilaian yang

sifatnya kuantitatif lebih disulitkan oleh pemenuhan yang berbeda (selera) terhadap suatu jenis komoditi.

Untuk itu kelompok ahli telah mencoba membuat berbagai rumusan komponen kebutuhan dasar yang dikutip oleh Hendra Esmara (tahun 1986) antara lain:

1. Menurut standar UN (United Nations) tahun 1961 komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial dan kebebasan manusia.
2. Menurut UNSRID (1966), kebutuhan dasar dibedakan 3 komponen yaitu kebutuhan fisik primer (mencakup gizi, perumahan dan kesehatan), kebutuhan kultural (mencakup pendidikan, rekreasi, ketenangan hidup) , dan kebutuhan atas kelebihan pendapatan (tabungan, asuransi, investasi).
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976) kebutuhan dasar dibedakan atas gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan dan sandang.
4. Menurut Green (1978) yang dikutip oleh Thee Kian wie (1981), kebutuhan dasar terdiri dari 2 komponen yaitu personal consumption yang berupa pangan, sandang dan pemukiman; and basic public services berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara dalam tulisannya tersebut (1986) kebutuhan dasar mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan dasar terdiri dari indikator makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari hasil tersebut dapat dijelaskan kebutuhan akan:
 - a. pangan dinyatakan dengan pemenuhan gizi akan kecukupan kalori dan protein.
 - b. Sandang, dinyatakan dalam indikator pengeluaran rata-rata penduduk atas keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
 - c. Perumahan, dinyatakan dalam indikator pengeluaran rata-rata akan sewa rumah, listrik, bahan bakar untuk memasak (minyak tanah, kayu bakar/arang), dan air.

- d. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, seragam, iuran sekolah, alat tulis dan buku)
- e. Kesehatan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan dirumah, ongkos berobat, perawatan termasuk obat-obatan

3. Penetapan Penduduk Miskin

Secara keseluruhan dalam penggunaan komponen pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat menjangkau sasaran penduduk yang dinyatakan miskin dan perlu dilakukan suatu tindakan guna pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini ada data dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang dapat menunjukkan sasaran rumahtangga miskin.

Pendekatan BKKBN yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan keluarga yang dikelompokkan dalam 5 kebutuhan dasar keluarga yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama; keluarga umumnya makan makan 2 kali atau lebih/hari; keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian; lantai rumah tempat tinggal keluarga bukan dari tanah; dan bila anak sakit atau pasangan usia subur (PUS) dapat pergi kesarana kesehatan serta diberi alat KB modern. Namun demikian data ini tidak dapat digunakan secara operasional dikarenakan belum lengkapnya kriteria yang digunakan dan masih ada unsur penilaian yang kualitatif yang sulit dikelompokkan secara measurement (yang bisa dikuantitaifkan).

Survei SKPKM (Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin)

Penghitungan kebutuhan dasar secara makro yang dilaksanakan oleh BPS tidak dapat menjangkau individu perorangan untuk mengetahui sasaran rumahtangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Sehingga tidak diketahui suatu normatif yang perlu dilakukan pengentasan kemiskinan pada individu yang dikategorikan miskin tersebut. Maka dengan menggunakan hasil studi SPKPM (Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin) tahun 2000 dengan 8 variabel awal dan dikembangkan menjadi 14 variabel yang diperoleh dengan menggunakan stepwise logistic regression (SLR) dan misklasifikasi. Variabel tersebut akhirnya digunakan untuk penentuan rumahtangga miskin, hampir miskin dan tidak miskin yang

kedepannya dapat dilakukan berbagai program sektoral maupun lintas sektor guna mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Variabel tersebut dikelompokkan dalam 2 skor penilaian. Hasil analisis dengan menggunakan uji *chisquare* menunjukkan bahwa 8 variabel awal 99% dapat menggambarkan ciri rumahtangga miskin, dan 6 variabel pengembangan untuk menghindari misklasifikasi. Hasil tersebut mengelompokkan pada 3 kelompok rumahtangga sasaran yaitu sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Variabel ini pertama kali digunakan pada tahun 2005 pada kegiatan survei Pendataan Sosial Ekonomi, dan dilanjutkan pada tahun 2008 dengan survei PPLS yang menghasilkan jumlah rumahtangga sasaran program pengentasan.

4. Karakteristik Kemiskinan

Indikator penentu dalam melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan salah satu suksesnya pembangunan milenium (Milenium Development Goals/MDGs) adalah pengentasan kemiskinan absolut, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan akan fasilitas kepuasan hidup untuk bersosialisasi dan berekonomi dilandaskan pada bangsa yang mandiri.

Kemiskinan merupakan topik yang semakin menjadi perhatian, terlebih sejak terjadinya krisis ekonomi. Dengan adanya krisis menjadikan analisis masalah kemiskinan yang komprehensif dan mendalam jelas sangat diperlukan. Lebih dari itu, sangat perlu ditelaah bagaimana dampak krisis pada penduduk lapisan bawah dari segi ketahanan pangan, aspek kemampuan rumah tangga mempertahankan anaknya untuk tetap sekolah dan tetap sehat. Informasi mengenai penduduk yang masuk dalam kategori miskin termasuk karakteristik kemiskinan merupakan upaya agar target program pengentasan kemiskinan dapat dibuat menjadi lebih akurat.

Menyadari pentingnya pengentasan kemiskinan, pemerintah melalui program JPS (Jaring Pengaman Sosial) dan program-program lainnya telah berusaha mengangkat masyarakat miskin tersebut. Namun data tentang jumlah penduduk dan rumah tangga miskin yang representatif menurut wilayah sangat terbatas.

Informasi utama tentang kemiskinan yang paling menarik perhatian banyak pihak adalah mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin. Dengan memperhatikan angka ini maka dapat dipantau tentang keberhasilan pelbagai kebijakan dan program pembangunan yang sekaligus dapat dinilai apakah program tersebut memihak penduduk miskin atau tidak.

Metode penghitungan penduduk miskin yang telah diuraikan diatas dan yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Jumlah dan persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran perkapitanya. Mereka yang memiliki tingkat pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan (GK) dikategorikan miskin. Garis kemiskinan, yang merupakan standar kebutuhan dasar tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu batas kecukupan makanan dan non makanan. GK ini pada prinsipnya adalah suatu standar minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan perkataan lain, GK adalah nilai pengeluaran untuk kebutuhan minuman makanan yang distandarisasikan dengan kecukupan 2100 kkalori dan bukan makanan per kapita per bulan. GK setiap tahun terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan nilai komoditas. Tahun 2005 GK di Kutai Timur perkapita/bulan mencapai Rp. 196.261,- dan meningkat menjadi Rp. 257.155,- ditahun 2008.

Jumlah penduduk miskin yang dihitung dengan menggunakan GK dari tahun 2000 hingga 2008 terus mengalami penurunan yang cukup berarti. Artinya dari segi pemenuhan kebutuhan dasar akan kecukupan pangan dan non makanan sudah mulai terlihat adanya pengentasan kemiskinan. Masyarakat mulai mampu untuk mencapai standar kecukupan hidupnya. Tahun 2000 persentase penduduk miskin sekitar 17,11% dan turun menjadi 13,20% ditahun 2008. Lihat Tabel. 6.98. berikut ini.

Tabel.6.98. Jumlah penduduk miskin, persentase, dan garis kemiskinan di Kabupaten Klutai Timur 2008

No.	Uraian	Satuan	2002	2004	2006	2008
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	27.703	27.900	31.800	24.760
	Persentase Jumlah	Persen	17,11	16,57	17,66	13,20
2.	Penduduk Miskin					
3.	Gharis Kemiskinan	Rp/Kap/Bln	176.560	186.261	262.462	257.155

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (SUSENAS Modul Konsumsi)

Pengentasan kemiskinan ternyata tidak identik dengan rasa keadilan masyarakat/rumahtangga dalam pemahamannya mengenai kesejahteraan. Mereka lebih memahami bahwa dirinya sebagai warga masyarakat merasa masih memerlukan uluran tangan pemerintah dalam upaya pemenuhan kecukupan hingga dikatakan sejahtera. Sehingga untuk menghilangkan kerancuan dari istilah rumahtangga miskin dan kebutuhan untuk sejahtera, maka pada hasil pendataan tahun 2008 tidak lagi disebut sebagai program pengentasan kemiskinan namun lebih disebut program bantuan pada rumahtangga sasaran.

Karakteristik Rumahtangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan

Data Tabel 6.99 memperlihatkan kantong-kantong kemiskinan diketahui hampir sebagian besar rumah tangga di kecamatan-kecamatan pedesaan yang kehidupannya berdsandar pada sektor pertanian menjadi daerah yang banyak rumah tangga miskinnya dan hanya beberapa kecamatan yang persentase rumah tangga miskinnya kecil yaitu; Kecamatan Karang, Kaubun, Kaliorang, Sangatta Utara, dan Muara Wahau. Tahun 2000 hingga 2005 merupakan data kemiskinan yang dihitung berdasarkan variabel hasil SPKPM (Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin) . Secara total di Kutai Timur jumlah rumahtangga miskin terus mengalami peningkatan dari 22,17% meningkat menjadi 51,21% ditahun 2003 dan 55,24% ditahun 2005 dan mulai terjadi penurunan di tahun 2008 menjadi 45,77%. Secara konseptual, dari penghitungan dengan rumusan GK kabupaten Kutai Timur telah berhasil mengurangi kemiskinan. Kecukupan gizi dan non makanan guna melangsungkan kegiatan ekonomi dan sosial telah mengalami kemajuan. Namun bukan berarti secara kuantitatif dengan melihat fisik rumahtangga dan karakteristik rumahtangga mengenai kesejahteraan terpenuhi. Masih diperlukan program sasaran sektoral guna pengentasan kemiskinan.

Pada tabel 6.100 terlihat pada tahun 2008 dari 24.477 rumahtangga sasaran komponen karakteristik yang perlu mendapat perhatian dalam pengentasan rumahtangga miskin yang menjadi sasaran utama pengentasan antara lain rumah tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah, kemampuan mendapat pengobatan, Keluarga Berencana, peningkatan usaha dengan pemberian kredit lunak dan peningkatan kondisi bangunan tempat tinggal yang layak huni.

Jumlah rumahtangga yang perlu penanganan untuk memantau kondisi gizi balita ada sekitar 38,13% rumahtangga. Karena dengan tingkat kesejahteraan

rumahtangga sasaran yang masih perlu dibantu, tingkat rentan atas penanganan anak balita terhadap kesehatan dan kecukupan gizi untuk modal pertumbuhan anak dirumahtangga tersebut biasanya amatlah minim.

Selanjutnya ada sekitar 54,55% (13.352) rumahtangga sasaran yang anaknya masih bersekolah dan dikuatirkan tingkat kelangsungan sekolahnya pada rumahtangga sasaran yang rentan akan ekonomi rumahtangga. Dari persentase rumahtangga yang memiliki anak masih sekolah 52,98% duduk dibangku SD/MI, 14,93% di bangku SLTP/MTs dan 6,55% duduk dibangku SMU/SMK/MA. Penangan yang segera sejojanya dilakukan untuk program wajib belajar adalah pada rumahtangga yang anaknya usia sekolah namun tidak bersekolah. Ada sekitar 25,55% (6.380) rumahtangga dari 24.974 anak usia sekolah di rumahtangga sasaran. Disamping itu sebagian besar rumah tangga miskin menempati bangunan yang kurang layak huni terutama, a bangunan banyak terbuat dari bahan yang berkualitas rendah seperti bambu, kayu sebetan/kayu berkualitas rendah dan air untuk minum bersumber dari air sumur/sungai/mata air, disamping tempat buang air besar belum menggunakan WC bertangki septik.

Tabel.6.100. Rumah Tangga Miskin Menurut Keberadaan Balita, Anak Sekolah dan Kondisi Tempat Tinggal di Kabupaten Kutai Timur 2005

No	Kecamatan	Ada Anak Balita	Ada Anak Sekolah	Tidak Mampu berobat	Terdapat anak Tidak Sekolah	Ada anak Sekolah SD/MI
1.	Muara Ancalong	1.409	2.049	1.684	883	1.839
2.	Busang	327	492	513	294	493
3.	Muara Wahau	289	511	244	288	509
4.	Telen	354	551	506	288	589
5.	Kombeng	204	517	475	254	568
6.	Muara Bengkal	1.161	1.671	2.133	984	1.544
7.	Sengatta	2.475	3.387	6.605	880	3.684
8.	Bengalon	913	1.178	1.510	513	1.094
9.	Kaliorang	708	1.049	1.157	608	1.053
10.	Sangkulirang	980	1.300	1.402	935	1.222
11.	Sandaran	514	647	786	453	635

TOTAL	9.334	13.352	17.015	6.380	13.230
-------	-------	--------	--------	-------	--------

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (Hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk)

Tabel 6.101. Rumah Tangga Miskin Menurut Keberadaan Balita, Anak Sekolah dan Kondisi Tempat Tinggal di Kabupaten Kutai Timur 2008

No.	Kecamatan	Kondisi Bangunan Tempat Tinggal				
		Tanah/Bambu/ Kayu Berkualitas Rendah	Semen/Kerami Kayu berkualitas Tinggi	WC Bersama/ Umum	WC Sendiri	Air Minum dari Sumur/Mata Air/Sungai
1.	Muara Ancalong	3.156	455	2.843	768	3.376
2.	Busang	803	34	649	188	831
3.	Muara Wahau	790	74	477	387	680
4.	Telen	868	115	891	92	975
5.	Kombeng	739	59	451	347	716
6.	Muara Bengkal	3.522	32	3.080	474	3.265
7.	Sengatta	6.762	85	5.877	970	6.541
8.	Bengalon	1.800	201	1.177	824	1.888
9.	Kaliorang	1.730	21	767	984	1.623
10.	Sangkalirang	2.650	21	1.797	874	2.474
11.	Sandaran	1.290	23	1.163	150	1.311
TOTAL		24.110	1.120	19.172	6.058	23.680

Peningkatan Usaha pada Rumahtangga Sasaran

Peningkatan kesejahteraan mandiri dalam program ini amatlah diperlukan. Stimulasi bantuan usaha untuk rumahtangga sasaran guna pemenuhan kebutuhan rumahtangga secara mandiri, memang diperlukan langkah awal oleh pemerintah. Salah satu program yang diharapkan adalah pemberian bantuan usaha baik berupa modal, ketrampilan ataupun manajemen usaha guna pengelolaan usaha yang lebih baik dan terarah. Program bantuan yang terlihat saat ini untuk rumahtangga sasaran baru dalam taraf pemberian modal kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jalan pintas `perlu dilakukan dengan pemberian kredit lunak seperti program (PNPM) yang saat ini sedang digiatkan. Persentase penerima bantuan kredit UKM tahun 2008 baru 1,22% (308) rumahtangga.

2. Indikator Angka Kematian Bayi

Tingkat Fertilitas (TFR)

Walaupun terus mengalami penambahan jumlah penduduk namun kecepatan penambahannya mengalami penurunan, sebagai akibat dari menurunnya tingkat kelahiran (TFR menurun). Salah satu masalah kependudukan di Indonesia dewasa ini adalah bagaimana menurunkan tingkat fertilitas ke tingkat yang lebih rendah. Hal tersebut diperlukan karena kelahiran adalah salah satu komponen yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Dengan adanya penurunan jumlah kelahiran pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Program pemerintah melalui Keluarga Berencana tidak hanya bertujuan menurunkan tingkat fertilitas tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menanamkan norma tentang keluarga kecil bahagia sejahtera.

Upaya pemerintah tersebut diatas telah berhasil menurunkan tingkat fertilitas di Indonesia secara umum. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai sumber data dimana TFR (*Total Fertility Rate*) yang sering digunakan sebagai ukuran fertilitas. Keadaan ini disertai dengan pembangunan sosial ekonomi dan budaya yang membaik seperti salah satunya peningkatan ekonomi rumah tangga melalui peranan wanita dalam angkatan kerja.

Di Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2005 TFR mencapai 2,279 per wanita. Angka TFR terus turun hingga pada tahun 2008 menjadi 2,20 per wanita, pengertiannya adalah secara hipotesis setiap wanita akan melahirkan anak sebanyak 2-3 orang hingga berakhirnya masa reproduksi yang biasanya hingga usia wanita 49 tahun, atau untuk setiap 100 wanita melahirkan sebanyak 20-30 anak hingga berakhir masa reproduksinya.

Perubahan-perubahan perilaku fertilitas tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan program keluarga berencana, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain baik variabel langsung maupun variabel tidak langsung. Beberapa variabel tidak langsung adalah variabel peranan alternatif wanita yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh variabel sosial ekonomi lainnya seperti pendidikan dan variabel pendapatan. Variabel peranan alternatif wanita menekankan bahwa stasus wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, merawat anak dan melayani suami tetapi juga peran-peran lain dalam pembangunan.

Angka Kematian Bayi (IMR)

Mortalitas merupakan komponen demografi yang juga mempengaruhi dinamika demografis disamping fertilitas dan migrasi. Tingkat kematian yang terjadi umumnya berbeda menurut golongan umur, jenis kelamin maupun kondisi sosial ekonomi penduduk. Dengan demikian tingkat kematian yang terjadi disuatu wilayah sering dihubungkan dengan kemajuan sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Indikator kematian yang sering digunakan adalah jalur Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR). Angka kematian bayi adalah hal yang paling mudah untuk melihat keberhasilan program kesehatan dan lingkungan sosial ekonomi terutama untuk ibu dan anak. Untuk menghitung berbagai indikator tersebut, data utamanya adalah berasal dari registrasi vital. Namun data demikian sulit untuk diperoleh, sehingga perhitungan sering dilakukan secara tidak langsung (*Indirect*). Hal tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan hasil sensus penduduk melalui data anak lahir hidup maupun anak masih hidup. Besarnya AKB di Kabupaten Kutai Timur tahun 2005 adalah sebesar 20,67, dan pada tahun 2006 menjadi 19,75 per 1000 kelahiran hidup.

Berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kematian bayi antara lain faktor tempat tinggal, sebuah penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kematian bayi di daerah perkotaan lebih rendah dibanding daerah pedesaan. Hal ini didasari karena masyarakat kota pada umumnya mempunyai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, serta penyediaan air dan sanitasi yang lebih baik, demikian pula konsentrasi pelayanan kesehatan modern dan tenaga kesehatan lebih besar di kota. Faktor pendidikan, terutama pendidikan ibu, berpengaruh sangat kuat terhadap kelangsungan hidup bayi dan anaknya. Dengan pendidikan tinggi, membuat ibu mampu memanfaatkan dunia modern yaitu pengetahuan tentang fasilitas dan perawatan kesehatan modern, serta mampu berkomunikasi dengan aparat para medis. Disamping itu pendidikan wanita dapat mengubah keseimbangan kekuasaan tradisional di keluarga.

Angka Harapan Hidup (AHH)

Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, dimana semakin tinggi kematian bayi nilai AHH akan menurun. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari beberapa hal seperti kondisi lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status

gizi dan lain-lain. Oleh karena itu AHH cukup representatif digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat

kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan.

Pada tahun 2005 AHH Kabupaten Kutai Timur sebesar 67,8 tahun, kemudian meningkat 67,9 tahun pada tahun 2006, dan ditahun 2008 meningkat menjadi 68,25 tahun. AHH penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 ternyata masih rendah bila dibandingkan dengan AHH Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 (70,5 tahun).

Angka kelahiran Total wanita usia subur di Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 rata-rata sebesar 2,20 orang. Kondisi ini menurun setiap tahunnya sejak 2005 dari angka 2,28 orang, 2,26 orang, dan 2,25 orang, hal ini menggambarkan adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya mengikuti program Keluarga Berencana (KB) untuk mendapatkan kerluarga kecil sejahtera

Selain itu Angka Kematian bayi (IMR) juga pada periode yang sama menurun dari 20,67 per 1.000 kelahiran di tahun 2005 menjadi 19,71 per 1.000 kelahiran di tahun 2008 hal ini menggambarkan bahwa ibu-ibu usia produktif mengalami peningkatan dalam hal kesehatannya, memahami arti penting menjaga janin selama kehamilan dengan memakan makanan bergizi dan memeriksakan kesehatanya di tempat sarana kesehatan yang semakin lengkap. Untuk angka harapan hidup mengalami peningkatan dari 67,80 tahun menjadi 68,25 tahun di tahun 2008 yang hal ini menggambarkan semakin sehatnya masyarakat karena adanya peningkatan pendapatan hingga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang cukup.

Tabel 101a. Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

Variabel	Satuan	2005	2006	2007	2008
Angka Kelahiran Total /TFR	Per Wanita	2,28	2,26	2,25	2,20
Angka Kematian bayi/IMR	Per 1000 kelahiran hidup	20,67	19,75	19,74	19,71
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,80	67,9	68,08	68,25
Rasio Ketergantungan	Persen	53,06	50,41	46,49	45,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

3. Indikator Konsumsi Non Makanan

Keadaan Sosial ekonomi rumahtangga dapat diamati dari besar-kecilnya tingkat pendapatan suatu rumahtangga, atau dapat dikatakan bahwa tingkat kesajahteraan suatu rumahtangga dapat dilihat dari tingkat pendapatan rumahtangga tersebut. Namun demikian untuk memperoleh data pendapatan yang akurat adalah sulit, sehingga pendekatan yang sering dilakukan adalah pendekatan pengeluaran rumahtangga.

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan sebagian besar pengeluaran pendudukan per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Timur pada 2007 berada pada golongan pengeluaran per kapita diatas Rp 200.000,- yaitu mencapai 89,54 persen dan sisanya 10,46 persen pengeluaran perkapita perbulan kurang dari Rp 200.000,-

Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin berkurang pengeluaran yang dibelanjakan untuk makanan dan semakin meningkat pengeluaran untuk bukan makanan. Pada tahun 2007 di Kalimantan Timur persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 50,52 persen dan untuk pengeluaran non makanan sebesar 49,48 persen

6.9.9. Indikator-indikator untuk menilai Sosial, Politik dan Budaya:

1. Indikator Aktivitas Sosial
2. Indikator Pengaman Sosial
3. Indikator Partisipasi Pemuda

1. Aktivitas Sosial

Sebagian besar penduduk Kabupaten Kutai Timur beragama Islam yaitu mencapai 168.369 jiwa atau 87,82 persen, kemudia diikuti oleh pemeluk agama Kristen Protestan 17.184 jiwa, Katholik 2.880 jiwa, Hindu 2.592 jiwa dan Hindu 702 jiwa. Jumlah rumah ibadah

Jumlah sarana ibadah meningkat setiap tahunnya, masjid/musholla/langgar yang pada tahun 2000 berjumlah 165 unit pada tahun 2008 meningkat menjadi 268

unit atau selama sembilan tahun mengalami pertambahan sebanyak 103 unit atau 62,42 persen. Selanjutnya gereja pada tahun 2008 berjumlah 175 unit atau mengalami pertambahan selama periode yang sama sebanyak 115 unit atau 191,67 persen, dan pura pada tahun 2008 berjumlah 21 unit atau mengalami pertambahan selama periode yang sama sebanyak 13 unit atau 162,50 persen, dan secara rata-rata rumah ibadah selama sembilan tahun bertambah sebanyak 231 unit atau 99,14 persen atau rata-rata pertahun bertambah sebesar 12,39 persen. Lihat Tabel.6.102 berikut.

Tabel.6.102. Sarana Peribadatan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Sarana Ibadah	2000	2003	2008	Perkembangan	
					Pertambahan 2000-2008 (Unit)	Persen- tase (%)
1.	Masjid/Musholla/Langgar Gereja Kristen Protestan dan Kristen Katholik	165	209	268	103	62,42
2.	Pura	8	9	21	13	162,50
3.	Vihara	-	-	-	-	-
4.	Jumlah	233	360	464	231	99,14

Sumber : Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur

Kegiatan organisasi kemasayarakatan di Kutai Timur juga mengalami pertumbuhan yang pesat rata-rata di atas 50 persen, organisasi sosial dimaksud adalah Ormas, Paguyuban, Organisasi Profesi, Yayasan, Organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat fungsional. Selain itu jumlah komunitas adat terpencil jumlah menurun yang semula 369 KK pada tahun 2008 menjadi 112 KK atau turun sebesar 99,00 persen, sementara jumlah anak terlantar jumlahnya tidak berubah yaitu 540 Orang. Lihat Tabel.6.103 berikut.

Tabel.6.103. Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No	Uraian	Satuan	2007	2008	Pertumbuhan (%)
1.	Organisasi Kemsayarakatan:	Buah			
	Ormas		80	184	130,00
	OKP		-	-	-
	LSM		52	52	-
	Paguyuban		20	38	90,00
	Organisasi Profesi		16	16	-
	Yayasan		10	17	70,00
	Organisasi Keagamaan		24	24	-

	ORMAS Fungsional		-	144	-
2.	Banyaknya Komunitas adat terpencil	KK	369	112	-99,00
3.	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Orang	540	540	-

Sumber : Dinas Sosial (Kaltim Dalam Angka)

Kegiatan sosial politik di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat salah satunya dari kegiatan Pemilihan umum Legislatif maupun presiden, dan pemilihan kepala daerah (PILKADA). Dari jumlah Penduduk 213.586 jiwa terdapat jumlah pemilih tetap pada Pemilu Legislatif sebanyak 174.388 jiwa atau 81,61 persen dari total penduduk, dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 93.188 jiwa atau sebesar 53,44 persen yang berarti terdapat 46,56 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan. Dari hasil Pemilu Legislatif telah menghasilkan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur sebanyak 25 orang dengan komposisi 22 orang laki-laki dan 3 orang berjenis kelamin perempuan yang berarti sebesar 8,36 persen atau tidak memenuhi kuota 30 persen wanita di parlemen. Lihat tabel.6.104 berikut.

Tabel.6.104. Organisasi Politik di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No	Uraian	Satuan	2008	Keterangan
1.	Jumlah Pemilih Tetap pada Pemilu 2008	Orang	174.388	Rasio Pemilih terhadap Total Penduduk= 81,61%
2.	Jumlah Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Gubernur Kaltim :			Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih sah= 53,44%
	a. Calon I (Awang F+ Farid Wajdi)	Orang	68.814	
	b. Calon II (M. Amin+ Hadi Mulyadi)	Orang	24.374	
	Jumlah	Orang	93.188	
3.	Banyaknya anggota Legislatif (DPRD):	Orang		Persentase Perempuan di DPRD= 8,36%
	a. Laki-laki	Orang	22	
	b. Perempuan	Orang	3	
	Jumlah	Orang	25	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kaltim

Potensi wisata di Kabupaten Kutai Timur memang belum tergarap dengan baik, walaupun sebenarnya obyek wisata tersebut dapat dijadikan instrumen sumber pendapatan daerah. Berbagai obyek wisata alam seperti pantai, pegunungan, dan

hutan yang terdapat di beberapa kecamatan seperti Sangatta Selatan, Bengalon, Sangkulirang, dan Kongbeng telah menarik perhatian wisatawan domestik maupun asing yang datang berkunjung walaupun masih sedikit yaitu 7.200 orang domestik dan 108 orang wisatawan asing. Cukup menarik perhatian bagi pengunjung dengan keberadaan obyek wisata tersebut, sebab wisata asing tidak kesulitan untuk mendapatkan tempat menginap sebab di daerah ini telah tersedia fasilitas hotel yang memadai dan jumlahnya pun cukup fantastik, dimana dalam waktu 9 tahun perkembangan jumlah hotel dan akomodasi meningkat menjadi sebanyak 60 unit atau sebesar 315,78 persen yaitu dari sebanyak 19 unit tahun 2000 menjadi 79 tahun 2008. Lihat tabel. 6.105 dan 6.106 berikut.

Tabel.6.105. Potensi Wisata Alam di Kabupaten Kutai Timur 2008

No	Jenis Objek Wisata	Jumlah Objek Wisata	Lokasi	Jumlah Pengunjung (Orang)	
				Indonesia	Asing
1	Pantai	3	Teluk Lombok Kecamatan Sangatta Selatan, Skrat Kec. Bengalon, Kec. Sangkulirang, Pantai Aquatik	5.000	75
2	Pegunungan	2	Pegunungan Kongbeng kec. Kongbeng, Goa Kelelawar Kec. Kongbeng	1.200	12
3	Hutan	1	Weber Kecamatan	1.000	25
Jumlah					

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Tabel.6.106. Sarana dan Prasarana Wisata di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Sarana dan Prasarana Wisata	2000	2003	2008	Perkembangan	
					Pertambahan 2000-2008 (Unit)	Persentase (%)
1.	Akomodasi					
	Hotel	19	52	79	60	315,78
	Jumlah Kamar	211	739	1.177	966	457,82
	Jumlah Tempat Tidur	302	1.006	1.710	1.408	366,23
2.	Taman Wisata Alam			1	1	100,00
3.	Event Budaya	-	-	6	6	100,00
4.	Peninggalan Sejarah dan Purbakala	-	-	1	1	100,00
5.	Museum	-	-	-	-	-
6.	Art Galeri	-	-	-	-	-
7.	Taman Budaya	-	-	1	1	100,00

8.	Desa Kerajinan Tradisional			1	1	100,00
9.	Taman Nasional	1	1	1	-	-
10.	Taman Hutan raya	-	-	-	-	-
11.	Taman Wisata Laut	-	-	1	1	100,00
12.	Taman Buru	-	-	-	-	-
13.	Hutan Manggrove	-	-	5	5	100,00

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur



2. Pengaman Sosial

Pengamanan sosial di daerah ini terutama pada banyaknya peristiwa kejahatan relatif bervariasi setiap tahun karena angkanya tidak cenderung turun dan naik dalam arti di tahun tertentu angkanya naik dan tahun lainnya turun. Pada tahun 2004 jumlah kejahatan sebanyak 171 kali kemudian tahun 2005 jumlahnya turun menjadi 104 kali dan selanjutnya hingga tahun 2008 angkanya berturut-turut menjadi 218 kali, 201 kali, dan 176 kali. Kejahatan yang paling dominan ada tiga yaitu penganiayaan ringan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan. Sementara itu persentase penyelesaian tindak kejahatan baru mampu berkisar antara 57,67 persen hingga 66,87 persen, jadi belum sertus persen. Lihat tabel berikut.

Tabel 6.105. Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2004-2008

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	2004	2005	2006	2007	2008
I. Kejahatan					
Pembakaran	-	1	3	1	-
Kebakaran	7	2	10	11	10
Memalsukan Materai/Surat/Merek	-	4	4	4	4
Perzinahan	2	-	2	3	-
Perjudian	4	5	8	3	6
Penculikan	-	-	-	-	-
Pembunuhan	1	5	2	4	4
Penganiayaan Berat	23	19	3	4	13
Penganiayaan Ringan	21	2	28	34	18
Pencurian dengan pemberatan	25	22	2	14	59
Pencurian Ringan	62	11	101	60	15
Pencurian dengan kekerasan	3	4	3	9	9
Pemerasan	2	2	3	7	5
Penggelapan	15	13	15	19	16
Penipuan	3	12	14	12	7
Merusak	3	2	8	5	6
Penadahan	-	-	5	2	2
Pemeriksaan	-	-	7	9	2
Jumlah	171	104	218	201	176

Sumber : Polresta Kabupaten Kutai Timur

Tabel 6.106. Jumlah Tindak Kejahatan di Kabupaten Kutai Timur 2005-2008

No.	Uraian Tindak Kejahatan	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah Tindak Pidana Yang Dilaporkan	386	367	404	317
2.	Jumlah Tunggakan Perkara tindak Kejahatan	143	148	171	105
3.	Jumlah Tindak Pidana Yang Diselesaikan	243	219	233	212
4.	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan	62,95	59,67	57,67	66,87

Sumber data : Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

3. Partisipasi Pemuda

Salah satu komponen penting dalam perencanaan kebijakan pembangunan adalah jumlah dan struktur demografis penduduk. Dari sisi perencanaan data jumlah dan struktur penduduk memberikan gambaran mengenai jumlah tenaga kerja yang tersedia yang dapat disertakan dalam proses pembangunan. Di sisi lain, perencanaan output pembangunan membutuhkan tersedianya informasi jumlah dan struktur penduduk untuk menentukan jenis dan jumlah kelompok sasaran pembangunan. Sejalan dengan itu, data mengenai jumlah dan struktur demografis pemuda merupakan bahan dasar dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan kepemudaan.

Kondisi pemuda di Indonesia, dapat dilihat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, dapat dilihat melalui komposisi jumlah penduduk usia 15-35 tahun dengan berbagai karakteristiknya. Pada bagian ini akan dilihat gambaran mengenai struktur demografis pemuda dari beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan hubungan dengan kepala rumah tangga, sedangkan kualitas pemuda dapat dilihat pada pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibahas pada bab-bab berikutnya.

3.1. Jumlah Pemuda

Generasi muda atau pemuda di Indonesia hingga saat ini masih merupakan bagian terbesar dari populasi penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil Susenas 2005, jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 215 juta orang. Dari jumlah tersebut, kelompok yang dikategorikan generasi muda atau yang berusia 15-35 tahun, diperkirakan berjumlah sekitar 79 juta jiwa atau 36,75 persen dari jumlah penduduk seluruhnya (Tabel 3.1.1). Hal ini menunjukkan bahwa hampir 40 persen dari seluruh penduduk Indonesia didominasi oleh golongan penduduk usia muda. Di sisi lain, persentase jumlah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 35 tahun masing-masing hanya sebesar 29,08 persen dan 34,17 persen. Mengingat jumlah pemuda yang relatif besar, merupakan potensi yang besar sebagai sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan. Pemuda akan menempati posisi penting dan strategis, baik sebagai pelaku-pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan.

Tabel. 6.107. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2005

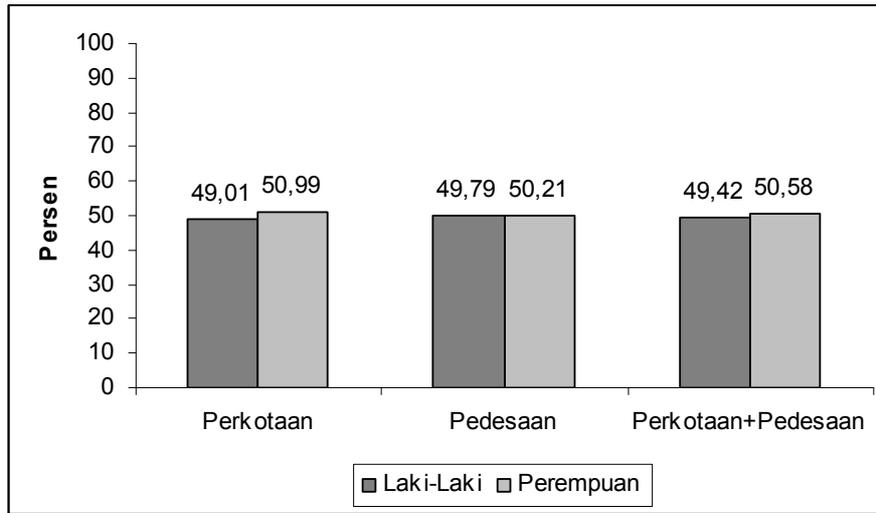
Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
< 15	27,60	30,26	29,08 (62.792.761)
15-35	39,20	34,82	36,75 (79.363.477)
> 35	33,21	34,92	34,17 (73.777.507)
Total	100,00	100,00	100,00 (215.933.745)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2005

3.2. Struktur Pemuda menurut Jenis Kelamin

Gambar 3.2.1 menunjukkan komposisi pemuda menurut jenis kelamin. Nampak bahwa secara umum pemuda perempuan mempunyai persentase lebih besar dibandingkan dengan pemuda laki-laki yaitu 50,58 persen berbanding 49,42 persen. Keadaan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Di daerah perkotaan terdapat 50,99 persen pemuda perempuan dan 49,01 persen pemuda laki-laki sedangkan di daerah pedesaan terdapat 50,21 persen pemuda perempuan dan 49,42 persen pemuda laki-laki.

Grafik 6.9 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2008



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2005

Jumlah pemuda laki-laki yang lebih sedikit dibanding perempuan juga tercermin dari rasio jenis kelamin yang mendekati 100. Rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2005 adalah sebesar 97,7 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata untuk setiap 100 pemuda perempuan hanya terdapat sekitar 98 pemuda pria. Hal ini mengisyaratkan bahwa dari sisi jumlah, baik pemuda laki-laki maupun perempuan relatif mempunyai potensi yang sama untuk berperan sebagai tokoh pembangunan.

3.3. Struktur Pemuda menurut Tipe Daerah

Bila ditinjau menurut tipe daerah, persentase pemuda di daerah pedesaan (52,99%) lebih besar daripada di daerah perkotaan (47,01 %) seperti yang disajikan pada Gambar 3.3.1. Pola yang sama terjadi baik pada pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan. Sekitar 55,38 persen dari keseluruhan pemuda laki-laki tinggal di daerah pedesaan, dan 46,62 persen tinggal di daerah perkotaan. Sementara itu, persentase pemuda perempuan di daerah pedesaan mencapai sebesar 52,61 persen sedangkan di daerah perkotaan hanya sebesar 47,39 persen.

6.9. Analisis Pertanian

1. Sub Sektor Tanaman Pangan

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah telah dan sedang mencanangkan upaya peningkatan produksi komoditi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Untuk maksud tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana produksi yang memadai dari hulu sampai hilir, termasuk dukungan kebijakan Pemerintah terhadap rumah tangga pada sub sektor tanaman pangan. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti penyaluran benih unggul, pencetakan lahan sawah, penyaluran pupuk bersubsidi, SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu), dan lain sebagainya. Perlu dukungan dari berbagai pihak, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Stakeholders melalui Proksi Mantap (Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan).

Luas panen padi di Indonesia selama tahun 2008 seluas 12.327.425 Ha dengan produksi sebesar 60.325.925 Ton gabah kering giling (GKG). Produksi padi selama tahun 2008 di Kalimantan Timur mencapai 586.030 Ton GKG atau 370.371 Ton beras. Produksi ini menempatkan Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi ke 17 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Apabila dibandingkan pada wilayah Pulau Kalimantan, Kalimantan Timur menduduki peringkat ke 4 dari 4 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke 7, Kalimantan Barat peringkat ke 9 dan Kalimantan Tengah pada peringkat ke 15 untuk produksi padi nasional.

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 memiliki luas baku lahan sawah yang ditanami padi seluas 84.235 Ha yang merupakan luas lahan sawah irigasi dan non irigasi. Lahan sawah irigasi seluas 23.897 Ha (28,37%), sedangkan lahan sawah non irigasi seluas 60.338 Ha (71,63%). Dari luas lahan baku sawah yang ditanami padi tersebut, luas panen padi sawah pada tahun 2008 seluas 97.754 Ha dengan produksi sebesar 441.405 Ton GKG. Luas baku lahan ladang/huma selama tahun 2008 seluas 177.523 Ha. Dari luas lahan baku ladang/huma tersebut, luas panen padi ladang tahun 2008 seluas 59.587 Ha dengan produksi sebesar 144.625 Ton GKG.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, produksi padi di Kalimantan Timur pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 3,26 persen, dari 567.502 Ton GKG pada tahun 2007 menjadi 586.030 Ton GKG pada tahun 2008. Kenaikan produksi tersebut karena dipacu kenaikan produksi padi sawah sebesar 8,91 persen, sedangkan padi ladang mengalami penurunan produksi sebesar 10,84 persen.

Selain itu, akibat dari puso yang dialami oleh tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang yang menyebabkan gagal panen selama tahun 2008 mencapai 4.134 Ha sehingga Kalimantan Timur kehilangan produksi padi sekitar 15.399 Ton GKG atau 9.732 Ton beras. Berbagai penyebab hingga terjadinya puso seperti banjir, kekeringan hingga organisme pengganggu tanaman (OPT).

Di Kabupaten Kutai Timur, produksi padi pada tahun 2008 sebesar 38.322 Ton GKG atau 24.220 Ton beras. Hal ini menyebabkan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 menempati posisi ke 6 dari 13 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur. Bila dibandingkan dengan tahun 2007, produksi padi di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan produksi hingga 7,28 persen. Hal ini dipacu karena menurunnya produksi padi ladang yang merupakan lahan kering hingga 40,19 persen. Berubahnya fungsi lahan (alih fungsi lahan) dari lahan padi ladang/padi gunung menjadi lahan perkebunan sawit merupakan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani. Kebijakan ini menciptakan efek berkurangnya produksi padi khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan produksi padi sawah meningkat dari tahun ke tahun.

Selain padi, sub sektor tanaman pangan juga mencakup tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi jagung di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2008 mencapai 1.999 ton jagung dalam bentuk pipilan kering panen, memberikan kontribusi sebesar 15,62 persen dari produksi jagung Provinsi Kalimantan Timur. Produksi jagung selama tahun 2008 di Kabupaten Kutai Timur meningkat sangat signifikan (sebesar 111,71 persen) bila dibanding produksi tahun 2007, bandingkan dengan peningkatan produksi jagung di Kalimantan Timur sebesar 10,12 persen.

Untuk tanaman kedelai, produksi pada tahun 2008 juga mengalami peningkatan sebesar 175 persen bila dibanding tahun 2007, dari 175 ton dalam bentuk biji kering menjadi 482 ton pada tahun 2008 sehingga dapat memberikan kontribusi produksi kedelai sebesar 18,70 persen pada produksi kedelai di Kalimantan Timur. Luas lahan di Kabupaten Kutai Timur masih memungkinkan untuk mengembangkan tanaman kedelai sehingga produksi kedelai dari tahun ke tahun terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk.

Produksi kacang tanah selama tahun 2008 di Kalimantan Timur mencapai 2.465 ton, sedangkan produksi kacang tanah di Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 mencapai 323 ton atau 13,10 persen dari produksi kacang tanah se Kalimantan Timur.

Produksi ini mengalami peningkatan sebesar 48,82 persen apabila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2007 yang hanya mencapai 222 ton.

Tahun 2008, produksi kacang hijau di Kabupaten Kutai Timur mencapai 139 ton dalam bentuk biji kering atau hanya memberikan kontribusi sebesar 12,24 persen dari produksi kacang hijau di Kalimantan Timur.

Selama tahun 2008, produksi ubi kayu di Kabupaten Kutai Timur mencapai 7.630 ton dalam bentuk umbi basah. Hal ini menunjukkan peningkatan produksi yang sangat signifikan apabila dibanding tahun 2007, yaitu sebesar 147,08 persen. Produksi ubi kayu di Kabupaten Kutai Timur memberikan *share* sebesar 6,57 persen terhadap produksi ubi kayu di Kalimantan Timur.

Produksi ubi jalar di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2008 mencapai 2.633 ton dalam bentuk umbi basah, mengalami peningkatan produksi sebesar 194,74 persen apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2007. Sedangkan produksi ubi jalar di Kalimantan Timur selama tahun 2008 mencapai 29.373 ton, sehingga produksi ubi jalar di Kabupaten Kutai Timur hanya memberikan kontribusi sebesar 8,96 persen.

2. Analisis Rumah Tangga Usaha Padi dan Palawija

Tanaman padi dan palawija dikenal sebagai tanaman pangan yang memberikan manfaat besar. Tanaman ini merupakan sumber protein, karbohidrat, lemak dan mineral yang penting bagi kesehatan, bahkan di beberapa daerah di Indonesia tanaman palwija tertentu menjadi makanan pokok dan pengganti makanan pokok. Manfaat lain yang dapat diambil dari tanaman palawija adalah sisa-sisa tanaman setelah panen dapat digunakan sebagai pupuk hijau ataupun pakan ternak. Pada umumnya tanaman palawija ini diusahakan hanya sebagai tanaman selingan. Meskipun begitu jika diusahakan dengan intensif akan memberikan keuntungan yang cukup besar sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup besar pula bagi petani.

Di Kabupaten Kutai Timur Sentra tanaman padi dan palawija berada di kecamatan; Kaliorang, Sangatta Utara, Muara Bengkal, Kongbeng, , Busang, dan Sangkulirang, serta Longmesangat. Selama periode 2000 - 2008, Produksi dari beberapa komoditi tanaman padi dan palawija, seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau berfluktuasi. Penurunan produksi ketiga jenis komoditas palawija tersebut lebih banyak disebabkan oleh fluktuasi luas

panen. Untuk tanaman padi pada tahun 2000 produksinya mencapai 25.868,0 ton menjadi 43.376,0 ton pada tahun 2008 atau mengalami peningkatan produksi hingga 67,68 persen atau rata-rata pertahun tumbuh sebesar 8,46 persen. Sementara itu tanaman palawija pada tahun 2000 produksinya mencapai 12.051 ton menjadi hanya 12.818,00 Ha atau tumbuh sebesar 6,36 persen atau rata-rata pertahun tumbuh sebesar 0,80 persen.

Tabel. 6.108. Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Uraian	Satuan	2000	2003	2006	2008
1.	Padi Sawah	Ton	10.385,0	14.746,00	12.951,00	20.485,00
2.	Padi Ladang	Ton	15.483,0	7.703,00	32.405,00	22.891,00
	Total Padi	Ton	25.868,0	22.449,00	45.356,00	43.376,00
3.	Jagung	Ton	2.460,00	3.202,00	1.170,00	1.918,00
4.	Ubi Kayu	Ton	7.566,00	6.202,00	4.635,00	7.419,00
5.	Ubi Jalar	Ton	1.293,00	1.113,00	923,00	2.500,00
6.	Kacang Tanah	Ton	301,00	344,00	224,00	328,00
7.	Kedele	Ton	312,00	425,00	345,00	509,00
8.	Kacang Hijau	Ton	119,00	205,00	77,00	144,00
	Total Palawija	Ton	12.051	11.491,00	7.374,00	12.818,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Kutai Timur

Sama seperti produksi padi dan palawija, luas panen komoditi tanaman padi dan palawija mengalami pluktuasi. Pluktuasi dan dan turunnya luas panen yang dialami komoditas padi dan palawija sebenarnya tidak terlalu signifikan, hanya berkisar antara 15 - 38 persen saja. Khusus tanaman jagung, penurunan luas panen ini disebabkan oleh adanya kecenderungan pemanenan tanaman jagung muda yang dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat yang mana jika dilihat dari segi ekonomis lebih menguntungkan. Untuk tanaman padi pada tahun 2000 luas panen mencapai 11.035,0 Ha menjadi 14.640,00 Ha pada tahun 2008 atau mengalami peningkatan produksi hingga 32,67 persen atau rata-rata pertahun tumbuh sebesar 4,08 persen. Sementara itu tanaman palawija pada tahun 2000 luas tanamnya mencapai 9.219,00 Ha menjadi hanya sebesar 2.807 Ha atau mengalami penurunan pertumbuhan hingga -69,55 persen atau rata-rata pertahun tumbuh negatif sebesar 8,69 persen. Lihat tabel. 6.109 berikut

Tabel. 6.109. Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten Kutai Timur 2000-2008

No.	Uraian	Satuan	2000	2003	2006	2008
1.	Padi Sawah	Ha	3.627,00	4.487,00	3.226,00	5.177,00
2.	Padi Ladang	Ha	7.408,00	3.455,00	13.688,00	9.463,00
	Jumlah Padi		11.035,00	7.942,00	16.914,00	14.640,00
3.	Jagung	Ha	1.327,00	1.492,00	581,00	960,00
4.	Ubi Kayu	Ha	594,00	473,00	359,00	577,00
5.	Ubi Jalar	Ha	153,00	139,00	117,00	314,00
6.	Kacang Tanah	Ha	339,00	337,00	219,00	320,00
7.	Kedele	Ha	332,00	408,00	361,00	499,00
8.	Kacang Hijau	Ha	149,00	191,00	79,00	137,00
	Total Palawija	Ha	9.219,00	3.040,00	1.716,00	2.807,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Timur

Sedangkan tingkat produktifitas padi kwintal/tahun seluruh tanaman palwija mengalami kecenderungan pertumbuhan meningkat, sementara palawija masih tetap berfluktuasi. Peningkatan terbesar dialami oleh tanaman padi pada tahun 2006, hal ini disebabkan dengan adanya bantuan penggunaan benih unggul di beberapa kecamatan. Sementara untuk tanaman kacang tanah dan kacang hijau, peningkatan tingkat produktifitas relatif rendah. Berfluktuasinya tanaman padi berkisar antara 10,52-20,60 persen, sedangkan palawija antara 0,33 - 0,59 persen saja. Lihat Tabel.6.110. berikut.

Tabel.6.110. Produktivitas hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

No.	Uraian	Satuan	2000	2003	2006	2008
1.	Padi Sawah	Kw/Ha	28,63	32,86	40,15	39,57
2.	Padi Ladang	Kw/Ha	20,90	22,30	23,67	24,19
	Jumlah Padi	Kw/Ha	23,44	28,27	26,81	29,63
3.	Jagung	Kw/Ha	18,54	21,46	20,15	19,98
4.	Ubi Kayu	Kw/Ha	127,37	131,00	129,00	128,58
5.	Ubi Jalar	Kw/Ha	84,51	80,00	79,00	79,61
6.	Kacang Tanah	Kw/Ha	8,88	10,22	10,21	10,25
7.	Kedele	Kw/Ha	9,40	10,43	9,57	10,21
8.	Kacang Hijau	Kw/Ha	7,99	10,75	9,69	10,52
	Jumlah Palawija	Kw/ha	262,97	263,86	257,62	259,15

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dan Prov.Kaltim

3. Profil Rumah Tangga Usaha Padi dan Palawija

Dalam perekonomian Kabupaten Kutai Timur, Padi dan Palawija termasuk dalam subsektor tanaman bahan makanan bersama-sama dengan padi, sayuran dan buah-buahan. Kontribusi tanaman padi, palawija dan hortikultura (Tanaman Bahan Makanan/Tabama) terhadap perekonomian Kutai Timur (PDRB) dengan MIGAS

pada tahun 2008 sebesar 0,88 persen dan dibandingkan dengan tahun 2000 yang masih sebesar 1,53 persen berarti mengalmi kecenderungan menurun, Begitupula apabila dilihat dari perarnannya dalam perekonomian Kutai Timur tanpa MIGAS yaitu dari sebesar 10,98 persen tahun 2000 menjadi 6,11 persen di tahun 2008. Walaupun Nilai tambah bruto yang diberikan oleh subsektor Tabama meningkat sebesar 271,05 persen selama sembilan tahun (2000-2008) yaitu dari sebesar Rp. 287.474, 21 juta menjadi Rp.1.066.664,71 juta tetapi tingkat kecepatan pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan sub sektor lainnya. Meskipun kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah namun subsektor ini menunjukkan pertumbuhan yang positif cukup tinggi selama sembilan tahun terakhir yaitu rata-rata 33,88 persen per tahun. Lihat Tabel.6.111 berikut.

Tabel.6.111. Nilai PDRB, Peranan dan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap Total PDRB Kabupaten Kutai Timur tahun 2000-2008

Dengan MIGAS

No.	Sub Sektor	Nilai PDRB (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		Kontribusi terhadap Total PDRB (%)	
		2000	2008	2000	2008	2000	2008
1.	Tanaman Bahan Makanan	87.224,16	217.642,64	(7,49)	6,30	1,59	0,88
2.	Perkebunan	24.221,08	305.346,78	3,30	13,80	0,44	1,23
3.	Peternakan	18.510,14	93.004,24	3,49	6,57	0,34	0,38
4.	Kehutanan	119.711,13	309.065,93	6,47	(4,70)	2,18	1,25
5.	Perikanan	37.887,70	141.655,12	13,73	5,79	0,59	0,57
	PERTANIAN	287.474,21	1.066.664,71	2,19	5,22	5,23	4,31

Tanpa MIGAS

No.	Sub Sektor	Nilai PDRB (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		Kontribusi terhadap Total PDRB (%)	
		2000	2008	2000	2008	2000	2008
1.	Tanaman Bahan Makanan	87.224,16	217.642,64	(7,49)	6,30	10,98	6,11
2.	Perkebunan	24.221,08	305.346,78	3,30	13,80	3,05	8,57
3.	Peternakan	18.510,14	93.004,24	3,49	6,57	2,33	2,61
4.	Kehutanan	119.711,13	309.065,93	6,47	(4,70)	15,06	8,67
5.	Perikanan	37.887,70	141.655,12	13,73	5,79	4,76	3,97
	PERTANIAN	287.474,21	1.066.664,71	2,19	5,22	36,17	29,93

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur

3.1 Karakteristik Petani Usaha Palawija

Karakteristik petani usaha palawija apabila dibedakan berdasarkan kelompok umur terlihat bahwa sebagian besar petani palawija berada pada kelompok umur 20 - 24 tahun (54,86 persen). Kemudian diikuti oleh petani palawija pada kelompok umur 45 - 60 tahun (31,48 persen). Jumlah petani palawija diatas usia 60 tahun sebesar 9,88 persen, sedangkan jumlah petani palawija dengan kelompok umur 10 - 19 tahun (usia sekolah) sebesar 3,78 persen.

Besarnya jumlah petani palawija yang berada pada usia 20 - 40 tahun menunjukkan bahwa usaha palawija sebenarnya menyimpan peluang yang cukup besar untuk ditingkatkan karena usia 20 - 44 tahun merupakan usia yang sangat produktif dengan tenaga/energi yang cukup besar, sehingga cocok untuk usaha pertanian pada umumnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar petani palawija hanya berpendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar, yaitu sebesar 48,57 persen. Bahkan masih banyak petani palawija yang tidak mempunyai ijazah artinya tidak tamat SD, yaitu sebesar 24,17 persen. Sedangkan petani palawija yang berpendidikan SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 17,31 persen dan 9,24 persen (tabel 3.4).

Lebih memprihatinkan lagi apabila melihat petani palawija yang berpendidikan sarjana. Terlihat bahwa petani palawija yang berpendidikan Diploma baru sekitar 0,29 persen, sedangkan yang berpendidikan sarjana sekitar 0,21 persen.

3.2 Penggunaan dan Penguasaan Lahan

Rata-rata jumlah lahan yang dikuasai oleh rumah tangga palawija di Kalimantan Timur sebesar 0,7 Ha yang terdiri dari lahan pertanian (lahan sawah dan lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga palawija sebesar 92,31 persen sedangkan sisanya sebesar 7,69 persen adalah lahan bukan pertanian. Dari lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga palawija, yang diusahakan untuk tanaman palawija hanya sekitar 36,47 persen.

3.3 Akses Petani Palawija ke Sumber Daya Produktif (Benih, Pupuk, dan Permodalan)

Sebagian besar petani palawija khususnya padi, jagung, dan kedele menggunakan benih lokal. Tanaman padi penggunaan benih lokal hingga sebesar 78,31 persen dan yang menggunakan benih unggul hanya 21,45 persen, dan sisanya menggunakan benih hibrida. Sementara itu untuk Tanaman Jagung masih penggunaan benih unggul hingga 53,95 persen dan yang menggunakan benih lokal sebesar 23,22 persen, dan sisanya menggunakan benih hibrida Untuk Tanaman kedele masih penggunaan benih unggul hingga 81,03 persen dan yang menggunakan benih lokal sebesar 18,97 persen.

Sebagian besar petani palawija khususnya padi, jagung, dan kedele tidak menggunakan pupuk. Tanaman padi tidak menggunakan pupuk hingga sebesar 74,35 persen dan yang menggunakan pupuk hanya 25,65 persen dan terbanyak petani menggunakan pupuk Anorganik, dan sisanya menggunakan pupuk organin dan gabungan organik dan anorganik. Untuk petani yang menggunakan pupuk anorganik(pupuk pabrik) jenis yang digunakan sebagian besar adalah Urea dan TSP/SP35 dan sisanya menggunakan jenis ZA, KCL, NPK, PPT/ZPT, dan lainnya

Sementara itu untuk Tanaman Jagung masih penggunaan pupuk hingga 57,12 persen dan yang tidak menggunakan pupuk sebesar 42,88 persen. Petani yang menggunakan pupuk sebagian besar menggunakan pupuk anorganik, dan sisanya menggunakan pupuk organik dan pupuk gabungan organik dan anorganik. Untuk petani yang menggunakan pupuk anorganik(pupuk pabrik) jenis yang digunakan sebagian besar adalah Urea dan TSP/SP35 dan sisanya menggunakan jenis ZA, KCL, NPK, PPT/ZPT, dan lainnya

Untuk Tanaman Kedele masih penggunaan pupuk hingga 76,57 persen dan yang tidak menggunakan pupuk sebesar 23,43 persen. Petani yang menggunakan pupuk sebagian besar menggunakan pupuk anorganik, dan sisanya menggunakan pupuk organik dan pupuk gabungan organik dan anorganik. Untuk petani yang menggunakan pupuk anorganik(pupuk pabrik) jenis yang digunakan sebagian besar adalah Urea dan TSP/SP35 dan sisanya menggunakan jenis ZA, KCL, NPK, PPT/ZPT, dan lainnya

Sebagian rumah tangga mengusahakan palawija khususnya padi, jagung, dan kedele dengan modal sendiri hampir seratus persen yaitu sebesar 98,94 persen, pada rumah tangga usaha tanaman padi, jagung dan kedele selain dari modal sendiri, ada yang memperoleh modal dari pinjaman perorangan, koperasi, bank dan lainnya tetapi persentasenya hanya sekitar 1,06 persen saja.

3.4. Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur

Ketahanan pangan merupakan bagian program yang sangat dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi gizi masyarakat akan kebutuhan pangan. Sampai dengan tahun 2008 produksi pangan dari daerah ini belkum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk yang berarti defisit dan masih mendatangkan dari luar Kutai Timur.

Kebutuhan beras untuk penduduk Kutai Timur baru mampu dipenuhi hanya sebesar 91,98 persen dari jumlah produksi padi sebesar 38.314 ton dan menjadi beras yang siap dikonsumsi sebesar 22.218 ton. Dengan jumlah konsumsi perkapita 113 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 213.762 jiwa, maka jumlah kebutuhan konsumsi besar per tahun sebanyak 24.155 ton atau masih kurang sebanyak 1.937 ton. Apabila dirinci per kecamatan, maka kecamatan yang telah surplus beras hanya kecamatan; Busang, Long Mesangat, Telen, Kongbeng, Muara Bengkal, Kaliorang, dan Sangkulirang.

Kebutuhan Jagung untuk penduduk Kutai Timur telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daerah ini atau sudah swasembada/surplus jagung yaitu hingga sebesar 161,60 persen dari jumlah produksi jagung sebesar 1.918 ton dan menjadi jagung yang siap dikonsumsi sebesar 1.651,2 ton. Dengan jumlah konsumsi perkapita 4,78 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 213.762 jiwa, maka jumlah kebutuhan 629,42ton. Apabila dirinci per kecamatan, maka sebagian besar kecamatan yang telah surplus jagung kecuali kecamatan; Batu ampar, Telung Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Kaubun dan Karang.

Kebutuhan kedele untuk penduduk Kutai Timur belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daerah ini atau belum berswasembada/surplus kedele yaitu baru mampu sebesar 31,36 persen dari jumlah produksi kedele sebesar 509 ton dan menjadi kedele yang siap dikonsumsi sebesar 436,19 ton. Dengan jumlah konsumsi perkapita 6,91 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 213.762 jiwa, maka jumlah kebutuhan 1.477,10 ton atau masih kekurangan kebutuhan sebesar 1.040,91 ton yang

harus didatangkan dari luar. Apabila dirinci per kecamatan, maka sebagian kecil kecamatan yang telah surplus kedele seperti kecamatan; Bengalon dan Kaliorang.

Kebutuhan Ubikayu untuk penduduk Kutai Timur telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daerah ini atau sudah swasembada/surplus ubikayu yaitu hingga sebesar 236,92 persen dari jumlah produksi ubikayu sebesar 7.419 ton dan menjadi ubikayu yang siap dikonsumsi sebesar 6.290 ton. Dengan jumlah konsumsi perkapita 12,42 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 213.762 jiwa, maka jumlah kebutuhan 2.654,94 ton. Apabila dirinci per kecamatan, maka sebagian besar kecamatan yang telah surplus ubikayu kecuali kecamatan; Muara Ancalong, Batu ampar, Telung Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Kaibun dan Karang.

Kebutuhan kacang hijau untuk penduduk Kutai Timur belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daerah ini atau belum berswasembada/surplus kacang hijau yaitu baru mampu sebesar 45,48 persen dari jumlah produksi kacang hijau sebesar 144 ton dan menjadi kacang hijau yang siap dikonsumsi sebesar 131,95 ton. Dengan jumlah konsumsi perkapita 1,36 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 213.762 jiwa, maka jumlah kebutuhan 290,13 ton atau masih kekurangan kebutuhan sebesar 158,18 ton yang harus didatangkan dari luar. Apabila dirinci per kecamatan, maka sebagian kecil kecamatan yang telah surplus kacang hijau seperti kecamatan; Busang, Longmesangat, Telen, bengalon dan Kaliorang.

Kebutuhan kacang tanah untuk penduduk Kutai Timur belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daerah ini atau belum berswasembada/surplus kacang tanah yaitu baru mampu sebesar 35,40 persen dari jumlah produksi kacang tanah sebesar 328 ton dan menjadi kacang tanah yang siap dikonsumsi sebesar 296,66 ton. Dengan jumlah konsumsi perkapita 3,92 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 213.762 jiwa, maka jumlah kebutuhan 837,97 ton atau masih kekurangan kebutuhan sebesar 541,31 ton yang harus didatangkan dari luar. Apabila dirinci per kecamatan, maka sebagian kecil kecamatan yang telah surplus kacang tanah seperti kecamatan; Busang, Longmesangat, dan Kaliorang.

Kebutuhan Ubijalar untuk penduduk Kutai Timur telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daerah ini atau sudah swasembada/surplus ubijalar yaitu hingga sebesar 202,19 persen dari jumlah produksi Ubijalar sebesar 2.500 ton dan menjadi ubijalar yang siap dikonsumsi sebesar 2.200 ton. Dengan jumlah konsumsi perkapita 5,09 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 213.762 jiwa, maka jumlah kebutuhan 1.008 ton. Apabila dirinci per kecamatan, maka sebagian besar kecamatan

yang telah surplus ubi jalar kecuali kecamatan; Muara Ancalong, Muara Bengkal, Batu ampar, Sangatta Utara, Telung Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Kaubun, Sangkulirang, karangan dan sandaran.

4. Analisis Rumah Tangga Usaha Perkebunan

4.1. Profil Rumah Tangga Usaha Perkebunan

Dalam perekonomian Kutai Timur, sejak tahun 2000 nilai tambah yang diberikan oleh sub sektor perkebunan terus mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari sebesar Rp. 24.221,08 juta pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 305.346,78 juta pada tahun 2008. Kontribusi yang diberikan oleh subsektor perkebunan terhadap PDRB Kutai Timur pada tahun 2008 sebesar 1,23 persen dengan MIGAS dan tanpa MIGAS sebesar 8,57 persen. Meskipun kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah namun subsektor ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup tinggi selama sembilan tahun terakhir yaitu dari sebesar 0,44 persen tahun 2000 menjadi 1,23 persen tahun 2008 (dengan MIGAS) dan tanpa MIGAS dari 3,05 persen tahun 2000 menjadi 8,57 persen tahun 2008 (Tanpa MIGAS). Selain itu sektor ini merupakan sektor pendorong bagi sektor unggulan seperti sektor industri makanan dan minuman khususnya dengan adanya industri CPO (minyak sawit). Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai profil dari rumah tangga perkebunan di Kutai Timur yang meliputi distribusi rumah tangga, karakteristik petani, serta penguasaan dan penggunaan lahan.

4.1.1 Distribusi Rumah Tangga Usaha Perkebunan

Sebanyak 42.532 orang dari rumah tangga pertanian di Kutai Timur merupakan rumah tangga yang mengusahakan tanaman perkebunan. Lokasi dan luas tanaman yang diusahakan oleh rumah tangga dan pengusaha perkebunan terbanyak di Kutai Timur berturut-turut terdapat di Kecamatan Muara wahau hingga 37.795,10 Ha (34,04 persen), Kongbeng seluas 23.413,70 Ha (21,09 persen), Kecamatan Telen 15.974,03 Ha (14,39 persen), Kaubun seluas 5.852,20 (5,27 persen) sedangkan sisanya dengan luas perkebunan berkisar dibawah lima persen.

Berbagai jenis tanaman perkebunan yang dapat diusahakan di Kutai Timur sebanyak 10 jenis yaitu; kakao, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, lada, Jarak Pagar. Berdasarkan jenis tanaman perkebunan yang diusahakan tersebut, rumah tangga perkebunan yang paling banyak di Kutai Timur adalah rumah tangga yang

mengusahakan tanaman kelapa sawit (56,542 persen), coklat (30,45 persen) dan Kelapa (7,72 persen). Namun bila dilihat persentase luas tanaman usaha perkebunan Kelapa Sawit, kakao, kelapa terhadap jumlah luasan perkebunan se Kalimantan Timur relatif cukup besar, artinya rumah tangga yang mengusahakan perkebunan tiga jenis komoditi diatas sudah besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dengan persentase masing-masing sebesar 27,69persen (Urutan ke-1), 25,06 persen (Urutan ke-2), dan 6,03 persen (urutan ke-6). Luas tanaman perkebunan kakao yang terbanyak ada di Kabupaten Nunukan, kemudian rumah tangga usaha perkebunan kelapa terdapat paling banyak di Kutai Kertanegara, Pasir, dan Penajam Paser Utara.

4.1.2. Penguasaan dan Penggunaan Lahan

Luas areal perkebunan di Kutai Timur pada masing-masing komoditi yang diusahakan secara umum mengalami peningkatan. Dari berbagai jenis komoditi utama perkebunan di Kutai Timur yang mengalami peningkatan luas areal dari tahun 2000 ke tahun 2008 adalah areal perkebunan untuk tanaman kelapa sawit, Kakao, dan lada, sementara luas perkebunan tanaman karet, kelapa, kopi, dan cengkeh cenderung menurun.

Di tahun 2000, areal perkebunan yang terluas digunakan oleh kelapa sawit, yaitu sebesar 17.781 Ha (60,30 persen) dari keseluruhan luas areal perkebunan di Kutai Timur, kemudian digunakan untuk menanam pohon Kakao seluas 2.211,00Ha (7,49 persen), pohon kelapa seluas 7,536.50 Ha (25,56 persen). sedangkan sisanya digunakan untuk menanam pohon perkebunan lain-lain

Di tahun 2008, areal perkebunan yang terluas digunakan oleh kelapa sawit, yaitu sebesar 131.939,50 Ha (91,42 persen) dari keseluruhan luas areal perkebunan di Kutai Timur, kemudian digunakan untuk menanam pohon Kakao seluas 8.465,63 Ha (5,86 persen), pohon kelapa seluas 2.436,68 Ha (1,69 persen). sedangkan sisanya digunakan untuk menanam pohon perkebunan lain-lain. Lihat Tabel.6.112 berikut.

Tabel 6.112. Luas Lahan tanaman Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

No.	Uraian	Satuan	2000	2003	2006	2008	Kontribusi (%)
1.	Karet	Ha	1,235.00	1,709.00	659.50	851.00	0,59
2.	Kelapa	Ha	7,536.50	7,755.00	5,686.00	2.436.68	1,69
3.	Kopi	Ha	537.00	633.50	1,229.50	297.75	0,21
4.	Lada	Ha	172.00	332.50	444.50	322.36	0,22
5.	Cengkeh	Ha	15.00	16.00	1,80	1.80	0,00
6.	Kakao	Ha	2,211.00	8.393.00	12,814.50	8.465.63	5,86
7.	Kelapa Sawit	Ha	17,781.0	31,592.0	52,599.00	131.939,50	91,42
8.	Lainnya	Ha	29.487,5			144.314,72	100,00

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Kaltim Dalam Angka)

4.2.1. Struktur Ongkos

Rata-rata kebutuhan dalam proses produksi tanaman perkebunan seperti bibit, tanaman pelindung, pupuk, pestisida dan kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing jenis tanaman perkebunan berbeda. Kebutuhan bibit umumnya dalam bentuk batang dan yang terbanyak adalah untuk tanaman kopi dengan jumlah rata-rata pengeluaran per 100 pohon sebanyak 30,32 batang, kemudian tanaman kakao dengan kebutuhan bibit 17,21 batang per 100 pohon. Sedangkan pengeluaran bibit untuk tanaman kelapa sawit, karet, kelapa, relatif kecil.

Bila dilihat kebutuhan pupuk, tanaman kelapa sawit memerlukan jumlah pupuk yang terbanyak diantara tanaman lainnya. Kebutuhan pestisida untuk semua jenis tanaman rata-rata tidak terlalu banyak. Kebutuhan tenaga kerja yang terbanyak pada usaha tanaman kelapa sawit terutama untuk jenis pekerjaan penyiangan dan pemanenan.

Biaya produksi atau pengeluaran untuk proses produksi yang terbesar menurut jenis pekerjaan, tampak bahwa pengeluaran untuk pembelian bibit yang terbesar pada tanaman kelapa sawit dan kakao, kebutuhan tanaman pelindung lebih banyak pada tanaman lada dan kakao, selanjutnya kebutuhan pupuk terbanyak untuk tanaman kelapa sawit.

Bila dilihat persentase biaya produksi terhadap nilai produksi pada masing-masing jenis tanaman perkebunan yang diusahakan maka terlihat bahwa rata-rata ongkos produksi tanaman kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya mencapai 36,87 persen dari nilai produksi, sedangkan pada tanaman kelapa persentase ongkos produksi paling rendah dibandingkan jenis tanaman lainnya.

4.2.1. Revitalisasi Perkebunan

Revitalisasi pertanian dalam arti luas termasuk perkebunan menjadi perhartian yang serius dari pemerintah, karena menyangkut kebutuhan dalam negeri dan luar negeri dalam rangka kontinuitas ketersediannya sebagai bahan baku industri, penyediaan pekerjaan penduduk dan kesejahteraan petani.

Jumlah tenaga kerja di perkebunan setiap tahunnya selalu meningkat, semula pada tahun 2000 sebanyak 15.572 orang pada tahun 2008 menjadi 42.532 orang atau mengalami peningkatan sebesar 173,13 persen atau rata-rata tumbuh sebesar 21,64 persen. Sementara itu jumlah perusahaan dibidang perkebunan meningkat sangat signifikan dimana pada tahun 2000 hanya ada 13 buah perusahaan menjadi 78 perusahaan perkebunan di tahun 2008. Jumlah penyuluh pertanian perkebunan juga meningkat dari sebanyak 13 orang menjadi 60 orang tahun 2008. Organisasi perkebunan dari 1 buah tahun 2000 menjadi sebanyak 11 di tahun 2008, serta alokasi anggaran untuk pembangunan perkebunan dari APBD Kutai Timur meningkat setiap tahunnya yaitu dari sebesar Rp. 10.684,00 Milyar menjadi Rp. 27.446,25 Milyar di tahun 2008 atau meningkat sebesar 156,89 persen atau rata-rata meningkat sebesar 19,61 persen.

Revitalisasi perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan diseluruh kecamatan dengan konsentrasi tanaman kelapa sawit dan terdapat tanaman lainnya yaitu jarak pagar dan karet. Di Kecamatan Muara Wahau dengan luas lokasi 59.250 Ha, Kongbeng 28.880 Ha, Kaliorang luas 29.202 Ha, Kaubun luas 18.427 Ha, Sangkulirang luas 66.863 Ha, Karangan luas 47.589 Ha, Muara Ancalong dengan luas 68.733 Ha, Sandaran dengan luas 71.457 Ha, Telen dengan luas 85.665, Muara Bengkal dengan luas 58.053 Ha, Batu Ampar dengan luas 15,730 Ha, Rantau Pulung dengan luas 61.810 Ha, Longa Mesangat dengan luas 55.690 Ha, Bengalon seluas 54.490 Ha, Busang seluas 156.663 Ha, dan Sangkulirang dengan luas 66.863 Ha.

5. Analisis Rumah Tangga Usaha Hortikultura

Pengembangan komoditas hortikultura di Kutai Timur dapat disarankan untuk memenuhi permintaan pasar, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan petani, menurunkan impor dan bila memungkinkan dapat meningkatkan ekspor, serta memperbaiki gizi masyarakat. Dukungan bagi pengembangan aneka jenis tanaman hortikultura sangat besar karena Kalimantan Timur mempunyai sumber daya yang potensial seperti sumber daya alam yang

meliputi luasnya lahan pertanian yang tersedia, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, dan potensi pasar dimana peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan akan sayuran meningkat, bertambahnya kawasan industri, peningkatan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya gizi dan arus penduduk yang semakin cepat.

5.1. Profil Rumah Tangga Usaha Tanaman Hortikultura

Berdasarkan tabel I-O Kalimantan Timur tahun 2003, kondisi persediaan domestik dari komoditi hortikultura di Kalimantan Timur masih relatif sedikit sehingga masih melakukan impor hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan yang cukup besar dari luar daerah.

5.1.1. Distribusi Rumah Tangga Usaha Tanaman Hortikultura

Jenis tanaman yang diusahakan oleh Kutai Timur ada 24 macam tanaman dan satu kelompok untuk tanaman hortikultura gabungan, dimana dari empat belas jenis tanaman tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok tanaman sayuran semusim, kelompok tanaman buah-buahan tahunan, kelompok tanaman obat-obatan dan kelompok tanaman hortikultura gabungan. Yang termasuk tanaman sayuran semusim adalah bayam, cabe merah, cabe rawit, sawi dan kacang panjang. Dari kelima tanaman tersebut, kacang panjang merupakan tanaman yang terbanyak diusahakan oleh rumah tangga hortikultura tanaman sayuran semusim,

Rata-rata rumah tangga hortikultura di Kutai Timur ini paling banyak mengusahakan tanaman buah-buahan tahunan. Dari 23 jenis tanaman buah-buahan tahunan yang diusahakan oleh rumah tangga hortikultura tersebut, paling banyak adalah rumah tangga yang mengusahakan buah pisang. Selain rumah tangga yang mengusahakan tanaman buah pisang, rumah tangga terbanyak kedua adalah yang mengusahakan tanaman buah jeruk siam, Tanaman lain yang juga cukup banyak diusahakan oleh rumah tangga hortikultura adalah tanaman nangka/cempedak, Jahe merupakan satu-satunya tanaman obat-obatan yang diproduksi di Kutai Timur ini, Rumah tangga yang mengusahakan berbagai macam tanaman hortikultura masuk dalam kelompok rumah tangga hortikultura gabungan dan jumlah rumah tangga yang mengusahakan tanaman gabungan ini juga cukup banyak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga hortikultura di Kutai Timur yang terbanyak adalah yang mengusahakan tanaman buah-buahan

seperti pisang, Jeruk Siam/Kepron dan Rambutan serta cempedak. Sedangkan rumah tangga yang mengusahakan tanaman sayur-sayuran seperti Kacang Panjang, Ketimun, bayam, sawi, cabe rawit dan cabe merah relatif sangat sedikit. Hal ini disebabkan faktor lingkungan seperti kesuburan tanah dan iklim yang kurang kondusif terhadap produksi dari tanaman sayur-sayuran tersebut, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan akan sayur-sayuran di daerah Kutai Timur ini masih dilakukan impor sayuran yang cukup besar terutama dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Tabel. 6.113 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Semusim Tahun 2008 di Kabupaten Kutai Timur

Jenis Tanaman Sayuran	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bawang Merah	13	0,22	3
2. Bawang Putih	0	0	0
3. Bawang Daun	53	0,31	17
4. Kentang	0	0	0
5. Kubis	15	0,46	7
6. Kembang Kol	0	0	0
7. Petsai/Sawi	222	0,52	115
8. Wortel	0	0	0
9. Lobak	0	0	0
10. Kacang Merah	0	0	0
11. Kacang Panjang	277	0,84	233
12. Cabe Besar	93	0,80	74
13. Cabe Rawit	214	0,56	120
14. Jamur *)	0	0	0
15. Tomat	95	0,63	60
16. Terung	191	0,92	175
17. Buncis	189	0,53	101
18. Ketimun	214	0,95	203
19. Labu Siam	88	0,61	54
20. Kangkung	341	0,44	149
21. Bayam	324	0,35	114
22. Melon	2	0,35	1
23. Semangka	89	0,80	71
24. Blewah	2	0,45	1

Sumber : Indikator Pertanian BPS Provinsi Kaltim

Tabel. 6.114 Produksi Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan menurut Jenisnya di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008

Jenis Tanaman Buah-Buahan	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produktivitas (Kg/Phn)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Alpukat	838	38,19	32
2. Belimbing	3.518	37,27	131
3. Duku/Langsar	4.608	37,70	174
4. Durian	4.443	37,70	168
5. Jambu Biji	11.231	38,62	434
6. Jambu Air	5.709	8,51	49
7. Jeruk Siam/Kepron	27.595	47,40	1.308
8. Jeruk Besar	1.004	49,50	50
9. Mangga	5.390	50,50	272
10. Manggis	602	19,93	12
11. Nangka/Cempedak	18.493	46,00	851
12. Nenas *)	22.837	4,48	102
13. Pepaya	9.322	34,54	322
14. Pisang *)	183.841	21,87	4.021
15. Rambutan	18.342	24,04	441
16. Salak *)	13.602	8,43	115
17. Sawo	3.149	49,19	155
18. Markisa/Konyal	0	0	0
19. Sirsak	5.979	22,53	135
20. Sukun	7.754	39,93	310
21. Melinjo	6.330	34,09	216
22. Petai	1.214	31,38	38
23. Jengkol	958	0,42	0

Sumber : Indikator Pertanian BPS Provinsi Kaltim

*) Luas Panen Dalam Satuan Rumpun, Produktivitas Dalam Kg/Rumpun

6. Analisis Rumah Tangga Usaha Peternakan

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian dan pembangunan wilayah yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk dapat:

- (1) menyediakan pangan asal ternak yang berkualitas dan cukup kuantitasnya; (2) memberdayakan sumber daya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi di dalam maupun luar negeri; (3) menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan usaha peternakan; (4) menciptakan lapangan kerja dibidang ogrobisnis peternakan; (5) melestarikan dan memanfaatkan

sumber daya alam pendukung peternakan; (6) menggali potensi dibidang peternakan.

Perkembangan populasi ternak pada tahun 2000-2008 pada beberapa jenis ternak sudah menunjukkan perkembangan yang sangat tinggi seperti: sapi, kerbau, Kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging kecuali pada ternak domba yang mengalami penurunan populasi. Selama periodfe sembilan tahun (2000-2008) pertumbuhan ternak masing-masing seperti di atas yaitu: 86,15 persen, 726,14 persen, 153,68 persen, 13,68 persen, 179,91 persen, dan 24.430 persen. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan menurun yaitu domba sebesar -82,95 persen dan yang mengalami pertumbuhan lamban seperti babi sebesar 14,55 persen dan itik sebesar 13,86 persen. Secara umum perkembangan populasi ternak mengalami peningkatan yang menggembirakan. Secara populasi jumlah ternak terbesar adalah ayam kampung/buras dengan jumlah 282.911 ekor, kemudian ayam ras pedaging dengan jumlah 231.487 ekor, ayam ras petelur dengan jumlah 24.530 ekor, ternak sapi 16.292 ekor, kambing 6.587 ekor, babi 4.810 ekor kerbau 727 ekor, dan ternak itik pada akhir tahun 2008 berjumlah 7.743 ekor. Apabila diulihat pewrtumbuhan rata-rata populasi ternakn besar dan kecil serta ternak unggas pada peride selama sembilan tahun untuk ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan itik adalah sebagai berikut; 10,77 persen, 90,77 persen, 19,21 persen, -10,37 persen, 1,82 persen, 14,20 persen, 22,49 persen, 3.053, 75 perrsen, dan 1,73 persen. Perkembangan populasi ternak tahun 2000-2008 dapat dilihat pada table 6.115. berikut:



Tabel 6.115. Populasi Akhir Tahun Ternak besar dan kecil serta unggas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

No.	Uraian	Satuan	2000	2003	2008	Pertumbuhan (2000-2008) (%)
1.	Populasi Ternak Akhir:					
	Sapi	Ekor	8.752	12.619	16.292	86,15
	Kerbau	Ekor	88	426	727	726,14
	Kambing	Ekor	2.593	4.915	6.578	153,68
	Domba	Ekor	129	22	0	-82,95
	Babi	Ekor	4.199	3.284	4.810	14,55
	Kuda	Ekor	0	0	0	-
2.	Populasi Ternak Potong Yang Masuk :					
	Sapi	Ekor	-	1.153	2.049	77,71
	Kerbau	Ekor	-	0	10	-
	Kambing	Ekor	-	0	1.103	-
	Domba	Ekor	-	0	-	-
	Babi	Ekor	-	0	250	-
	Kuda	Ekor	-	0	-	-
3.	Populasi Unggas:					
	Ayam Kampung	Ekor	132.400	206.442	282.911	113,68
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	82.700	200.000	231.487	179,91
	Ayam Ras Petelur	Ekor	100	5.000	24.530	24.430,00
	Itik	Ekor	6800	146.900	7.743	13,86

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim Dalam Angka)

Produksi utama hasil ternak adalah daging, telur, dan susu yang persediaannya dipengaruhi oleh perkembangan produksi dan tingkat produktifitas ternak. Selain itu dipengaruhi oleh keluar masuknya ternak dan hasil ternak. Penyediaan produksi daging ditentukan oleh jumlah pemotongan ternak, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Penyediaan produksi daging di Kutai Timur masih tergantung pada pemasukan ternak potong ke daerah ini, terutama sapi dan kerbau. Penyediaan produksi telur yang meliputi telur ayam ayam buras, ayam ras petelur dan itik ditentukan oleh populasi ternak dan produktifitasnya. Jumlah produksi hasil ternak di Kutai Timur pada tahun 2000-2008 per jenis ternak terdapat pada table 6.116 berikut

Tabel 6.116. Produksi Daging, dan produksi Telur Hasil Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2008

No.	Uraian	Satuan	2000	2003	2008	Pertumbuhan (2000-2008) (%)
1.	Produksi Daging Ternak Besar:					
	Sapi	Ton	98,22	141,63	369,90	276,60
	Kerbau	Ton	0,24	1,12	1,93	704,17
	Kambing	Ton	7,26	13,78	17,85	145,87
	Domba	Ton			0	
	Babi	Ton	20,97	16,09	28,94	38,01
	Kuda	Ton			0	
2.	Produksi Daging Unggas :					
	Ayam Kampung	Ton	343,10	169,91	372,85	8,67
	Ayam Ras Pedaging	Ton	61,80	179,20	1.626,27	2.531,5
	Ayam Ras Petelur	Ton	1,10	5,99	526,52	47.765,45
	Itik	Ton	5,60	6,76	32,99	489,11
3.	Produksi Telur Unggas :					
	Ayam Kampung	Ton	215,60	106,78	194,64	-9,72
	Ayam Ras Petelur	Ton	11,90	79,96	138,59	1.068,07
	Itik	Ton	64,90	16,30	53,48	-17,59

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim Dalam Angka)

Tabel.6.117. Kemampuan penyediaan telur untuk konsumsi penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008

No.	Indikator	Satuan	Jumlah
1.	Produksi Telur	Produksi	Ton
			386,71
	Populasi	ekor	320.549
	Konsumsi Per Kapita	Kg	8,24
	Konsumsi Total	Ton	1.761,40
	Jumlah Rumah Tangga Peternak	RT	962
	Pendapatan Peternak	Rp.	3.098.000
	Persentase Kemampuan Penyediaan	Persen	21,95
	Jumlah Penduduk	Jiwa	213762

Tabel.6.118. Kemampuan penyediaan Daging untuk konsumsi penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008

No.	Jenis Tanaman	Indikator	Satuan	Jumlah
1.	Produksi Daging	Produksi	Ton	993,45
		Populasi	ekor	575.078
		Konsumsi Per Kapita	Kg	9,89
		Konsumsi Total	Ton	2.114,11
		Jumlah Rumah Tangga Peternak	RT	4.473
		Pendapatan Peternak	Rp.	3.098.000
		Persentase Kemampuan Penyediaan	Persen	46,99
		Jumlah Penduduk	Jiwa	213.762

Berdasarkan table 6.116 dan Tabel 6.118. diatas terlihat bahwa secara keseluruhan penyediaan produksi telur untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 baru mampu sebesar 21,95 persen dari total produksi telur sebesar 386,71 ton bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi total penduduk sebesar 1.761,40 ton tahun 2008. Sementara itu penyediaan produksi daging untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 baru mampu sebesar 46,99 persen dari total produksi telur sebesar 993,45 ton bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi total penduduk sebesar 2.114,11 ton.

6.1. Profil Rumah Tangga Usaha Peternakan

Dalam perekonomian Kutai Timur , selama lima tahun terakhir kontribusi nilai tambah yang diberikan oleh subsector peternakan tidak banyak mengalami perubahan hanya sekitar 0.38 persen tahun 2000 menjadi 0,38 persen pada tahun 2008 dari total PDRB Kutai Timur. Namun nilai tambah bruto dari subsector peternakan ini mangalami peningkatan dari 18.510,14 juta rupiah pada tahun 2000 meningkat menjadi 93.004,24 juta rupiah pada tahun 2008, dengan tingkat pertumbuhan antara 3,49 persen – 6,57 persen.

Usaha peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya peternak. Secara garis besar, usaha peternakan mencakup kegiatan pembibitan dan pembudidayaan semua jenis

ternak dan unggas yang bertujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, digemukkan, dipotong dan diambil hasilnya. Jenis ternak yang diusahakan di Kalimantan Timur meliputi ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ikutan lainnya serta hewan peliharaan lainnya. Misalnya ternak sapi, kerbau, babi, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, itik dan lain-lain.

Propinsi Kalimantan Timur dengan kondisi wilayah yang cukup luas, merupakan salah satu potensi dalam usaha peternakan. Namun disisi lain sumberdaya manusia yang mampu menjalankan usaha peternakan sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya di sector peternakan masih sangat terbatas, selain itu dari sisi permodalan usaha juga masih minim, sehingga masyarakat cenderung menjadikan usaha peternakan ini hanya sebagai usaha sampingan saja.

7. Analisis Rumah Tangga Usaha Perikanan

Pembangunan perikanan merupakan bagian dari pembangunan pertanian dan pembangunan wilayah yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk dapat: (1) menyediakan pangan asal gizi ikan yang berkualitas dan cukup kuantitasnya; (2) memberdayakan sumber daya manusia perikanan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi di dalam maupun luar negeri; (3) menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan usaha nelayan; (4) menciptakan lapangan kerja dibidang ogrobisnis perikanan; (5) melestarikan dan memanfaatkan sumber daya perairan pendukung perikanan; (6) menggali potensi dibidang perikanan.

Perkembangan produksi perikanan pada tahun 2000-2008 mencapai 87,46 persen untuk beberapa jenis perikanan sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik seperti: perikanan laut, kolam, keramba, dan budidaya pantai atau sawah yang selama periode 2000-2008 pertumbuhannya berturut-turut sebesar 49,11 persen, 312,85 persen, 335,29 persen, dan 100,00 persen, terkecuali perikanan perairan umum dan tambak yang justru menurun selama peride yang sama yaitu -57,76 persen dan 59,99 persen. Secara umum perkembangan perikanan mengalami penurunan hingga tahun 2008 mencapai rata-rata -22,74 persen. Lihat Tabel.6.119 berikut.

Tabel 6.119. Rumah Tangga Perikanan, Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2008

No	Uraian	Satuan	2001	2008	Pertumbuhan (%)
1	Rumah Tangga Perikanan:		3.318,00	6.220,00	87,46
	Perikanan Laut	RT	1.011,00	4.102,00	305,73
	Perikanan Perairan Umum	RT	1.144,00	1.282,00	12,06
	Tambak	RT	340,00	549,00	61,47
	Kolam	RT	28,00	97,00	246,82
	Keramba	RT	795,00	110,00	-86,16
	Budidaya Pantai/Sawah	RT	-	80,00	
2	Produksi Hasil Perikanan:		6.734,30	5.202,60	-22,74
	Perikanan Laut	Ton	2.146,20	3.200,90	49,11
	Perikanan Perairan Umum	Ton	2.015,00	851,80	-57,76
	Tambak	Ton	860,70	344,30	-59,99
	Kolam	Ton	140,00	578,00	312,85
	Keramba	Ton	1,70	7,40	335,29
	Budidaya Pantai/Sawah	Ton	-	220,20	100,00
3	Nilai Produksi Hasil Perikanan		37.187.226	87.080.869	
	Perikanan Laut	Ribu Rp	9.402.960	48.567.500	
	Perikanan Perairan Umum	Ribu Rp	15.011.750	15.508.800	
	Tambak	Ribu Rp	30.640	9.009.600	
	Kolam	Ribu Rp	11.952	13.355.200	
	Keramba	Ribu Rp	12.757.500	639.769	
	Budidaya Pantai/Sawah	Ribu Rp	-	8.445.958	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Timur

Dilihat dari kemampuan penyediaan produksi ikan untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kutai Timur ternyata baru mampu sebesar 42,39 persen dari total produksi sebesar 5.202,60 ton dibanding kebutuhan konsumsi penduduk yang mencapai 12.272,08 ton. Lihat tabel.6.120 berikut.

Tabel 6.120. Produksi Ikan, konsumsi total penduduk dan kemampuan penyediaan konsumsi ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008

Indikator	Satuan	Jumlah
Produksi	Ton	5.202,60
Konsumsi Per Kapita	Kg	57,41
Konsumsi Total per tahun	Ton	12.272,08
Jumlah Rumah Tangga Perikanan	RT	6.220
Pendapatan Nelayan	Rp.	850.000 – 3.500.000
Kemampuan Penyediaan konsumsi per tahun	Persen	42,39

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim Dalam Angka)

BAB VII PENUTUP

Setelah selesai melakukan analisis Shift-share sesuai tahap-tahap di atas dapat diketahui perubahan struktur perekonomian Kabupaten Kutai Timur dengan memperhatikan perkembangan perekonomian propinsi Kalimantan Timur. Selain itu, analisis Shift-share juga dapat digunakan untuk membantu dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan termasuk perumusan kebijakan anggaran.

Dengan analisis Shift-share, kedudukan perekonomian daerah terhadap perekonomian daerah yang menjadi referensi atau diacu dapat diketahui. Analisis Shift-share dapat digunakan untuk menghitung dan menganalisis variabel perekonomian regional sampai tingkat terkecil, misalnya subsektor (tergantung data variabel regional yang tersedia). Hasil analisis Shift-share tersebut dapat memberikan informasi kepada pengambil kebijakan, misalnya mengenai sektor-sektor unggulan suatu daerah dan tingkat spesialisasi suatu sektor.

Analisis Shift-share dapat digunakan untuk menentukan sektor-sektor prioritas suatu daerah. Hal ini penting bagi perumusan kebijakan anggaran. Dengan menentukan sektor-sektor prioritas, pemerintah daerah akan dapat menentukan alokasi dan prioritas anggaran untuk sektor-sektor yang secara signifikan dapat memacu perkembangan atau pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu alokasi anggaran yang tepat dapat mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN TABEL DI BUKU II



